

LAPORAN PEREKONOMIAN

PROVINSI DKI JAKARTA

MEI 2026





LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI DKI JAKARTA

Mei 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi DKI Jakarta

Visi, Misi & Nilai Strategis Bank Indonesia

Visi

"Menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara *emerging markets* untuk Indonesia Maju"

Misi

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan pembiayaan ekonomi, termasuk infrastruktur, melalui akselerasi pendalaman pasar keuangan.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Nilai-nilai Strategis Organisasi

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah :



Kejujuran dan integritas
(*trust and integrity*)



Profesionalisme
(*professionalism*)



Keunggulan
(*excellence*)



Mengutamakan
kepentingan umum
(*public interest*)



Koordinasi dan kerjasama tim
(*coordination and teamwork*)
yang belandaskan keluhuran
nilai-nilai agama (religi).



Visi & Misi

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Visi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjadi Kantor Perwakilan Bank Indonesia yang kredibel dan digital terdepan dengan tata kelola kuat dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional serta berperan aktif dalam forum internasional.

Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta edisi Mei 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku Laporan Perekonomian Provinsi DKI Jakarta ini diterbitkan rutin secara triwulanan, di mana pada edisi Mei 2026 ini menganalisis dan mengevaluasi kondisi perekonomian DKI Jakarta, khususnya pada triwulan I 2026, triwulan II 2026, dan prospek keseluruhan tahun 2026.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Jakarta tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 5,59% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,71%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan tingginya kinerja ekspor-impor. Di sisi lain, kinerja investasi, dan konsumsi pemerintahan tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Keuangan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,90% – 5,70% (yoy). Namun demikian, tekanan terhadap prospek pertumbuhan meningkat seiring berlanjutnya ketidakpastian global. Adapun inflasi DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi 2,5±1% (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, pelaku usaha, narasumber dalam berbagai *Focus Group Discussion*, dan pihak-pihak lainnya atas perolehan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan buku ini. Harapan kami, laporan ini dapat menjadi sumber referensi bagi para pemangku kepentingan dan pemerhati ekonomi Jakarta, dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Provinsi DKI Jakarta. Masukan dan saran dari berbagai pihak juga kami harapkan untuk dapat meningkatkan kualitas laporan ini. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi kita dalam berkarya.

Jakarta, Mei 2026
Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta

ttd.

Iwan Setiawan
Direktur



Daftar Isi

Visi Misi Bank Indonesia	III
Kata Pengantar	IV
Daftar Isi	VI
Daftar Tabel	VIII
Daftar Gambar	IX
Daftar Grafik	X
Ringkasan Eksekutif	XIV
Tabel Indikator	XVIII
Tim Penyusun	93

Bab I	
Perekonomian Global & Nasional	2
A. Perekonomian Global	3
B. Perekonomian Nasional	3
C. Bauran Kebijakan Bank Indonesia	6

Bab II	
Ekonomi Makro Regional	10
A. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I 2026	11
B. <i>Tracking</i> Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II 2026	19

BOKS 1	
Mewujudkan Jakarta Kota Sinema: Industri Perfilman sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Ekonomi DKI Jakarta	25



Lokasi: Jakarta Light Festival

Bab III	
Inflasi	30
A. Kinerja Inflasi Provinsi Triwulan I 2026	31
B. <i>Tracking</i> Inflasi Triwulan II 2026	34
C. Program Pengendalian Inflasi Triwulan I 2026	37

BOKS 2	
Perkuat Ketahanan Pangan, DKI Jakarta dan Jawa Tengah Jajaki Penguatan Kerja Sama Antardaerah	41

Bab IV	
Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	44
A. Perkembangan Kinerja Bank Umum	45
B. Perkembangan Kinerja Sektor Korporasi	50
C. Perkembangan Kinerja Sektor Rumah Tangga	53
D. Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM	56



Lokasi: Jakarta Light Festival

Bab V			
Sistem Pembayaran	62	Bab VII	
A. Kondisi Umum	63	Prospek Perekonomian	84
B. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai	63	A. Prospek Perekonomian Global dan Nasional	85
C. Perkembangan Sistem Pembayaran Nontunai	63	B. Prospek Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	87
D. Upaya Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran	67		
BOKS 3			
Perkuat Implementasi ETPD DKI Jakarta Melalui Perluasan Pembayaran QRIS Tap di SAMSAT Wilayah DKI Jakarta	71		
BOKS 4			
Reklasifikasi Perizinan Sistem Pembayaran	73		
Bab VI			
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	76		
A. Ketenagakerjaan	77		
B. Kemiskinan	79		
C. Upah Tenaga Kerja	82		

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% yoy)	3
Tabel 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran	4
Tabel 1.3	Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha	4
Tabel 4.1	Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta	45
Tabel 4.2	Kredit Korporasi Menurut Sektor Ekonomi	52
Tabel 5.1	Persebaran KUPVA BB	67
Tabel 5.2	Perkembangan Transaksi PJP LR	69
Tabel 6.1	Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan	77
Tabel 6.2	Perkembangan Status Pekerjaan Utama	78
Tabel 6.3	Profil Kemiskinan DKI Jakarta	80
Tabel 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% yoy)	85
Tabel 7.2	Proyeksi PDB Nasional	87
Tabel 7.3	Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2026	92

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2026 (% , yoy)	4
Gambar 1.2	Peta Inflasi Daerah Bulan Maret 2026 (% yoy)	5
Gambar B1.1	Ilustrasi <i>Multiplier Effect</i> dari Aktivitas Industri Perfilman	26
Gambar B1.2	<i>Value Chain</i> Industri Film di DKI Jakarta	27
Gambar B2.1	Kunjungan ke Pancarga Tani Gemilang dan Gupon Sekar Langit	42
Gambar B2.2	Diskusi Bersama Dinas Pertanian Jawa Tengah, BUMD, dan Klaster Unggulan	42
Gambar B2.3	Seremonial Kerja Sama Antardaerah pada GPIPS Wilayah Jawa Tahun 2026	42
Gambar B3.1	Seremonial Implementasi QRIS Tap di Samsat Jakarta Utara	72
Gambar B3.2	Kampanye Edukasi Pembayaran QRIS Tap di Samsat Jakarta Utara	72
Gambar B3.3	Pembayaran QRIS Tap di Gerai Samsat Mal Pelayanan Publik	72

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Inflasi Global	3	Grafik 2.26	Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi Jakarta	16
Grafik 1.2	Aliran Modal ke Negara Berkembang	3	Grafik 2.27	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran Komponen Makanan dan Minuman	16
Grafik 1.3	Indeks Keyakinan Konsumen	5	Grafik 2.28	Perkembangan Penjualan E-Commerce Barang Makanan dan Minuman	16
Grafik 1.4	Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur	5	Grafik 2.29	Pertumbuhan LU Konstruksi DKI Jakarta	17
Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta	11	Grafik 2.30	Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Jakarta	17
Grafik 2.2	Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan I 2026 Sisi Pengeluaran	11	Grafik 2.31	Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta	17
Grafik 2.3	Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan I 2026 Sisi Pengeluaran	11	Grafik 2.32	Perkembangan PDRB LU Jasa Keuangan dan PDRB di Jakarta	17
Grafik 2.4	Perkembangan IKK, IKE, dan IEK	12	Grafik 2.33	Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta	17
Grafik 2.5	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran	12	Grafik 2.34	Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta	17
Grafik 2.6	Perkembangan Penjualan e-commerce Jakarta	12	Grafik 2.35	Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Lapangan Usaha Utama DKI Jakarta	18
Grafik 2.7	Perkembangan Realisasi PMA PMDN	12	Grafik 2.36	Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan	18
Grafik 2.8	Perkembangan Kredit Investasi di Jakarta	12	Grafik 2.37	Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta	18
Grafik 2.9	Realisasi Belanja APBN DKI Jakarta	12	Grafik 2.38	Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta	18
Grafik 2.10	Realisasi Belanja APBD DKI Jakarta	13	Grafik 2.39	Perkembangan Impor Bahan Baku DKI Jakarta	18
Grafik 2.11	Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta	13	Grafik 2.40	Perkembangan Penumpang Penerbangan di Jakarta	19
Grafik 2.12	Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan Jakarta	13	Grafik 2.41	Perkembangan IKK, IEK, IKE Jakarta	19
Grafik 2.13	Perkembangan Kunjungan Wisman ke Jakarta	13	Grafik 2.42	Perkembangan Indeks Total Penjualan Eceran	19
Grafik 2.14	Perkembangan Penumpang Kereta Api Jabodetabek	13	Grafik 2.43	Perkembangan Impor Barang Konsumsi	19
Grafik 2.15	Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku Jakarta	14	Grafik 2.44	Realisasi Belanja APBN di Jakarta	20
Grafik 2.16	Perkembangan Keberangkatan Penumpang Domestik CGK	14	Grafik 2.45	Realisasi APBD DKI Jakarta	20
Grafik 2.17	Perkembangan Keberangkatan Penumpang Internasional CGK	14	Grafik 2.46	Perkembangan SKDU	20
Grafik 2.18	Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama	14	Grafik 2.47	Nilai Impor Barang Modal	20
Grafik 2.19	Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan	14	Grafik 2.48	Perkembangan Kredit Investasi	20
Grafik 2.20	Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan I 2026	15	Grafik 2.49	Ekspor Mobil CBU dan CKD	21
Grafik 2.21	Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha	15	Grafik 2.50	Ekspor Motor	21
Grafik 2.22	Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta	15	Grafik 2.51	Perkembangan Penumpang Penerbangan dari Jakarta	21
Grafik 2.23	Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen	15	Grafik 2.52	Perkembangan Impor Jakarta dan Komponennya	21
Grafik 2.24	Perkembangan Penjualan E-Commerce di Jakarta	15	Grafik 2.53	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	21
Grafik 2.25	Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta	16			

Daftar Grafik

Grafik 2.54	Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	22
Grafik 2.55	Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta (Triwulan II 2026)	22
Grafik 2.56	Perkembangan Penyaluran Kredit Jakarta (Triwulan II 2026)	22
Grafik 2.57	Perkembangan DPK di Jakarta (Triwulan II 2026)	22
Grafik 2.58	Perkembangan Penyaluran Kredit LU Utama Jakarta (Triwulan II 2026)	22
Grafik 2.59	Perkembangan Konsumsi Listrik Industri DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	23
Grafik 2.60	Perkiraan SKDU LU Industri Pengolahan DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	23
Grafik 2.61	Perkembangan Kredit LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	23
Grafik 2.62	Perkiraan SKDU LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan II 2026)	23
Grafik 2.63	Perkembangan Indeks Penjualan <i>E-Commerce</i> di Jakarta (Triwulan II 2026)	23
Grafik B1.1	Tren Jumlah Film Layar Lebar Nasional 2020-2025	25
Grafik B1.2	Pangsa Platform OTT di Indonesia	26
Grafik B1.3	Perkembangan Investasi Subsektor Film, Animasi, dan Video di DKI Jakarta	26
Grafik 3.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	31
Grafik 3.2	Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	31
Grafik 3.3	Perkembangan Harga Emas Global	32
Grafik 3.4	Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta	32
Grafik 3.5	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	32
Grafik 3.6	Perkembangan Harga Beras	32
Grafik 3.7	Perkembangan Harga Cabai Merah	33
Grafik 3.8	Perkembangan Harga Cabai Rawit	33
Grafik 3.9	Perkembangan Harga Bawang Merah	33
Grafik 3.10	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)	34
Grafik 3.11	Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Februari-April 2026	34
Grafik 3.12	Perkembangan Harga Daging Ayam Ras	35
Grafik 3.13	Perkembangan Harga Telur Ayam Ras	35
Grafik 3.14	Perkembangan Harga Cabai Rawit	35

Grafik 3.15	Perkembangan Harga Cabai Merah	35
Grafik 3.16	Perkembangan Harga Beras	36
Grafik 3.17	Perkembangan Harga Minyak Goreng	36
Grafik 3.18	Perkembangan Harga Emas Perhiasan	36
Grafik 3.19	Perkembangan Harga Emas Global	36
Grafik 3.20	Inflasi Jakarta dan Nasional	36
Grafik 3.21	Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Februari-April 2026	37
Grafik 4.1	Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank	45
Grafik 4.2	Pertumbuhan DPK Jakarta	46
Grafik 4.3	Komposisi DPK Jakarta	46
Grafik 4.4	Komposisi Pemilik DPK Jakarta	46
Grafik 4.5	Perkembangan DPK Spasial Jakarta	46
Grafik 4.6	Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional	47
Grafik 4.7	Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional	47
Grafik 4.8	Pertumbuhan Kredit Jakarta	47
Grafik 4.9	Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan	47
Grafik 4.10	Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan	48
Grafik 4.11	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan	48
Grafik 4.12	Pertumbuhan Kredit Sektoral	48
Grafik 4.13	Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta	48
Grafik 4.14	Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek	48
Grafik 4.15	Perkembangan NPL DKI Jakarta	49
Grafik 4.16	Perkembangan LaR DKI Jakarta	49
Grafik 4.17	NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	49
Grafik 4.18	Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional	49
Grafik 4.19	Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama	50
Grafik 4.20	Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta	50
Grafik 4.21	Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta	51
Grafik 4.22	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta	51
Grafik 4.23	Pertumbuhan kredit Korporasi	52
Grafik 4.24	Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi	52

Daftar Grafik

Grafik 4.25	NPL pada Sektor Korporasi	52	Grafik 5.4	Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS	64
Grafik 4.26	Perkembangan DPK Korporasi	53	Grafik 5.5	Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI	64
Grafik 4.27	Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi	53	Grafik 5.6	Perkembangan Volume Transaksi SKNBI	64
Grafik 4.28	Komposisi DPK Korporasi	53	Grafik 5.7	Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debet	65
Grafik 4.29	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT	53	Grafik 5.8	Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debet, ATM dan Mesin ATM	65
Grafik 4.30	Perkembangan Indeks Ketersediaan Lap.Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama	53	Grafik 5.9	Pangsa Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi	65
Grafik 4.31	Perkembangan Kredit Rumah Tangga	54	Grafik 5.10	Pangsa Volume Transaksi Kartu ATM/ Debit Berdasarkan Jenis Transaksi	65
Grafik 4.32	Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	54	Grafik 5.11	Perkembangan Transaksi Uang Elektronik	65
Grafik 4.33	Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga	54	Grafik 5.12	Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik	65
Grafik 4.34	Komposisi Kredit RT dan Non-RT	54	Grafik 5.13	Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta	66
Grafik 4.35	NPL Kredit Rumah Tangga	55	Grafik 5.14	Perkembangan Pengguna QRIS di DKI Jakarta	66
Grafik 4.36	Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga	55	Grafik 5.15	Perkembangan Merchant QRIS di DKI Jakarta	66
Grafik 4.37	Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga	55	Grafik 5.16	Pangsa merchant QRIS per Wilayah	66
Grafik 4.38	NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga	55	Grafik 5.17	Pangsa merchant QRIS per Jenis Usaha	66
Grafik 4.39	Pertumbuhan DPK Rumah Tangga	56	Grafik 5.18	Pangsa Pengaduan Konsumen di DKI Jakarta Triwulan I 2026	67
Grafik 4.40	Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan	56	Grafik 5.19	Perkembangan Transaksi KUPVA BB	67
Grafik 4.41	Komposisi DPK	56	Grafik 5.20	Market Share Valuta Asing	67
Grafik 4.42	Komposisi DPK Rumah Tangga	56	Grafik 5.21	Perkembangan Transaksi PJP LR	68
Grafik 4.43	Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta	56	Grafik B4.1	Jumlah PJP yang perlu direklasifikasi	73
Grafik 4.44	Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan	56	Grafik B4.2	Hasil Reklasifikasi Izin PJP	73
Grafik 4.45	UMKM Berdasarkan Skala Usaha	57	Grafik 6.1	Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta	77
Grafik 4.46	Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	57	Grafik 6.2	Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja	77
Grafik 4.47	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama	57	Grafik 6.3	Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja	77
Grafik 4.48	NPL Kredit UMKM	57	Grafik 6.4	Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	77
Grafik 4.49	NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha	58	Grafik 6.5	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	78
Grafik 5.1	Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal	63	Grafik 6.6	Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan	78
Grafik 5.2	Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya	63	Grafik 6.7	Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)	78
Grafik 5.3	Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS	64			

Daftar Grafik

Grafik 6.8	Produktivitas TK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 (Juta Rupiah)	79
Grafik 6.9	Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	79
Grafik 6.10	Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja	79
Grafik 6.11	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta	79
Grafik 6.12	Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional	80
Grafik 6.13	Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta	80
Grafik 6.14	Garis Kemiskinan DKI Jakarta	80
Grafik 6.15	Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan	80
Grafik 6.16	Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan	81
Grafik 6.17	Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa	81
Grafik 6.18	Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa	81
Grafik 6.19	Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	81
Grafik 6.20	Rasio Gini Jakarta dan Nasional	81
Grafik 6.21	Distribusi Pendapatan DKI Jakarta	82
Grafik 6.23	UMP Provinsi di Indonesia	82
Grafik 6.22	Perkembangan UMP DKI Jakarta	82
Grafik 7.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2026	89
Grafik 7.2	Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2026	89
Grafik 7.3	Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2026	89
Grafik 7.4	Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2026	90

Ringkasan Eksekutif

Gejolak global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama potensi gangguan Selat Hormuz, meningkatkan tekanan terhadap prospek perekonomian dunia melalui kenaikan harga minyak, gangguan rantai pasok, peningkatan harga komoditas, serta pengetatan kondisi keuangan global. Kondisi tersebut mendorong respons kebijakan moneter global yang lebih ketat, termasuk ekspektasi *Fed Funds Rate* yang belum turun hingga akhir 2026, kenaikan *yield US Treasury*, penguatan dolar AS, serta berlanjutnya aliran modal keluar dari *emerging markets* menuju aset *safe haven*. Perkembangan ini berpotensi menekan nilai tukar, meningkatkan *imported inflation*, dan menahan pertumbuhan ekonomi global.

Di tengah tekanan eksternal tersebut, perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja yang kuat. Pada triwulan I 2026, ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,61% (yoy), meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang meningkat seiring periode HBKN dan stimulus pemerintah, konsumsi pemerintah melalui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembayaran THR/gaji ke-14, dan investasi bangunan yang didukung Program Kerja Prioritas Nasional. Namun demikian, kinerja ekspor tertahan akibat perlambatan ekonomi global.

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 5,59% (yoy), meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 5,71% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga serta kinerja ekspor-impor yang masih tinggi, sementara investasi dan konsumsi pemerintah tetap tumbuh namun relatif tertahan. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan didukung oleh LU Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Konstruksi, dan Industri Pengolahan, serta diperkuat oleh sektor jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan makan minum.

Memasuki triwulan II 2026, ekonomi Jakarta diperkirakan tetap kuat, ditopang oleh konsumsi rumah tangga seiring momentum Iduladha, hari libur nasional, cuti bersama, dan libur sekolah. Investasi juga diperkirakan tetap terjaga seiring akselerasi penanaman modal pada program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan. Konsumsi pemerintah diperkirakan meningkat melalui akselerasi realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bansos. Sejalan dengan itu, LU Perdagangan diperkirakan tetap kuat mengikuti kinerja konsumsi rumah tangga.

Dari sisi harga, inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat 3,37% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan berada di atas sasaran inflasi, terutama akibat *base effect* dari diskon tarif listrik tahun 2025 yang bersifat temporer. Dengan mengecualikan komponen tarif listrik, inflasi Jakarta masih terkendali dalam rentang sasaran. Komoditas lain yang mendorong inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, dan beras seiring tingginya permintaan pada periode HBKN. Pada April 2026, inflasi Jakarta melandai menjadi 2,12% (yoy), meskipun tekanan dari komoditas yang diatur pemerintah perlu dicermati akibat kenaikan harga minyak dan energi global. Ke depan, inflasi diperkirakan tetap terkendali melalui penguatan sinergi pengendalian inflasi, termasuk melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Ringkasan Eksekutif

Intermediasi perbankan di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tetap solid dengan profil risiko yang terjaga. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek tetap tumbuh meskipun sedikit melambat, didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dan pertumbuhan DPK yang masih tinggi. Risiko kredit tetap terkendali, tecermin dari NPL yang rendah dan jauh di bawah *threshold* 5%, serta permodalan yang kuat. Dari sisi permintaan, kredit terutama didorong oleh kebutuhan pembiayaan korporasi untuk ekspansi usaha, khususnya pada sektor konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta industri pengolahan. Kredit rumah tangga dan UMKM juga tumbuh positif, didukung oleh terjaganya daya beli, optimisme konsumen, peningkatan aktivitas usaha, serta program penguatan kapasitas UMKM.

Kinerja sistem pembayaran turut mendukung aktivitas ekonomi Jakarta. Pada triwulan I 2026, peredaran uang kartal mencatat *net outflow*, sementara transaksi nontunai terus tumbuh sejalan dengan perluasan akseptasi QRIS. Transaksi KUPVA BB tumbuh positif sebesar 30,78% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, sedangkan transaksi PJP Layanan Remitansi tumbuh 15,44% (yoy) meskipun melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 21,28% (yoy). Perlambatan remitansi terutama disebabkan oleh penurunan transaksi *outgoing* dan domestik, sementara transaksi *incoming* menunjukkan perbaikan kontraksi.

Dari sisi ketenagakerjaan dan kesejahteraan, serapan tenaga kerja DKI Jakarta pada November 2025 relatif stabil sebesar 93,69%, sedikit menurun dari Agustus 2025 sebesar 93,95%. Sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja, dengan peningkatan terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran, Akomodasi dan Makan Minum, Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, serta Jasa Lainnya. Sementara itu, tingkat kemiskinan DKI Jakarta turun menjadi 4,03% pada September 2025 dari 4,14% pada September 2024, dan tetap jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,25%. Penurunan ini sejalan dengan program perlindungan sosial Pemprov DKI Jakarta, termasuk subsidi pangan, transportasi, dan bantuan sosial.

Secara keseluruhan, perekonomian DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy), ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat seiring peningkatan daya beli, kenaikan UMP 6,17%, stimulus dan bansos, serta peningkatan mobilitas masyarakat. Investasi didukung oleh proyek strategis multitaluh seperti MRT Fase 2A, LRT Jakarta Fase 1B, pengembangan kawasan TOD, dan proyek infrastruktur perkotaan lainnya, sementara investasi swasta diperkirakan tetap berlanjut terutama pada sektor properti, transportasi, dan jasa perkotaan. Dari sisi sektoral, pertumbuhan akan ditopang oleh LU Perdagangan, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, Jasa Keuangan, Konstruksi, Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan. Namun demikian, risiko terhadap prospek ekonomi meningkat akibat ketidakpastian global, eskalasi konflik Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, volatilitas nilai tukar Rupiah, dan perlambatan permintaan global.

Tabel

Indikator

INDIKATOR	2023					2024					2025					2025
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
Ekonomi Makro Regional																
Produk Domestik Regional Bruto (% ,yoy)	4,95	5,13	4,93	4,85	4,96	4,78	4,90	4,93	5,01	4,90	4,95	5,18	4,96	5,71	5,21	5,59
Berdasarkan Lapangan Usaha:																
1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,07	-10,87	-5,85	1,32	-3,94	9,19	6,98	5,62	-0,43	5,17	0,57	3,19	0,63	7,28	2,97	-2,25
2 Pertambangan dan Penggalian	-8,16	-23,33	-12,67	-6,63	-12,75	-11,43	4,52	-6,26	-6,35	-5,27	-3,64	-8,60	-8,14	-11,99	-7,74	-5,97
3 Industri Pengolahan	1,58	1,18	2,13	2,54	1,86	-0,53	2,46	1,33	1,35	1,14	1,61	0,98	1,44	2,53	1,65	2,62
4 Pengadaan Listrik dan Gas	-7,69	-6,29	-5,19	-10,34	-7,20	-15,17	-19,04	-16,57	-13,80	-16,32	-15,24	-19,09	-11,73	-3,29	-12,49	-7,45
5 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,36	4,37	5,06	8,68	6,33	5,22	0,59	0,28	-3,84	0,48	-4,93	-3,26	-3,09	-3,10	-3,60	-4,81
6 Konstruksi	0,11	2,36	3,01	4,53	2,50	6,27	6,55	5,65	9,39	6,99	2,61	3,64	3,17	3,15	3,14	4,98
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,70	4,67	3,99	3,78	4,52	5,39	6,87	7,99	7,26	6,87	4,35	5,91	5,15	6,55	5,50	6,71
8 Transportasi dan Pergudangan	17,43	18,05	13,96	7,76	14,05	6,48	6,15	7,10	8,07	6,96	7,96	9,90	9,06	7,87	8,69	8,31
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,27	10,49	11,59	8,40	9,69	9,56	7,57	7,31	8,87	8,31	9,64	9,79	9,55	8,40	9,33	10,84
10 Informasi dan Komunikasi	7,65	8,26	8,42	5,57	7,45	6,43	4,19	4,27	4,36	4,80	5,93	5,65	6,72	6,58	6,22	6,33
11 Jasa keuangan dan Asuransi	6,04	0,61	4,69	10,24	5,39	2,02	10,99	6,09	2,60	5,36	5,84	4,71	-0,15	4,78	3,83	3,68
12 Real Estate	0,92	1,01	0,68	0,37	0,74	1,31	1,35	1,64	1,76	1,51	1,97	2,68	3,48	2,96	2,77	2,52
13 Jasa Perusahaan	6,77	8,18	6,06	5,03	6,49	6,57	3,57	3,65	5,05	4,71	6,32	7,62	8,58	8,11	7,66	5,71
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	0,22	1,72	-1,92	0,02	0,04	14,16	-5,96	0,93	-2,53	1,25	4,64	2,92	5,21	7,71	5,36	4,65
15 Jasa Pendidikan	0,33	5,55	-0,79	-0,19	1,20	3,69	0,96	6,97	5,52	4,26	7,19	5,99	7,22	6,94	6,83	6,70
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,44	6,07	6,59	9,27	5,85	9,09	6,71	3,36	2,79	5,41	4,37	3,72	6,02	6,39	5,12	5,44
17 Jasa Lainnya	13,16	14,20	11,82	7,55	11,60	3,45	3,87	6,09	8,20	5,42	8,98	8,31	8,29	8,32	8,46	8,37
Berdasarkan Permintaan:																
1 Konsumsi																
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,18	5,26	5,49	5,23	5,05	5,25	5,28	5,26	5,14	5,23	5,36	5,13	5,01	5,51	5,25	5,72
b. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,95	9,53	6,27	15,43	9,84	19,70	9,69	11,99	6,84	11,82	3,45	4,58	2,42	2,03	3,12	5,54
c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,79	6,06	-16,18	-5,04	-3,86	30,30	-5,62	10,81	5,20	8,72	9,75	5,16	20,06	8,60	10,56	4,22
3 PMTB	1,32	4,22	4,38	5,17	3,89	4,36	4,66	4,27	7,54	5,20	2,89	5,50	3,67	6,81	4,77	4,71
4 Perubahan Inventori	-27,79	37,25	209,14	44,75	-8,82	-75,78	-12,18	38,88	38,67	-51,17	90,39	-284,84	-132,41	-145,07	60,45	-146,52
5 Ekspor	11,89	8,93	5,93	4,46	7,67	3,23	7,06	13,40	14,66	9,64	17,72	17,26	8,57	7,62	12,50	8,98
6 Impor	7,01	8,19	2,96	3,16	5,25	6,30	5,32	13,50	14,51	10,09	16,44	16,99	7,92	8,67	12,18	7,21
Ekspor																
- Nilai Ekspor Non Migas(USD Juta)	2,799	2,475	2,813	2,899	10,986	2,694	2,856	3,875	4,217	10,786	4,387	3,593	4,570	4,725	12,892	2,980
- Volume Ekspor Non Migas(ribu ton)	849	764	809	922	3,344	820	894	1,032	1,119	1,716	1,016	959	1,170	1,118	4,263	0,879
Impor																
- Nilai Impor Non Migas(USD Juta)	18,439	17,926	18,703	17,868	72,936	16,409	16,597	20,637	20,431	74,074	17,522	19,331	19,544	21,031	59,924	17,902
- Volume Impor Non Migas(ribu ton)	8,345	7,831	8,378	8,925	33,479	8,269	8,047	9,541	9,913	35,770	8,226	8,938	9,157	9,939	28,042	8,619
Indeks Harga Konsumen	112,83	113,18	113,76	114,67	114,67	104,81	105,10	104,97	105,69	105,69	105,88	105,48	105,85	106,55	106,55	107,57
Laju Inflasi Tahunan (% ,yoy)	3,69	3,20	2,08	2,28	2,28	2,18	2,23	1,70	1,48	1,48	1,02	2,07	2,40	2,63	2,63	3,37

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia

Tabel Indikator

INDIKATOR	2023					2024					2025					2025
	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	I
Perbankan																
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	4.211	4.234	4.235	4.461	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.596	4.742	4.994	5.253	5.602	5.602	5.664
Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	2.010	2.103	2.193	2.324	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.690	2.717	2.817	2.847	3.178	3.178	3.197
- Modal Kerja	1.130	1.186	1.236	1.315	1.315	1.353	1.434	1.461	1.486	1.486	1.469	1.526	1.526	1.658	1.658	1.635
- Investasi	640	672	703	749	749	783	818	834	915	915	955	995	1.021	1.211	1.211	1.258
- Konsumsi	240	244	253	260	260	265	270	277	289	289	291	296	301	310	310	304
Pertumbuhan Kredit Lokasi Proyek (% yoy)	12,7	8,0	11,6	15,83	15,8	19,41	19,90	17,30	15,76	15,76	13,16	11,69	10,69	18,16	18,16	17,67
- Modal Kerja	14,2	6,9	11,9	17,5	17,50	19,6	20,8	18,2	12,9	12,9	8,7	6,4	4,5	11,6	11,6	11,3
- Investasi	10,7	9,3	13,2	16,0	16,00	22,3	21,6	18,5	22,1	22,1	22,1	21,6	22,4	32,4	32,4	31,6
- Konsumsi	11,0	9,2	6,2	7,8	7,80	10,6	10,6	9,7	11,3	11,3	9,8	9,7	8,4	7,1	7,1	4,4
Kredit UMKM Lokasi Proyek (Rp Triliun)	140	144	146	150	150	149	147	150	155	155	150	154	155	159	159	160
Loan to Deposit Ratio Lokasi Proyek(%)	47,75	50,18	50,46	49,68	49,68	52,90	55,31	57,10	58,52	58,52	57,30	56,41	54,20	56,73	56,73	56,45
NPL Gross Lokasi Proyek (%)	1,37	1,41	1,45	1,33	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,14	1,08	1,13	0,98	0,98	1,08
Sistem Pembayaran																
- Volume Total Kartu Kredit (juta)	19,07	18,51	19,42	20,88	20,88	20,35	21,20	22,79	25,56	25,56	23,99	24,47	24,25	27,39	27,39	25,63
- Nominal Total Kartu Kredit (Rp triliun)	21,10	19,94	19,26	21,20	21,20	19,53	19,50	21,55	23,32	23,32	21,15	21,36	20,79	25,31	25,31	23,60
- Jumlah Merchant QRIS (Juta)	4,52	4,63	5,03	5,16	5,16	5,28	5,43	5,62	5,78	5,78	6,04	6,17	6,38	5,60	5,60	5,63
- Volume Transaksi UE (Juta)	1.631	1.972	2.136	2.311	8.050	2.513	2.811	2.868	3.309	11.501	4.106	4.676	5.171	5.707	19.660	5.767
Nominal Transaksi UE (Rp Triliun)	103	127	136	151	518	165	190	207	220	782	250	283	314	349	1.195	354

Sumber: Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia



Bab 1

Perekonomian Global & Nasional

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Penutupan Selat Hormuz mengakibatkan harga minyak dunia melonjak tinggi. Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan harga komoditas dunia lainnya. Perkembangan ini menyebabkan prospek pertumbuhan dunia lebih rendah dan tekanan inflasi global meningkat. Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, tecermin dari sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga. *Fed Funds Rate* (FFR) diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026, sementara imbal hasil (*yield*) *US Treasury* tenor 10 dan 2 tahun terus naik. Di pasar keuangan global, ketidakpastian global mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara *Emerging Markets*, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS. Perkembangan ini juga mendorong kuatnya indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY).

Di dalam negeri, momentum peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus dipertahankan. Perekonomian Indonesia tumbuh 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan dampak positif stimulus pemerintah. Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR). Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat.



PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL (yoy)

5,39%

Triwulan IV 2025



5,61%

Triwulan I 2026



INFLASI IHK NASIONAL (yoy)

2,92%

Triwulan IV 2025



3,48%

Triwulan I 2026



CAPITAL ADEUQACY RATIO (CAR) Perbankan Nasional

25,83%

Triwulan I 2026



BI RATE

5,25%

Mei 2026

A. PEREKONOMIAN GLOBAL¹

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi perekonomian dunia. Eskalasi perang diikuti dengan ditutupnya Selat Hormuz, yang berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia serta kenaikan harga komoditas dunia lainnya seiring terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara. Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga. Imbal hasil (*yield*) US Treasury telah naik ke 4,66% (tenor 10 tahun) dan 4,11% (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026.

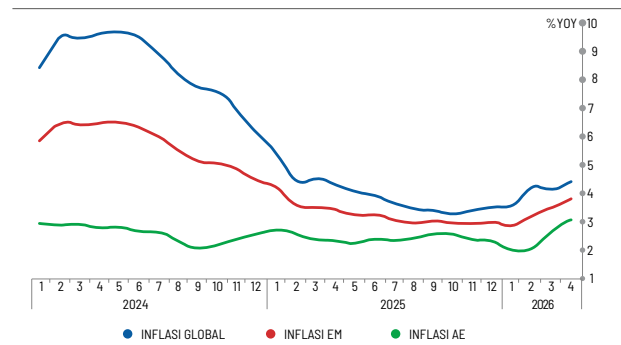
Prospek perekonomian global diperkirakan lebih rendah dengan tekanan inflasi global yang meningkat. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan lebih rendah menjadi sebesar 3,0% dan tekanan inflasi global yang diperkirakan meningkat menjadi 4,3%. Respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat dengan kemungkinan suku bunga moneter Amerika Serikat, FFR akan naik pada 2027 seiring laju inflasi AS yang tetap tinggi. *Yield* US Treasury diperkirakan dapat naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.

Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara *Emerging Markets* ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (*safe-haven assets*), khususnya obligasi AS. Perkembangan ini juga mendorong kuatnya indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang. Terus memburuknya prospek perekonomian dan pasar keuangan global mengharuskan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Tabel 1.1 Tabel Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (% , yoy)

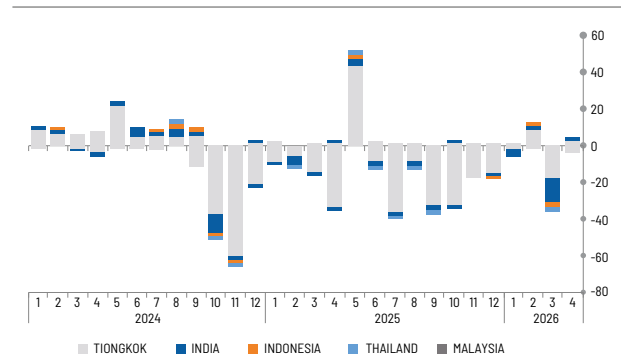
NEGARA	2022	2023	2024	2025	2026*
Dunia	3,5	3,3	3,3	3,4	3,0
Negara Maju	2,6	1,7	1,8	1,9	1,7
Amerika Serikat	1,9	2,5	1,7	2,1	2,3
Kawasan Euro	3,4	0,5	0,9	1,4	0,9
Jepang	1,0	1,9	0,1	1,2	0,7
Negara Berkembang	4,1	4,4	4,3	4,4	3,9
Tiongkok	3,0	5,2	5,0	5,0	4,5
India (Fiscal Year for CF)	6,8	7,7	6,5	7,6	6,5
ASEAN-5	5,5	4,1	4,6	4,5	4,0
Amerika Latin	4,2	2,3	2,4	2,4	2,4
Negara Berkembang Eropa	1,2	3,2	3,4	2,0	2,1
Timur Tengah & Asia Tengah	5,4	2,0	2,4	3,6	2,6

Sumber: IMF WEO.
*Proyeksi Bank Indonesia



Sumber: Bloomberg dan IMF, diolah

Grafik 1.1 Inflasi Global



Sumber: EPFR, diolah

Grafik 1.2 Aliran Modal ke Negara Berkembang

B. PEREKONOMIAN NASIONAL²

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 5,39% (yoy). Peningkatan ini terutama ditopang oleh permintaan domestik dari konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong kenaikan mobilitas masyarakat pada periode HBKN dan dampak positif berbagai stimulus pemerintah. Konsumsi pemerintah tumbuh tinggi didorong belanja program prioritas pemerintah, terutama Makan Bergizi Gratis (MBG), serta peningkatan belanja pegawai melalui gaji ke-14 atau THR. Investasi khususnya investasi bangunan meningkat dipengaruhi oleh Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Sementara itu, ekspor turun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), seluruh LU menunjukkan kinerja positif, kecuali LU Pertambangan dan LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. LU Perdagangan Besar dan Eceran serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, didukung oleh tingginya mobilitas masyarakat pada saat HBKN.

Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 paling tinggi tercatat di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), diikuti Jawa, Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), dan Sumatera didorong oleh kenaikan permintaan domestik. Sementara, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 di wilayah Kalimantan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.

¹ Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Mei 2026

² Asesmen lengkap dapat dilihat pada Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2026 dan Tinjauan Kebijakan Moneter Mei 2026

Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Pengeluaran

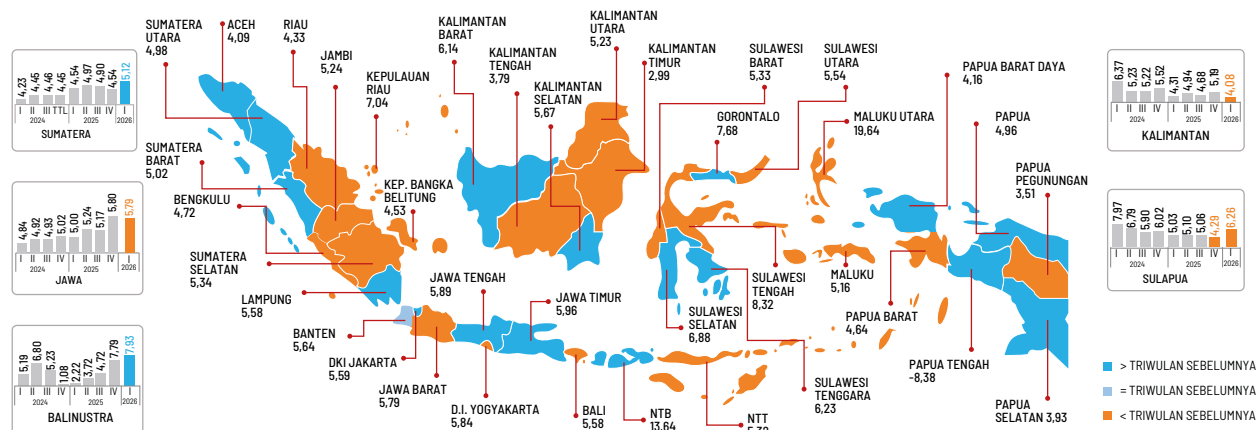
KOMODITAS	2022	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Konsumsi Rumah Tangga	4,94	4,53	5,22	5,05	4,47	4,82	4,91	4,93	4,91	4,98	4,94	4,95	4,97	4,89	5,11	4,98	5,52
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	5,66	6,16	8,59	6,18	18,11	9,83	24,29	9,98	11,69	6,06	12,48	3,07	7,82	4,28	5,90	5,13	6,28
Konsumsi Pemerintah	-4,47	3,31	10,47	-3,93	2,81	2,95	19,90	1,42	4,62	4,17	6,61	-1,37	-0,33	5,49	4,55	2,50	21,81
Investasi (PMTDB)	3,87	2,11	4,63	5,77	5,02	4,40	3,79	4,43	5,15	5,03	4,61	2,12	6,99	5,04	6,12	5,09	5,96
Investasi Bangunan	0,91	0,08	3,32	6,31	6,42	4,04	5,46	5,31	6,02	5,26	5,51	1,35	4,89	3,02	3,74	3,25	5,29
Investasi Nonbangunan	12,53	7,93	8,30	4,45	1,60	5,34	-0,64	2,08	2,98	4,40	2,23	4,32	12,93	10,34	12,39	10,12	7,85
Ekspor	16,23	11,74	-2,91	-3,91	1,64	1,32	0,50	8,28	9,09	7,63	6,51	6,46	10,67	9,91	3,25	7,03	0,90
Impor	15,00	4,15	-3,23	-6,75	-0,15	-1,65	1,77	8,57	11,47	10,36	7,95	4,17	11,65	1,18	3,96	4,77	7,18
PDB	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,04	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11	5,61

Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Domestik Sisi Lapangan Usaha

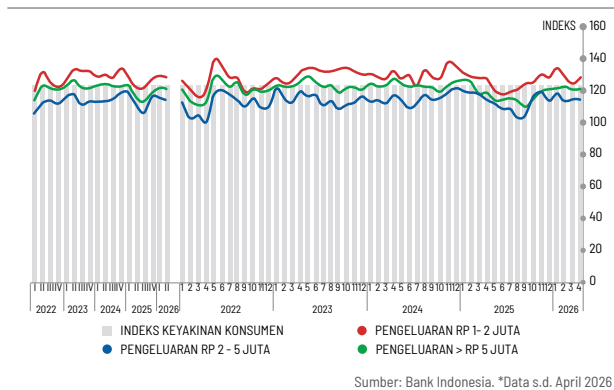
KOMODITAS	2022	2023				2023	2024				2024	2025				2025	2026
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,25	0,44	2,03	1,49	1,13	1,31	-3,54	3,25	1,69	0,71	0,67	10,52	1,65	4,93	5,14	5,33	4,97
Pertambangan dan Penggalian	4,38	4,92	5,01	6,95	7,46	6,12	9,31	3,17	3,46	3,95	4,90	-1,23	2,03	-1,98	-1,31	-0,66	-2,14
Industri Pengolahan	4,89	4,43	4,88	5,19	4,07	4,61	4,13	3,95	4,72	4,89	4,43	4,55	5,68	5,54	5,40	5,30	5,04
Pengadaan Listrik dan Gas	6,61	2,67	3,15	5,06	8,68	4,91	5,35	5,39	5,02	3,42	4,77	5,11	0,90	2,66	3,55	3,10	-0,99
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,23	5,70	4,78	4,49	4,66	4,90	4,44	0,84	0,03	1,06	1,56	0,18	0,82	3,32	-0,51	0,94	0,42
Konstruksi	2,01	0,32	5,23	6,39	7,68	4,91	7,59	7,29	7,48	5,81	7,02	2,18	4,98	4,21	3,89	3,81	5,49
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,53	4,94	5,30	5,10	4,09	4,85	4,58	4,85	4,82	5,19	4,86	5,03	5,37	5,49	6,07	5,49	6,26
Transportasi dan Pergudangan	19,87	15,93	15,28	14,74	10,33	13,96	8,66	9,56	8,64	7,92	8,69	9,01	8,52	8,62	8,98	8,78	8,04
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,94	11,54	9,91	10,93	7,88	10,00	9,34	10,15	8,32	6,61	8,56	5,75	8,04	8,41	7,15	7,41	13,14
Informasi dan Komunikasi	7,73	7,11	8,03	8,51	6,74	7,59	8,41	7,66	6,82	7,45	7,57	7,72	7,92	9,65	8,09	8,35	7,14
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,93	4,45	2,86	5,24	6,56	4,77	3,93	7,90	5,49	1,74	4,74	3,98	3,20	0,77	7,92	3,96	4,68
Real Estat	1,72	0,37	0,96	2,21	2,18	1,43	2,54	2,16	2,32	2,97	2,50	2,94	3,71	3,95	3,71	3,58	3,54
Jasa Perusahaan	8,77	6,37	9,59	9,37	7,62	8,24	9,63	7,96	7,93	8,08	8,38	9,27	9,31	9,94	7,90	9,10	4,91
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,52	2,13	8,18	-6,24	1,63	1,51	18,89	2,81	3,94	1,16	6,40	4,79	4,69	4,33	1,63	3,86	6,45
Jasa Pendidikan	0,55	1,02	5,42	-2,09	2,63	1,77	7,43	2,44	2,56	2,95	3,75	5,04	1,40	10,59	3,43	4,99	5,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,75	4,77	8,27	2,92	3,09	4,67	11,65	8,57	7,65	5,20	8,11	5,78	3,80	6,83	5,95	5,99	7,62
Jasa lainnya	9,47	8,90	11,89	11,14	10,15	10,52	8,92	8,85	9,95	11,36	9,80	9,84	11,31	9,92	8,71	9,93	9,91
PDB	5,31	5,04	5,17	4,94	5,04	5,05	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11	5,61

Sumber: BPS, diolah



Sumber: BPS, diolah

Gambar 1.1 Peta Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Triwulan I 2026 (% yoy)



Grafik 1.3 Indeks Keyakinan Konsumen



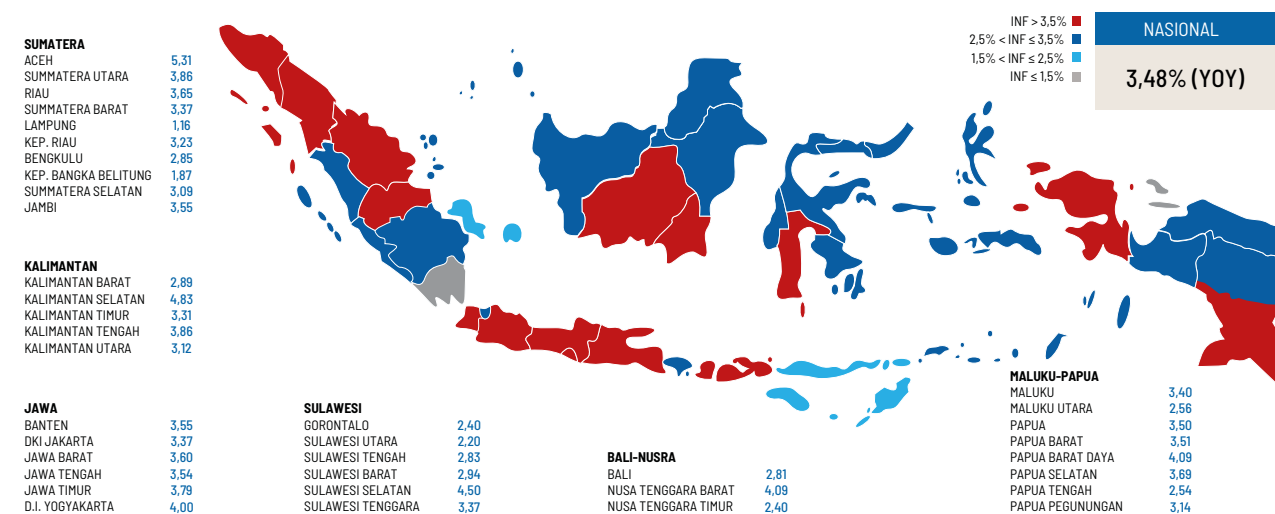
Grafik 1.4 Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur

Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terkendali, di tengah peningkatan tekanan harga minyak dunia serta harga komoditas lainnya sebagai dampak eskalasi perang di Timur Tengah. Inflasi IHK pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,48% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,76% (yoy). Inflasi inti menurun menjadi 2,52% (yoy) seiring tetap terjaganya ekspektasi inflasi sesuai dengan sasaran didukung konsistensi

kebijakan moneter Bank Indonesia. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) juga turun menjadi 4,24% (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama di tengah peningkatan permintaan pada periode perayaan HBKN Idulfitri 1447H. Inflasi kelompok *administered prices* (AP) menurun menjadi 6,08% (yoy) dari realisasi bulan sebelumnya sebesar 12,66% (yoy) seiring minimalnya kebijakan harga yang diatur Pemerintah serta berakhirnya faktor temporer *base effect* dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga pada Januari dan Februari 2025.

Secara spasial, inflasi tahunan IHK Maret 2026 di mayoritas wilayah relatif terjaga, dengan tekanan inflasi terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Inflasi tahunan tertinggi tercatat di Provinsi Aceh 5,31% (yoy), utamanya dipengaruhi oleh ketidakstabilan pasokan dan harga seiring dampak bencana banjir sejak akhir November 2025. Sementara itu, inflasi tahunan terendah tercatat di Provinsi Lampung sebesar 1,16% (yoy) seiring terjaganya pasokan pangan domestik.

Dari sektor keuangan, ketahanan perbankan tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang Timur Tengah. Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan secara agregat tetap rendah sebesar 2,17% (bruto) dan 0,83% (neto) pada Februari 2026. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejala global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.



Gambar 1.2 Peta Inflasi Daerah Bulan Maret 2026 (% yoy)

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan I 2026 tetap tinggi didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 14,82 miliar transaksi atau tumbuh 37,69% (yoy) pada triwulan I 2026, didukung oleh perluasan akseptasi pembayaran digital. Volume transaksi melalui aplikasi *mobile* dan internet masing-masing tumbuh sebesar 11,82% (yoy) dan 17,13% (yoy), termasuk transaksi QRIS yang terus tumbuh tinggi mencapai 116,43% (yoy). Kinerja positif tersebut didukung oleh peningkatan jumlah pengguna dan *merchant*. Dari sisi infrastruktur, volume transaksi ritel yang diproses melalui BI-FAST mencapai 1,4 miliar transaksi atau tumbuh 30,82% (yoy) dengan nilai transaksi mencapai Rp3.519 triliun pada triwulan I 2026. Sementara itu, volume transaksi nilai besar yang diproses melalui BI-RTGS tercatat sebanyak 2,46 juta transaksi atau mencatat penurunan 0,20% (yoy), di tengah nominal transaksi BI-RTGS yang tetap tumbuh 11,26% (yoy) mencapai Rp51.490 triliun pada triwulan I 2026. Dari sisi pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 8,59% (yoy) menjadi Rp1.347 triliun pada triwulan I 2026.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga pada triwulan I 2026 ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat. Infrastruktur yang stabil tecermin pada penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) dan sistem pembayaran industri yang lancar dan andal serta kecukupan pasokan uang dalam jumlah dan kualitas yang memadai. Struktur industri yang sehat tergambar pada interkoneksi antarpelaku dalam sistem pembayaran yang terus menguat dan diikuti oleh ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD) yang meluas. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat struktur industri sistem pembayaran, khususnya pada aspek manajemen risiko dan keandalan infrastruktur teknologi pelaku industri, sejalan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP). Bank Indonesia juga akan terus memastikan keamanan dan keandalan infrastruktur SPBI, baik untuk transaksi ritel maupun *wholesale* serta infrastruktur sistem pembayaran industri. Bank Indonesia juga terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

C. BAURAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25%, suku bunga *Deposit Facility* sebesar 50 bps menjadi 4,25%, dan suku bunga *Lending Facility* sebesar 50 bps menjadi 6,00%. Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$ yang ditetapkan Pemerintah. Keputusan ini sejalan dengan fokus

kebijakan moneter pada stabilitas (*"pro-stability"*) untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global. Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (*"pro-growth"*). Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

Arah bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam memperkuat stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga didukung dengan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah dan menjaga inflasi 2026 dan 2027 dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan:
 - i. meningkatkan intensitas intervensi valuta asing untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui transaksi *Non-Deliverable Forward* (NDF) di pasar luar negeri maupun transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF) di pasar domestik;
 - ii. meningkatkan struktur suku bunga instrumen moneter *pro-market* sejalan dengan kenaikan BI-Rate untuk tetap menarik aliran masuk investasi portofolio asing ke aset keuangan domestik; dan
 - iii. menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan memastikan pertumbuhan Uang Primer lebih dari 10% (*double digit*) sesuai dengan ekspansi moneter, termasuk melalui transaksi Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder secara terukur.
2. Memperkuat pelonggaran kebijakan makroprudensial untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan mendorong intermediasi perbankan, termasuk dari aspek pembiayaan (*financing*) non-kredit maupun pendanaan (*funding*) non-DPK, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui:
 - i. pelonggaran kebijakan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) melalui perluasan cakupan dan penguatan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan RIM, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2026;
 - ii. peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan memberikan tambahan insentif paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK untuk bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%, yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2026;

- iii. penguatan sinergi lebih lanjut dengan Pemerintah dan pemangku kepentingan lain untuk mendorong kredit/ pembiayaan tinggi baik dari sisi penawaran perbankan maupun permintaan dunia usaha melalui Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI); dan
 - iv. publikasi asesmen transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.
3. Memperkuat implementasi langkah-langkah digitalisasi sistem pembayaran sesuai dengan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk semakin memperluas kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui:
 - i. perluasan program QRIS Jelajah Indonesia 2026 dengan target *merchant* QRIS sebanyak 47 juta pada 2026 guna meningkatkan aktivitas ekonomi keuangan digital yang inklusif, termasuk UMKM;
 - ii. pelaksanaan QRIS Antarnegara Indonesia – Tiongkok sebagai upaya perluasan konektivitas pembayaran digital lintas negara setelah kesuksesan konektivitas QRIS dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan; dan
 - iii. penyelenggaraan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI): *Digdaya* dan Hackathon melalui program pelatihan tingkat lanjutan untuk semakin memperluas penciptaan kewirausahaan dan usaha digital inklusif (*digital business entrepreneurship*) baik di bidang jasa keuangan, UMKM, maupun layanan umum sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan perluasan lapangan kerja.
 4. Memperkuat kebijakan transaksi pasar valas melalui implementasi penurunan *threshold* tunai beli valas terhadap Rupiah tanpa *underlying* menjadi USD25.000 per pelaku per bulan yang mulai berlaku Juni 2026, guna mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah dan pendalaman pasar keuangan domestik.
 5. Mempercepat implementasi pendalaman pasar uang dan pasar valas sesuai dengan *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang (BPPU) 2030 untuk mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah melalui:
 - i. perluasan lebih lanjut transaksi dalam valuta *offshore* Chinese Renminbi (CNH) terhadap Rupiah dengan instrumen *spot* dan *swap* di pasar valas domestik sejalan dengan semakin meluasnya penggunaan mata uang lokal (*Local Currency Transaction*, LCT) untuk penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi;
 - ii. perluasan keikutsertaan perbankan dalam transaksi *offshore* NDF jual valas terhadap Rupiah di pasar luar negeri bagi Dealer Utama PUVA yang memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia.
 6. Memperkuat pengawasan terhadap bank dan korporasi dengan aktivitas pembelian dolar AS yang tinggi melalui koordinasi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 7. Memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta memfasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk memitigasi dampak ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah terhadap perekonomian domestik sehingga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga baik. Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pembiayaan bagi program *Asta Cita* Pemerintah.





Bab 2

Ekonomi Makro Regional

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh positif dengan pertumbuhan sebesar 5,59% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (5,71%, yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan terutama ditopang oleh masih kuatnya kinerja konsumsi rumah tangga dan tingginya kinerja ekspor-impor. Di sisi lain, kinerja investasi, dan konsumsi pemerintahan tertahan, meski masih mencatatkan pertumbuhan positif. Dari sisi sektoral atau lapangan usaha, pertumbuhan terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Jasa Keuangan. LU utama lainnya yaitu LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan juga tumbuh positif. Selain LU utama, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan, Transportasi dan Pergudangan (Transgud), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akamamin) tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta. Capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta juga sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh kuat pada triwulan I 2026 sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,39%; yoy).

Memasuki triwulan II 2026, perekonomian Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat dibandingkan triwulan I 2026, didorong oleh prakiraan kuatnya kinerja Konsumsi RT seiring momentum HBKN Iduladha, banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama, serta periode libur sekolah. Selain itu, investasi diperkirakan tetap kuat seiring prakiraan akselerasi penanaman modal guna perluasan program strategis ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan pemerintah, serta peningkatan kinerja konsumsi pemerintah akibat akselerasi realisasi belanja pegawai, belanja modal, dan akselerasi belanja Bansos. Dari sisi LU utama, pertumbuhan LU Perdagangan juga diperkirakan tetap kuat dari triwulan sebelumnya, sejalan dengan kinerja Konsumsi RT yang diperkirakan tumbuh tinggi.



PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA (yoy)

5,71%

Triwulan IV 2025



5,59%

Triwulan I 2026



PERTUMBUHAN KONSUMSI RUMAH TANGGA (yoy)

5,51%

Triwulan IV 2025



5,72%

Triwulan I 2026



PERTUMBUHAN INVESTASI (yoy)

6,81%

Triwulan IV 2025



4,71%

Triwulan I 2026



PERTUMBUHAN EKSPOR (yoy)

7,62%

Triwulan IV 2025

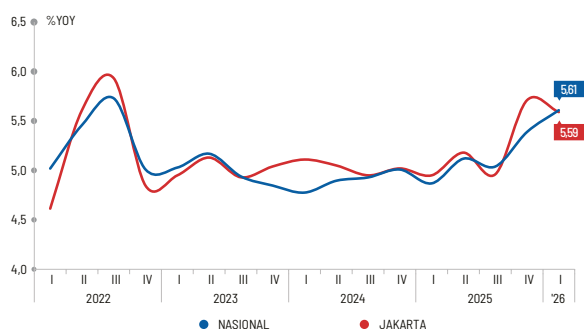


8,98%

Triwulan I 2026

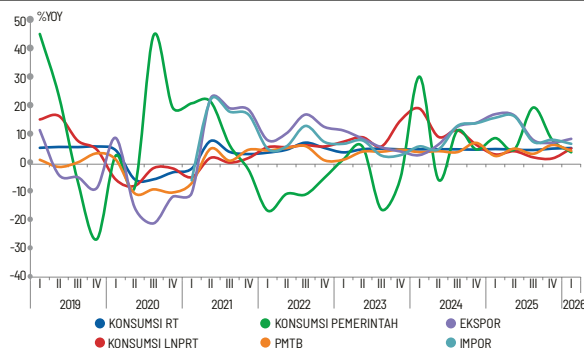
A. PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN I 2026

Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 5,59% (yoy), meskipun tidak setinggi capaian pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,71% (yoy). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta ditopang oleh menguatnya kinerja Konsumsi RT dan terjaganya kinerja Investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Capaian pertumbuhan ekonomi Jakarta juga sejalan dengan perekonomian nasional yang tumbuh kuat pada triwulan I 2026 sebesar 5,61% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (5,39%; yoy).



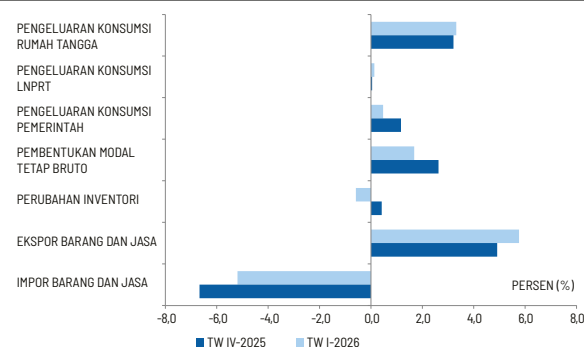
Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan DKI Jakarta



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan I 2026 Sisi Pengeluaran



Sumber: Badan Pusat Statistik

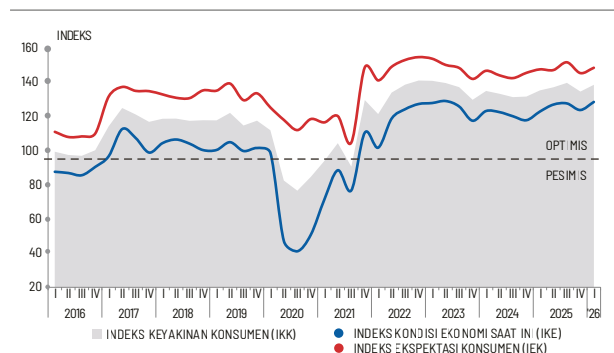
Grafik 2.3 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jakarta Triwulan I 2026 Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026 terutama ditopang oleh kinerja Konsumsi RT dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (Investasi). Konsumsi RT dengan pangsa 58,19% tumbuh 5,72% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,51% (yoy) (grafik 2.3). Investasi dengan pangsa 35,40% juga mencatatkan pertumbuhan positif 4,71% (yoy), meski melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 6,81% (yoy). Selanjutnya, Konsumsi Pemerintah dengan pangsa 11,07% mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,22% (yoy) pada triwulan I 2026, adapun Konsumsi LNPR tumbuh 5,54% (yoy). Dari sisi eksternal, pada triwulan I 2026 ekspor tumbuh sebesar 8,98% (yoy) dan impor tumbuh sebesar 7,21% (yoy).

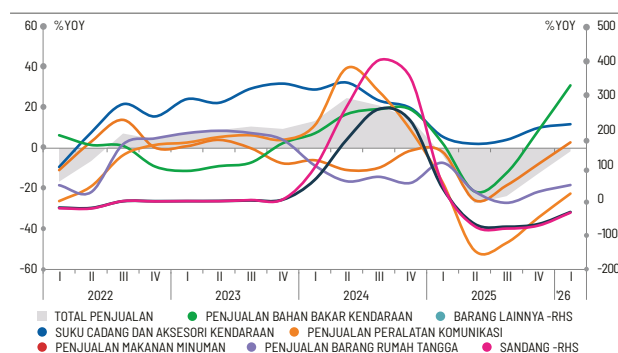
Konsumsi Rumah Tangga (RT)

Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan kinerja solid dan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026. Konsumsi RT pada triwulan I 2026 tumbuh kuat mencapai 5,72% (yoy) dengan kontribusi sebesar 3,32%, meningkat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (5,51%; yoy) (Grafik 2.2). Pertumbuhan konsumsi RT utamanya didorong oleh momentum HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, Nyepi, serta terjaganya daya beli masyarakat seiring kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 6,17% dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR). Kondisi ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) pada triwulan I 2026 yang tetap pada level optimis dan meningkat dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.4). Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, IKK pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 147,13 yang menunjukkan tingkat keyakinan atau kepercayaan konsumen yang berada pada level optimis. Begitu juga dengan IKE dan IEK pada triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 136,43 dan 157,83 menunjukkan persepsi optimis konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan enam bulan ke depan. Tetap optimisnya persepsi konsumsi masyarakat tersebut juga terkonfirmasi dengan menguatnya penjualan eceran, khususnya bahan bakar kendaraan, suku cadang dan aksesoris kendaraan, makanan minuman, peralatan komunikasi, serta sandang yang tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.5). Lebih lanjut, penjualan e-commerce di Jakarta tetap solid, didorong oleh komponen perlengkapan rumah tangga dan kantor, otomotif dan aksesoris, *personal care* dan kosmetik, serta *fashion* yang masing-masing tumbuh sebesar 49,00% (yoy), 43,39% (yoy), 40,71% (yoy), dan 1,97% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.6).



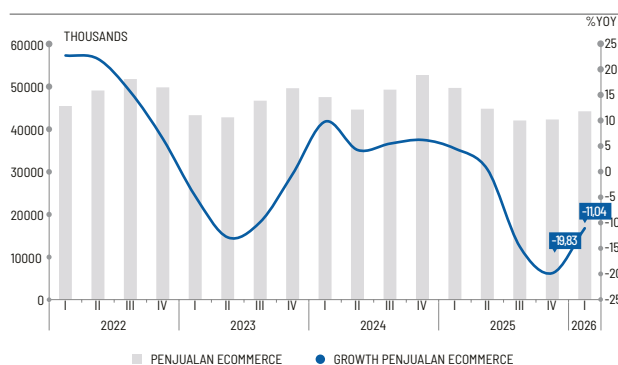
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.4 Perkembangan IKK, IKE, dan IEK



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 2.5 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran

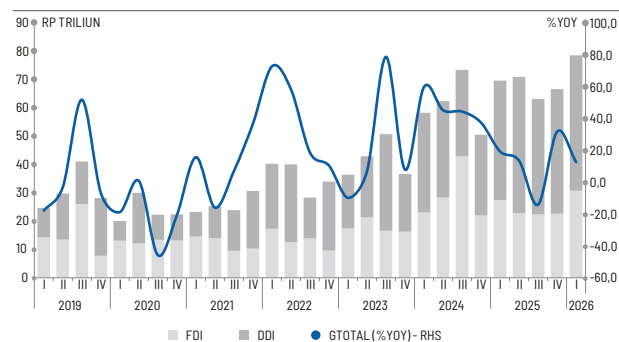


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 2.6 Perkembangan Penjualan e-commerce Jakarta

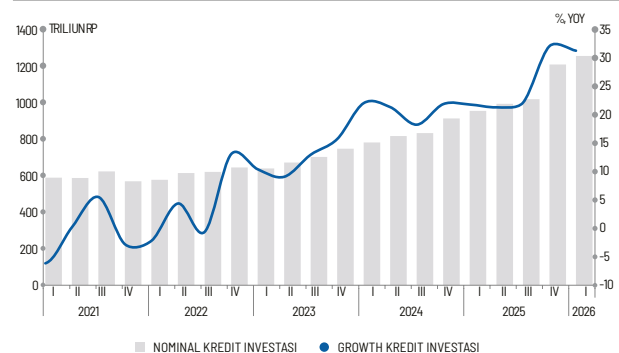
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Investasi pada triwulan I 2026 tumbuh positif dan menopang perekonomian. Pada triwulan I 2026, investasi (PMTB) tumbuh sebesar 4,71% (yoy), tetap kuat meskipun capaiannya tidak setinggi pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,81% (yoy) (Grafik 2.2). Adapun komponen investasi memberikan kontribusi sebesar 1,68% terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026 (Grafik 2.3). Tertahannya pertumbuhan investasi di Jakarta disebabkan melambatnya pertumbuhan PMA dan PMDN pada triwulan I 2026 (Grafik 2.7). Meski demikian, kinerja investasi tetap terjaga, ditopang oleh peningkatan output konstruksi, impor barang modal, serta meningkatnya belanja modal APBN di Jakarta. Kinerja investasi yang positif juga tercermin dari penyaluran kredit investasi yang tumbuh kuat mencapai 31,57% (yoy) (Grafik 2.8).



Sumber: DPMTSP DKI Jakarta, diolah

Grafik 2.7 Perkembangan Realisasi PMA PMDN

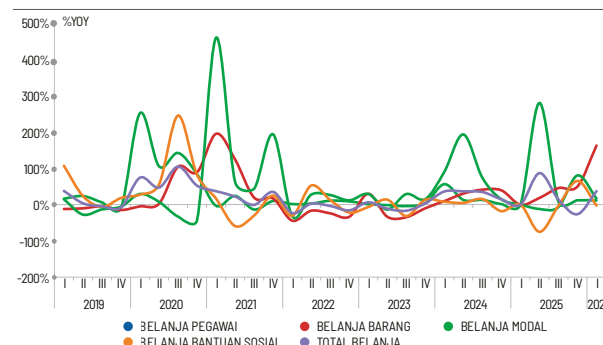


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.8 Perkembangan Kredit Investasi di Jakarta

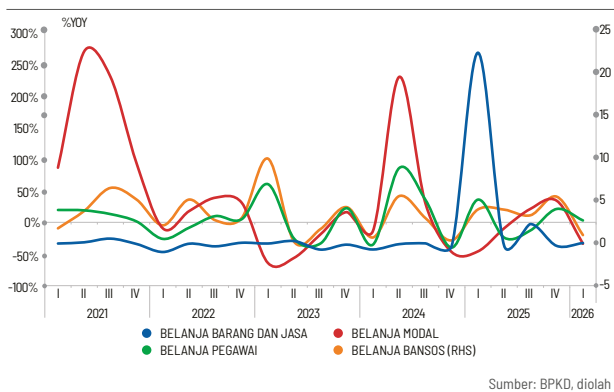
Konsumsi Pemerintah

Konsumsi pemerintah tumbuh positif pada triwulan I 2026, meskipun tidak sekuat periode sebelumnya. Konsumsi pemerintah mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,22% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih rendah dari triwulan IV 2025 yang tumbuh 8,60% (yoy) (Grafik 2.2). Dengan perkembangan tersebut, konsumsi pemerintah memberikan kontribusi 0,47% terhadap PDRB Jakarta (Grafik 2.3). Dari sisi APBN, perlambatan belanja terjadi pada komponen belanja pegawai, belanja modal, dan belanja bantuan sosial di tengah menguatnya komponen belanja barang (Grafik 2.9). Di sisi lain, kinerja belanja pemerintah daerah juga mengalami perlambatan, tercermin dari realisasi belanja daerah APBD triwulan I 2026 yang berkontraksi sebesar 5,63% (yoy) setelah mencatatkan pertumbuhan 23,17% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh melambatnya realisasi komponen belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal (Grafik 2.10).



Sumber: DJPb Kanwil DKI Jakarta, diolah

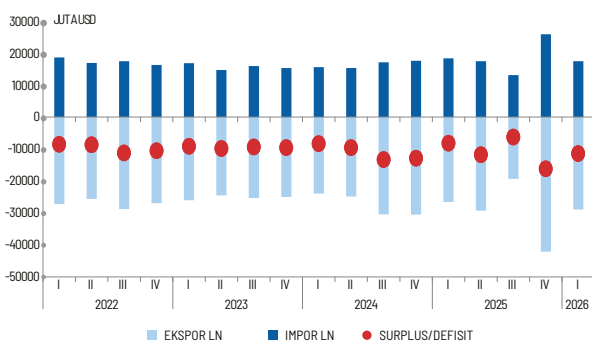
Grafik 2.9 Realisasi Belanja APBN DKI Jakarta



Grafik 2.10 Realisasi Belanja APBD DKI Jakarta

Net Ekspor

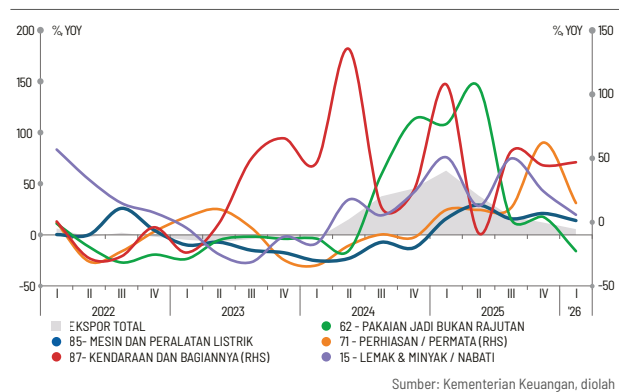
Pada triwulan I 2026, neraca perdagangan luar negeri DKI Jakarta mencatat defisit net ekspor USD 11,43 miliar, lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar USD16,25 miliar (Grafik 2.11). Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya, ekspor luar negeri melalui Jakarta berkontraksi 4,67% (yoy) pada triwulan I 2026, berbalik arah dari triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 49,35% (yoy). Sejalan dengan kinerja Ekspor, kinerja Impor luar negeri melalui Jakarta juga melambat, dengan pertumbuhan sebesar 8,78% (yoy), turun dari 37,92% (yoy) pada triwulan sebelumnya.



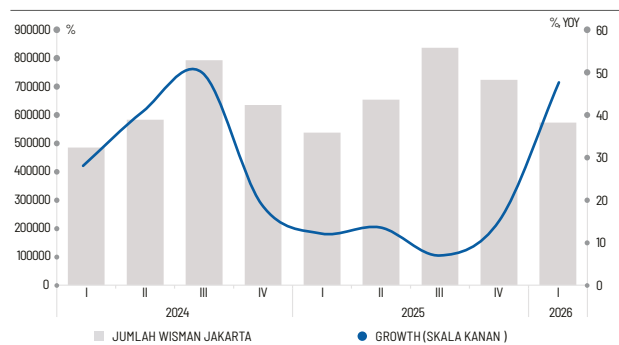
Grafik 2.11 Neraca Perdagangan Luar Negeri DKI Jakarta

Ekspor

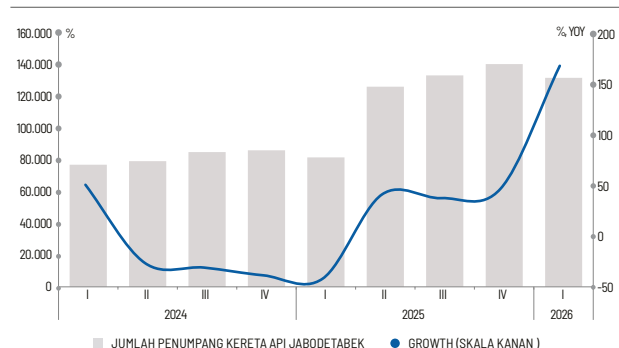
Ekspor tetap tumbuh di tengah dinamika perdagangan global yang masih berlanjut. Pada triwulan I 2026, ekspor tumbuh 8,98% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (7,62%; yoy). Kinerja positif ekspor utamanya ditopang oleh peningkatan nilai ekspor komoditas Perhiasan/Permata yang tumbuh 46,90% (yoy), di tengah perlambatan komoditas unggulan Jakarta lainnya (Grafik 2.12). Dari sisi ekspor jasa, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi mencapai 46,47% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,86% (yoy) (Grafik 2.13). Sejalan dengan itu, kunjungan wisatawan Nusantara (wisnus) juga meningkat, tecermin dari jumlah penumpang kereta api Jabodetabek yang tumbuh 141,15% (yoy), meningkat dari 63,06% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 2.14).



Grafik 2.12 Perkembangan Ekspor Komoditas Unggulan Jakarta



Grafik 2.13 Perkembangan Kunjungan Wisman ke Jakarta

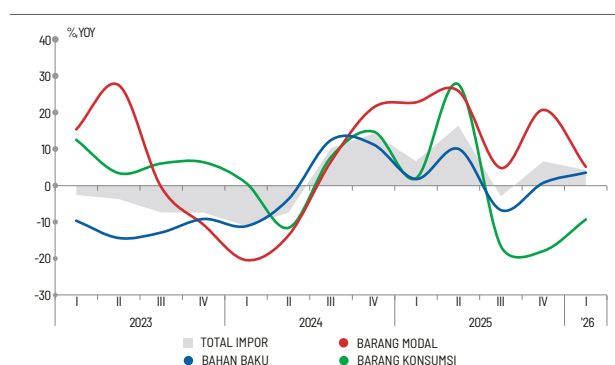


Grafik 2.14 Perkembangan Penumpang Kereta Api Jabodetabek

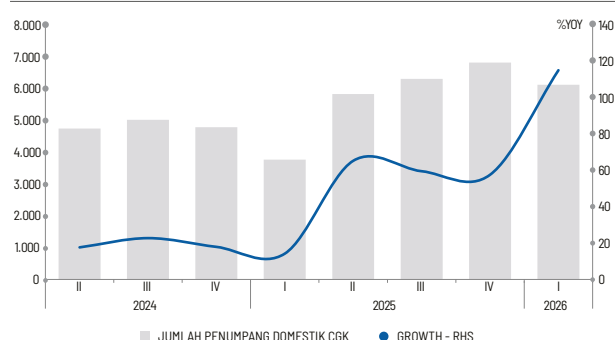
Impor

Kinerja Impor pada triwulan I 2026 menunjukkan perlambatan.

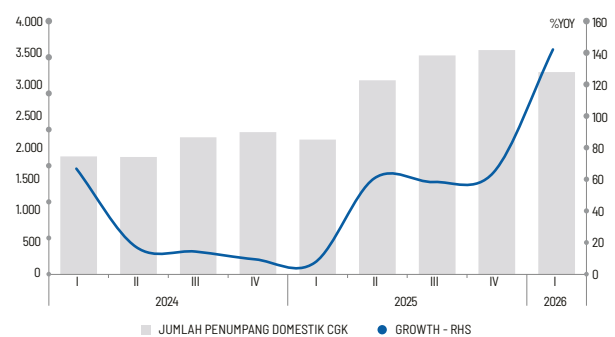
Impor Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 7,21% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,67% (yoy). Perlambatan kinerja impor berasal dari komponen impor Barang Modal dan Barang Konsumsi. Pada triwulan I 2026, pertumbuhan impor barang modal tercatat 5,19% (yoy), menurun dari 20,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, impor barang konsumsi masih berkontraksi sebesar 9,25% (yoy) (Grafik 2.15). Di sisi lain, penurunan lebih dalam tertahan oleh kinerja positif impor jasa, tecermin dari jumlah keberangkatan penumpang domestik dan internasional dari Bandara Soekarno Hatta yang tumbuh tinggi masing-masing sebesar 138,14% (yoy) dan 115,29% (yoy) (Grafik 2.16 dan Grafik 2.17).



Grafik 2.15 Perkembangan Nilai Impor Barang Konsumsi, Barang Modal, dan Bahan Baku Jakarta



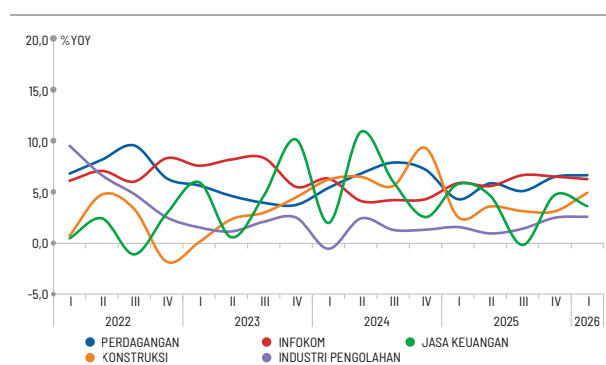
Grafik 2.16 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Domestik CGK



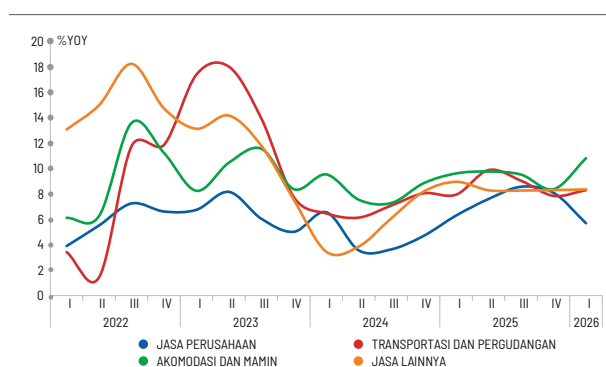
Grafik 2.17 Perkembangan Keberangkatan Penumpang Internasional CGK

Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Dari sisi lapangan usaha utama DKI Jakarta, pertumbuhan ekonomi di triwulan I 2026 terutama bersumber dari LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi (Infokom), dan LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, seiring dengan momentum HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, dan Nyepi. Pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh LU utama lainnya, seperti LU Konstruksi dan LU Industri Pengolahan yang tumbuh meningkat. Selain LU utama dan LU yang berkontribusi besar, LU lainnya seperti LU Jasa Perusahaan dan LU Transportasi dan Pergudangan (Transgud) tumbuh tinggi dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta (Grafik 2.18 dan 2.19). Pada triwulan I



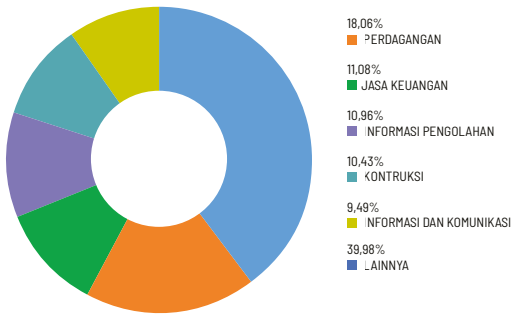
Grafik 2.18 Perkembangan Pertumbuhan Lima LU Utama



Grafik 2.19 Perkembangan Pertumbuhan LU Akmamin, LU Transgud, dan LU Jasa Perusahaan

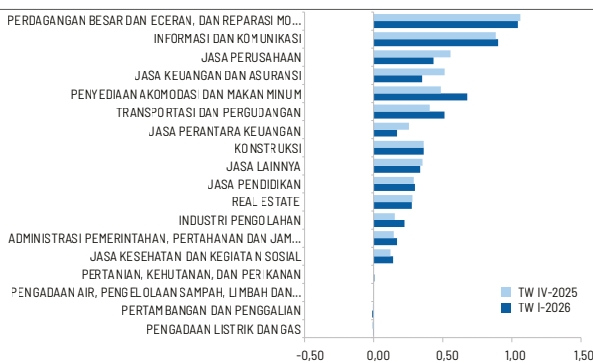
2026, LU Perdagangan masih menjadi penopang utama perekonomian Jakarta, disusul oleh LU Jasa Keuangan dan Asuransi, LU Industri Pengolahan, LU Konstruksi, dan LU Infokom dengan porsi masing-masing sebesar 18,06%; 11,08%; 10,96%; 10,43%, dan 9,49% (Grafik 2.18).

LU utama tersebut di atas juga memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan laporan, utamanya LU Perdagangan, LU Infokom, dan LU Konstruksi yang masing-masing memberikan kontribusi sebesar 1,06% (yoy); 0,88% (yoy); dan 0,51% (yoy) (Grafik 2.18). Masih kuatnya pertumbuhan pada ketiga sektor ekonomi utama tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan wisman dan wisnus tujuan Jakarta, serta peningkatan aktivitas MICE dan event yang diselenggarakan di Jakarta pada triwulan laporan. Selain itu, adanya rilis beberapa film dan serial dengan rating yang tinggi pada bioskop dan layanan *streaming* juga berdampak pada tingginya pertumbuhan LU Infokom pada triwulan laporan. Selanjutnya, pada LU lainnya seperti LU Penyediaan Akomamin dan LU Transportasi dan Pergudangan, juga turut memberikan kontribusi tinggi masing-masing sebesar 0,56% (yoy) dan 0,35% (yoy) (Grafik 2.19). Hal ini disebabkan tingginya mobilitas dan permintaan domestik untuk sektor HOREKA pada momentum HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek dan Nyepi yang meningkatkan kinerja kedua LU tersebut.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.20 Porsi LU Utama terhadap PDRB DKI Jakarta Triwulan I 2026



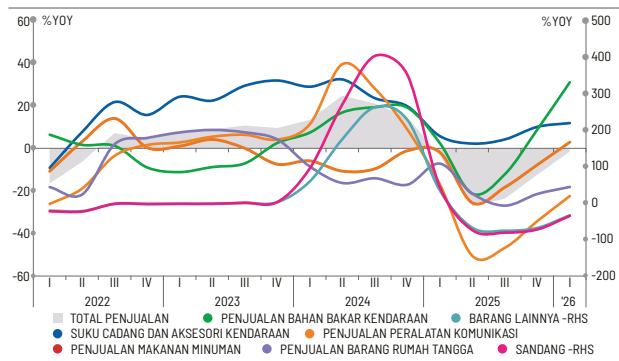
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.21 Kontribusi Pertumbuhan PDRB DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha

Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

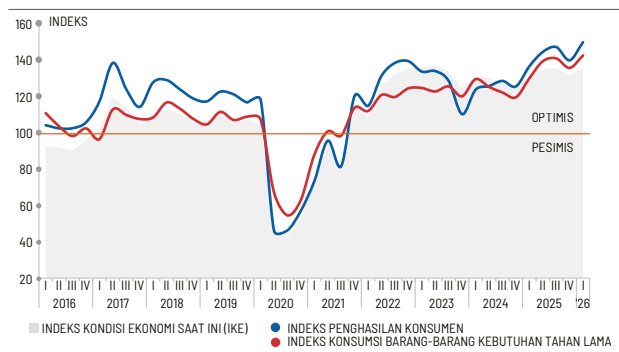
LU Perdagangan menjadi kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi Jakarta pada triwulan I 2026 dengan pertumbuhan sebesar 6,71% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 6,55% (yoy) (Grafik 2.21). Peningkatan tersebut ditopang oleh maraknya pelaksanaan kegiatan event besar, MICE serta diskon belanja, tecermin dari perkembangan indeks penjualan eceran yang tumbuh lebih baik walau masih terkontraksi pada triwulan I 2026, dengan nilai pertumbuhan total penjualan terkontraksi sebesar 3,85% (yoy), membaik dari triwulan sebelumnya (-12,42% yoy) (Grafik 2.21). Selain itu, survei konsumen menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan nilai indeks kondisi ekonomi pada triwulan I 2026 sebesar 136,40, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (131,37) (Grafik 2.23).

Dari sisi digitalisasi, kinerja perdagangan juga didukung oleh membaiknya aktivitas perdagangan secara digital via platform *e-commerce* yang menunjukkan pertumbuhan yang terkontraksi sebesar 11,04% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 19,83% (yoy) (Grafik 2.24). Peningkatan kinerja *e-commerce* salah satunya disebabkan momentum HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, dan Nyepi yang disertai pemberian THR sehingga mendorong daya beli masyarakat DKI Jakarta.



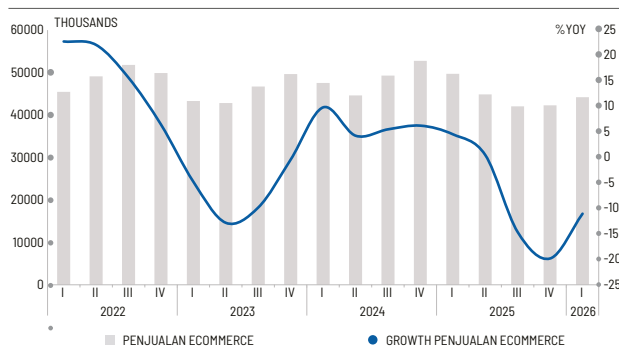
Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.22 Perkembangan Survei Penjualan Eceran DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.23 Perkembangan Indeks Kondisi Konsumen



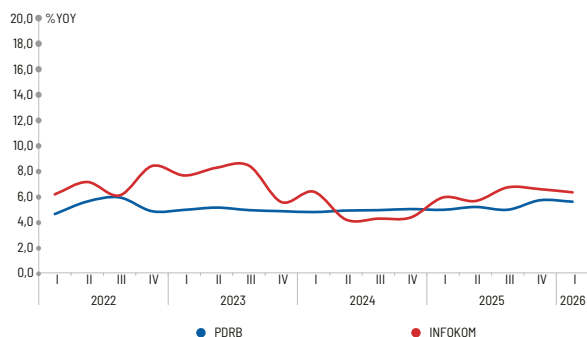
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.24 Perkembangan Penjualan E-Commerce di Jakarta

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi

LU Informasi dan Komunikasi (Infokom) dengan kontribusi 0,88% pada triwulan I 2026, mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,33% (yoy) meskipun tidak sekuat pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 6,58% (yoy) (Grafik 2.25). Pertumbuhan LU Infokom DKI Jakarta pada triwulan I 2026 terpantau tetap kuat, ditopang oleh beberapa faktor utama. Dari sisi konektivitas, penetrasi internet nasional meningkat signifikan mencapai 229 juta pengguna atau sekitar 80,66% dari total populasi pada pertengahan 2025, naik dari 212 juta pengguna pada awal tahun. Jakarta tercatat memiliki tingkat penetrasi tertinggi, yaitu mencapai 91,35% (Survey APJII,

2025). Kenaikan jumlah pengguna internet tersebut turut didukung oleh Jakarta sebagai pusat teknologi nasional dengan infrastruktur digital yang semakin matang, contohnya pada Mei 2025 Microsoft resmi membuka *region cloud* pertama di Indonesia (Indonesia Central) yang berpusat di Jakarta, sebagai bagian dari rencana investasi sebesar USD1,7 miliar tahun 2024–2028 untuk infrastruktur *Artificial Intelligence* dan *cloud* di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, sektor infokom merupakan salah satu sektor dengan nilai investasi terbesar di Jakarta sepanjang tahun 2025. Beberapa contoh investasi besar di sektor ini antara lain: ekspansi jaringan oleh operator seluler (Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata) untuk meningkatkan kapasitas 4G/5G; investasi perusahaan *tech giants* global (selain Microsoft, Google dan Amazon) juga telah membuka *region cloud/data center* di sekitar Jakarta; serta maraknya pendanaan *startup* di ekosistem digital Jakarta (*fintech*, *e-commerce*, *ride-hailing*, *edutech* dan lainnya yang berbasis di ibu kota). Momentum ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor Infokom di Jakarta tidak hanya ditopang oleh tren peningkatan konektivitas internet, tetapi juga diperkuat oleh ekosistem infrastruktur digital yang semakin siap, daya beli masyarakat yang terjaga, serta intensitas kegiatan masyarakat yang memacu permintaan terhadap layanan digital, yang salah satunya tercermin dari membaiknya indeks penjualan peralatan komunikasi, dari triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi 7,76% (yoy), pada triwulan I 2026 menjadi tumbuh positif sebesar 2,91% (yoy) (Grafik 2.26).



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.25 Perkembangan LU Infokom dan PDRB Jakarta

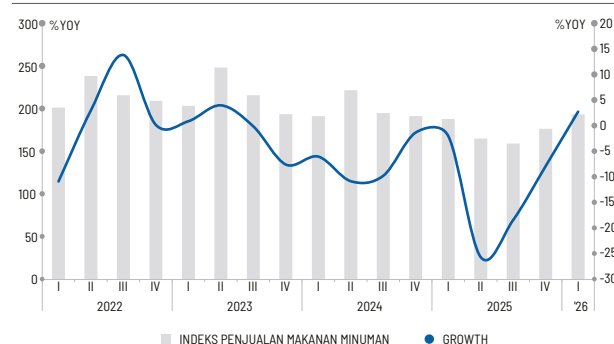


Sumber: BPS, diolah

Grafik 2.26 Perkembangan Indeks Penjualan Peralatan Komunikasi Jakarta

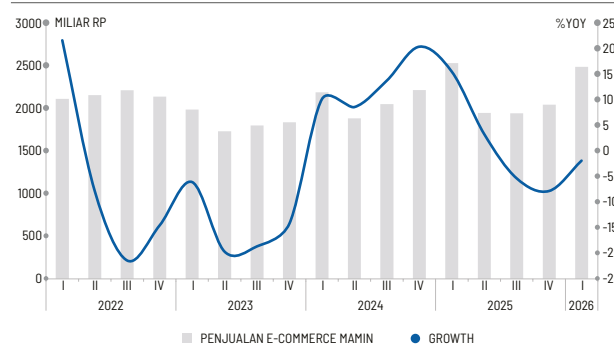
Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin)

LU Penyediaan Akmamin memberikan andil pertumbuhan pada perekonomian Jakarta sebesar 0,56% pada triwulan I 2026, dengan laju pertumbuhan sebesar 10,84% (yoy) atau meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (8,40% yoy). Peningkatan tecermin dari indikator penjualan barang makanan dan minuman melalui indeks penjualan eceran pada komponen makanan dan minuman, yang tumbuh meningkat sebesar 2,17% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang masih terkontraksi 7,76% (yoy) (Grafik 2.27). Selain itu, peningkatan juga tecermin dari sisi pasar digital, penjualan *e-commerce* untuk barang makanan dan minuman yang masih tumbuh meningkat walaupun masih terkontraksi, yaitu dari kontraksi 7,75% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi kontraksi 1,81% (yoy) (Grafik 2.28).



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.27 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran Komponen Makanan dan Minuman

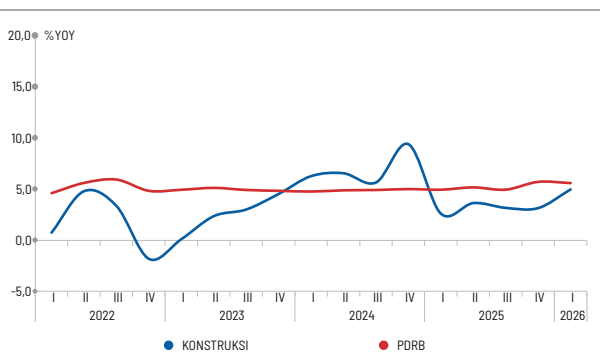


Sumber: BI, diolah

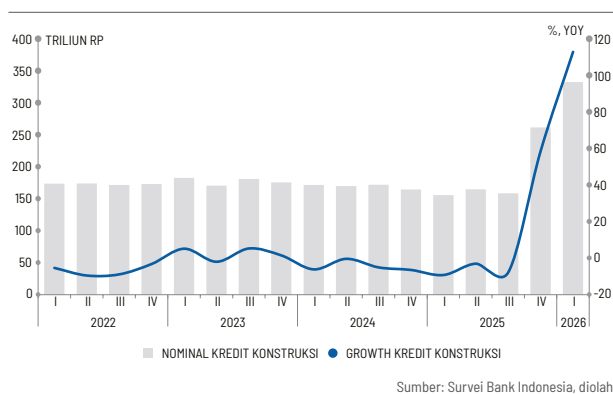
Grafik 2.28 Perkembangan Penjualan E-Commerce Barang Makanan dan Minuman

Lapangan Usaha Konstruksi

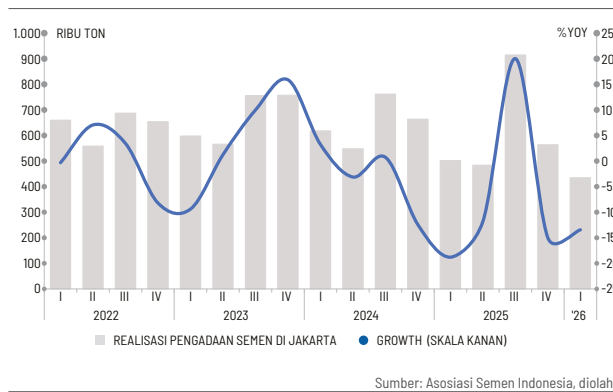
LU Konstruksi pada triwulan I 2026 memberikan andil sebesar 0,51 % pada pertumbuhan perekonomian DKI Jakarta dengan pertumbuhan sebesar 4,98% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (3,15%; yoy). Peningkatan kinerja LU Konstruksi tecermin dari tingginya pertumbuhan kredit konstruksi yang tumbuh signifikan pada triwulan I 2026 sebesar 113,73% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya (59,12%; yoy) (Grafik 2.29). Selain itu, pertumbuhan juga didukung oleh perbaikan kinerja pengadaan semen pada triwulan I 2026 yang tumbuh terkontraksi sebesar 13,42% (yoy), lebih baik dari triwulan sebelumnya yang terkontraksi lebih dalam sebesar 15,03% (yoy) (Grafik 2.31).



Grafik 2.29 Pertumbuhan LU Konstruksi DKI Jakarta



Grafik 2.30 Perkembangan Penyaluran Kredit Konstruksi di Jakarta

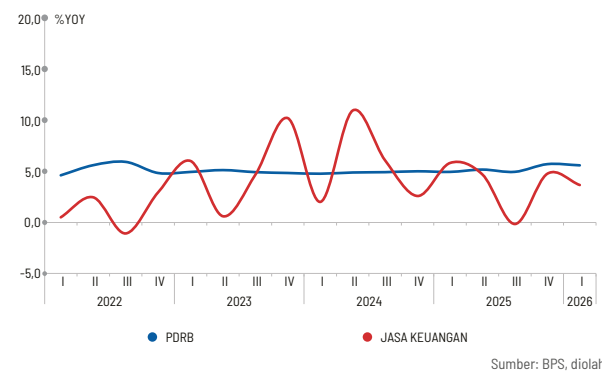


Grafik 2.31 Perkembangan Realisasi Pengadaan Semen di Jakarta

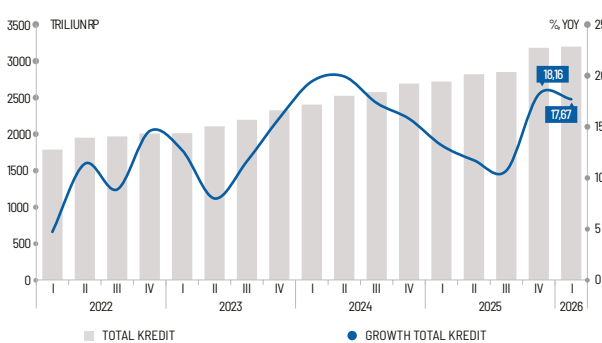
Selanjutnya, masih kuatnya kinerja LU Konstruksi di Jakarta terutama ditopang beberapa proyek strategis pemerintah maupun swasta yang masih berlanjut pada triwulan I 2026, diantaranya: Proyek MRT fase 2 dan 3, *Transit Oriented Development* (TOD), Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment, Mandiri IT Tower - Bumi Slipi Jakarta, *pedestrian shelter redevelopment* dan *green shelter electricity* TransJakarta, hingga Fatmawati Mixed Used MRT Jakarta. Selain itu, terdapat 9 (sembilan) proyek PT Pembangunan Perumahan (PP) dengan status *on going* dan persiapan di Jakarta, yaitu: (i) tanggul pantai/laut dengan nama proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD); (ii) Jakarta Sewerage System yang masih dalam proses konstruksi; serta (iii) 7 ruas jalan tol, yang mana 4 diantaranya sedang proses konstruksi dan 3 lainnya masih tahap persiapan (proses pembebasan lahan), (Kementerian PUPR).

Lapangan Usaha Jasa Keuangan

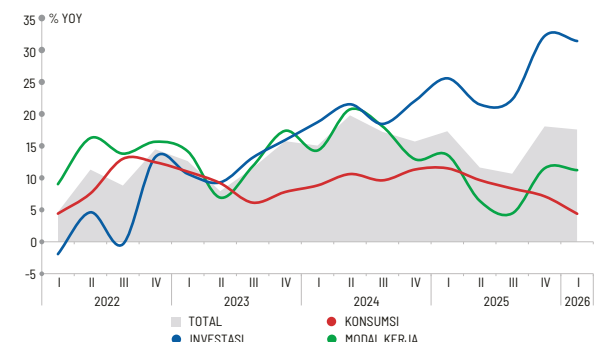
Pada triwulan I 2026, LU Jasa Keuangan memberikan andil sebesar 0,41% terhadap pertumbuhan PDRB pada triwulan laporan. LU Jasa Keuangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,68% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,78% (yoy). (Grafik 2.32). Melambatnya pertumbuhan antara lain tecermin dari nilai penyaluran kredit total pada triwulan I 2026 yang masih tumbuh kuat sebesar 17,67% (yoy), walaupun sedikit melambat jika dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18,16% (yoy) (Grafik 2.33). Lebih lanjut, jika dilihat dari jenis penggunaannya, perlambatan kredit terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja penyaluran kredit konsumsi yang tumbuh sebesar 4,40% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (7,14%; yoy) (Grafik 2.34). Adapun secara sektoral, tetap positifnya kinerja penyaluran kredit terutama dipengaruhi peningkatan kredit ke sektor konstruksi dan industri pengolahan di triwulan I 2026 yang masing-masing tumbuh 113,73% (yoy) dan 11,81% (yoy) di triwulan laporan. (Grafik 2.35).



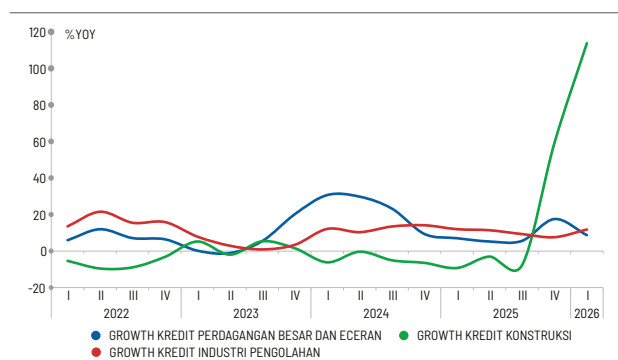
Grafik 2.32 Perkembangan PDRB LU Jasa Keuangan dan PDRB di Jakarta



Grafik 2.33 Perkembangan Penyaluran Kredit di Jakarta

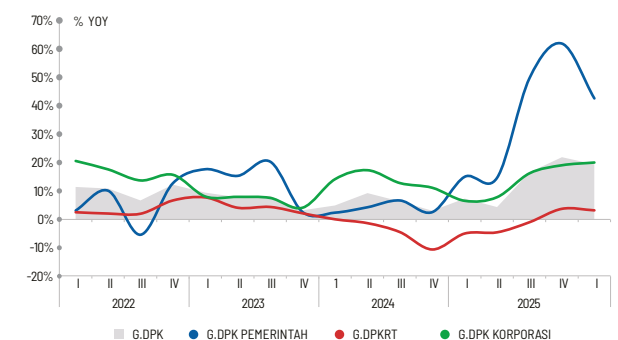


Grafik 2.34 Perkembangan Penyaluran Kredit Konsumsi, Investasi, dan Modal Kerja di Jakarta

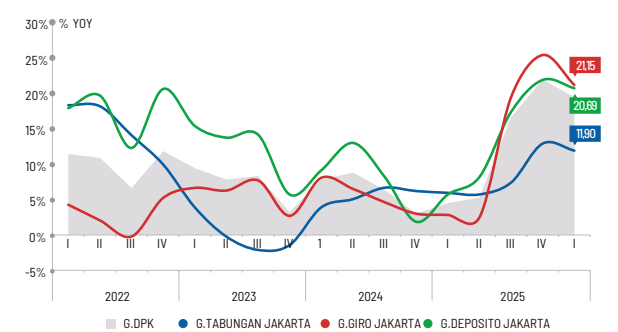


Grafik 2.35 Perkembangan Penyaluran Kredit Sektor Lapangan Usaha Utama DKI Jakarta

Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) di Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh kuat sebesar 19,44% (yoy), meski lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,90% (yoy). Hal ini terutama ditopang meningkatnya pertumbuhan DPK Pemerintah, DPK Korporasi, dan DPK Rumah Tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 42,61% (yoy), 20,06% (yoy), dan 3,19% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh sebesar 61,93% (yoy), 19,10% (yoy), dan 3,72% (yoy) (Grafik 2.36). Dari sisi kepemilikan rekening, meningkatnya perkembangan DPK di Jakarta ditopang oleh pertumbuhan pada rekening deposito, giro, maupun tabungan rumah tangga dan non-rumah tangga di Jakarta yang pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 21,15% (yoy); 20,69% (yoy); dan 11,90% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang masing-masing tumbuh 25,39% (yoy); 21,86% (yoy); dan 12,90% (yoy) (Grafik 2.37).



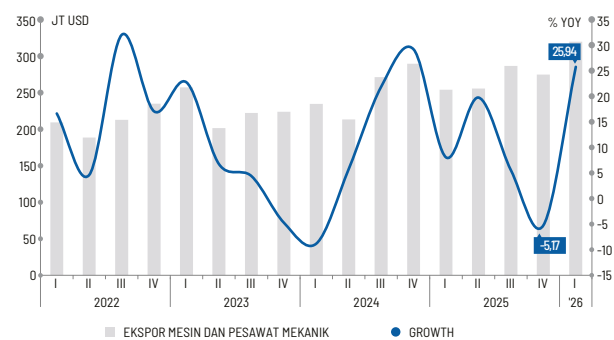
Grafik 2.36 Perkembangan DPK di Jakarta Berdasarkan Kepemilikan



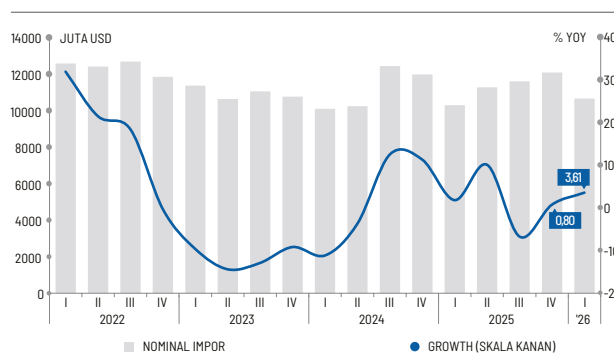
Grafik 2.37 Perkembangan DPK Berdasarkan Rekening di Jakarta

Lapangan Usaha Industri Pengolahan

Sebagai salah satu LU utama, LU Industri Pengolahan mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2026 walaupun tidak setinggi LU Utama lainnya. Dengan andil terhadap pertumbuhan triwulan I 2026 sebesar 0,28%, LU Industri Pengolahan tumbuh sebesar 2,62% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya (2,53%; yoy). Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya permintaan domestik akibat momentum HBKN Imlek-Rafi sehingga meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, permintaan dari mitra dagang juga tetap terjaga, yang tercermin dari meningkatnya kinerja ekspor mesin dan pesawat mekanik. Ekspor mesin dan pesawat mekanik tumbuh sebesar 25,94% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang berkontraksi sebesar 5,17% (yoy) (Grafik 2.38). Peningkatan juga diikuti oleh membaiknya impor bahan baku yang tumbuh positif sebesar 3,61% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari triwulan IV 2025 yang tumbuh 0,80% (yoy) (Grafik 2.39).



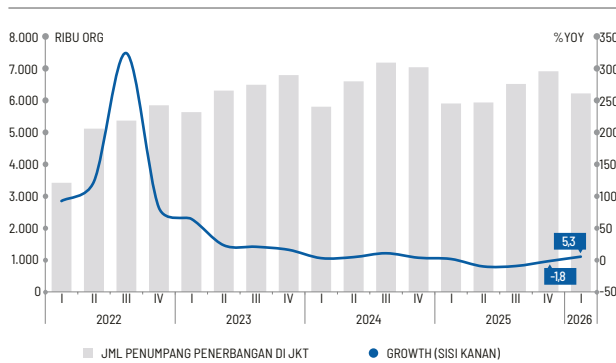
Grafik 2.38 Pertumbuhan ekspor komoditas industri DKI Jakarta



Grafik 2.39 Perkembangan Impor Bahan Baku DKI Jakarta

Lapangan Usaha Jasa Perusahaan dan Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan (Transgud)

LU Jasa Perusahaan, dan LU Transgud dengan andil masing-masing sebesar 0,49%, dan 0,35%, pada triwulan I 2026 mencatatkan pertumbuhan masing-masing sebesar 5,71% (yoy), dan 8,31% (yoy). Pada LU Jasa Perusahaan, laju pertumbuhan tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (8,11%; yoy), sedangkan pertumbuhan LU Transgud tercatat meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (7,87%; yoy). Pertumbuhan LU Jasa Perusahaan yang tertahan sejalan dengan minimnya hari kerja akibat



Grafik 2.40 Perkembangan Penumpang Penerbangan di Jakarta

maraknya hari libur nasional dan cuti bersama pada periode HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, dan Nyepi. Di sisi lain, momentum HBKN tersebut mendorong peningkatan kinerja LU Transgud sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat.

B. TRACKING PERTUMBUHAN EKONOMI TRIWULAN II 2026

Akselerasi perekonomian Jakarta diperkirakan akan tertahan pada triwulan II 2026. Dari sisi pengeluaran, konsumsi RT diperkirakan termoderasi pasca momentum rangkaian HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, dan Nyepi, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan akan terakselerasi seiring peningkatan belanja APBD serta berlanjutnya program-program prioritas pemerintah. Dari sisi Lapangan Usaha, LU Perdagangan, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Akomodasi dan Makan Minum diperkirakan akan termoderasi di tengah perbaikan kinerja LU Konstruksi dan LU Infokom.

Komponen Pengeluaran (Permintaan)

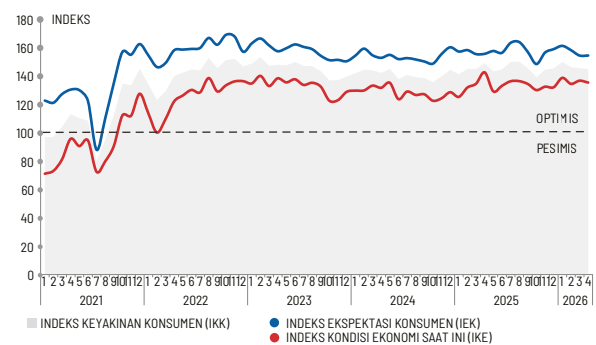
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tetap ditopang oleh konsumsi RT, investasi, dan konsumsi pemerintah. Permintaan domestik diperkirakan akan termoderasi seiring berakhirnya *long festive season* bertepatan momentum tahun baru, HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, dan Nyepi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan terakselerasi seiring percepatan implementasi program-program prioritas pemerintah. Lebih lanjut, investasi diperkirakan tumbuh terbatas seiring berlanjutnya proyek prioritas pemerintah dan swasta yang bersifat *multiyears*. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor diperkirakan tetap moderat sejalan volatilitas perekonomian global dan berlanjutnya konflik geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global.

Konsumsi Rumah Tangga

Kinerja konsumsi RT diperkirakan termoderasi pada triwulan II 2026. Kinerja konsumsi RT diperkirakan tumbuh positif meski tidak setinggi triwulan I 2026. Hal ini seiring dengan normalisasi permintaan setelah berakhirnya *long festive season*. Meski demikian, kinerja konsumsi RT tetap terjaga sejalan dengan banyaknya tanggal merah

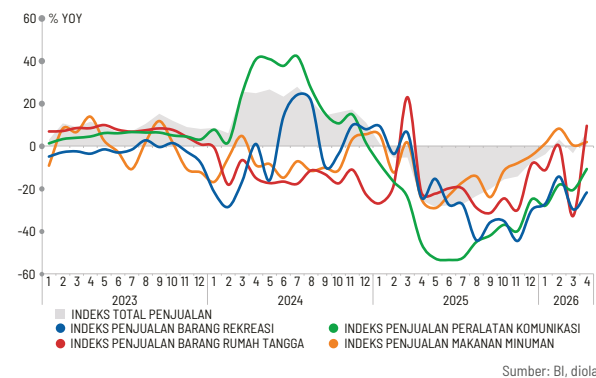
dan cuti bersama, momentum libur sekolah, serta penyaluran gaji ke-13 ASN pada bulan Juni.

Kinerja konsumsi RT pada triwulan II 2026 yang terjaga tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) pada bulan April yang tetap berada pada level optimis (Grafik 2.41). Indeks total penjualan eceran pada bulan April juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,55% (yoy), lebih tinggi dari Maret 2026 yang berkontraksi sebesar 3,28% (yoy) (Grafik 2.42). Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertahan oleh normalisasi permintaan masyarakat yang tecermin pada perlambatan impor barang konsumsi (Grafik 2.43).



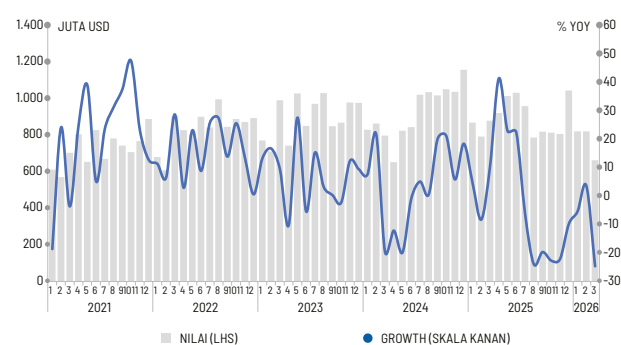
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.41 Perkembangan IKK, IEK, IKE Jakarta



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.42 Perkembangan Indeks Total Penjualan Eceran



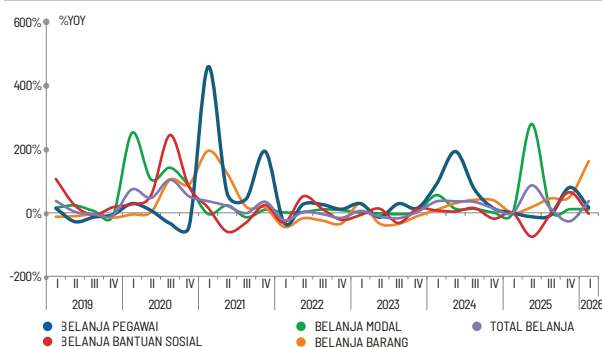
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.43 Perkembangan Impor Barang Konsumsi

Konsumsi Pemerintah

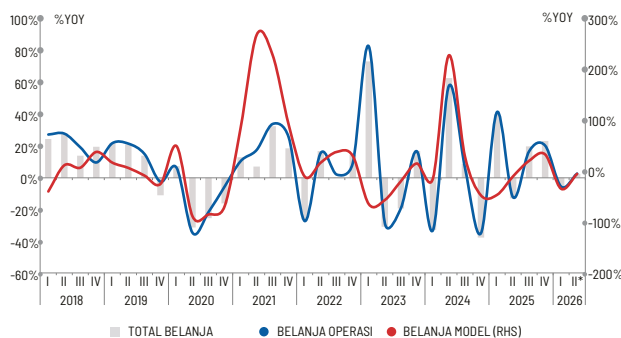
Konsumsi Pemerintah diperkirakan meningkat dari triwulan I 2026. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh belanja pegawai penyaluran gaji ke-13 ASN pada Juni 2026 serta berlanjutnya pelaksanaan program prioritas pemerintah pusat dan daerah.

Akselerasi realisasi belanja APBN di DKI Jakarta pada awal tahun seiring berakhirnya Inpres No.1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, serta upaya periodisasi belanja agar lebih merata hingga akhir tahun. Dari sisi APBD, eksekusi belanja pada awal tahun mulai berjalan dengan dorongan utama pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi), sejalan kebutuhan layanan publik dan kegiatan rutin Pemerintah



Sumber: Djpb DKI Jakarta diolah

Grafik 2.44 Realisasi Belanja APBN di Jakarta



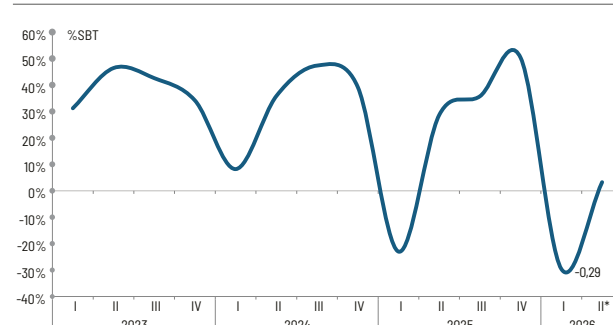
Sumber: Djpb DKI Jakarta diolah

Grafik 2.45 Realisasi APBD DKI Jakarta

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

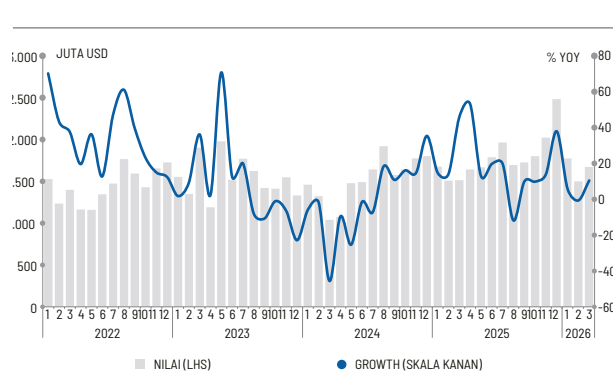
Kinerja PMTB pada triwulan II 2026 diperkirakan tumbuh kuat. Perkiraan ini terutama didorong oleh berlanjutnya investasi untuk proyek-proyek strategis Pemerintah dan swasta yang bersifat multitalun seperti MRT, LRT, TOD, serta akselerasi penyelesaian berbagai proyek multitalun. Kondisi tersebut tecermin dari pertumbuhan survei kegiatan dunia usaha (SKDU) yang diperkirakan menunjukkan kinerja positif pada triwulan II 2026 (Grafik 2.46). Prakiraan ini selanjutnya juga didukung oleh peningkatan nilai impor barang modal menjelang triwulan II 2026 yang tumbuh 10,42% (yoy), berbalik arah dari bulan sebelumnya yang berkontraksi 0,69% (yoy) (Grafik 2.47). Kredit investasi pada Maret 2026 juga berada pada tren yang membaik dengan pertumbuhan mencapai 31,57% (yoy), lebih

tinggi dari bulan sebelumnya yang tumbuh 31,34% (yoy). Meningkatnya PMTB juga didukung oleh berlanjutnya berbagai proyek strategis swasta yang juga sedang berlangsung di Jakarta yaitu Thamrin Nine - Autograph Tower 1 (Waldorf Astoria) & Luminary Tower 2 (Pan Pacific, Park Royal) dan Leparc senilai USD326,96 juta, New Priok Container Terminal (NPTC) 2 & 3 (Phase 1B) senilai USD257,3 juta, Benhil Central - Hotel & Serviced Apartment senilai USD115,38 juta, Mandiri IT Tower - Bumi Slipi Jakarta Barat senilai USD57,42 juta, jalan Kamal-Teluk Naga-Rajeg Toll Road Development: SS Kosambi-SS Teluk Naga-SS Tanjung Pasir (Section 2) dan Kamal (JC Sedyatmo-SS Kosambi (Section 1) senilai USD109,87 juta serta berbagai proyek *green investment* seperti *waste management*, infrastruktur EV, dan *green commercial/industrial zone*.



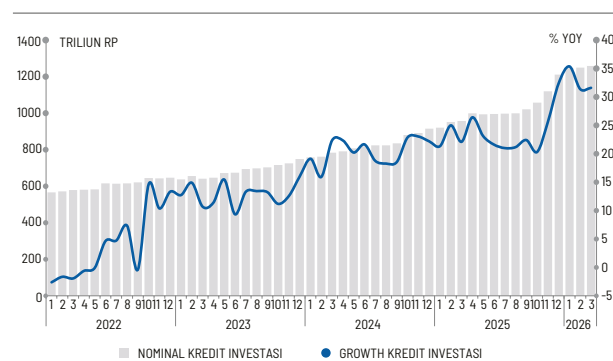
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.46 Perkembangan SKDU



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.47 Nilai Impor Barang Modal

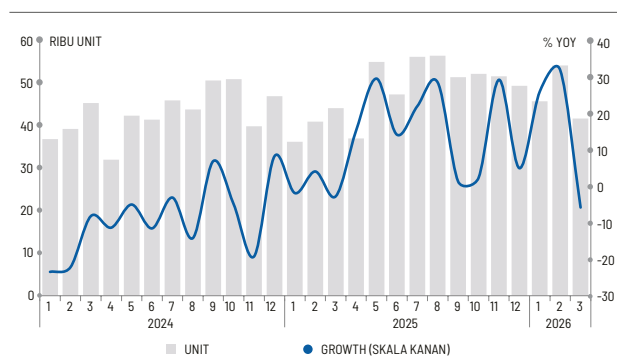


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.48 Perkembangan Kredit Investasi

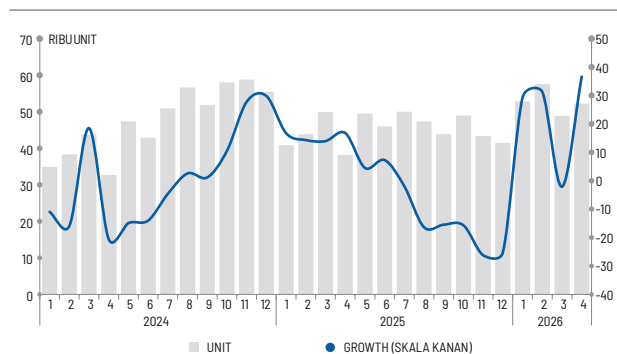
Ekspor

Kinerja ekspor pada triwulan I 2026 diprakirakan tumbuh kuat meski tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekspor tetap kuat, namun berpotensi tertahan seiring tekanan konflik geopolitik yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Perlambatan ekspor salah satunya terjadi pada ekspor mobil jenis *completely built up* (CBU) maupun *completely knocked down* (CKD) yang berkontraksi sebesar 32,28% (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (Grafik 2.49). Meski demikian, perlambatan ekspor yang lebih dalam tertahan dengan meningkatnya kinerja ekspor sepeda motor pada April 2026 yang tumbuh 36,77% (yoy), lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang berkontraksi 2,06% (yoy) (Grafik 2.50).



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.49 Ekspor Mobil CBU dan CKD

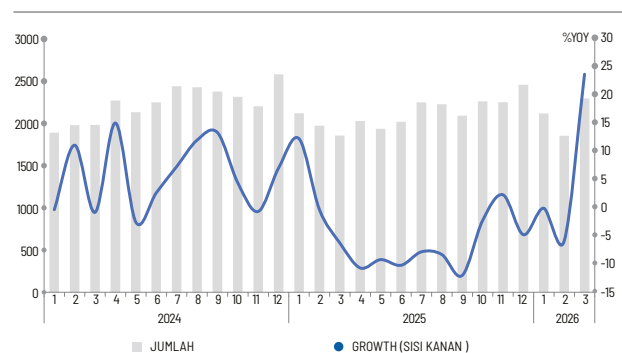


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.50 Ekspor Motor

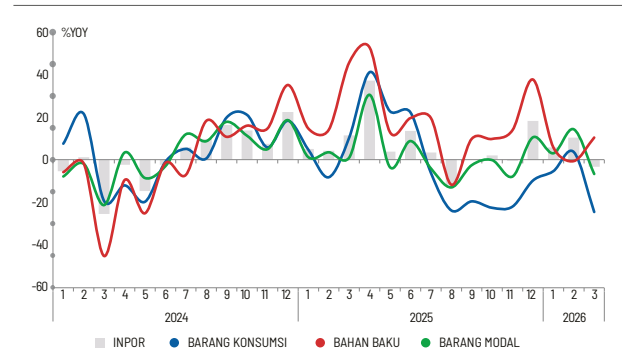
Impor

Kinerja impor pada triwulan I 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi. Meningkatnya kinerja impor terutama didorong oleh prospek tingginya impor jasa dan masuknya barang impor setelah pergeseran negara tujuan eksportir besar akibat perang dagang. Tren peningkatan impor jasa tecermin dari perkembangan jumlah penumpang penerbangan dari Jakarta yang tumbuh 23,54% (yoy) pada Maret 2026, lebih tinggi dari bulan sebelumnya (Grafik 2.51). Berdasarkan komponen, impor barang konsumsi dan bahan baku mengalami perlambatan, sedangkan impor barang modal tetap tumbuh positif sejalan dengan perkiraan meningkatnya investasi dan produksi industri (Grafik 2.52).



Sumber: Angkasa Pura, diolah

Grafik 2.51 Perkembangan Penumpang Penerbangan dari Jakarta

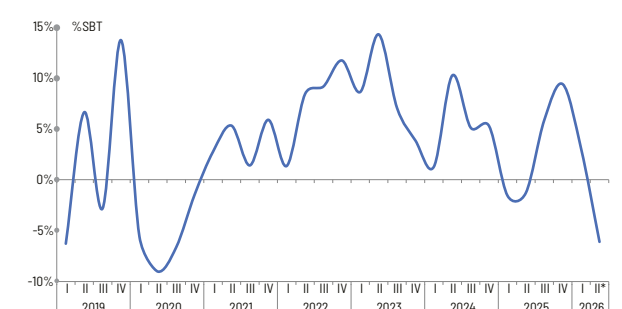


Sumber: BI, diolah

Grafik 2.52 Perkembangan Impor Jakarta dan Komponennya

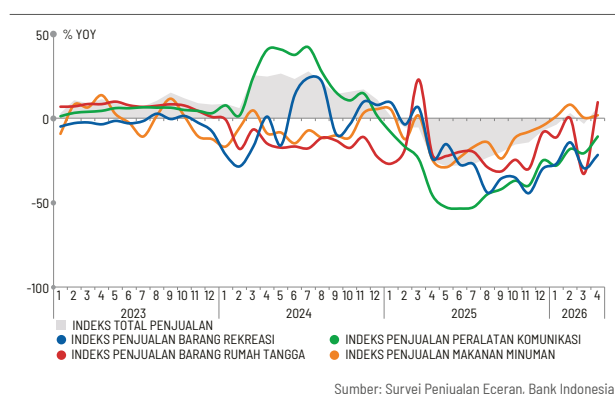
Komponen Lapangan Usaha (Penawaran)

Pada triwulan II 2026, **LU Perdagangan** diprakirakan akan tumbuh kuat, walaupun tidak setinggi periode sebelumnya seiring normalisasi setelah momentum HBKN Ramadan-Idulfitri, Imlek, dan Nyepi. Hal ini tecermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Perdagangan yang menunjukkan penurunan dengan nilai -6,09% SBT, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (3,05% SBT) (Grafik 2.53). Kendati demikian, perlambatan lebih lanjut tertahan oleh peningkatan kinerja penjualan eceran yang tecermin dari indeks penjualan eceran pada bulan April 2026 yang tumbuh 6,55% (yoy) meningkat dari bulan sebelumnya (-3,28%; yoy). Masih kuatnya aktivitas perdagangan, juga terindikasi dari penjualan mobil pada April 2026 yang meningkat dengan pertumbuhan 55,02% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (-13,82%; yoy).

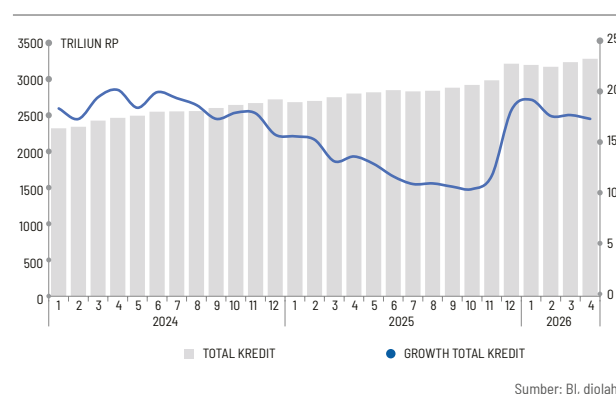


Sumber: Survei Bank Indonesia, diolah

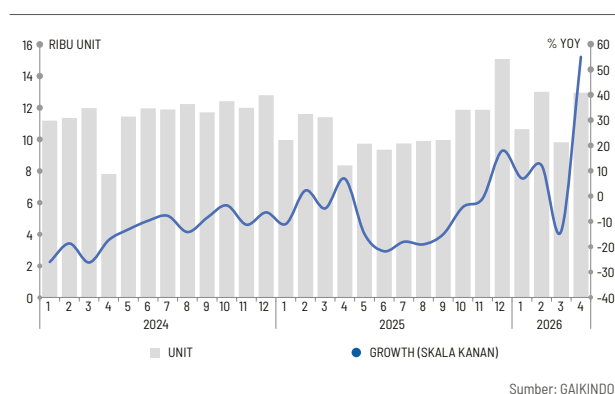
Grafik 2.53 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) DKI Jakarta (Triwulan II 2026)



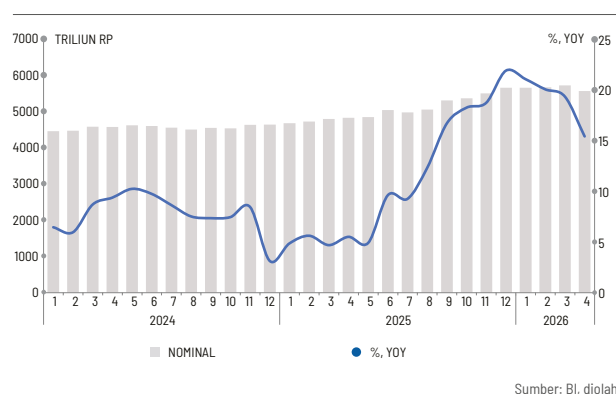
Grafik 2.54 Perkembangan Indeks Penjualan Eceran DKI Jakarta (Triwulan II 2026)



Grafik 2.56 Perkembangan Penyaluran Kredit Jakarta (Triwulan II 2026)

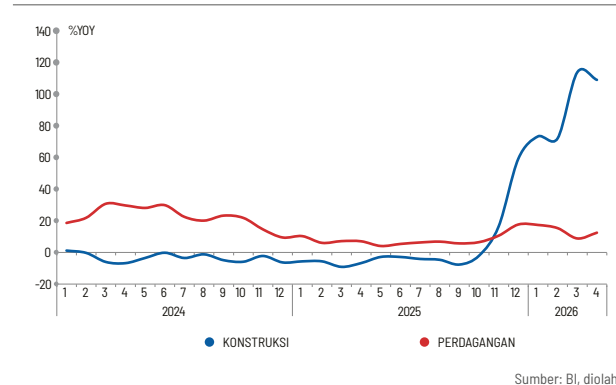


Grafik 2.55 Perkembangan Penjualan Mobil Jakarta (Triwulan II 2026)



Grafik 2.57 Perkembangan DPK di Jakarta (Triwulan II 2026)

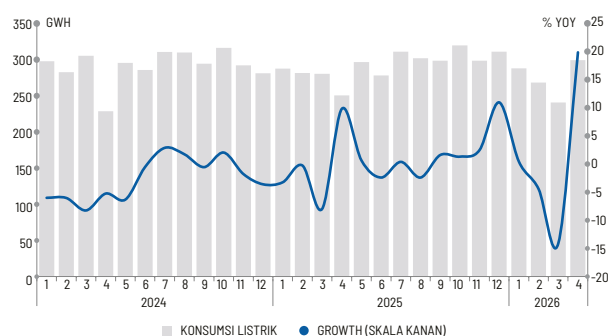
Selanjutnya, **LU Jasa Keuangan** pada triwulan II 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan yang kuat walaupun lebih lambat dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh tingginya penyaluran kredit DKI Jakarta pada April 2026 dengan pertumbuhan sebesar 17,30% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya (17,67%; yoy). Selain itu, pertumbuhan kredit untuk beberapa LU Utama mencatatkan peningkatan/pertumbuhan yang kuat, diantaranya kredit perdagangan dan konstruksi yang pada April 2026 tumbuh masing-masing sebesar 108,92% (yoy) dan 12,37% (yoy). Kredit konstruksi tetap tumbuh tinggi walaupun sedikit melambat dari bulan sebelumnya (113,73%; yoy). Di sisi lain, kredit perdagangan meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (8,72%; yoy). Sementara dari sisi DPK perbankan menunjukkan perlambatan kinerja, pertumbuhan DPK pada April 2026 tercatat sebesar 15,40% (yoy), sedikit melambat dari bulan sebelumnya (19,32%; yoy). Dari sisi kepemilikan rekening, pertumbuhan DPK yang tetap kuat terutama ditopang oleh rekening Korporasi. Pertumbuhan DPK Korporasi per April 2026 tumbuh sebesar 20,06% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya (19,10%; yoy). Pertumbuhan DPK yang kuat ini mengindikasikan perbaikan likuiditas perbankan yang dapat membantu aktivitas jasa keuangan.



Grafik 2.58 Perkembangan Penyaluran Kredit LU Utama Jakarta (Triwulan II 2026)

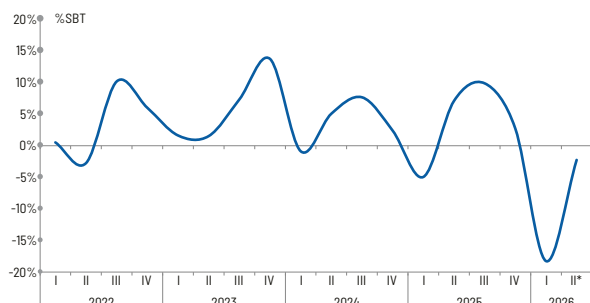
LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi diperkirakan juga mengalami peningkatan kinerja pada triwulan II 2026. Kuatnya kinerja industri pengolahan diperkirakan didorong oleh tetap tingginya permintaan domestik dengan adanya HBKN Idul Adha serta banyaknya libur nasional dan periode libur sekolah. Selain itu, permintaan mitra dagang diperkirakan tetap solid, terutama untuk kendaraan dan bagiannya ke negara-negara non-tradisional seiring upaya diversifikasi ekspor yang semakin meluas. Prakiraan tersebut tercermin dari peningkatan konsumsi listrik untuk sektor industri yang pada April

2026 tumbuh 19,44% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya (-14,22%; yoy) (Grafik 2.59). Selain itu, peningkatan juga tercermin dari prakiraan SKDU sektor industri pengolahan yang meningkat dengan nilai 5,29% SBT dibandingkan bulan sebelumnya (2,85% SBT) (Grafik 2.60). Selanjutnya, peningkatan LU Konstruksi tercermin dari pertumbuhan kredit konstruksi yang cukup signifikan pada April 2026, dengan jumlah Rp334,80 triliun dan tumbuh sebesar 108,92% (yoy), sedikit melambat dari triwulan sebelumnya (113,73%; yoy) (Grafik 2.61). Selain itu, prakiraan peningkatan kinerja sektor konstruksi juga didukung oleh meningkatnya SKDU sektor konstruksi untuk triwulan II 2026 dengan nilai sebesar 7,01% SBT, meningkat dari triwulan sebelumnya (-4,67%; yoy) (Grafik 2.62).



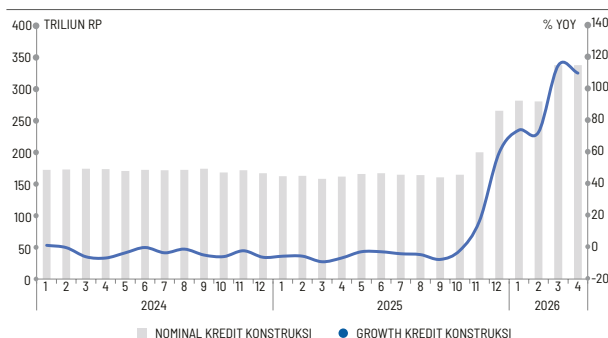
Sumber: BI, diolah

Grafik 2.59 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri DKI Jakarta (Triwulan II 2026)



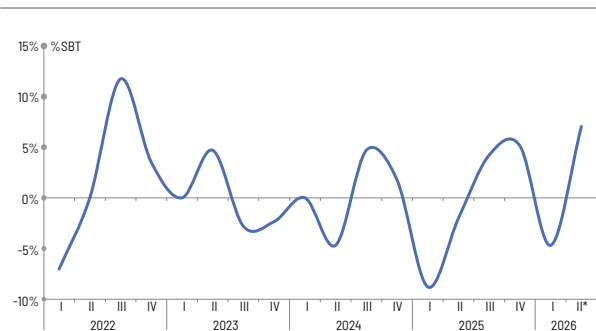
GAIKINDO, diolah

Grafik 2.60 Prakiraan SKDU LU Industri Pengolahan DKI Jakarta (Triwulan II 2026)



Sumber: BI, diolah

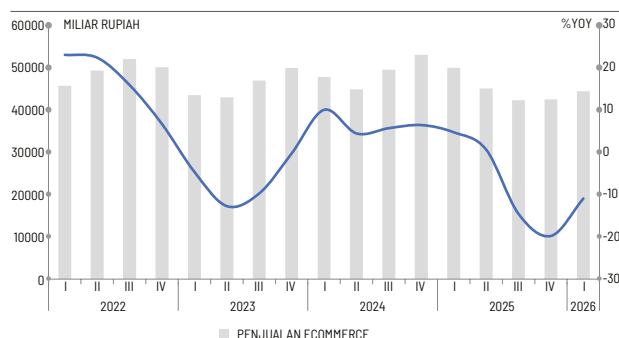
Grafik 2.61 Perkembangan Kredit LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan II 2026)



GAIKINDO, diolah

Grafik 2.62 Prakiraan SKDU LU Konstruksi DKI Jakarta (Triwulan II 2026)

Selanjutnya, **LU Infokom** diperkirakan akan mengalami kinerja yang kuat pada triwulan II 2026 seiring membaiknya aktivitas transaksi transportasi *online* sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan aktivitas *e-commerce* pada periode HBKN Iduladha, cuti bersama dan periode libur sekolah. Nilai pertumbuhan indeks penjualan *e-commerce* di Jakarta membaik dari yang sebelumnya terkontraksi sedalam 19,83% (yoy), menjadi terkontraksi 11,04% (yoy) (Grafik 2.63).



Sumber: BI, diolah

Grafik 2.63 Perkembangan Indeks Penjualan E-Commerce di Jakarta (Triwulan II 2026)





BOKS 1

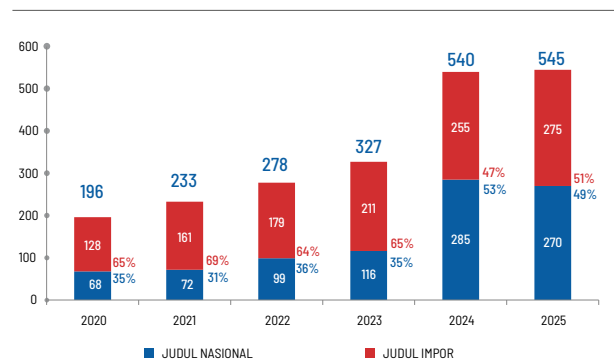
Mewujudkan Jakarta Kota Sinema: Industri Perfilman sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Ekonomi DKI Jakarta

Di tengah transformasi ekonomi Jakarta menuju kota jasa, kreatif, dan berdaya saing global, industri perfilman semakin layak dipandang bukan hanya sebagai sektor hiburan, tetapi juga sebagai mesin ekonomi baru. Film menggabungkan kreativitas, teknologi, talenta, *intellectual property*, jasa pendukung, pariwisata, digitalisasi, hingga UMKM dalam satu rantai nilai yang luas. Karena itu, agenda “Jakarta Kota Sinema 2027” menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi DKI Jakarta sebagai pusat industri perfilman nasional sekaligus simpul ekonomi kreatif regional.

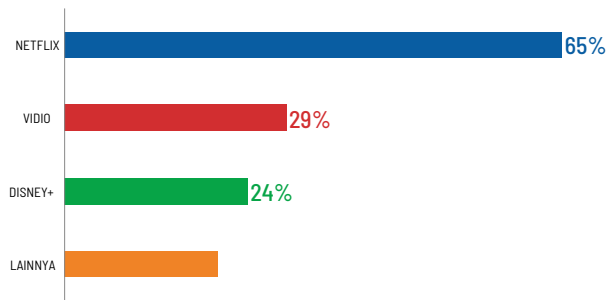
Secara nasional, industri film Indonesia menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan data Lembaga Sensor Film (LSF), pada 2025 terdapat 545 judul film layar lebar, terdiri dari 270 judul film nasional dan 275 judul film impor. Pangsa film nasional meningkat pesat dari 35% pada 2020 menjadi 49% pada 2025, hampir setara dengan film impor. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kapasitas produksi film nasional semakin kuat, baik dari sisi jumlah produksi, daya saing konten, maupun penerimaan pasar.

Perubahan lanskap konsumsi juga memperluas ruang tumbuh industri perfilman. Konten film tidak lagi bergantung sepenuhnya pada bioskop, tetapi semakin berkembang melalui platform digital atau *over-the-top* (OTT). Pada 2025, terdapat 1.474 judul konten pada kanal OTT/

JTI, terdiri dari 1.321 judul nasional dan 153 judul impor. Pergeseran ini diperkuat oleh penetrasi internet Indonesia yang pada 2025 diperkirakan mencapai 80,66% atau sekitar 229 juta jiwa menurut APJII. Survei Jakpat 2024 juga menunjukkan kuatnya konsumsi OTT di Indonesia, dengan Netflix memimpin pangsa pasar sebesar 65%, diikuti Vidio 29% dan Disney+ 24%. Bahkan, pada Januari 2026, Netflix menyampaikan bahwa lebih dari 90% penggunaanya di Indonesia menonton konten lokal dan 35 judul Indonesia telah masuk daftar Global Top 10.



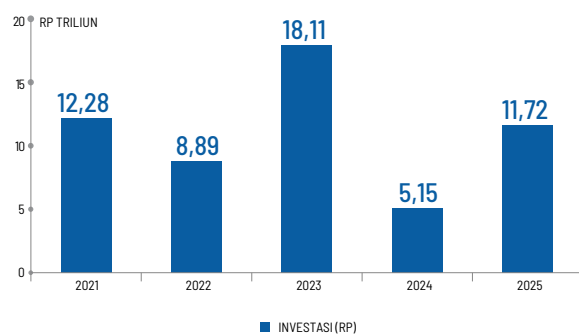
Grafik B1.1 Tren Jumlah Film Layar Lebar Nasional 2020-2025



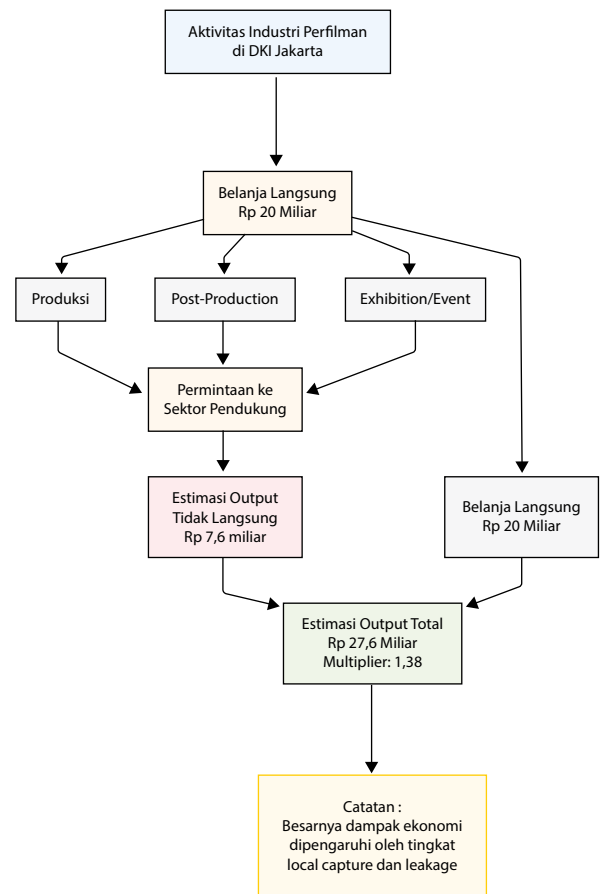
Grafik B1.2 Pangsa Platform OTT di Indonesia

Bagi DKI Jakarta, perkembangan tersebut membuka peluang besar. Jakarta memiliki konsentrasi rumah produksi, talenta kreatif, jaringan bisnis, media, bioskop, platform distribusi, serta jasa pendukung yang relatif lebih lengkap dibandingkan daerah lain. Berdasarkan kajian Disparekraf DKI Jakarta bersama LPEM FEB UI, subsektor Film, Animasi, dan Video mencatat pertumbuhan 7,68% pada periode 2021–2024. Data DPMPTSP DKI Jakarta juga menunjukkan bahwa subsektor ini memiliki basis aktivitas nyata, baik dari sisi pelaku usaha, tenaga kerja, maupun investasi. Meski datanya fluktuatif, dinamika tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem film Jakarta sudah terbentuk dan berpotensi diperkuat lebih lanjut.

Dampak ekonomi industri film juga dapat dilihat melalui *multiplier effect*. Kajian PwC Indonesia dan LPEM FEB UI pada 2023 mencatat bahwa output multiplier subsektor Film, Animasi, dan Video mencapai sekitar 1,38. Artinya, setiap Rp1 belanja produksi film dapat menghasilkan dampak output yang lebih besar melalui keterkaitan dengan sektor-sektor pendukung. Sebagai ilustrasi, apabila satu produksi film di Jakarta membelanjakan Rp20 miliar untuk produksi, pasca-produksi, dan aktivitas ekshibisi, maka potensi output ekonomi yang terbentuk dapat mencapai sekitar Rp27,6 miliar. Dalam skala yang lebih besar, apabila 270 film domestik pada 2025 diasumsikan memiliki biaya produksi Rp8–15 miliar per film, maka total belanja langsung dapat mencapai sekitar Rp2,16–4,05 triliun. Dengan multiplier 1,38, potensi output ekonomi yang terbentuk diperkirakan berada pada kisaran Rp2,98–5,59 triliun.



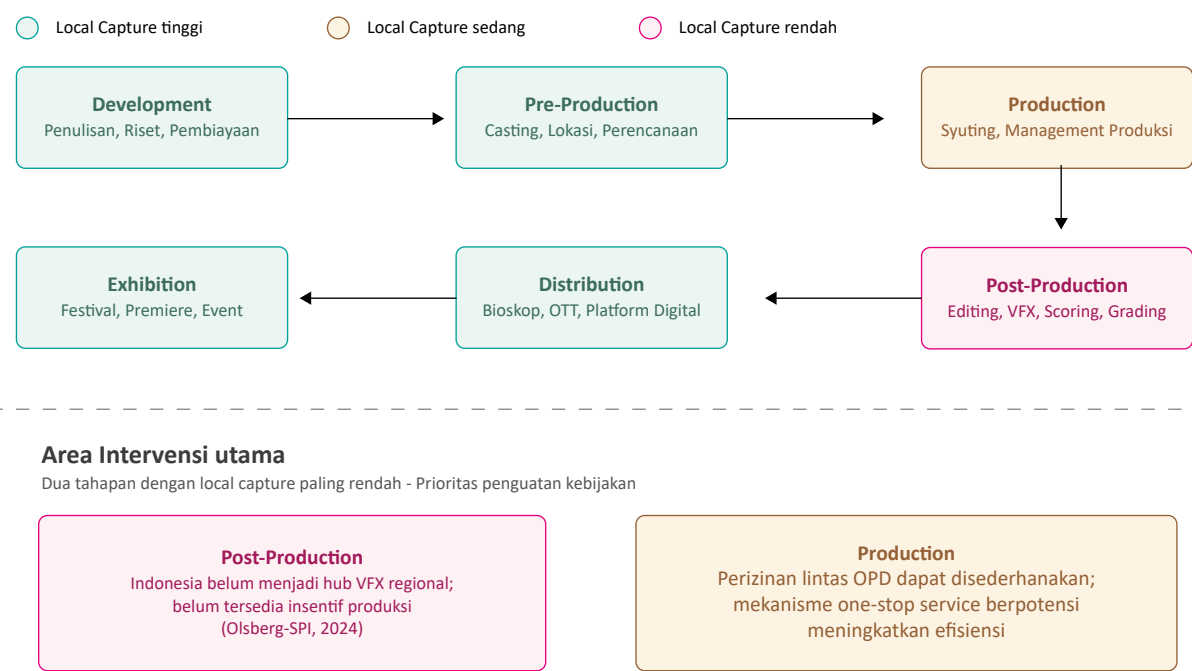
Grafik B1.3 Perkembangan Investasi Subsektor Film, Animasi, dan Video di DKI Jakarta



Gambar B1.1 Ilustrasi Multiplier Effect dari Aktivitas Industri Perfilman

Namun, besarnya dampak tersebut sangat bergantung pada seberapa besar belanja produksi benar-benar tertangkap oleh perekonomian Jakarta. Dalam literatur dampak ekonomi lokal, konsep ini dikenal sebagai *local capture*. Semakin banyak produksi film menggunakan vendor, kru, fasilitas, lokasi, studio, layanan pasca-produksi, akomodasi, transportasi, catering, dan UMKM berbasis Jakarta, semakin besar nilai ekonomi yang tinggal di daerah. Sebaliknya, apabila sebagian besar kebutuhan produksi dipenuhi dari luar Jakarta, maka terjadi *leakage* atau kebocoran nilai ekonomi ke luar wilayah. Dalam rantai nilai industri film, Jakarta memiliki keunggulan pada tahap pengembangan, pra-produksi, distribusi, dan ekshibisi karena didukung konsentrasi talenta, jaringan bisnis, dan infrastruktur bioskop. Namun, pada tahap pasca-produksi, terutama layanan VFX, potensi kebocoran masih cukup besar karena Indonesia belum menjadi pusat layanan regional seperti Singapura, Thailand, atau Malaysia.

Keberhasilan pengembangan industri film juga ditentukan oleh dukungan kebijakan. Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan Singapura telah membangun *film commission* serta berbagai skema insentif untuk menarik produksi dan memperkuat ekosistem industri.



Gambar B1.2 Value Chain Industri Film di DKI Jakarta

Dibandingkan negara-negara tersebut, Jakarta masih memiliki ruang untuk meningkatkan daya saing kebijakannya. Karena itu, terdapat tiga langkah strategis yang dapat ditempuh DKI Jakarta. Pertama, menyederhanakan perizinan produksi melalui mekanisme *one-stop service* agar proses syuting lebih cepat dan terkoordinasi. Kedua, membentuk Jakarta Film Commission sekaligus memperkuat basis data industri untuk mendukung perencanaan kebijakan dan akses pembiayaan. Ketiga, mengembangkan insentif berbasis belanja lokal (*local spend*), misalnya melalui kemudahan penggunaan lokasi, dukungan promosi, atau insentif nonfiskal lain yang mendorong penggunaan vendor dan tenaga kerja lokal.

Pada akhirnya, industri perfilman dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi Jakarta apabila dikelola sebagai ekosistem ekonomi. Dengan perizinan yang lebih sederhana, kelembagaan yang kuat, data yang memadai, dan insentif yang tepat sasaran, Jakarta berpeluang memperkuat posisinya sebagai pusat perfilman nasional sekaligus mendukung agenda Jakarta Kota Sinema 2027 dan visi Jakarta sebagai kota global yang kompetitif.





Bab 3

Inflasi

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Inflasi triwulan I terutama dipengaruhi oleh adanya faktor *base effect* kebijakan diskon tarif listrik tahun 2025 yang bersifat temporer. Dengan mengecualikan komponen tarif listrik, laju inflasi tahunan Jakarta tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi. Komoditas lain yang turut menyumbang inflasi pada triwulan I 2026 di antaranya emas perhiasan, daging ayam ras, beras, di tengah tingginya permintaan pada periode HBKN yang berdekatan, Imlek dan Ramadan-Idulfitri. Memasuki triwulan II 2026, inflasi Jakarta pada April 2026 melandai menjadi 2,12% (yoy). Tekanan inflasi terutama bersumber dari penyesuaian harga komoditas yang diatur Pemerintah imbas kenaikan harga minyak dan energi global. Ke depan, inflasi IHK Jakarta diperkirakan tetap terkendali dalam rentang sasaran pada tahun 2026 seiring dengan sinergi dan kolaborasi pengendalian inflasi dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).



INFLASI IHK DKI JAKARTA (yoy)

2,63%

Triwulan IV 2025



3,37%

Triwulan I 2026



RATA-RATA INFLASI IHK (yoy)

2,10%

Rerata inflasi Triwulan I 2024-2026, yoy



INFLASI IHK DKI JAKARTA (ytd)

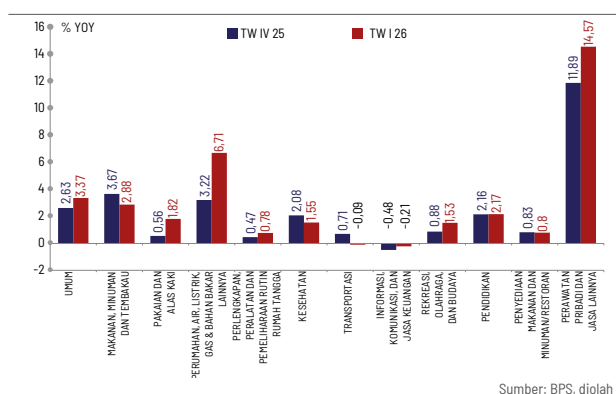
0,90%

Mare 2026, ytd

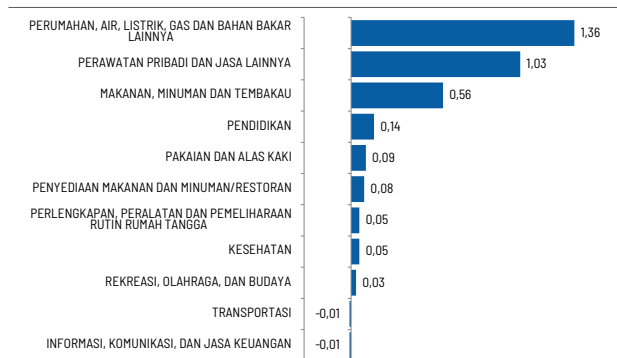
A. KINERJA INFLASI PROVINSI TRIWULAN I 2026

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Jakarta meningkat pada triwulan I 2026. Inflasi IHK Jakarta tercatat sebesar 3,37% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan IV 2025 yang sebesar 2,63% (yoy). Inflasi triwulan I 2026 masih berada dalam rentang sasaran inflasi dan terutama dipengaruhi oleh adanya faktor base effect kebijakan diskon tarif listrik tahun 2025 yang bersifat temporer. Dengan mengecualikan komponen tarif listrik, laju inflasi tahunan Jakarta tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi. Dampak base effect ini bersifat temporer dan diperkirakan kembali normal pada triwulan berikutnya. Upaya pengendalian inflasi terus diperkuat guna menjaga stabilitas harga pada periode HBKN Imlek dan Ramadan-Idulfitri, sekaligus mengantisipasi potensi rambatan kenaikan harga komoditas global terhadap tekanan harga domestik. Dalam hal ini, TPID Jakarta memperkuat sinergi melalui strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—dalam kerangka Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Inflasi yang lebih tinggi pada triwulan I 2026 terutama dipengaruhi kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran, kecuali kelompok Transportasi dan kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (Grafik 3.1). Berdasarkan kontribusinya, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya memberikan sumbangan inflasi yang paling besar, disusul oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (Grafik 3.2). Berdasarkan komoditasnya, inflasi terutama didorong oleh tarif listrik, emas perhiasan, daging ayam ras, beras, dan tarif kendaraan roda 2 online. Namun demikian, tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh penurunan harga bensin, cabai merah, telepon seluler, cabai rawit, dan bawang merah.



Grafik 3.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

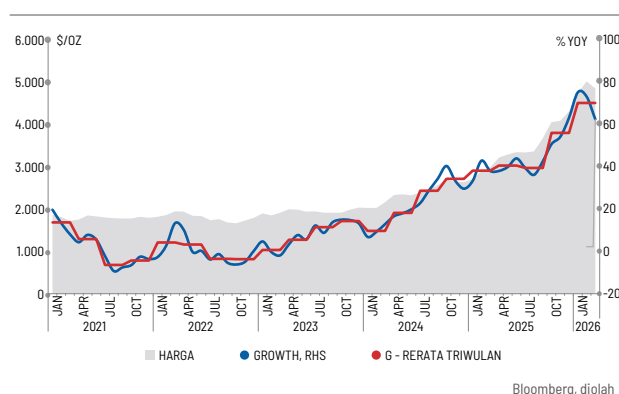


Grafik 3.2 Sumbangan Inflasi Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

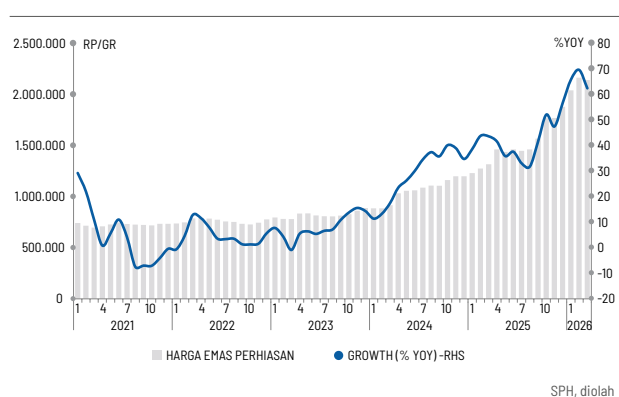
Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga menjadi kontributor utama inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2026. Kelompok ini mencatat andil tahunan sebesar 1,36% dengan inflasi yang meningkat dari 3,22% (yoy) pada akhir tahun 2025 menjadi 6,71% (yoy). Tekanan inflasi dipengaruhi oleh faktor *low base effect* dari inflasi periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat rendah seiring dengan implementasi diskon tarif listrik sebesar 50%. Tekanan inflasi kelompok ini juga dipengaruhi oleh kenaikan harga sewa rumah dan kontrak rumah seiring dengan pola tahunan yang mengalami penyesuaian harga setiap triwulan I dan masing-masing berkontribusi 0,30% dan 0,01%. Kenaikan tarif tukang bukan mandor juga turut berkontribusi dengan andil sebesar 0,01%.

Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menjadi penyumbang terbesar kedua inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2026. Kelompok ini mencatat andil tahunan sebesar 1,03% dengan inflasi yang meningkat dari 11,89% (yoy) pada akhir tahun 2025 menjadi 14,57% (yoy). Tekanan inflasi juga dipengaruhi oleh kenaikan harga emas perhiasan yang mencatat inflasi 61,63% (yoy), meningkat dari 53,06% (yoy) pada akhir tahun 2025, dengan andil tahunan mencapai 0,92%.

Kenaikan tersebut sejalan dengan tren harga emas global yang terus meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik serta relatif tingginya permintaan masyarakat pada periode HBKN Ramadan dan Idulfitri. Rata-rata harga emas global pada triwulan I 2026 terpantau meningkat sebesar 70,20%, lebih tinggi dibandingkan kenaikan triwulan sebelumnya yang sebesar 56,07% (Grafik 3.3). Sementara itu, rata-rata harga emas perhiasan domestik mencapai Rp2.144.804 per gram atau meningkat 62,54% (yoy) (Grafik 3.4). Selain emas perhiasan, komoditas personal care, seperti parfum, sampo, deodoran, facial/peeling, sabun mandi, bedak, dan pasta gigi juga berkontribusi terhadap inflasi kelompok ini.



Grafik 3.3 Perkembangan Harga Emas Global



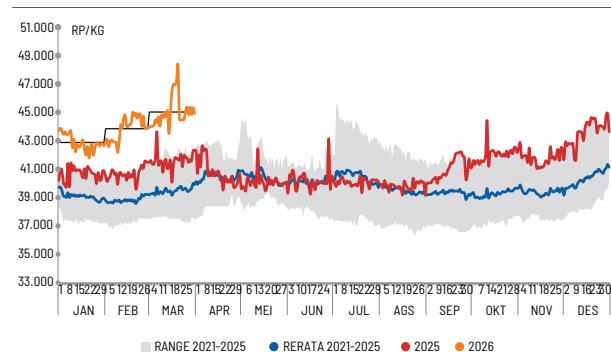
Grafik 3.4 Perkembangan Harga Emas Perhiasan Jakarta

Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut berkontribusi pada inflasi IHK Jakarta pada triwulan I 2026. Dengan andil tahunan sebesar 0,56%, kelompok ini mencatat inflasi 2,88% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,67% (yoy). Kontribusi inflasi terbesar berasal dari komoditas daging ayam ras dan beras dengan andil masing-masing sebesar 0,27% dan 0,07%, sementara penurunan harga pada hortikultura, yakni cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah menahan tekanan inflasi lebih lanjut.

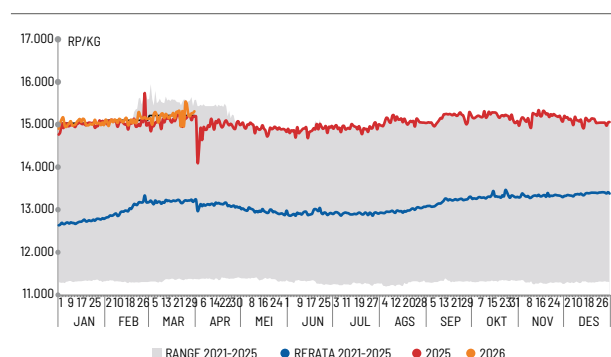
Kenaikan harga daging ayam ras menjadi salah satu sumber utama tekanan inflasi pada triwulan I 2026. Hasil pemantauan Informasi Pangan Jakarta (IPJ) menunjukkan rata-rata harga daging ayam ras sebesar Rp43.994/kg (Grafik 3.5). Secara tahunan, harga tersebut meningkat 7,18% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,96% (yoy), dipengaruhi oleh harga *live bird* di tingkat produsen dan masih tingginya biaya input produksi, khususnya jagung pakan ternak, di tengah tingginya permintaan pada periode HBKN yang berdekatan, yakni Imlek dan Ramadan-Idulfitri. Selain itu, berlanjutnya program pemerintah pada awal tahun 2026 juga mendorong ekspektasi terhadap permintaan komoditas ini.

Komoditas beras juga mengalami kenaikan harga, meskipun relatif terbatas dengan rata-rata harga beras pada triwulan I 2026 tercatat Rp15.131/kg (Grafik 3.6). Secara tahunan, kenaikan harga beras pada triwulan I 2026 sebesar 0,44% (yoy), lebih rendah dari kenaikan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,03% (yoy). Tingginya harga beras disebabkan oleh tingginya harga pembelian gabah yang konsisten berada di atas HAP (Rp6.500/kg) dengan rentang harga pembelian Rp7.000-7.200/kg, meskipun masa panen raya telah berlangsung di beberapa wilayah sentra pada akhir triwulan I 2026. Dari sisi pasokan, ketersediaan beras Jakarta tetap terjaga dengan rata-rata stok sebesar 183,6 ribu ton pada triwulan I 2026.

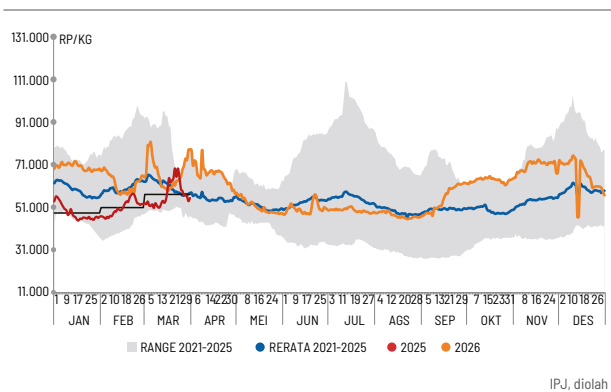
Di sisi lain, komoditas hortikultura yang meliputi cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah mengalami penurunan harga, seiring dengan berlangsungnya masa panen di wilayah sentra dengan hasil produksi yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data data Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga cabai merah dan cabai rawit masing-masing sebesar Rp67.005/kg dan Rp74.438/kg (Grafik 3.7-3.8). Secara tahunan, harga aneka cabai tersebut masing-masing turun sebesar 22% (yoy) dan 13% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, rata-rata harga bawang merah tercatat sebesar Rp53.332, atau secara tahunan turun 6% (yoy) (Grafik 3.9).



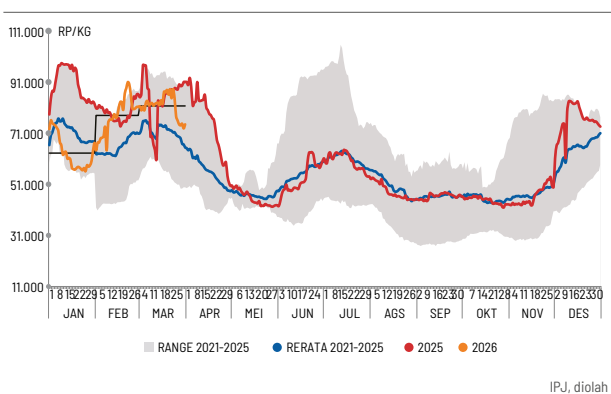
Grafik 3.5 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



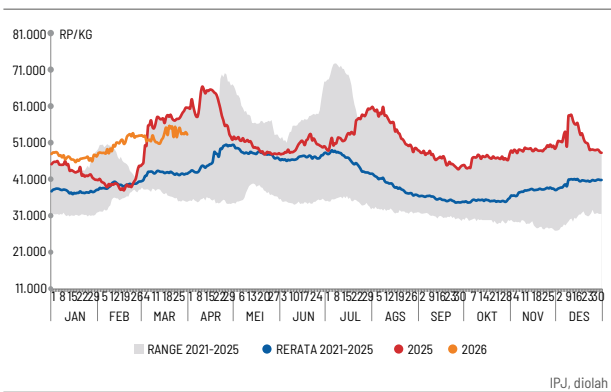
Grafik 3.6 Perkembangan Harga Beras



Grafik 3.7 Perkembangan Harga Cabai Merah



Grafik 3.8 Perkembangan Harga Cabai Rawit



Grafik 3.9 Perkembangan Harga Bawang Merah

Kelompok Pendidikan mencatatkan inflasi 2,17% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,16% (yoy), dengan sumbangan inflasi tahunan sebesar 0,14%. Tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan biaya pendidikan, terutama Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Dasar (SD), dan akademi/perguruan tinggi yang masing-masing memberikan andil tahunan sebesar 0,05%, 0,04%, dan 0,03%. Kenaikan ini sejalan dengan pola musiman seiring dengan penyesuaian harga setiap awal tahun.

Kelompok Pakaian dan Alas Kaki menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,09%. Inflasi kelompok ini meningkat dari 0,56% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi sebesar 1,82% (yoy) pada triwulan laporan. Inflasi yang lebih tinggi juga dipengaruhi tingginya konsumsi

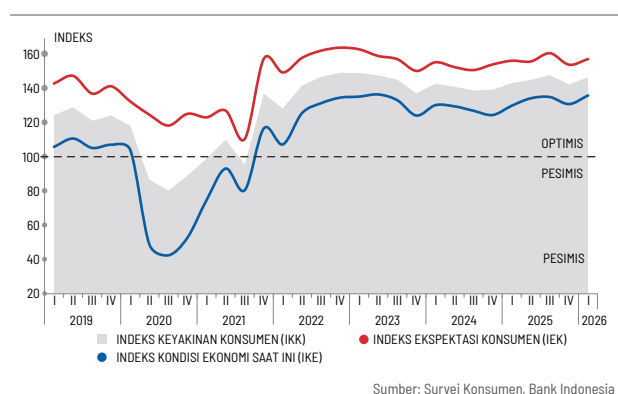
masyarakat seiring faktor musiman HBKN Ramadan dan Idulfitri. Tekanan bersumber dari kenaikan harga pakaian, di antaranya celana panjang jeans pria, celana pendek pria, baju muslim pria, celana dalam wanita, dan bra dengan andil masing-masing sebesar 0,01%.

Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mencatat andil 0,08% dengan inflasi 0,80% (yoy), sedikit melandai dari triwulan sebelumnya yang inflasi 0,83% (yoy). Tekanan inflasi terutama dipicu oleh kenaikan harga makanan siap saji, seperti soto, nasi dengan lauk, ketoprak, pempek, martabak, sop, dan makanan jepang yang masing-masing memberikan andil tahunan sekitar 0,01%.

Dengan andil tahunan sebesar 0,05%, **kelompok Kesehatan dan kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga** turut mencatatkan inflasi masing-masing sebesar 1,55% (yoy) dan 0,78% (yoy). Tekanan inflasi pada kelompok Kesehatan terutama dipicu oleh kenaikan tarif rumah sakit, obat dengan resep, obat flu, dan obat gosok, sementara inflasi kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga didorong oleh kenaikan upah asisten rumah tangga, servis AC, dan biaya sabun cair/cuci piring. Terakhir, **kelompok Rekreasi, Olahraga, dan Budaya** turut berkontribusi terhadap inflasi tahunan dengan andil 0,03% (yoy) dan inflasi 1,53% (yoy). Inflasi pada triwulan ini meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya dan dipicu oleh kenaikan biaya makanan hewan peliharaan, bioskop, dan tas sekolah yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01%.

Inflasi tahunan IHK Jakarta pada triwulan I 2026 lebih lanjut tertahan oleh deflasi pada **kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan serta kelompok Transportasi** yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,01%. Deflasi kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan pada triwulan ini sebesar 0,21% (yoy), tidak sedalam triwulan sebelumnya yang sebesar -0,48% (yoy) dan dipicu oleh penurunan harga telepon seluler dengan andil -0,03%. Sementara itu, kelompok Transportasi mengalami deflasi sebesar 0,09% (yoy), berbalik dari inflasi sebesar 0,71% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Deflasi dipicu oleh penurunan tarif kendaraan roda 2 online, kendaraan roda 4 online, serta angkutan antar kota yang masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,05%, 0,02%, dan 0,01%.

Apabila komponen tarif listrik tidak diperhitungkan, inflasi Jakarta pada triwulan I 2026 tetap terkendali di tengah periode permintaan yang tinggi di saat perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Imlek dan Idulfitri yang cukup berdekatan dengan momen Natal dan Tahun Baru pada triwulan sebelumnya. Kondisi ini turut mendukung optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta. Hal ini tecermin dari hasil Survei Konsumen (SK) pada triwulan I 2026 yang menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Indeks Kondisi Ekonomi (IKE) seluruhnya berada pada level optimis (berada di atas 100) sebagaimana Grafik 3.10.



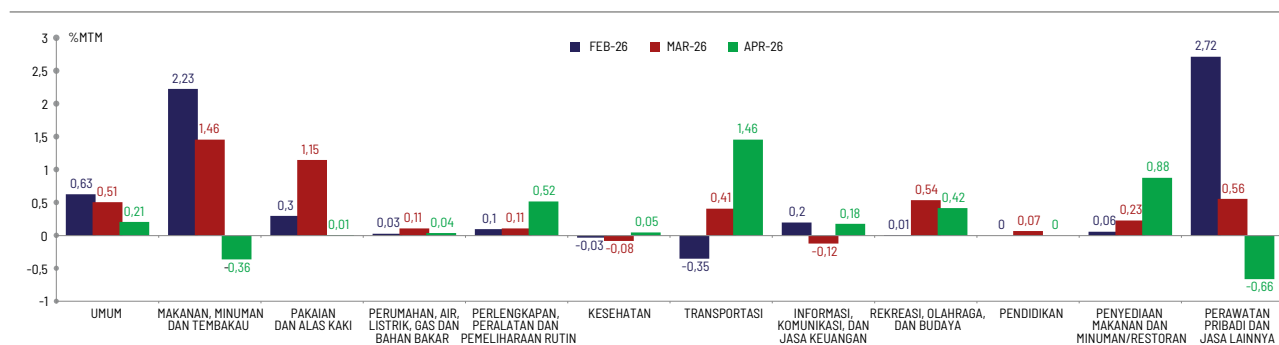
Grafik 3.10 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Ekspektasi Konsumen (IEK), dan Kondisi Ekonomi (IKE)

B. TRACKING INFLASI TRIWULAN II 2026

Memasuki triwulan II 2026, inflasi Jakarta tercatat lebih rendah seiring normalisasi permintaan pasca-periode HBKN, di tengah meningkatnya tekanan seiring dengan penyesuaian harga bahan bakar non subsidi. Hal ini merupakan imbas dari kenaikan harga minyak dan energi global seiring eskalasi perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran. IHK Jakarta pada April 2026 tercatat mengalami inflasi 0,21% (mtm), setelah mencatat inflasi 0,51% (mtm) pada Maret 2026. Kelompok Transportasi menjadi penyumbang utama inflasi seiring dengan penyesuaian fuel surcharge pada tarif angkutan udara pada awal April serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Selain itu, kenaikan harga ayam goreng akibat biaya bahan baku mendorong inflasi pada kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran. Di sisi lain, normalisasi permintaan bahan pangan di tengah pasokan yang terjaga serta penurunan harga emas perhiasan mendorong deflasi pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Grafik 3.11).

Kelompok **Transportasi** menjadi penyumbang utama inflasi Jakarta pada April 2026. Dengan andil inflasi bulanan sebesar 0,19%, kelompok ini mencatat inflasi sebesar 1,46%(mtm), meningkat signifikan dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,41%(mtm). Tekanan inflasi terutama bersumber dari tarif angkutan udara akibat kenaikan harga avtur yang kemudian mendorong penyesuaian *fuel surcharge* pada tarif angkutan udara pada awal April 2026. Dampak kenaikan harga minyak global juga turut mendorong penyesuaian harga pada BBM nonsubsidi per 18 April 2026. Namun, sebagai upaya meredam tekanan harga, Pemerintah menetapkan insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas tiket pesawat kelas ekonomi dalam negeri yang mulai berlaku sejak 25 April 2026 serta kebijakan harga BBM Subsidi yang masih dipertahankan. Tekanan harga lebih lanjut pada kelompok ini juga bersumber dari tarif kereta api seiring dengan berakhirnya diskon tarif periode libur Idulfitri serta tarif kendaraan roda dua *online* seiring dengan adanya penyesuaian BBM nonsubsidi. Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan Kelompok Transportasi sebesar 1,61%(yoy), setelah bulan sebelumnya deflasi 0,09%(yoy).

Kelompok **Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran** turut berkontribusi terhadap inflasi Jakarta periode ini dengan andil bulanan sebesar 0,09%. Kelompok ini mencatat inflasi bulanan sebesar 0,88% (mtm), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,23% (mtm). Tekanan inflasi terutama bersumber dari peningkatan harga ayam goreng yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya bahan baku, seperti minyak goreng, gas elpiji, serta kemasan plastik. Peningkatan harga juga terjadi pada komoditas nasi dengan lauk, masakan Jepang, hingga pizza. Dengan perkembangan tersebut, kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran mencatat inflasi tahunan sebesar 1,69% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,80% (yoy).



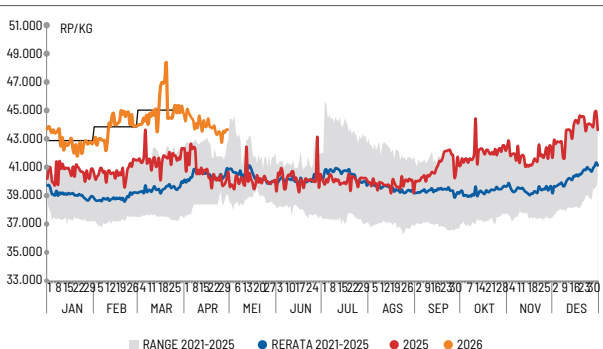
Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.11 Inflasi Bulanan Berdasarkan Kelompok Pengeluaran Februari-April 2026

Kelompok **Peralatan, Perlengkapan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga** turut mengalami inflasi sebesar 0,52% (mtm) dengan andil sebesar 0,03%. Tekanan terutama bersumber dari kenaikan harga kasur dan lemari pakaian. Sementara itu, kelompok **Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan** serta kelompok **Rekreasi, Olahraga, dan Budaya** masing-masing turut memberikan andil 0,01% terhadap inflasi bulanan periode ini dengan sumber tekanan utama berasal dari kenaikan harga laptop/notebook dan tas sekolah. **Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga** juga memberikan andil 0,01% pada inflasi periode ini, dengan kontribusi komoditas yang terbatas. Sementara itu, kelompok **Pendidikan** terpantau stabil dan kelompok **Pakaian dan Alas Kaki** tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap inflasi bulanan Jakarta pada April 2026.

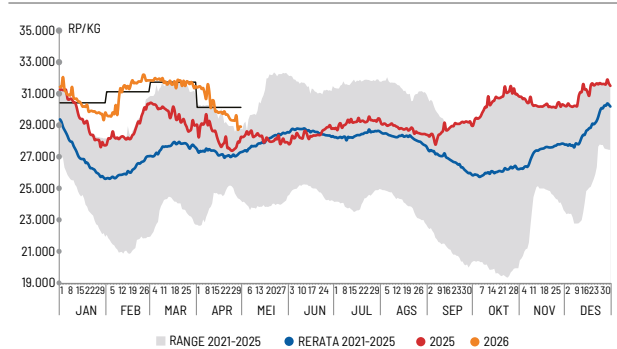
Inflasi IHK Jakarta pada April 2026 tertahan oleh inflasi pada kelompok **Makanan, Minuman, dan Tembakau** yang mencatat deflasi 0,36% (mtm) dengan andil bulanan sebesar -0,08%. Penurunan harga terutama terjadi pada komoditas daging ayam ras, cabai rawit, telur ayam ras, dan cabai merah seiring dengan normalisasi permintaan pasca HBKN Idulfitri dan ditopang pasokan yang terjaga dari sentra produksi. Keempat komoditas tersebut masing-masing memberikan andil deflasi sebesar 0,09%, 0,04%, 0,03%, dan 0,02% terhadap inflasi bulanan periode ini.

Berdasarkan pemantauan harga Informasi Pangan Jakarta (IPJ), rata-rata harga daging ayam ras pada April 2026 sebesar Rp44.066/kg, turun 2,31% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp45.105/kg (Grafik 3.12). Telur ayam ras juga terpantau turun 4,90%, dari Rp31.738/kg pada bulan sebelumnya menjadi Rp30.184/kg (Grafik 3.13). Penurunan daging dan telur ayam ras salah satunya juga didorong oleh penurunan harga di tingkat produsen. Selanjutnya, harga rata-rata cabai rawit dan cabai merah pada April 2026 masing-masing sebesar Rp67.098/kg dan Rp53.700/kg, atau turun masing-masing sebesar 18,19% dan 6,35% dari bulan sebelumnya (Grafik 3.14-3.15). Penurunan harga aneka cabai ini ditopang oleh peningkatan rata-rata pasokan mingguan dari sentra produksi. Dari sisi pasokan, rata-rata pasokan cabai rawit pada April 2026 tercatat sebesar 26,68 ton/minggu, meningkat cukup signifikan dari bulan sebelumnya yang sebesar 19,54 ton/minggu. Sementara itu, cabai merah tercatat sebesar 31,99 ton/minggu, juga meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 27,07 ton/minggu.



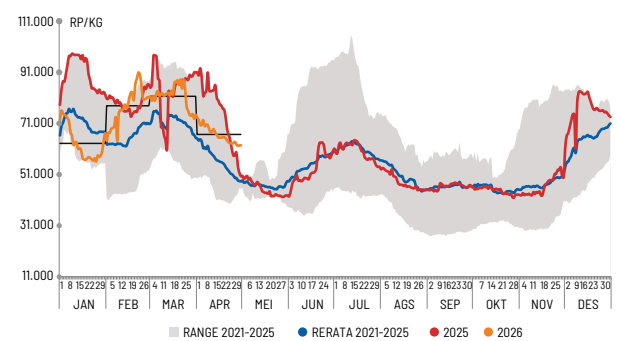
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 3.12 Perkembangan Harga Daging Ayam Ras



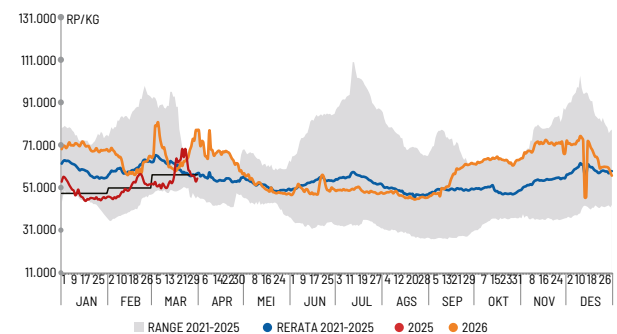
Sumber: IPJ, diolah

Grafik 3.13 Perkembangan Harga Telur Ayam Ras



Sumber: IPJ, diolah

Grafik 3.14 Perkembangan Harga Cabai Rawit

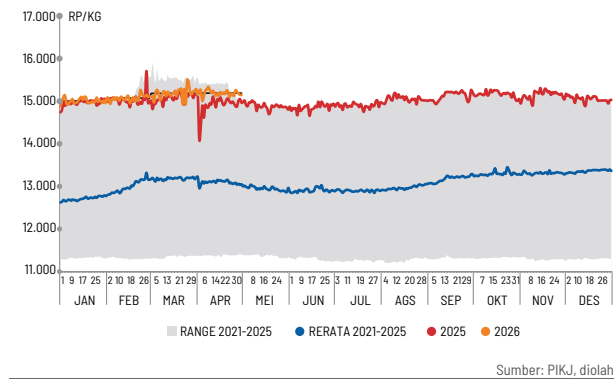


Sumber: PIKJ, diolah

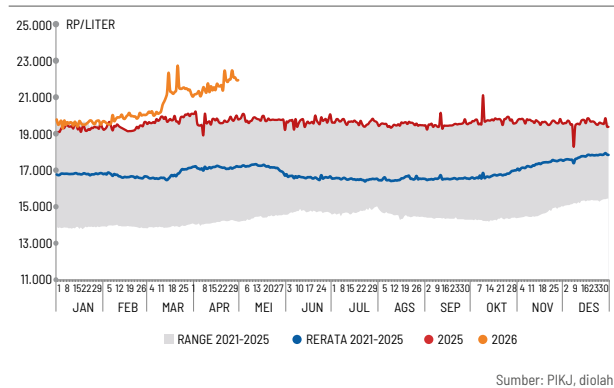
Grafik 3.15 Perkembangan Harga Cabai Merah

Meskipun demikian, penurunan harga lebih lanjut tertahan oleh beras yang mengalami peningkatan harga di tingkat distributor, di tengah berlangsungnya panen raya. Harga pembelian gabah tetap tinggi dengan rata-rata sekitar Rp7.800/kg, seiring tingginya tingkat persaingan pembelian gabah. Rata-rata harga beras pada April 2026 tercatat sebesar Rp15.234/kg, meningkat 0,03% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp15.229/kg (Grafik 3.16). Kemudian, peningkatan harga minyak goreng juga menambah tekanan inflasi pada kelompok ini. Rata-rata harga minyak goreng (curah) pada April 2026 tercatat sebesar Rp21.689/kg, meningkat 3,07% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp21.043/kg (Grafik 3.17). Peningkatan harga minyak goreng ini salah satunya dipicu oleh kenaikan harga minyak sawit global. Pada level global, minyak sawit terpantau meningkat 3,56%,

dari USD1.108,6/metrik ton menjadi USD1.148/metrik ton. Tekanan harga pada komoditas beras dan minyak goreng turut diperkuat oleh meningkatnya biaya kemasan plastik akibat gangguan distribusi dan rantai pasok global seiring penutupan selat Hormuz oleh Iran sebagai eskalasi perang dengan Amerika Serikat-Israel.



Grafik 3.16 Perkembangan Harga Beras

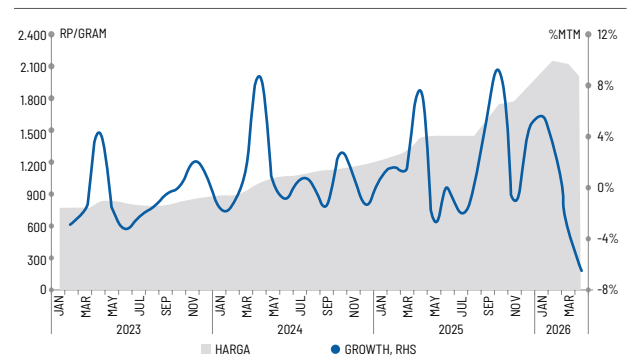


Grafik 3.17 Perkembangan Harga Minyak Goreng

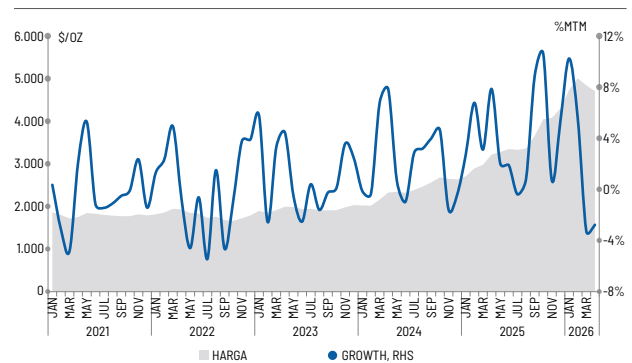
Di tengah terkendalinya perkembangan harga pangan DKI Jakarta pada April 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat kerja sama antardaerah (KAD) dengan wilayah surplus, sebagai salah satu langkah antisipasi menjaga ketahanan pangan Jakarta di tengah musim kemarau tahun 2026. BUMD pangan Jakarta, khususnya PT Food Station Tjipinang Jaya terus melakukan penajakan kerja sama *Business-to-Business* (B2B) untuk komoditas beras dengan beberapa mitra di wilayah Jawa. Adapun realisasi pengiriman kerja sama tersebut hingga April 2026 tercatat sebesar 806 ton. Secara keseluruhan, dinamika tersebut mendorong inflasi tahunan kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,35% (yoy), sedikit melandai dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,88% (yoy).

Tekanan inflasi lebih lanjut turut tertahan oleh penurunan harga pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Dengan andil bulanan sebesar -0,05%, kelompok ini mencatat deflasi 0,66%(mtm), setelah bulan sebelumnya inflasi 0,56% (mtm). Penurunan harga bersumber dari komoditas emas perhiasan. Berdasarkan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH), rata-rata harga emas perhiasan pada April 2026 tercatat sebesar Rp2.016.777/gram, turun 5,97% dibandingkan rata-rata harga

bulan sebelumnya yang sebesar Rp2.144.804/gram (Grafik 3.18). Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan harga emas global yang kembali mengalami koreksi pada April 2026, dari USD4.856/troy Oz pada bulan sebelumnya menjadi USD4.721/troy Oz, atau turun 2,76% dibandingkan bulan sebelumnya (Grafik 3.19). Dengan perkembangan tersebut, inflasi tahunan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya tercatat sebesar 11,58% (yoy), melandai dari bulan sebelumnya yang sebesar 14,57% (yoy).

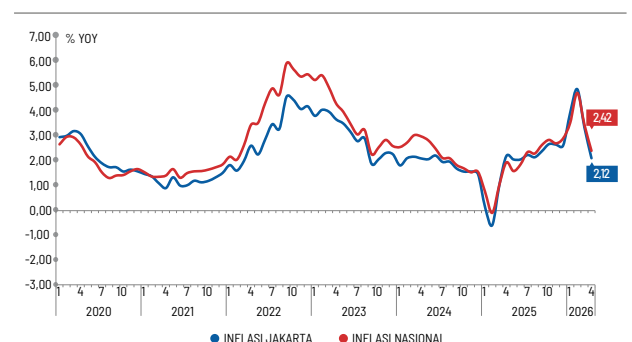


Grafik 3.18 Perkembangan Harga Emas Perhiasan

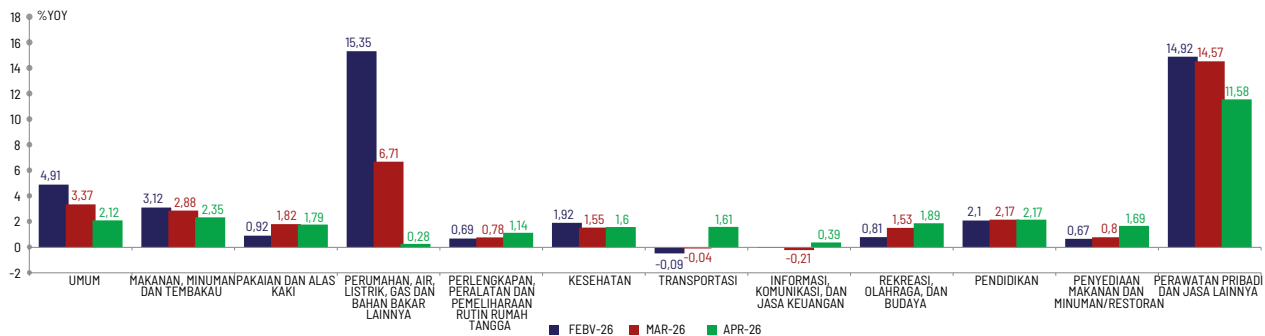


Grafik 3.19 Perkembangan Harga Emas Global

Secara tahunan, inflasi IHK Jakarta pada April 2026 melandai dari bulan sebelumnya. Inflasi tahunan Jakarta pada April 2026 tercatat sebesar 2,12% (yoy), lebih rendah dibandingkan nasional yang sebesar 2,42% (yoy) (Grafik 3.20). Tekanan inflasi tahunan pada periode ini melandai dari periode triwulan sebelumnya dan dipengaruhi oleh normalisasi pasca *low base effect* diskon tarif listrik pada triwulan I tahun 2025.



Grafik 3.20 Inflasi Jakarta dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.21 Inflasi Tahunan Kelompok Pengeluaran Februari-April 2026

Tekanan inflasi tahunan terutama berasal dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan andil 0,82% dan inflasi 11,58% (yoy) (Grafik 3.21). Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok Transportasi juga turut menjadi penyumbang utama dengan andil masing-masing sebesar 0,45% dan 0,22% serta inflasi sebesar 2,35% (yoy) dan 1,61% (yoy). Dari sisi komoditas, penyumbang utama inflasi tahunan berasal dari harga emas perhiasan yang mengalami lonjakan sejalan dengan harga global serta tarif angkutan udara akibat kenaikan biaya avtur yang masing-masing berkontribusi 0,70% dan 0,15%. Selain itu, beberapa komoditas pangan strategis juga turut berkontribusi, di antaranya daging ayam ras, beras, dan minyak goreng yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,20%, 0,12%, dan 0,07% terhadap inflasi tahunan Jakarta pada April 2026.

C. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI TRIWULAN I 2026

Terkendalinya inflasi di Jakarta dalam rentang sasaran tidak terlepas dari dukungan berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta. Program pengendalian inflasi TPID di Provinsi DKI Jakarta mengacu pada kerangka 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Upaya pengendalian dilakukan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan komoditas strategis agar tetap tersedia, mudah dijangkau, dan terjangkau harganya, terutama di tengah kenaikan permintaan masyarakat, risiko gangguan produksi pangan, serta peningkatan harga komoditas global.

Sebagai upaya merespon dinamika inflasi pangan, TPID DKI Jakarta memperkuat implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Kegiatan ini mencakup di antaranya perluasan KAD, penguatan kelembagaan, kegiatan *capacity building* TPID, komunikasi pengendalian ekspektasi, komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar Murah, Fasilitasi Distribusi Pangan, hilirisasi pangan maupun implementasi gerakan *urban farming* dan *digital farming*.

Keterjangkauan Harga

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga, TPID Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa upaya di antaranya:

1. Program pangan bersubsidi.

Pangan bersubsidi berlangsung di seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta sepanjang triwulan I 2026 dengan penerima program yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori penerima manfaat pangan subsidi. Program ini merupakan kolaborasi antara Pemprov DKI Jakarta, BUMD Pangan DKI Jakarta bersama para *stakeholder* yang terlibat. Adapun lokasi pengambilan pangan subsidi telah ditentukan oleh Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, yaitu diantaranya RPTRA, gerai kelurahan, kecamatan, serta seluruh gerai milik Perumda Pasar Jaya, Pasar Induk Beras Cipinang, dan gerai milik Perumda Dharma Jaya.

2. Program Pasar Murah.

Penyelenggaraan pasar murah dilakukan secara rutin oleh BUMD pangan melalui truk keliling pada periode Januari s.d. Maret 2026, serta melalui bazar pangan murah termasuk program BULOG Goes to Rusun. Komoditas yang disediakan antara lain beras, minyak goreng, gula pasir, tepung terigu, cabai, bawang, dan aneka daging. Intensifikasi kegiatan juga dilakukan pada periode Ramadan-Idulfitri, termasuk di wilayah Kepulauan Seribu seperti Pulau Pramuka.

3. Stabilisasi harga komoditas strategis.

Upaya stabilisasi harga dilakukan melalui Aksi Guyur Pasokan Cabai ke Pasar Induk Kramat Jati sebagai respons atas kenaikan harga cabai rawit merah. Pasokan didatangkan dari berbagai daerah sentra produksi dan dijual dengan harga yang telah ditetapkan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Paguyuban Pedagang Pasar Induk Kramat Jati, serta dinas terkait.

4. Pengawasan harga dan mutu.

Pemantauan dan inspeksi harga serta mutu bahan pangan strategis secara rutin oleh Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan Harga guna menjaga stabilitas harga dan kualitas komoditas di pasar.

Ketersediaan Pasokan

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan, di antaranya:

1. Program penguatan *urban farming*.

- Kunjungan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke *green house mini* melon di Taman Arunika dan Taman Pelataran Timoer.
- Kegiatan panen melon dan ragam sayuran di Kebun Gangnam Pegangsaan Dua oleh Suku Dinas KPKP Jakarta Utara bersama Dharma Wanita Persatuan dan TP PKK Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Kegiatan panen pokcoy di *rooftop* Kantor Perwakilan Jakarta Pusat oleh Sudin KPKP Jakarta Pusat bersama Wali Kota Jakarta Pusat dan Ketua TP PKK Jakarta Pusat.
- Kegiatan pembibitan cabai di *greenhouse* Pulau Pramuka oleh Sudin KPKP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Panen bayam merah hidroponik oleh warga di RPTRA Kelapa Nias, Kelurahan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara.
- Kegiatan panen *urban farming* sayur dan tanaman pangan oleh Sudin KPKP Jakarta Utara di berbagai kecamatan.
- Kegiatan panen rutin *urban farming* oleh Sudin KPKP Jakarta Timur di RPTRA dan kecamatan wilayah Jakarta Timur.
- Panen pokcoy hidroponik oleh PKK di Kelurahan Serdang, Jakarta Pusat.

2. Pengawasan mutu pangan segar.

- Monitoring kedatangan sapi impor asal Australia oleh Perumda Dharma Jaya yang dilakukan bersama Gubernur DKI Jakarta dan pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan Tanjung Priok pada 23 Februari 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan protein hewani menjelang HBKN Ramadan dan Idulfitri, sekaligus tindak lanjut *High Level Meeting* TPID. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pelepasan 590 ekor sapi menuju *feedlot* di Serang, Banten sebagai bagian dari pengadaan impor bertahap.
- Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) serta monitoring stabilitas harga dan stok pangan melalui peninjauan pasar induk, pasar tradisional, dan ritel modern oleh Kementerian Pertanian RI, Wakil Menteri Perdagangan RI, BPOM Jakarta, hingga jajaran Sudin KPKP Provinsi DKI Jakarta.

3. Penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD).

- Panen padi bersama antara Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada 12 Februari 2026 sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama B2B antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan PT Tunas Bumi Emas Lestari sejak 2025 dengan total lahan 150 ha. Hasil panen diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan beras Jakarta menjelang HBKN serta meningkatkan kesejahteraan petani, yang turut diperkuat melalui kerja sama G2G antar pemerintah daerah.
- Penandatanganan kerja sama antara PT Food Station Tjipinang Jaya dan PT Saudagar Selat Sunda yang dilakukan untuk mendukung penyediaan pasokan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai upaya menjaga ketersediaan pangan.
- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) dan penandatanganan komitmen transaksi perdagangan antara pelaku usaha Jawa Timur dan PT Food Station Tjipinang Jaya yang dilakukan untuk memperluas jejaring pasokan dan memperkuat stabilitas distribusi pangan.

Kelancaran Distribusi

Upaya untuk mendorong kelancaran distribusi di antaranya adalah:

1. Pelaksanaan pasar murah keliling.

Kegiatan pasar murah menjangkau seluruh wilayah DKI Jakarta, mulai dari tingkat kelurahan hingga rumah susun, melalui penjualan rutin oleh BUMD pangan menggunakan truk keliling selama periode Januari-Maret 2026.

2. Dukungan distribusi pangan Kepulauan Seribu.

Penyediaan dan penguatan fasilitas distribusi pangan untuk mendukung kelancaran pasokan dan perluasan pelaksanaan pasar murah di wilayah DKI Jakarta.

Komunikasi Efektif

Dalam hal komunikasi efektif, terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh TPID Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi serta membangun persepsi positif masyarakat, di antaranya:

1. Koordinasi dan rapat pengendalian inflasi.

Pelaksanaan rapat rutin "Kamis" Tim Teknis sebagai forum pemantauan harga dan stok pangan strategis serta perumusan tindak lanjut, termasuk Rapat Pra-*High Level Meeting* (HLM) dan *High Level Meeting* (HLM) dalam rangka penguatan sinergi dan kesiapan pasokan menjelang HBKN Idulfitri.

2. Penguatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan.

- a. *Capacity building* dan rapat koordinasi pada 15 Januari 2026 difokuskan pada pembahasan outlook ekonomi dan inflasi 2026, penyusunan program unggulan TPID, serta identifikasi tantangan global dan domestik. Kegiatan ini menghasilkan rekomendasi strategi pengendalian inflasi yang lebih adaptif, dengan penekanan pada penguatan sinergi pentahelix dan fokus strategi sesuai karakteristik Jakarta sebagai daerah konsumen.
- b. *Capacity building* dan rapat koordinasi pada 27 Januari 2026 bertujuan untuk menyelaraskan program kerja TPIN dan TPID, mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya, serta menyusun rencana kerja 2026. Dalam forum ini juga dibahas proyeksi inflasi, penguatan integrasi rantai pasok dan *buffer stock*, serta rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi, baik pangan maupun non-pangan, guna menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

3. Edukasi publik dan komunikasi kebijakan.

Sosialisasi belanja bijak melalui podcast Rabu Belajar Episode 221 bertema “Jaga Harga, Jaga Rupiah: Pengendalian Inflasi Jelang HBKN Bersama SERAMBI 2026”, podcast Anak Jakarte bertema “THR Cair, Dompot Tetap Aman atau Numpang Lewat karena Harga Barang Naik?”, serta iklan layanan masyarakat bertema Belanja Bijak yang ditayangkan di radio selama periode Idulfitri.





BOKS 2

Perkuat Ketahanan Pangan, DKI Jakarta dan Jawa Tengah Jajaki Penguatan Kerja Sama Antardaerah

Upaya memperkuat ketahanan pangan terus menjadi prioritas strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengingat tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. Dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjajaki penguatan kerja sama antardaerah (KAD) dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Kegiatan peninjauan kerja sama diawali dengan kunjungan ke dua klaster unggulan, yaitu Koperasi Panca Arga Tani Gemilang yang merupakan koperasi produsen cabai, serta Koperasi Produsen Gupon Sekar Langit yang berfokus pada komoditas beras organik. Koperasi Panca Arga Tani Gemilang yang berdiri sejak tahun 2022 saat ini beranggotakan sekitar 1.500 petani dengan total luasan lahan garapan mencapai kurang lebih 600 hektare dan mampu menghasilkan rata-rata 3.000 ton cabai setiap enam bulan. Koperasi ini menunjukkan keunggulan dalam menjaga keberlanjutan produksi sepanjang tahun melalui pengaturan pola tanam antaranggota. Selain itu, penerapan sistem lelang cabai menjadi inovasi yang memberikan nilai tambah dalam menjaga stabilitas harga, baik di tingkat petani maupun pasar.

Sementara itu, Koperasi Produsen Gupon Sekar Langit telah mengembangkan sistem pertanian organik berbasis sirkular serta memiliki jejaring pemasaran yang kuat melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan ritel dan sektor *food and beverage*. Koperasi ini terdiri atas 33 kelompok tani dengan total 1.579 petani dan luasan lahan garapan sekitar 776 hektare. Model bisnis yang terintegrasi dari hulu

ke hilir menjadikan koperasi ini sebagai salah satu contoh praktik baik dalam pengembangan pertanian berkelanjutan.

Selain kedua klaster tersebut, kegiatan peninjauan KAD ini juga menghadirkan Gapoktan Karya Makmur yang memiliki komoditas unggulan bawang merah. Gapoktan ini beranggotakan 1.447 petani yang tergabung dalam 10 kelompok tani di Desa Pasir, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi mencapai 2.400 ton per musim panen dan produktivitas rata-rata sebesar 8 ton per hektare. Turut hadir pula Paguyuban Petani Al-Barokah yang mengembangkan pertanian padi organik di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Paguyuban ini terdiri dari 21 kelompok tani dengan total anggota mencapai 1.084 petani dan luas lahan sekitar 180,22 hektare, serta telah menerapkan konsep *digital farming* untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani.

Secara umum, Provinsi Jawa Tengah dinilai telah memiliki pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan sektor pangan dari hulu hingga hilir. Strategi yang diterapkan mencakup upaya menjaga kesinambungan produksi, memperlancar distribusi, memastikan keterjangkauan harga, hingga memberikan perlindungan kepada petani, khususnya pada saat terjadi tekanan harga atau deflasi. Dengan kondisi surplus pada berbagai komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, cabai, bawang merah, telur, daging ayam, hingga daging sapi, Jawa Tengah memiliki kapasitas besar untuk menjadi pemasok utama dalam skema kerja sama antardaerah.



Gambar B2.1 Kunjungan ke Pancarga Tani Gemilang dan Gupon Sekar Langit

Dukungan terhadap penguatan kerja sama ini juga datang dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah serta BUMD setempat yang menyambut baik peluang kolaborasi dengan DKI Jakarta. Di sisi lain, BUMD pangan DKI Jakarta yang berperan sebagai penjamin pasokan (*supply guarantor*) turut menunjukkan ketertarikan untuk menjalin kemitraan strategis, khususnya dalam penyediaan komoditas hortikultura dan beras organik. Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka), serta memperkuat pelaksanaan program pasar murah di Jakarta.

Sebagai tindak lanjut dari penjajakan KAD tersebut, PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) dan PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman terkait kolaborasi penyediaan komoditas pangan. Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kegiatan budidaya, produksi, hingga pembinaan dan pendampingan kelompok tani. Penandatanganan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan *Grand Launching* Gerakan

Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional yang diselenggarakan di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, pada 13 Mei 2026.

Sinergi lintas instansi dan antarwilayah ini diharapkan dapat membangun pemahaman yang lebih komprehensif di antara para pemangku kepentingan mengenai ekosistem ketahanan pangan dari hulu hingga hilir. Kolaborasi yang terjalin tidak hanya berfokus pada aspek perdagangan, tetapi juga mencakup penguatan kelembagaan, pemanfaatan inovasi teknologi, serta integrasi sistem distribusi pangan. Penguatan jalur distribusi antardaerah diyakini mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di DKI Jakarta, sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di Jawa Tengah. Dengan demikian, sinergi antara DKI Jakarta dan Jawa Tengah tidak hanya menjadi solusi jangka pendek dalam pengendalian inflasi, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan.



Gambar B2.2 Diskusi Bersama Dinas Pertanian Jawa Tengah, BUMD, dan Klaster Unggulan



Gambar B2.3 Seremonial Kerja Sama Antar daerah pada GPIPS Wilayah Jawa Tahun 2026



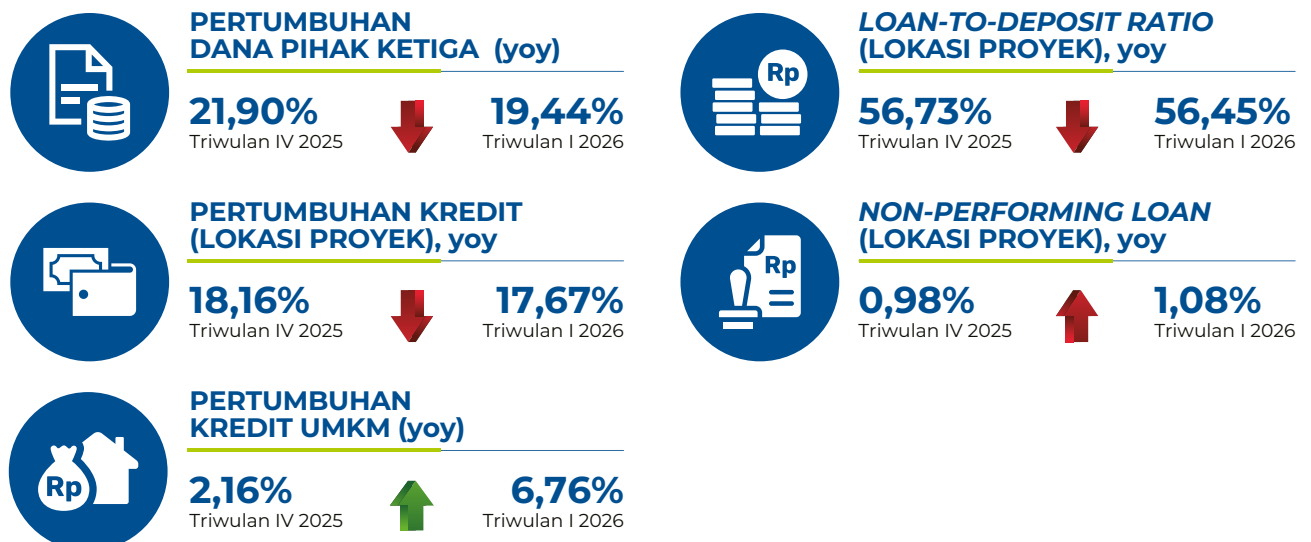
Bab 4

Pembiayaan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Pada triwulan I 2026, intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang solid dengan profil risiko yang tetap terjaga. Dari sisi penawaran, penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta tumbuh tinggi meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit diimbangi dengan kondisi likuiditas perbankan yang memadai, tecermin dari pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tetap tinggi meski melambat dari triwulan sebelumnya. Ruang ekspansi kredit juga didorong oleh kebijakan makroprudensial Bank Indonesia yang tetap akomodatif guna mendukung pembiayaan sektor riil dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ketahanan perbankan tetap terjaga, tecermin dari rasio kredit bermasalah yang rendah dan berada jauh di bawah threshold 5%, serta rasio permodalan yang tetap kuat.

Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit terutama ditopang oleh kebutuhan pembiayaan sektor korporasi seiring ekspansi usaha dan perbaikan kinerja penjualan. Profitabilitas korporasi non-keuangan tetap kuat sejalan dengan penguatan aktivitas ekonomi, sehingga mendorong peningkatan permintaan kredit investasi dan modal kerja. Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif, dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor konstruksi, transportasi pergudangan, dan industri pengolahan. Kemampuan bayar korporasi juga tetap kuat, tecermin dari rasio likuiditas yang terjaga dan tingkat Non-Performing Loans (NPL) korporasi yang rendah.

Kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2026 dan tetap tumbuh positif. Kinerja kredit konsumsi rumah tangga yang relatif stabil tersebut dipengaruhi oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat seiring meningkatnya optimisme masyarakat yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Risiko kredit rumah tangga tetap terjaga pada level 3% meskipun perlu terus dimonitor seiring akselerasi pertumbuhan kredit. Kredit sektor UMKM juga tumbuh positif di tengah kuatnya penyaluran kredit bank umum, didukung oleh peningkatan aktivitas usaha dan berbagai program penguatan kapasitas yang dilakukan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk mendorong produktivitas dan daya saing UMKM.



A. PERKEMBANGAN KINERJA BANK UMUM

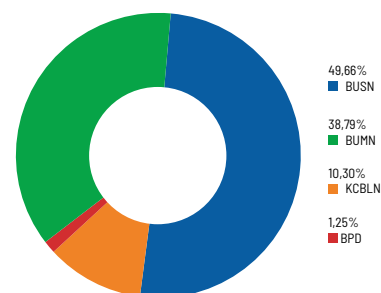
Pada triwulan I 2026, intermediasi bank umum di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan kinerja yang solid dengan profil risiko yang tetap terjaga. Penyaluran kredit berdasarkan lokasi proyek di DKI Jakarta tumbuh tinggi sebesar 17,67% (yoy), meski sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (18,16%, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, kinerja positif kredit terutama ditopang oleh tetap kuatnya penyaluran kredit investasi dan modal kerja, di tengah penyaluran kredit konsumsi yang termoderasi. Sejalan dengan hal tersebut, likuiditas perbankan pada triwulan I 2026 juga tetap terjaga, ditandai dengan dana pihak ketiga (DPK) bank umum yang tumbuh sebesar 19,44% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 21,90% (yoy). Dari sisi ketahanan, rasio kredit bermasalah tetap terjaga pada tingkat yang rendah yaitu sebesar 1,08% (Tabel 4.1).

Dalam upaya meningkatkan kinerja bank umum dalam menopang pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia konsisten melakukan inovasi dan sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia sebagai bauran kebijakan nasional. Bauran kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) melalui kebijakan moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial. Kedua kebijakan ini didukung oleh kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, serta berbagai kebijakan struktural yang memperkuat fondasi ekonomi dan sistem keuangan.

Bauran berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga kapasitas perbankan untuk tetap berperan positif dalam pembiayaan perekonomian domestik di tengah masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global. Kapasitas perbankan yang terjaga baik, antara

lain dapat dilihat dari kondisi kecukupan likuiditas perbankan dengan diiringi risiko kredit yang terjaga rendah jauh dibawah *threshold* 5%. Kondisi likuiditas bank yang memadai serta ditopang kebijakan insentif likuiditas dapat meringankan bank dalam hal *cost of fund*. Dengan *cost of fund* yang dijaga rendah, bank berpeluang memberikan kredit/pembiayaan dengan suku bunga yang lebih rendah sehingga memacu pertumbuhan kredit.

Seiring dengan kinerja intermediasi dan ketahanan bank yang tetap kuat, total aset bank umum meningkat menjadi sebesar Rp9.176 triliun dengan pertumbuhan sebesar 11,27% (yoy), lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 11,95% (yoy). Jika dilihat berdasarkan kelompok bank, pangsa aset terbesar berada pada kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) yaitu 49,66%, diikuti oleh kelompok Bank Umum Milik Negara (BUMN) 38,79%, Kantor Cabang Bank Luar Negeri (KCBLN) 10,30%, dan Bank Pemerintah Daerah (BPD) 1,25% (Grafik 4.1)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1 Komposisi Aset Berdasarkan Kelompok Bank

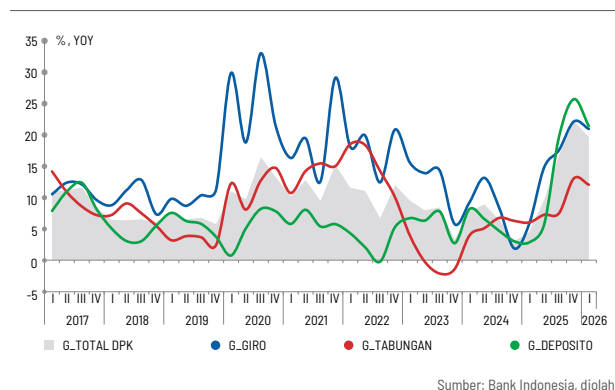
Tabel 4.1 Perkembangan Kinerja Bank Umum di Provinsi DKI Jakarta

NO	KOMPONEN BELANJA	2022				2023				2024				2025				2026
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
1	Total Asset	6.589	6.652	6.797	7.298	7.203	7.201	7.283	7.661	7.721	7.810	7.817	7.994	8.246	8.313	8.587	8.949	9.176
2	Dana Pihak Ketiga (DPK)	3.849	3.887	3.910	4.321	4.211	4.192	4.235	4.461	4.539	4.560	4.505	4.596	4.742	4.994	5.253	5.602	5.664
3	Kredit																	
	- Lokasi Bank (LB)	2.713	2.941	2.991	3.065	3.073	3.202	3.305	3.493	3.580	3.729	3.746	3.915	3.981	4.081	4.108	4.468	4.504
	- Lokasi Proyek (LP)	1.784	1.949	1.965	2.006	2.011	2.104	2.193	2.324	2.401	2.522	2.572	2.690	2.717	2.817	2.847	3.178	3.197
4	Pertumbuhan :																	
	- g_Aset (% , yoy)	11,01	9,83	7,31	9,89	9,32	8,25	7,16	4,96	7,20	8,46	7,32	4,35	6,80	6,44	9,86	11,95	11,27
	- g_DPK (% , yoy)	11,43	10,89	6,65	11,83	9,42	7,85	8,31	3,23	7,78	8,80	6,36	3,03	4,48	9,52	16,62	21,90	19,44
	- g_Kredit Lokasi Bank (% , yoy)	6,85	12,78	13,34	14,11	13,26	8,89	10,52	13,98	16,51	16,48	13,32	12,06	11,20	9,43	9,67	14,14	13,15
	- g_Kredit Lokasi Proyek (% , yoy)	4,69	11,35	8,84	14,55	12,69	7,96	11,80	15,83	19,41	19,90	17,30	15,76	13,16	11,69	10,69	18,16	17,67
5	Intermediasi (tanpa SB)																	
	-Lokasi Bank	70,48	75,66	76,48	70,92	72,96	76,39	78,04	78,31	78,87	81,78	83,15	85,18	83,95	81,72	78,19	79,75	79,52
	-Lokasi Proyek	46,36	50,13	50,25	46,42	47,75	50,18	51,78	52,09	52,90	55,31	57,10	58,52	57,30	56,41	54,20	56,73	56,45
6	Non performing loan (NPL)																	
	- Lokasi Bank	2,86	2,57	2,48	2,13	2,13	2,14	2,08	1,81	1,83	1,86	1,78	1,69	1,65	1,55	1,57	1,39	1,42
	- Lokasi Proyek	1,94	1,70	1,62	1,42	1,37	1,41	1,45	1,33	1,34	1,22	1,20	1,14	1,14	1,08	1,13	0,98	1,08

Sumber: Bank Indonesia, diolah

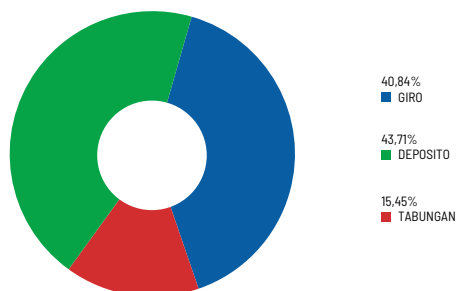
Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum

Pada triwulan I 2026, penghimpunan DPK bank umum tercatat tumbuh sebesar 19,44% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,90% (yoy) (Grafik 4.2). Perlambatan ini tecermin pada seluruh komponen, yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito yang menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan pangsa, DPK di DKI Jakarta didominasi oleh Deposito dengan pangsa sebesar 43,71%, diikuti oleh Giro dengan pangsa 40,84% dan Tabungan dengan pangsa 15,45% (Grafik 4.3).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

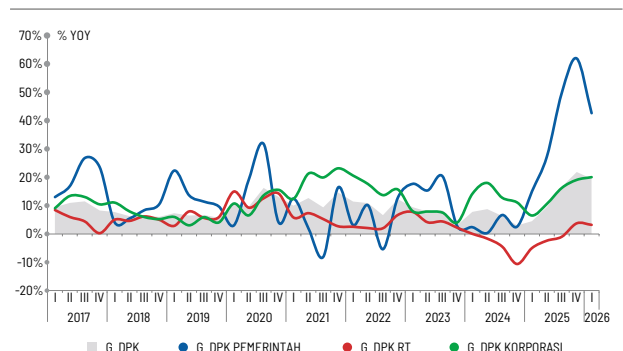
Grafik 4.2 Pertumbuhan DPK Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3 Komposisi DPK Jakarta

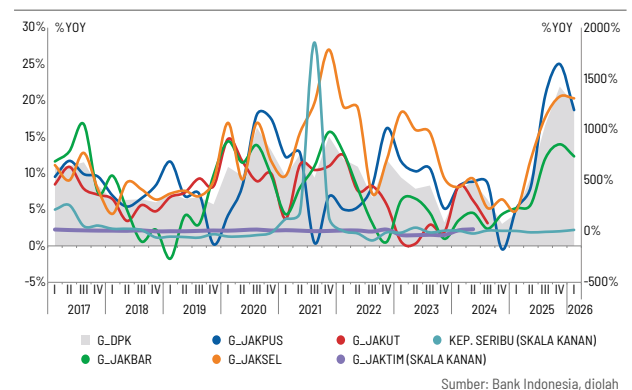
Berdasarkan kepemilikan, perlambatan DPK disebabkan oleh DPK milik pemerintah dan RT. DPK pemerintah tumbuh sebesar 42,61% (yoy) pada triwulan I 2026, melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 61,93% (yoy). Hal ini sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah pusat pada program-program prioritas nasional pada periode triwulan I 2026. Di sisi lain, dengan pangsa 56,52%, DPK milik korporasi menguat dari 19,10% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 20,06% (yoy) pada triwulan I 2026, sehingga menjadikan DPK korporasi tetap menjadi penopang utama pertumbuhan. Meningkatnya pertumbuhan DPK Korporasi diperkirakan terkait dengan sikap *wait and see* terhadap implementasi kebijakan pemerintah serta antisipasi atas masih tingginya ketidakpastian situasi ekonomi global (Grafik 4.4)



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.4 Komposisi Pemilik DPK Jakarta

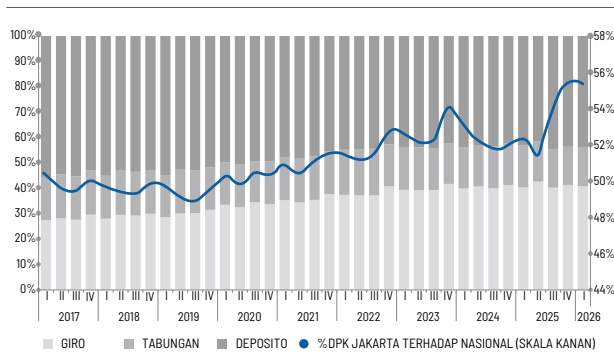
Secara spasial, DPK di seluruh wilayah Jakarta tetap mencatatkan pertumbuhan positif, dengan pertumbuhan tertinggi di Jakarta Timur yang tumbuh sebesar 62,03% (yoy). Berdasarkan kontribusinya, pertumbuhan DPK Jakarta pada triwulan I 2025 ditopang oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, seiring besarnya pangsa DPK di kedua wilayah tersebut, mengingat peran keduanya sebagai wilayah pusat bisnis di Jakarta (Grafik 4.5).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

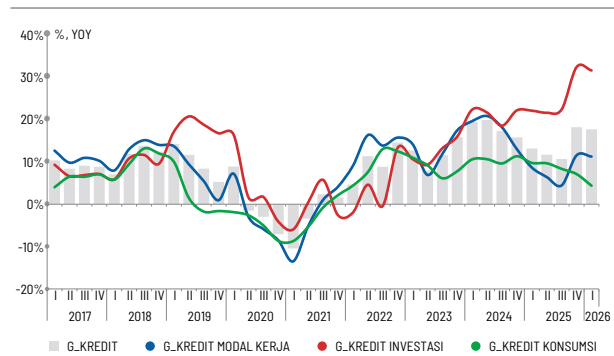
Grafik 4.5 Perkembangan DPK Spasial Jakarta

Pangsa DPK DKI Jakarta tetap dominan terhadap Nasional, mencapai 55,36%. Dengan kedudukannya sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis, pangsa DPK DKI Jakarta mencapai lebih dari 50% DPK perbankan nasional (Grafik 4.6). Hal tersebut menjadikan DKI Jakarta tetap sebagai tumpuan penghimpunan dana perbankan secara nasional, terutama Deposito. Besarnya sumber dana di DKI Jakarta menyebabkan banyak bank yang membuka kantor pusat ataupun kantor cabang di Jakarta. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta sangat dominan memengaruhi pertumbuhan DPK di nasional. Pertumbuhan DPK DKI Jakarta pada triwulan I 2026 adalah sebesar 19,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK Nasional yang sebesar 13,55% (yoy) (Grafik 4.7).



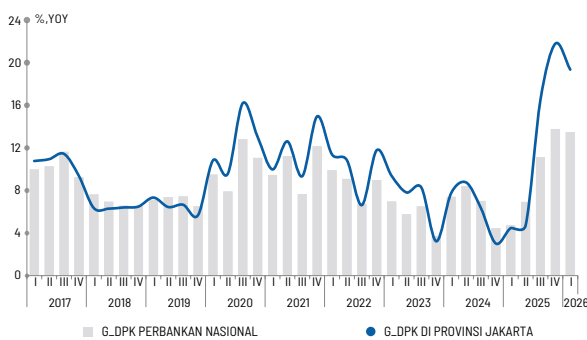
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.6 Kontribusi DPK Jakarta terhadap DPK Nasional



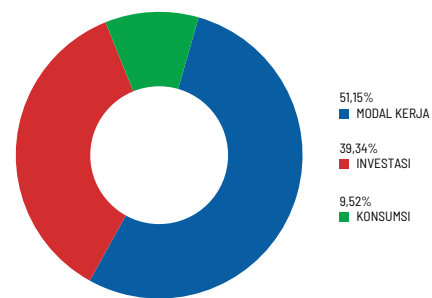
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.8 Pertumbuhan Kredit Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.7 Pertumbuhan DPK Jakarta dan Nasional



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 4.9 Komposisi Kredit Jakarta Berdasarkan Penggunaan

Perkembangan Kredit Bank Umum

Sejalan dengan DPK, penyaluran kredit oleh bank umum di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 juga mencatatkan pertumbuhan yang solid, namun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Pertumbuhan kredit berdasarkan lokasi proyek tercatat tumbuh sebesar 17,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,16% (yoy). Kredit berdasarkan lokasi bank juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 13,15% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 14,14% (yoy). Tertahannya laju pertumbuhan kredit disebabkan oleh melambatnya seluruh komponen, yaitu kredit investasi (KI), kredit modal kerja (KMK), dan kredit konsumsi (KK).

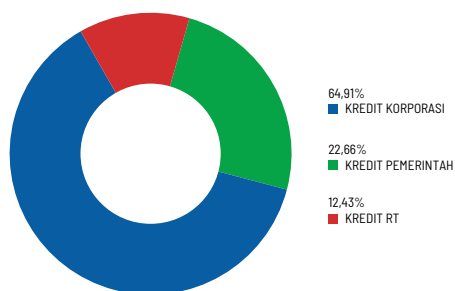
KI tumbuh tinggi sebesar 31,57% (yoy), melambat dari 32,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya. KMK juga sedikit menurun dari 11,56% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 11,26% (yoy) pada triwulan I 2026. Relatif kuatnya pertumbuhan KI dan KMK pada triwulan I 2026, sejalan dengan membaiknya kinerja sektor produktif DKI Jakarta terutama pada Lapangan Usaha (LU) Konstruksi dan LU Industri Pengolahan. Sementara, KK menurun cukup dalam dari 7,14% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 4,40% (yoy) pada triwulan I 2026 (Grafik 4.8). Berdasarkan pangsa, KMK memiliki pangsa terbesar terhadap total kredit Provinsi DKI Jakarta yaitu 51,14%, diikuti oleh Kredit Investasi dan Konsumsi yaitu masing-masing sebesar 39,33% dan 9,51% (Grafik 4.9).

Pertumbuhan kredit yang tetap tinggi utamanya ditopang oleh permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan dukungan kapasitas pembiayaan dari perbankan yang memadai sebagai dampak penerapan bauran kebijakan Bank Indonesia. Pelonggaran dan penerapan kebijakan akomodatif terhadap berbagai instrumen kebijakan makroprudensial seperti rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB), Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan penguatan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), serta kebijakan insentif Likuiditas Makroprudensial yang terus diperkuat dan inovatif mampu membantu perbankan dalam mengendalikan risiko sehingga penyaluran kredit tetap optimal.

Fungsi intermediasi bank yang tetap terjaga, juga didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah maupun otoritas keuangan, baik di lingkup global maupun domestik. Berlanjutnya penahanan suku bunga acuan BI *rate* seiring perkiraan tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1%, serta terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah diharapkan dapat meningkatkan kinerja intermediasi perbankan.

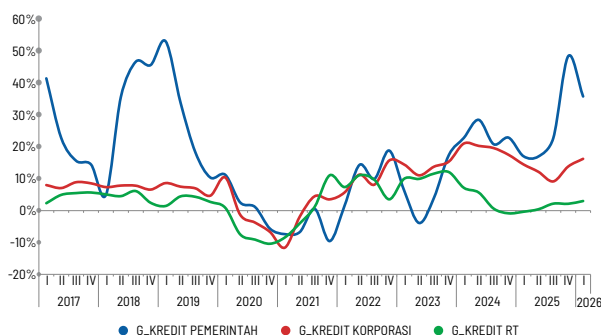
Kondisi pertumbuhan kredit yang ekspansif ini terkonfirmasi oleh Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang pada triwulan I 2026 tetap menunjukkan tren positif di zona optimis (di atas ambang batas 50). Optimisme ini mencerminkan ekspektasi perbankan terhadap keberlanjutan perbaikan kinerja intermediasi dan ketahanan sektor keuangan yang tetap solid.

Berdasarkan kelompok debitur, pada triwulan I 2025, penyaluran kredit kepada sektor korporasi masih mendominasi dengan pangsa mencapai 64,91% dari total kredit bank umum di DKI Jakarta, diikuti oleh kredit kepada sektor pemerintah sebesar 22,66% dan rumah tangga sebesar 12,43% (Grafik 4.10). Dilihat dari pertumbuhannya, kredit kelompok Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 35,87% (yoy), diikuti oleh kredit korporasi 16,33% (yoy), dan rumah tangga 3,05% (yoy). Kredit kelompok korporasi dan rumah tangga menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Adapun kredit kelompok pemerintah pada triwulan I 2026 melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya (Grafik 4.11).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

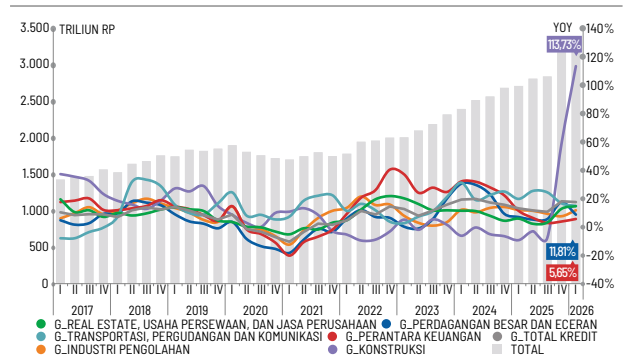
Grafik 4.10 Komposisi Kredit Berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.11 Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kepemilikan

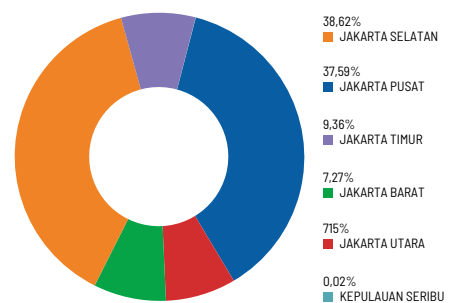
Ditinjau berdasarkan sektornya, semua sektor utama masih mencatat laju pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, kecuali sektor perdagangan besar dan eceran serta sektor transportasi dan pergudangan (transgud). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit ke sektor konstruksi, diikuti transgud, jasa perusahaan & real estate, industri pengolahan, perdagangan, dan perantara keuangan. Peningkatan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor utama tersebut secara umum sejalan dengan membaiknya kinerja pada masing-masing sektor usaha (Grafik 4.12).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.12 Pertumbuhan Kredit Sektoral

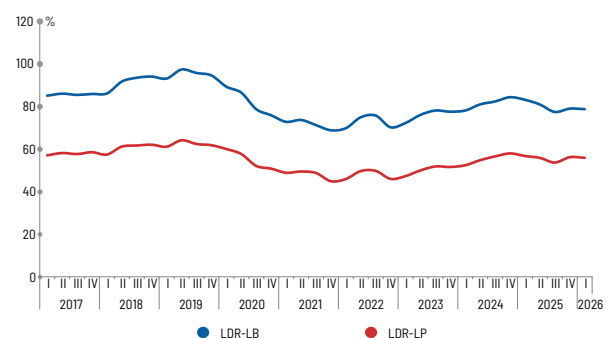
Secara spasial, penyaluran kredit perbankan terutama ditujukan ke Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan sebagai sentra perekonomian dan niaga, sejalan dengan tingginya pertumbuhan DPK pada kedua wilayah tersebut. Pada triwulan I 2026, porsi kredit yang disalurkan kepada kedua daerah tersebut melebihi 50% dari total kredit bank umum DKI Jakarta, yaitu masing-masing dengan pangsa sebesar 37,59% dan 38,62% (Grafik 4.13).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.13 Sebaran Kredit di Provinsi DKI Jakarta

Pada triwulan I 2026, rasio intermediasi berdasarkan lokasi proyek dan lokasi bank masing-masing sebesar 56,45% dan 79,52%. Rasio ini sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang masing-masing sebesar 56,73% dan 79,75% sejalan dengan pertumbuhan kredit yang lebih moderat dibandingkan pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). (Grafik 4.14).



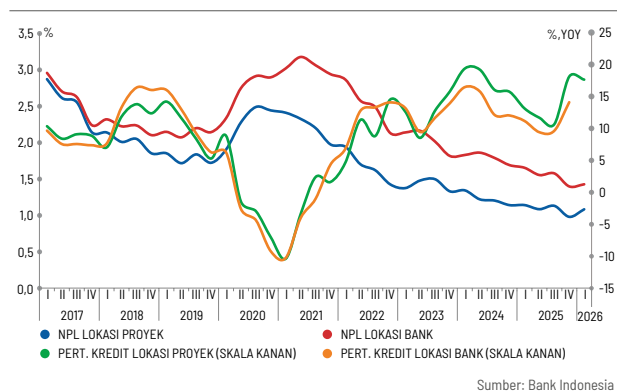
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.14 Perkembangan LDR Berdasarkan Lokasi Bank dan Lokasi Proyek

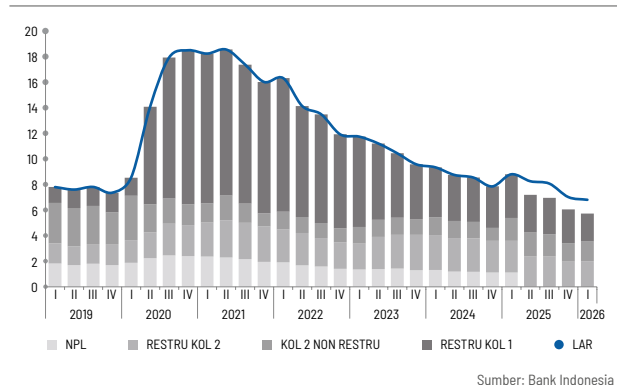
Angka rasio intermediasi perbankan berdasarkan lokasi proyek yang relatif rendah mencerminkan bahwa DKI Jakarta cenderung sebagai daerah penghimpun dana. Namun demikian, dana yang terhimpun tidak diimbangi dengan jumlah kredit yang disalurkan karena sebagian kredit juga disalurkan ke luar DKI Jakarta termasuk Bodetabek. Hal ini menjadi salah satu indikator eratnya hubungan ekonomi dan keuangan antara Jakarta dengan daerah sekitar Jakarta sebagai satu kawasan aglomerasi.

Risiko Kredit Bank Umum

Tingkat ketahanan perbankan pada triwulan laporan masih tetap terjaga dengan baik. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh tetap rendahnya rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Pada triwulan I 2026, rasio NPL kredit berdasarkan lokasi proyek (LP) adalah sebesar 1,08%, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,98%. Rasio NPL pada kredit berdasarkan lokasi bank (LB) juga tetap rendah sebesar 1,42%, meski lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,39% (Grafik 4.15). Begitu juga dengan rasio kredit yang berisiko, *loan at risk* (LaR) menurun dari 7,09% menjadi 6,87% (Grafik 4.16).

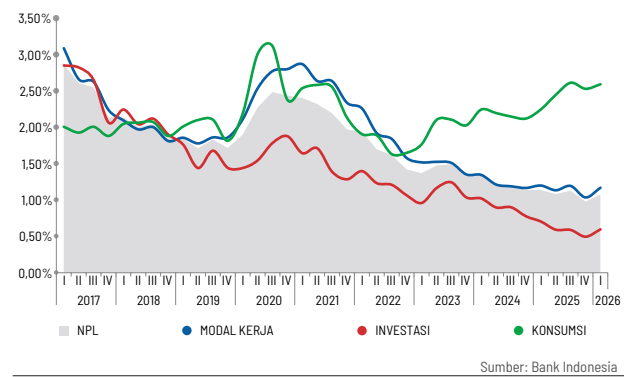


Grafik 4.15 Perkembangan NPL DKI Jakarta

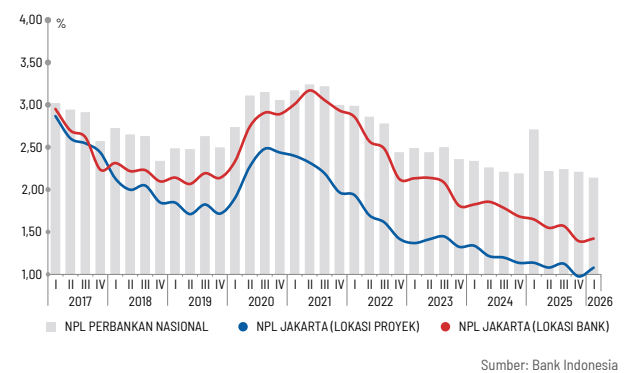


Grafik 4.16 Perkembangan LaR DKI Jakarta

Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL yang meningkat dipengaruhi oleh peningkatan rasio NPL pada semua jenis kredit penggunaan (Grafik 4.17). Jika dibandingkan dengan nasional, rasio NPL di DKI Jakarta baik berdasarkan lokasi proyek ataupun lokasi bank, masih tercatat lebih rendah (Grafik 4.18).



Grafik 4.17 NPL di Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan



Grafik 4.18 Perbandingan NPL di Provinsi DKI Jakarta dan Nasional

Tetap terjaganya rasio NPL perbankan DKI Jakarta di bawah *threshold* 5% tidak lepas dari upaya dan strategi perbankan dalam mengantisipasi potensi kenaikan risiko kredit, terutama yang dipengaruhi faktor tingginya gejolak global akibat dampak perang di Timur Tengah. Perbankan terutama bank-bank besar telah menyiapkan strategi dan penguatan manajemen risiko untuk menghadapi kenaikan risiko kredit. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain diversifikasi aset dan mengembangkan berbagai *credit risk tools* seperti penguatan aspek *credit risk scoring* dan *early warning signal* untuk mendeteksi debitur yang berpotensi mengalami pemburukan kualitas kredit.

Ke depan, risiko kredit perbankan diperkirakan akan tetap terjaga rendah namun perlu diwaspadai dampak lebih lanjut risiko makroekonomi terhadap penurunan kemampuan membayar korporasi dan rumah tangga. Dari sisi korporasi, risiko makroekonomi antara lain potensi pelemahan permintaan ekspor seiring potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global sebagai dampak perang di Timur Tengah, risiko nilai tukar di tengah tetap tingginya ketidakpastian di pasar

global, serta meningkatnya tekanan terhadap permintaan domestik, diperkirakan dapat menahan laju pemulihan kinerja korporasi sehingga memengaruhi pendapatan dan kemampuan membayar korporasi. Adapun di sisi rumah tangga, potensi tertahannya pemulihan korporasi lebih lanjut dapat memengaruhi tingkat penyerapan tenaga kerja sehingga menekan kinerja rumah tangga dan memengaruhi kemampuan membayar rumah tangga.

B. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR KORPORASI

Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Korporasi

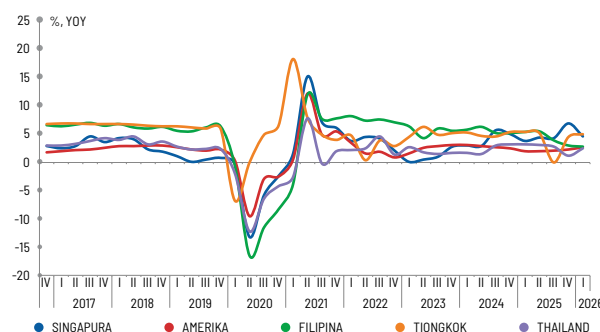
Pada triwulan I 2026, ketidakpastian ekonomi global akibat perang Timur Tengah serta implementasi tarif dagang oleh AS, masih menjadi faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang berorientasi ekspor. Hal tersebut diikuti dengan potensi gangguan rantai pasok dan volatilitas harga komoditas global yang terdampak eskalasi geopolitik, yang dapat memengaruhi kinerja korporasi, terutama yang memiliki ketergantungan pada bahan baku impor. Keketatan likuiditas di pasar global seiring ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, juga memengaruhi kinerja korporasi, terutama untuk korporasi-korporasi yang memiliki utang luar negeri dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari luar negeri. Sementara itu di sisi domestik, kinerja korporasi dipengaruhi oleh perkembangan inflasi serta konsolidasi fiskal seiring berbagai kebijakan pemerintah baru, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Risiko perlambatan ekonomi global, ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi serta tensi geopolitik yang terus berlanjut

Pada triwulan I 2026, beberapa negara mitra dagang utama Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali Amerika Serikat, Tiongkok, dan Thailand (Grafik 4.19). Hal ini sejalan dengan prakiraan pertumbuhan ekonomi global yang pada 2026 berpotensi tumbuh lebih rendah dari prakiraan sebelumnya sekitar 3,0% (yoy). Lebih lanjut, kinerja ekspor kepada negara mitra dagang utama menurun akibat disrupsi rantai pasok global (Grafik 4.20).

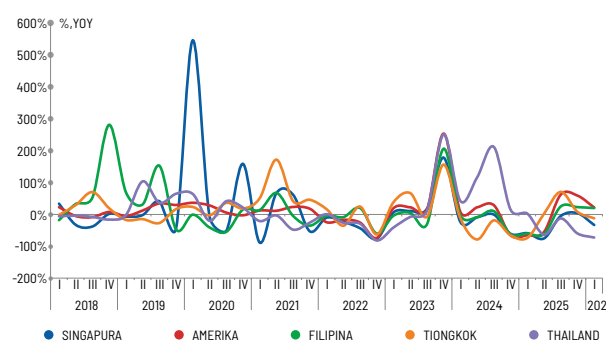
Ke depan, risiko pelemahan ekonomi global diperkirakan tetap tinggi di tengah masih berlanjutnya ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan. Kecenderungan pertumbuhan yang lebih rendah dan laju inflasi yang meningkat, mendorong sebagian besar bank sentral mempertahankan kebijakan moneter ketat. Perkembangan ini mendorong semakin kuatnya ekspektasi kenaikan Fed Fund Rate (FFR), yang diperburuk dengan defisit fiskal AS yang membesar. Kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi menyebabkan tingginya volatilitas aliran modal global yang lebih lanjut memperburuk prospek perekonomian global.

Dari sisi *financial channel*, kondisi tersebut berpotensi melemahkan nilai tukar berbagai negara. Kondisi ini perlu diantisipasi karena pelemahan Rupiah akan mengakibatkan peningkatan harga barang impor sehingga biaya produksi meningkat dan memberi tekanan terhadap kinerja sektor usaha. Dari sisi *commodity channel*, volatilitas harga komoditas dapat menambah tekanan inflasi di dalam negeri yang pada gilirannya juga akan memengaruhi kinerja usaha korporasi. Dari sisi *trade channel*, terdapat potensi meningkatnya ekspor ke AS, menggantikan produk Tiongkok dan produk negara lain yang tarif resiprokalnya lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Namun demikian, di saat bersamaan terdapat potensi membanjirnya produk Tiongkok ke negara non-AS, termasuk Indonesia yang dapat memengaruhi kinerja net ekspor.



Sumber: Trading Economics

Grafik 4.19 Pertumbuhan Ekonomi Mitra Dagang Utama



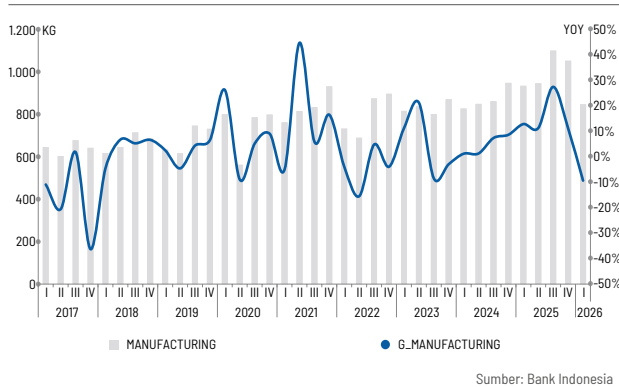
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.20 Pertumbuhan Volume Ekspor ke Negara Tujuan Utama DKI Jakarta

2. Volume Ekspor Manufaktur sebagai industri utama Jakarta berkontraksi

Ekspor produk manufaktur Jakarta pada triwulan I 2026 berbalik arah menjadi berkontraksi sebesar 9,26% (yoy) setelah tumbuh 11,28% (yoy). Ekspor produk otomotif sebagai ekspor utama produk manufaktur Jakarta yang sempat tertekan pada akhir 2024 karena persyaratan pemenuhan standar uji keselamatan, secara bertahap sudah menunjukkan pemulihan, namun kembali melambat (Grafik 4.21). Ke depan, tekanan fragmentasi perdagangan dan tensi

geopolitik global yang berpotensi meningkat, dapat memengaruhi pola dan volume perdagangan global. Untuk itu, penguatan kebijakan hilirisasi industri menjadi faktor kunci kemandirian dan kemajuan ekonomi nasional guna peningkatan nilai tambah sumber daya, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor dan dapat memperkuat volume ekspor korporasi pada industri manufaktur. Selain itu, diversifikasi ekspor ke negara-negara non-tradisional menjadi kunci untuk menjaga kinerja ekspor manufaktur khususnya otomotif.



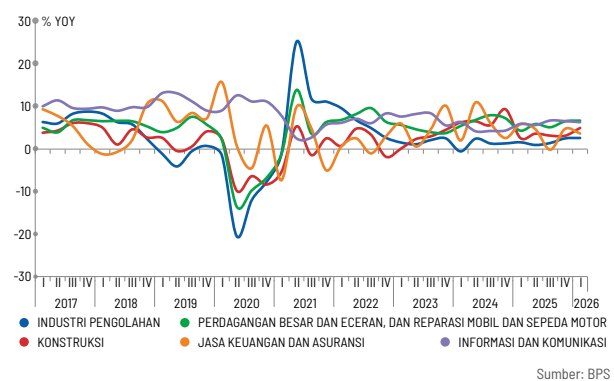
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 4.21 Pertumbuhan Volume Ekspor Industri DKI Jakarta

3. Kegiatan investasi melanjutkan pertumbuhan yang positif dan perlu terus didukung

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tumbuh tinggi meski melambat dari 31,96% (yoy) pada triwulan IV 2025 menjadi 12,82% (yoy). Pertumbuhan ini terutama ditopang kenaikan realisasi investasi PMA yang tumbuh 11,92% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya sebesar 2,62% (yoy). Sedangkan, PMDN tumbuh 13,40% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 54,74% (yoy). Berdasarkan sektor, realisasi penanaman modal terbesar pada triwulan I 2026 adalah sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi dengan pangsa 36%, Jasa Lainnya dengan pangsa 23%, serta Perdagangan dan Reparasi dengan pangsa 15%. Kinerja investasi yang positif didukung oleh berlanjutnya pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah dan swasta yang bersifat multitalun. Selain itu, kondisi makroekonomi dan stabilitas keuangan yang terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali, juga mendorong peningkatan kepercayaan investor untuk menjadikan Jakarta sebagai salah satu pilihan investasi utama mereka. Ke depan, kepastian hukum, sinergi kebijakan pusat dan daerah, serta simplikasi dan kejelasan proses perizinan perlu diperkuat untuk menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.

Kinerja Korporasi - Umum

Di tengah berbagai tantangan, baik global maupun domestik, perekonomian DKI Jakarta tetap resilien dan mencatatkan pertumbuhan di atas 5%. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 didukung oleh pertumbuhan yang tinggi pada berbagai komponen LU utama, dengan pertumbuhan tertinggi pada LU Perdagangan (Grafik 4.22). Kinerja positif LU Perdagangan tersebut didorong oleh tetap terjaganya permintaan domestik, meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa, serta tingginya mobilitas masyarakat. Selain itu, LU utama lainnya seperti LU Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan, serta Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan pertumbuhan yang solid, mencerminkan masih kuatnya aktivitas dunia usaha di tengah ketidakpastian global. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa korporasi di DKI Jakarta secara umum masih mampu mempertahankan kinerja usaha dan beradaptasi terhadap berbagai dinamika perekonomian yang berlangsung.



Sumber: BPS
Grafik 4.22 Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Unggulan DKI Jakarta

Eksposur Perbankan pada Sektor Korporasi Perkreditan

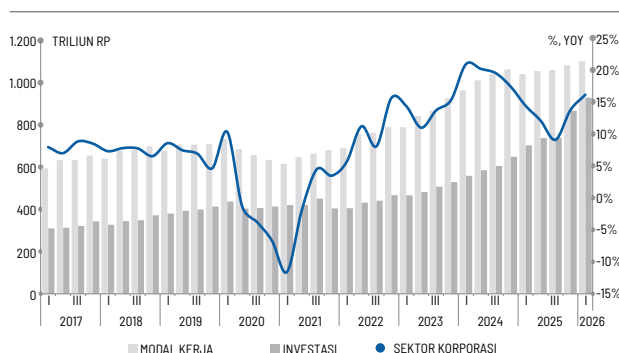
Kredit korporasi di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh tinggi sebesar 16,33% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 13,91% (yoy). Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kredit modal kerja korporasi yang tumbuh sebesar 5,82% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,92% (yoy) (Grafik 4.23). Secara sektoral, kredit korporasi pada sektor-sektor utama Jakarta mengalami pertumbuhan yang positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor konstruksi, transportasi pergudangan, dan industri pengolahan sejalan dengan tetap kuatnya kinerja usaha pada sektor-sektor tersebut (Tabel 4.3 dan Grafik 4.24).

Dari sisi kualitas kredit, *Non-Performing Loan* (NPL) kredit korporasi terjaga di level rendah sebesar 1,11%, sedikit lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang sebesar 0,98% (Grafik 4.25). Kondisi ini dipengaruhi oleh tetap baiknya kemampuan membayar korporasi dan terjaganya kondisi likuiditas korporasi.

Tabel 4.2 Kredit Korporasi Menurut Sektor Ekonomi

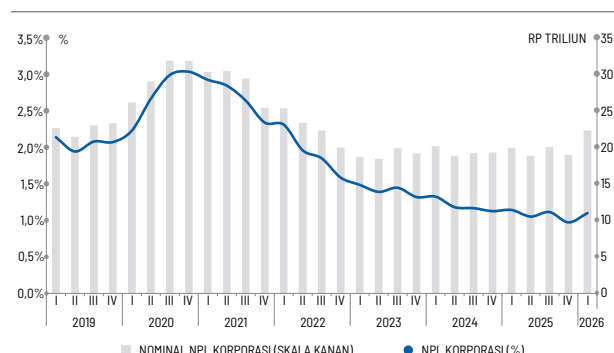
NO	SEKTOR EKONOMI	Sep-24			Dec-24			Sep-25			Dec-25		
		BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)	BAKI DEBIT (Rp T)	PANGSA (%)	PERTUMB. KREDIT (%.yoy)
1	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN	247,41	15,06%	19,51%	253,06	14,81%	11,63%	261,70	14,58%	5,78%	276,56	14,21%	9,29%
2	INDUSTRI PENGOLAHAN	331,84	20,20%	16,98%	340,79	19,95%	15,15%	356,91	19,89%	7,55%	376,26	19,33%	10,41%
3	PERANTARA KEUANGAN	302,55	18,41%	20,83%	307,59	18,00%	16,92%	280,00	15,60%	-7,45%	284,29	14,61%	-7,57%
4	REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN	205,90	12,53%	9,62%	204,87	11,99%	4,61%	210,38	11,72%	2,18%	231,96	11,92%	13,23%
5	TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI	201,32	12,25%	20,36%	215,97	12,64%	19,81%	240,55	13,40%	19,49%	253,49	13,03%	17,38%
6	KONSTRUKSI	87,57	5,33%	-2,73%	91,70	5,37%	8,57%	89,23	4,97%	1,90%	150,52	7,73%	64,15%
7	PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN	59,45	3,62%	27,48%	62,87	3,68%	16,31%	88,47	4,93%	48,80%	94,92	4,88%	50,99%
8	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN	102,18	6,22%	140,52%	121,37	7,10%	130,39%	133,53	7,44%	30,68%	130,75	6,72%	7,73%
9	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM	26,82	1,63%	-5,11%	27,40	1,60%	-3,76%	26,27	1,46%	-2,07%	23,97	1,23%	-12,53%
10	LISTRIK, GAS DAN AIR	33,28	2,03%	-0,94%	34,04	1,99%	3,49%	45,89	2,56%	37,89%	60,47	3,11%	77,63%
11	LAIN-LAIN	44,64	2,72%	26,40%	48,74	2,85%	26,52%	61,81	3,44%	38,46%	62,86	3,23%	28,96%
Total		1642,96	100,00%	19,70%	1708,39	100,00%	17,58%	1794,74	100,00%	9,24%	1946,05	100,00%	13,91%

Sumber: Bank Indonesia



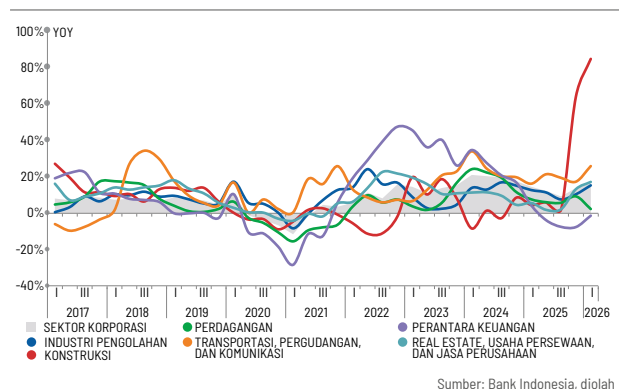
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.23 Pertumbuhan kredit Korporasi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.25 NPL pada Sektor Korporasi

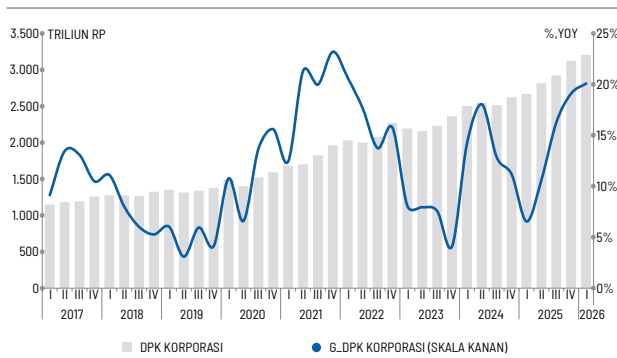


Sumber: Bank Indonesia, diolah

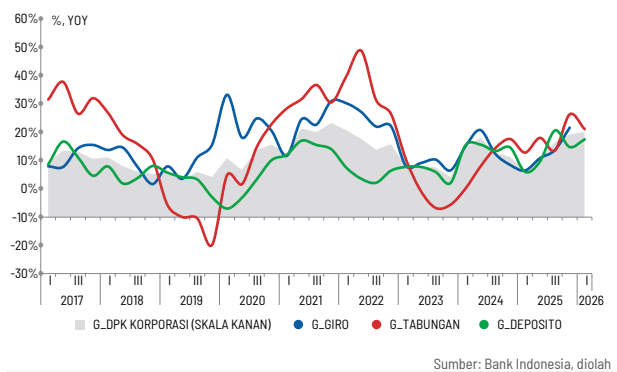
Grafik 4.24 Penyaluran Kredit pada Sektor Utama Korporasi

Dana Pihak Ketiga

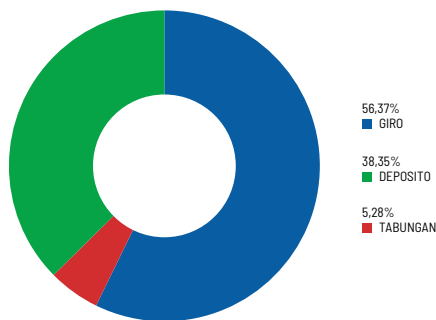
Dari sisi pendanaan, dana pihak ketiga (DPK) korporasi tumbuh meningkat sejalan dengan meningkatnya DPK bank umum. Pada triwulan IV 2025, DPK Korporasi tumbuh sebesar 20,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 19,10% (yoy) (Grafik 4.26). Peningkatan pertumbuhan terjadi pada semua jenis DPK Korporasi kecuali DPK Tabungan, dengan kontributor utama pertumbuhan adalah Giro Korporasi diikuti oleh Deposito Korporasi (Grafik 4.27). Laju pertumbuhan komponen Giro pada triwulan I 2026 mencapai 21,83% (yoy) dan menjadi kontributor utama pertumbuhan, mengingat pangsa yang dominan sebesar 57,24% terhadap keseluruhan DPK korporasi (Grafik 4.28).



Grafik 4.26 Perkembangan DPK Korporasi



Grafik 4.27 Pertumbuhan Komponen DPK Korporasi



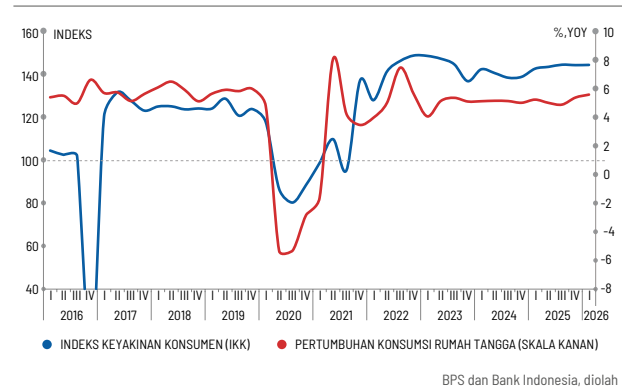
Grafik 4.28 Komposisi DPK Korporasi

C. PERKEMBANGAN KINERJA SEKTOR RUMAH TANGGA

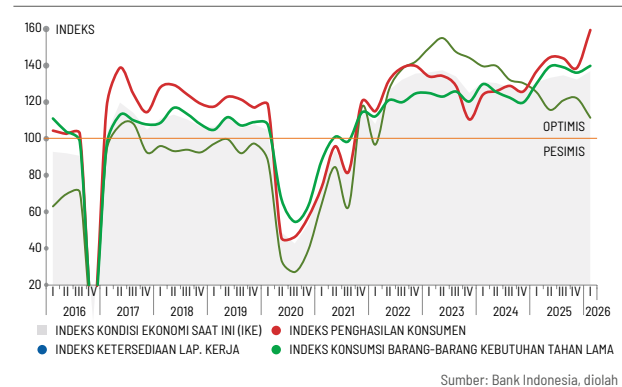
Sumber Kerentanan dan Risiko Sektor Rumah Tangga

Sejalan dengan perkembangan kinerja korporasi, kinerja rumah tangga pada triwulan I 2026 secara umum masih kuat. Kinerja rumah tangga yang berdaya tahan tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang pada triwulan I 2026 terjaga tinggi pada level optimis sebesar 145,4; lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya 145,3 (Grafik 4.29). Optimisme tersebut diperkuat dengan tingginya Indeks Kondisi Ekonomi saat ini (IKE), dengan nilai sebesar 136,40 meningkat dari triwulan sebelumnya (131,90). Meningkatnya indeks IKE didukung oleh

tingginya indeks Penghasilan Konsumen dan Indeks Konsumsi barang-barang kebutuhan tahan lama. Adapun indeks Ketersediaan Lapangan Kerja mengalami penurunan namun masih tetap terjaga pada zona optimis (Grafik 4.30).



Grafik 4.29 Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen dan Konsumsi RT



Grafik 4.30 Perkembangan Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja, Penghasilan Konsumen, dan Konsumsi Barang Tahan Lama

Namun demikian, apabila dilihat lebih dalam lagi berdasarkan tingkat pendapatannya, terjadi potensi peningkatan risiko pada rumah tangga seiring pelemahan daya beli rumah tangga khususnya pada kelas menengah ke bawah seiring penurunan nilai pada tingkat upah riil-nya.

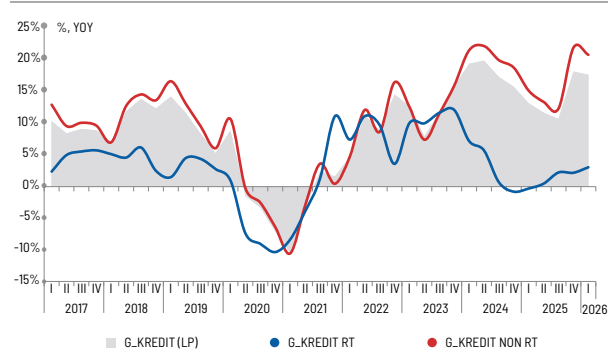
Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi peningkatan konsumsi rumah tangga DKI Jakarta yaitu: (i) Perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang tecermin dari meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor jasa, perdagangan, dan transportasi seiring normalisasi aktivitas ekonomi pascapandemi serta meningkatnya mobilitas masyarakat; (ii) Kenaikan upah minimum dan penyesuaian gaji pada sejumlah sektor formal yang mendorong peningkatan pendapatan disposabel rumah tangga, khususnya pada kelompok pekerja tetap; (iii) Meningkatnya aktivitas sosial dan penyelenggaraan berbagai event berskala nasional maupun internasional di Jakarta yang mendorong belanja masyarakat pada sektor makanan-minuman, rekreasi, perhotelan, dan ritel; (iv) Penyaluran bantuan sosial serta berbagai stimulus fiskal dan program perlindungan sosial Pemerintah yang membantu menjaga daya beli, khususnya pada kelompok menengah bawah; serta (v)

Tetap terjaganya optimisme konsumen di tengah stabilitas inflasi dan ekspektasi ekonomi yang membaik, sehingga mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, termasuk belanja non-esensial dan *durable goods*.

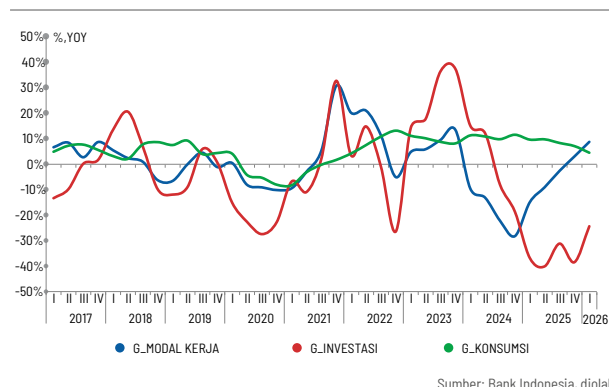
Peningkatan potensi *spillover* risiko Rumah Tangga terhadap perbankan tecermin dari peningkatan rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) Rumah Tangga meskipun masih di bawah *threshold* 5%. Ke depan, perlu diwaspadai beberapa faktor risiko yang berpotensi dapat semakin menekan daya beli dan mengurangi kemampuan membayar sektor Rumah Tangga. Pertama, kenaikan inflasi yang berpotensi meningkatkan alokasi pendapatan debitur untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari, seperti biaya makanan dan transportasi, sehingga mengurangi alokasi pendapatannya untuk pembayaran cicilan. Kedua, risiko kenaikan suku bunga yang dapat meningkatkan beban bunga debitur terutama debitur dengan kredit suku bunga mengambang. Ketiga, potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan nasional yang dapat memengaruhi kesempatan kerja dan pendapatan rumah tangga.

Eksposur Perbankan pada Sektor Rumah Tangga Perkreditan

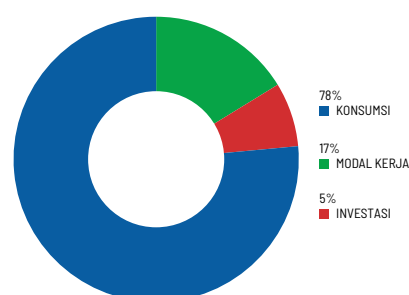
Berbeda dengan total kredit dan kredit korporasi, kredit pada sektor rumah tangga menunjukkan peningkatan pada triwulan I 2026 dan tumbuh positif. Kredit rumah tangga tercatat tumbuh sebesar 3,05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2,18% (yoy) (Grafik 4.31). Berdasarkan jenisnya, perbaikan kredit rumah tangga dipengaruhi oleh peningkatan kredit modal kerja yang tumbuh sebesar 8,78% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3,06% (yoy). Kinerja kredit modal kerja rumah tangga tersebut menahan penurunan total kredit rumah tangga lebih lanjut di tengah kontraksi pertumbuhan pada kredit konsumsi rumah tangga (Grafik 4.32). Hal ini dikarenakan kredit modal kerja rumah tangga memiliki pangsa dari total kredit rumah tangga mencapai 16,34% (Grafik 4.33).



Grafik 4.31 Perkembangan Kredit Rumah Tangga



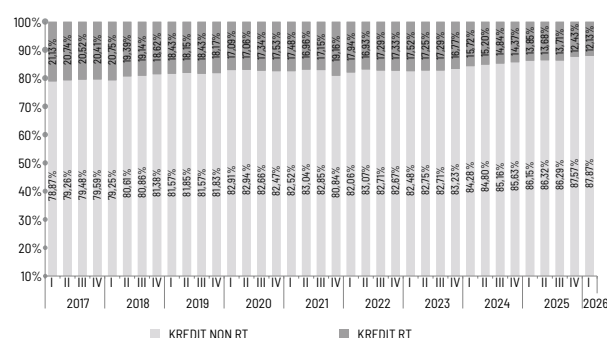
Grafik 4.32 Perkembangan Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga



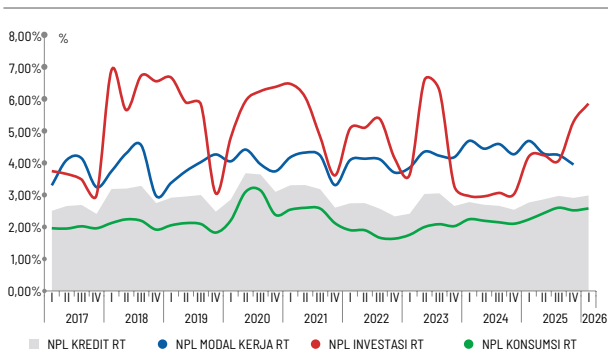
Grafik 4.33 Komposisi Jenis Penggunaan Kredit Rumah Tangga

Kinerja kredit konsumsi rumah tangga yang relatif stabil tersebut dipengaruhi oleh tetap terjaganya daya beli masyarakat seiring meningkatnya optimisme masyarakat yang tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Perkembangan tersebut juga didukung oleh kondisi ekonomi moneter yang kondusif sejalan dengan tren penurunan suku bunga kredit merespons penurunan *BI rate*, serta pelonggaran standar penyaluran kredit oleh bank, terutama pada aspek agunan, sehingga mempermudah masyarakat mengakses kredit konsumsi.

Meskipun menunjukkan peningkatan, namun kenaikan nominal kredit rumah tangga tidak setinggi kenaikan nominal kredit non-rumah tangga, sehingga pangsa kredit rumah tangga masih melanjutkan tren penurunan di triwulan I 2026 menjadi 12,13% (Grafik 4.34).



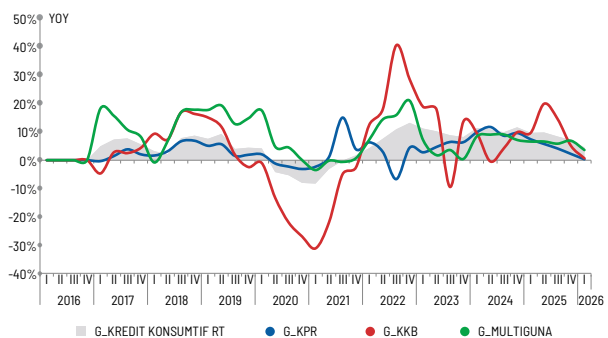
Grafik 4.34 Komposisi Kredit RT dan Non-RT



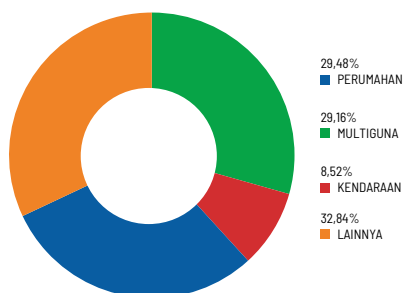
Grafik 4.35 NPL Kredit Rumah Tangga

Dari sisi kualitas kredit, rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan/ NPL*) Rumah Tangga masih relatif rendah yaitu sebesar 3,00%, cukup jauh di bawah *threshold* 5%. Rasio NPL pada triwulan I 2026 ini sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,92%. Rendahnya NPL RT terutama didorong oleh rendahnya NPL pada kredit konsumsi rumah tangga (Grafik 4.35).

Berdasarkan tujuan penyalurannya, perlambatan kredit konsumsi rumah tangga pada triwulan I 2026 didorong oleh penurunan pada ketiga komponen kredit konsumsi rumah tangga, yaitu: kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) dan kredit multiguna. (Grafik 4.36 dan 4.37).



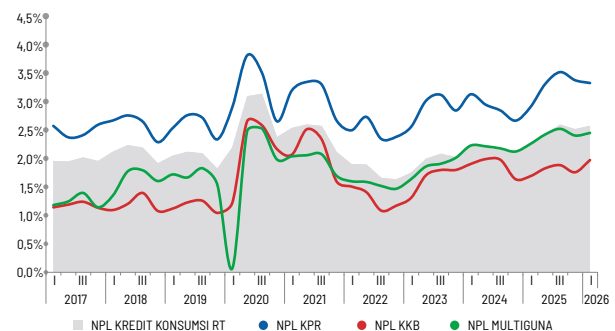
Grafik 4.36 Perkembangan Kredit Konsumsi Rumah Tangga



Grafik 4.37 Komposisi Kredit Konsumsi Rumah Tangga

Tumbuh positifnya kredit multiguna didorong oleh tingginya permintaan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, pengobatan, serta pembelian barang-barang. Fleksibilitas kredit multiguna menjadi daya tarik utama bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk berbagai tujuan, terutama saat kebutuhan mendesak atau prioritas lainnya. Adapun pertumbuhan kredit KPR didukung kebijakan pemerintah memberikan insentif PPN DTP pembelian rumah tapak dan rumah. Selain itu, untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah menambah alokasi KPR subsidi sebanyak 34.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi MBR diantaranya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Biaya Administrasi (BBA), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan bantuan Rumah Sederhana Terpadu (RST). Sementara itu, peningkatan kredit KKB didukung oleh kebijakan Bank Indonesia untuk memperpanjang insentif uang muka kredit (DP) 0% untuk kendaraan bermotor baru hingga Desember 2025.

Dari sisi risiko kredit, sejalan dengan kenaikan NPL kredit konsumsi rumah tangga, kenaikan NPL juga terjadi pada semua jenis kredit konsumsi rumah tangga. Tingkat NPL terbesar terjadi pada kredit KPR diikuti Multiguna dan KKB (Grafik 4.38).

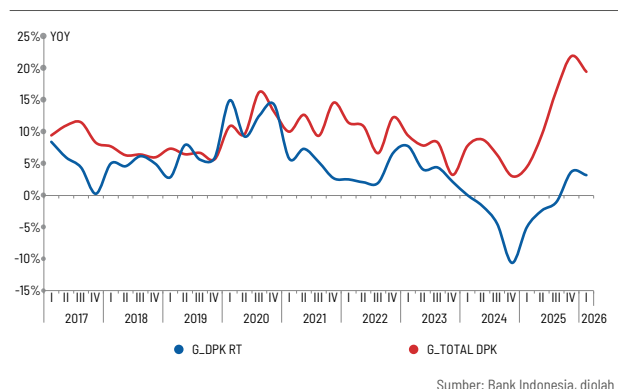


Grafik 4.38 NPL Kredit Konsumsi Rumah Tangga

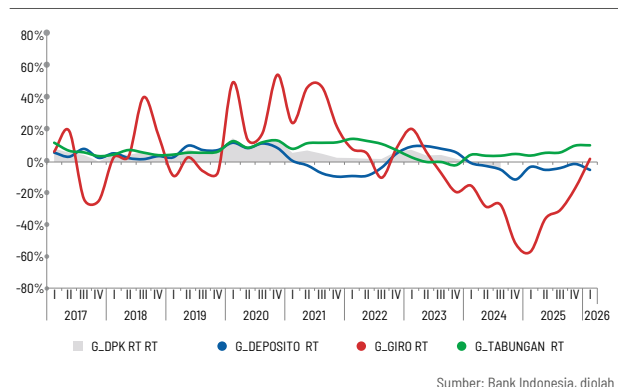
Dana Pihak Ketiga (DPK) Rumah Tangga

DPK rumah tangga di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 mencatat pertumbuhan yang positif, dan membaik dibandingkan triwulan sebelumnya. DPK rumah tangga mencatat pertumbuhan 3,18% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan 3,72% (yoy) (Grafik 4.39). Berdasarkan jenisnya, pertumbuhan DPK rumah tangga yang tetap positif ditopang oleh peningkatan pada komponen DPK tabungan rumah tangga, dan perbaikan kontraksi pada komponen DPK giro rumah tangga. DPK tabungan rumah tangga tumbuh 10,58% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya (10,38%; yoy). Giro rumah tangga pada triwulan I 2026 tumbuh positif sebesar 1,93% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 16,68% (yoy). Di sisi lain,

penurunan total DPK rumah tangga utamanya disebabkan oleh penurunan komponen DPK deposito rumah tangga yang berkontraksi sebesar 4,99% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1,25% (yoy)(Grafik 4.40).

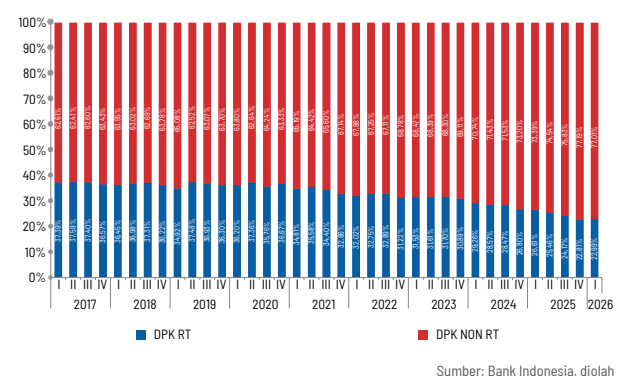


Grafik 4.39 Pertumbuhan DPK Rumah Tangga

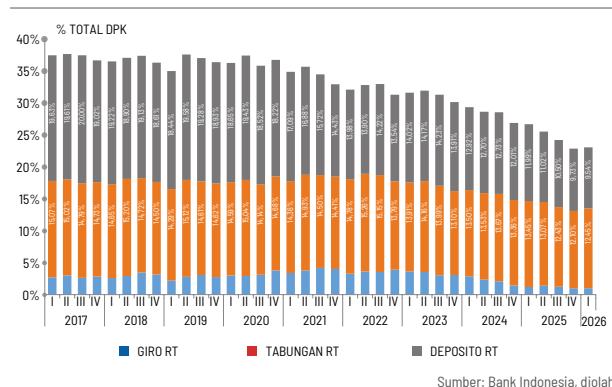


Grafik 4.40 Pertumbuhan DPK per jenis Simpanan

Jika dilihat dari komposisinya, porsi DPK rumah tangga terhadap total DPK di DKI Jakarta cenderung menurun (Grafik 4.42). Sementara itu, pangsa DPK rumah tangga terhadap total DPK didominasi oleh tabungan sebesar 12,45%, diikuti oleh deposito dan giro masing-masing sebesar 9,54% dan 1,00% (Grafik 4.42).



Grafik 4.41 Komposisi DPK

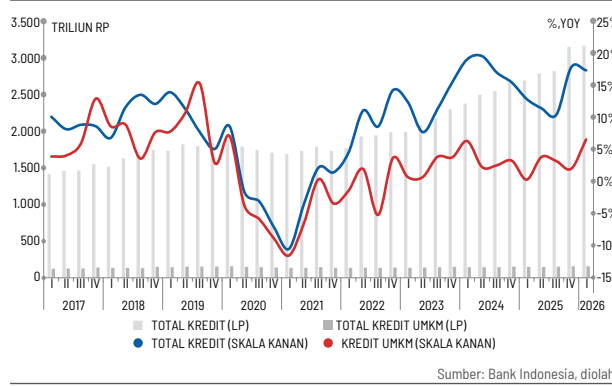


Grafik 4.42 Komposisi DPK Rumah Tangga

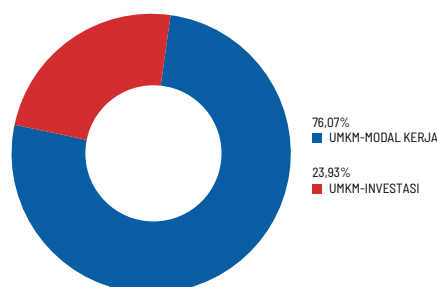
D. PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN DAN UMKM

Akses Keuangan kepada UMKM

Penyaluran kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menunjukkan pertumbuhan positif sejalan dengan kuatnya penyaluran kredit bank umum. Pada triwulan I 2026, kredit UMKM tumbuh sebesar 6,76% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,16% (yoy) (Grafik 4.43). Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit UMKM terutama diberikan untuk kredit modal kerja dengan pangsa sebesar 76,07% dan diikuti kredit investasi sebesar 23,93% (Grafik 4.44).



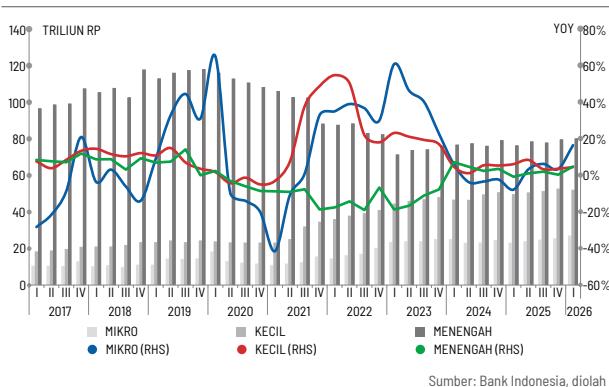
Grafik 4.43 Pertumbuhan Kredit UMKM di Jakarta



Grafik 4.44 Porsi Kredit UMKM di Jakarta Berdasarkan Jenis Penggunaan

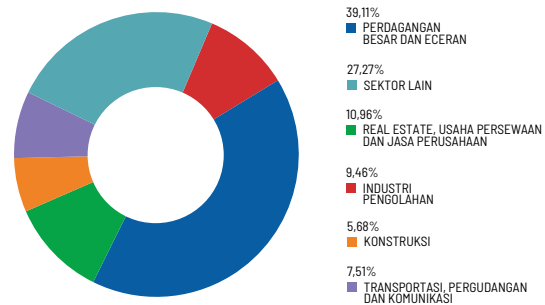
Berdasarkan skala usahanya, kenaikan kredit UMKM ditopang oleh pertumbuhan kredit skala mikro. Pada triwulan I 2026, kredit UMKM skala mikro tumbuh sebesar 16,81% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,73% (yoy). Sejalan dengan itu, pertumbuhan kredit skala kecil dan menengah masing-masing juga meningkat dari 3,85% (yoy) dan 0,59% (yoy) menjadi 4,75% (yoy) dan 5,03% (yoy) (Grafik 4.45).

Secara keseluruhan, pangsa kredit UMKM di Jakarta masih cukup rendah yaitu sekitar 5,0% dari total kredit perbankan. Kondisi ini antara lain dipengaruhi karakteristik sektor usaha di Jakarta yang lebih didominasi oleh sektor korporasi. Karakter Jakarta sebagai kota pusat ekonomi dan bisnis menyebabkan harga lahan dan upah tenaga kerja di Jakarta menjadi lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Berbagai faktor tersebut menyebabkan pertumbuhan kredit UMKM berdasarkan lokasi proyek di Jakarta cenderung terbatas. Secara umum, pelaku UMKM cenderung hanya memanfaatkan wilayah DKI Jakarta sebagai tempat penjualan/transaksi. Sedangkan untuk pengolahan maupun lokasi usaha lebih banyak berada di daerah penyangga ibukota, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok.



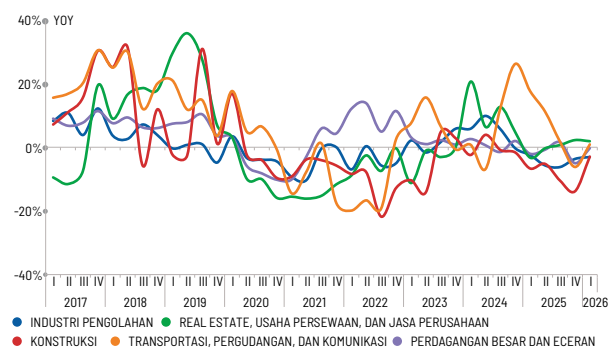
Grafik 4.45 UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Berdasarkan lapangan usaha, penyaluran kredit UMKM lebih diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi utama di Jakarta. Sektor-sektor ekonomi yang banyak menerima pembiayaan UMKM yaitu sektor perdagangan besar dan eceran dengan pangsa 39,11%, diikuti sektor real estate (10,96%), industri pengolahan (9,46%), sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi (7,51%) dan sektor konstruksi (5,68%) (Grafik 4.46). Dilihat dari pertumbuhannya, peningkatan kredit UMKM terutama terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran (Grafik 4.47).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

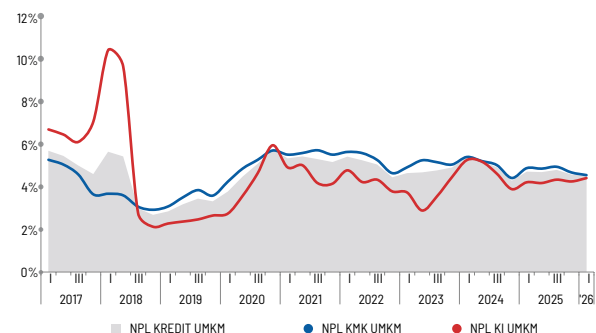
Grafik 4.46 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

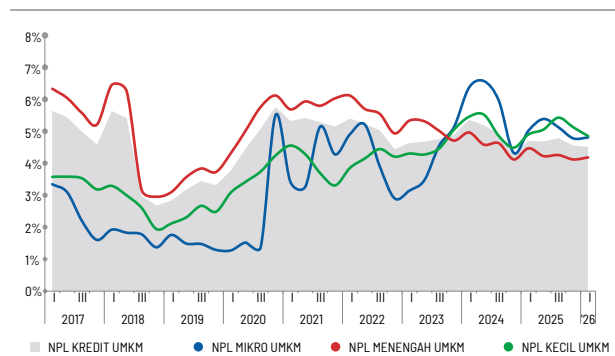
Grafik 4.47 Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Utama

Pertumbuhan kredit yang positif ini mengindikasikan perbankan masih mempunyai minat untuk membiayai kredit kepada UMKM dengan tetap menjaga kehati-hatian. Hal ini seiring dengan risiko kredit UMKM yang masih cukup tinggi meskipun mulai menunjukkan penurunan, baik jenis kredit Modal Kerja maupun Investasi (Grafik 4.48). Berdasarkan kelompok debitur, penurunan risiko kredit UMKM terjadi pada kelompok menengah (Grafik 4.49).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.48 NPL Kredit UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.49 NPL Kredit UMKM Berdasarkan Skala Usaha

Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No.47 tahun 2024 perihal Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang sudah diimplementasi secara bertahap sejak Januari 2025¹ berpotensi memberi ruang kepada UMKM yang sudah ada untuk bangkit dan kembali mendapatkan akses pembiayaan. Kebijakan ini bertujuan untuk membersihkan catatan kredit macet, sehingga UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam dapat kembali mendapatkan akses permodalan, yang pada akhirnya diharapkan mendukung terus berlanjutnya peningkatan penyaluran kredit baru di masa mendatang. Dari sisi perbankan, kebijakan penghapusan piutang macet UMKM diperkirakan tidak memengaruhi kinerja keuangan perbankan mengingat kredit yg dihapus tagih merupakan kredit yang sudah dihapus buku sehingga bank sudah membukukan beban kerugian (CKPN 100%) dan mengeluarkan pencatatan kredit macet tersebut dari neraca bank.

Pengembangan UMKM

Pelaksanaan program pengembangan UMKM di Bank Indonesia dilakukan berdasarkan 3 pilar kebijakan yakni korporatisasi, pengembangan kapasitas dan akses pembiayaan. Program pengembangan UMKM oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I 2026 (Januari – Maret 2026) terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: i) program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) 2026, ii) Export Coaching Program (ECP) 2026, dan iii) promosi dan fasilitasi perdagangan.

1. Program Jagoan Wirausaha Jakarta (JAWARA) 2026

Program JAWARA merupakan program pengembangan UMKM yang sudah diselenggarakan KPwBI Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2024. Program ini bertujuan mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global dengan berfokus pada penguatan aspek manajemen bisnis, membentuk pola pikir kewirausahaan yang adaptif dan siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Program JAWARA 2026 menghadirkan inovasi melalui beberapa kategori pembinaan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan UMKM. Kategori JAWARA *Go-Onboard* diperuntukkan bagi UMKM yang

baru bergabung dalam ekosistem pembinaan dan membutuhkan penguatan dasar bisnis. Program ini bertujuan membantu UMKM agar siap masuk ke dalam ekosistem pembinaan serta mampu memanfaatkan pasar digital secara optimal.

Sementara itu, kategori JAWARA *Go-Export* ditujukan bagi UMKM yang memiliki potensi ekspor atau ingin mempersiapkan produknya untuk menembus pasar internasional. Melalui kategori ini, UMKM didorong untuk meningkatkan kesiapan usaha agar mampu bersaing dan memasuki pasar global.

Kategori JAWARA *Go-Sustain* diperuntukkan bagi UMKM yang membutuhkan penguatan aspek keberlanjutan usaha, termasuk penerapan praktik bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan. Program ini bertujuan mendukung UMKM agar dapat tumbuh secara berkelanjutan, meningkatkan daya saing usaha, serta memperluas akses pasar melalui penerapan praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab.

Adapun kategori JAWARA *Go-Tourism* difokuskan bagi UMKM yang produknya berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta, atau memiliki potensi mendukung industri pariwisata di DKI Jakarta. Program ini bertujuan mendorong UMKM menjadi bagian dari ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta yang terus berkembang.

Program JAWARA tahun ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pelaku UMKM, tecermin dari jumlah pendaftar yang mencapai 879 UMKM. Dari jumlah tersebut, sebanyak 352 UMKM dinyatakan lolos seleksi administrasi dan mengikuti tahap pembinaan awal melalui JAWARA *Go-Onboard*. Selanjutnya, peserta melalui proses kurasi untuk pengelompokan ke dalam kategori lanjutan, yaitu *Go-Export*, *Go-Sustain*, dan *Go-Tourism*, dengan masing-masing kategori diikuti oleh 40 UMKM terpilih. Pada awal Mei 2026, telah dilaksanakan kegiatan pembukaan rangkaian pendampingan Program JAWARA sebagai langkah awal proses pembinaan. Ke depan, rangkaian program ini juga akan dilanjutkan dengan kegiatan *business matching* dan *showcasing* guna memperluas peluang akses pasar, kemitraan usaha, serta meningkatkan eksposur produk UMKM peserta.

2. Export Coaching Program (ECP) 2026

Export Coaching Program (ECP) merupakan program pendampingan bagi UMKM berorientasi ekspor yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha untuk memasuki pasar internasional. Program ini kembali diselenggarakan sebagai bentuk keberlanjutan upaya penguatan UMKM ekspor, sekaligus menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembinaan, pendampingan, serta penguatan strategi bisnis dan ekspor secara lebih terarah.

Pelaksanaan ECP tahun ini juga mendapatkan antusiasme yang tinggi dari para pelaku usaha yang memiliki orientasi ekspor. Hal tersebut tecermin dari jumlah pendaftar yang mencapai 122 UMKM dari berbagai sektor usaha. Melalui proses seleksi yang mempertimbangkan potensi produk, kesiapan usaha, serta

¹ Pemerintah upayakan perkuat akses pembiayaan UMKM lewat hapus piutang – ANTARA News

peluang penetrasi pasar internasional, telah terpilih sebanyak 30 UMKM untuk mengikuti rangkaian pendampingan intensif dalam program ECP. Para peserta terpilih nantinya akan memperoleh pembinaan yang difokuskan pada penguatan kapasitas ekspor, peningkatan kualitas dan daya saing produk, serta strategi pengembangan pasar internasional.

Pada awal Mei 2026, kegiatan pembukaan pendampingan ECP telah diselenggarakan bersamaan dengan pembukaan Program JAWARA sebagai simbol dimulainya rangkaian pembinaan UMKM tahun ini. Selanjutnya, peserta ECP akan mengikuti berbagai kegiatan pendampingan dan penguatan kapasitas yang dirancang untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar internasional, serta membuka peluang kolaborasi dan kemitraan bisnis ke depan.

3. Promosi dan Fasilitasi Perdagangan

Dalam upaya memperluas akses pasar bagi UMKM, promosi produk-produk unggulan terus diakselerasi melalui partisipasi pada berbagai pameran dan strategic event, baik di dalam maupun luar negeri. Pada Triwulan II 2026, sejumlah UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta telah mengikuti kegiatan promosi perdagangan sebagai bagian dari upaya peningkatan eksposur produk, perluasan jejaring bisnis, serta penajakan peluang pasar internasional, antara lain melalui kegiatan:

a) Bazar Balai Kota di Jakarta (9 – 12 Maret 2026)

Kegiatan promosi ini diikuti oleh 2 UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu Sookie dan Bening Jaya. Bazar Balai Kota merupakan *showcasing* UMKM yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pemasaran produk UMKM lokal sekaligus meningkatkan eksposur produk kepada masyarakat dan lingkungan pemerintahan. Melalui kegiatan tersebut, UMKM memperoleh kesempatan untuk memperluas pasar domestik serta memperkenalkan produk unggulan secara lebih luas.

b) Spring Fair UK 2026 di Birmingham, Inggris (1 – 4 Februari 2026)

Kegiatan promosi perdagangan internasional ini diikuti oleh 2 UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu DCraft Indonesia dan Long Story Short. Spring Fair merupakan salah satu pameran dagang terbesar di Inggris yang mempertemukan pelaku usaha sektor *home décor*, *gift*, *fashion*, dan *lifestyle* dengan pembeli serta distributor internasional. Keikutsertaan UMKM binaan pada kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama bisnis dan memperluas akses pasar ekspor produk kreatif Indonesia.

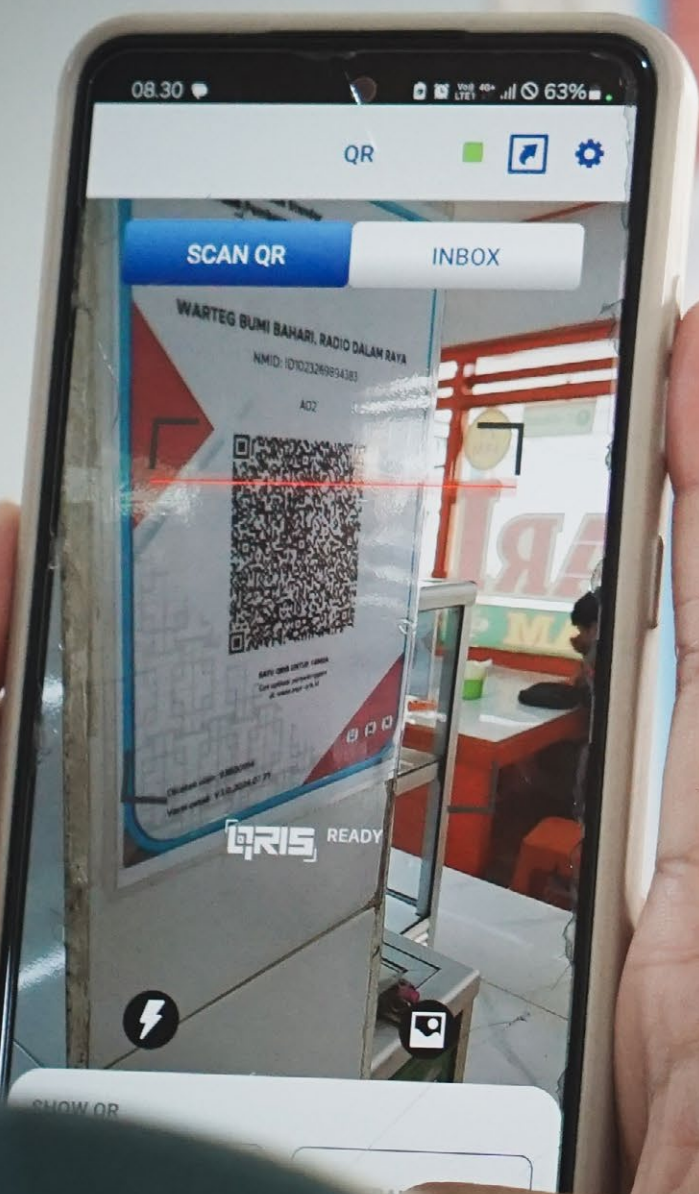
c) Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2026 di Jakarta (5 – 8 Maret 2026)

Kegiatan ini diikuti oleh 2 UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu Keboen Keyang Pottery dan Nancy Craft. IFEX merupakan pameran furnitur dan kerajinan bertaraf internasional yang menjadi ajang promosi produk furnitur dan kriya Indonesia kepada buyer global. Partisipasi UMKM dalam kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jejaring bisnis, memperkuat daya saing produk, serta membuka peluang ekspor ke pasar internasional. Kegiatan ini juga menghasilkan *Letter of Intent* dengan buyer.

d) FOODEX Japan 2026 di Tokyo, Jepang (10 – 13 Maret 2026)

Kegiatan ini diikuti oleh UMKM binaan KPwBI Provinsi DKI Jakarta, yaitu Kultiva Co. FOODEX merupakan ajang promosi dan pameran sektor makanan dan minuman yang mempertemukan pelaku usaha dengan buyer, distributor, dan mitra bisnis dari berbagai daerah maupun negara. Keikutsertaan UMKM binaan dalam kegiatan ini menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan produk pangan unggulan, memperluas jaringan pemasaran, serta membuka peluang kerja sama dan perluasan kapal.





Bab 5

Sistem Pembayaran

Pada triwulan I 2026, peredaran uang kartal di DKI Jakarta tercatat mengalami net *outflow*, sementara transaksi pembayaran nontunai tetap tumbuh yang didukung perluasan akseptasi QRIS. Adapun dari sisi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) juga tumbuh positif sebesar 30,78% (yoy) pada triwulan I 2026, lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Sementara dari sisi Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR), tetap mengalami pertumbuhan positif sebesar 15,44% (yoy), meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 21,28% (yoy). Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan pertumbuhan transaksi *outgoing* (dari dalam ke luar negeri) dan domestik (di dalam negeri) yang mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara, pertumbuhan nilai transaksi *incoming* (dari luar ke dalam negeri) mengalami perbaikan kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya.



PERTUMBUHAN *INFLOW* TRANSAKSI UANG KARTAL (yoy)

-24,13%  **-19,19%**
Triwulan IV 2025 Triwulan I 2026



PERTUMBUHAN *OUTFLOW* TRANSAKSI UANG KARTAL (yoy)

0,06%  **-12,96%**
Triwulan IV 2025 Triwulan I 2026



PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI BI-RTGS (yoy)

20,40%  **42,10%**
Triwulan IV 2025 Triwulan I 2026



PERTUMBUHAN NILAI TRANSAKSI SKN-BI (yoy)

4,81%  **-12,18%**
Triwulan IV 2025 Triwulan I 2026

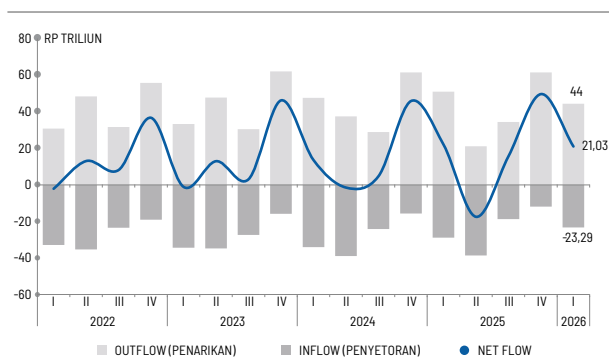
A. KONDISI UMUM

Pada triwulan I 2026, arus kas di DKI Jakarta tercatat pada posisi *net outflow* sebesar Rp21,03 triliun, sejalan dengan peningkatan permintaan uang kartal masyarakat pada periode musiman, bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Transaksi sistem pembayaran nontunai bernilai besar tercatat meningkat baik dari sisi nilai maupun volume. Adapun transaksi sistem pembayaran ritel tercatat tumbuh, meskipun SKNBI dan kartu ATM/debit melambat dibandingkan dengan triwulan IV 2025. Sementara itu, akseptasi QRIS terus meningkat yang tecermin dari akselerasi pertumbuhan volume transaksi QRIS pada triwulan I 2026 dengan pangsa Jakarta terhadap nasional sebesar 38,67%.

B. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN TUNAI

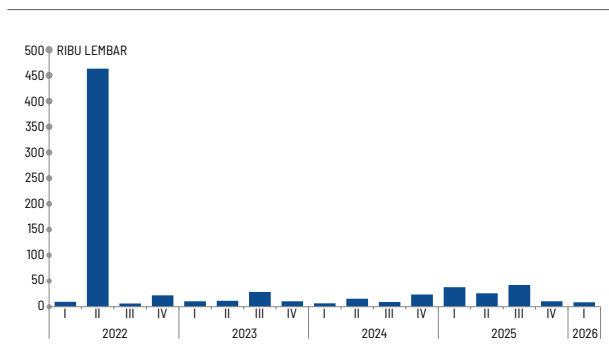
Peredaran uang kartal di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 mengalami *net outflow* sebesar Rp21,03 triliun. Hal ini menunjukkan jumlah uang kartal yang keluar dari Bank Indonesia (*cash outflow*) lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang kartal yang masuk ke Bank Indonesia (*cash inflow*), terutama dipengaruhi peningkatan kebutuhan uang kartal masyarakat pada periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idulfitri. Selanjutnya, *net outflow* DKI Jakarta pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi 4,84% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,30% (yoy). Secara rinci, *cash outflow* dan *cash inflow* DKI Jakarta pada triwulan I 2026 masing-masing tercatat sebesar Rp44,32 triliun dan Rp23,29 triliun, dengan laju pertumbuhan mengalami kontraksi masing-masing sebesar 12,96% (yoy) dan 19,19% (yoy).

Sementara itu, jumlah temuan uang yang diragukan keasliannya di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat sebanyak 8.670 lembar. Jumlah temuan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang mencapai 10.646 lembar. Sebagai tindak lanjut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pelaksanaan kampanye Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah (CBP) sebagai upaya menjaga kualitas dan keaslian uang Rupiah yang beredar di masyarakat. Penguatan kampanye dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang Rupiah melalui 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang) serta menjaga kualitas uang Rupiah agar tetap layak edar melalui prinsip 5J (Jangan Dilipat, Jangan Dicoret, Jangan Distapler, Jangan Diremas, dan Jangan Dibasahi).



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.1 Perkembangan Inflow dan Outflow Uang Kartal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

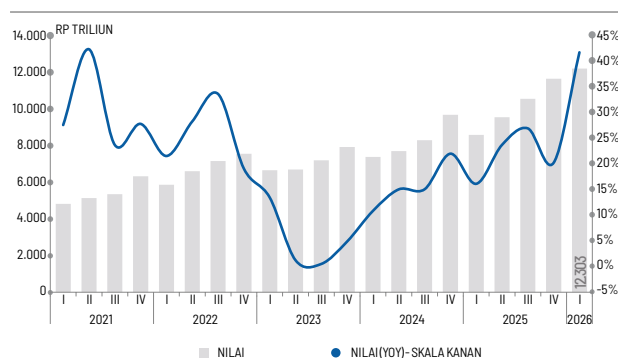
Grafik 5.2 Perkembangan Temuan Uang yang Diragukan Keasliannya

C. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN NONTUNAI

Bank Indonesia Real-Time Gross Settlement (BI-RTGS)

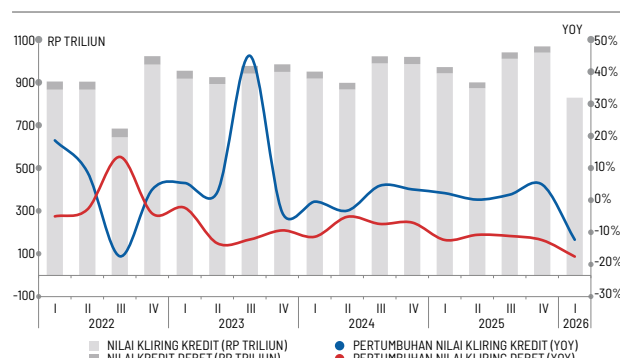
Pada triwulan I 2026, transaksi BI RTGS di DKI Jakarta tercatat mengalami pertumbuhan baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi BI-RTGS mencapai Rp12.303 triliun atau tumbuh 42,10% (yoy). Sementara itu, volume transaksi BI-RTGS tercatat 1,13 juta transaksi atau tumbuh 4,52% (yoy). Pertumbuhan transaksi BI-RTGS pada triwulan I 2026 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yakni nilai transaksi sebesar 20,40% (yoy) dan volume transaksi sebesar 4,11% (yoy). Akselerasi transaksi BI-RTGS ini diperkirakan bersumber dari akselerasi belanja Pemerintah untuk program prioritas nasional, terutama dari belanja APBN di DKI Jakarta yang di triwulan I 2026 tumbuh 37,02% (yoy).

Kinerja transaksi kliring di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara total, nilai transaksi melalui SKNBI di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 mencapai Rp866,71 triliun dengan volume sebesar 28,16 juta warkat.



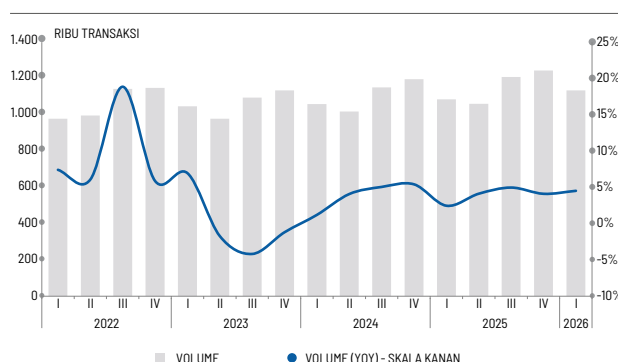
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.3 Perkembangan Nilai Transaksi BI-RTGS



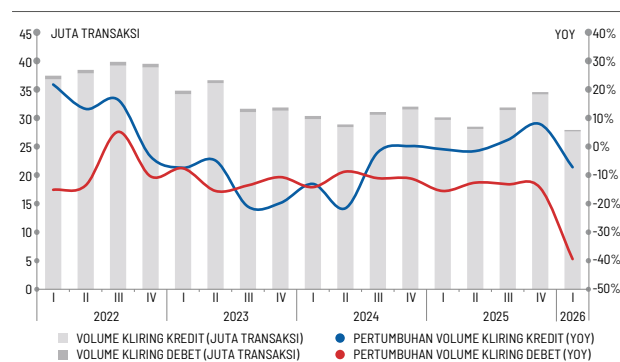
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.5 Perkembangan Nilai Transaksi SKNBI



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.4 Perkembangan Volume Transaksi BI-RTGS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.6 Perkembangan Volume Transaksi SKNBI

Nilai dan volume transaksi SKNBI pada triwulan I 2026 tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar 12,18% (yoy) dan 7,32% (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025 dengan nilai dan volume transaksi SKNBI yang masih tumbuh masing-masing sebesar 4,81% (yoy) dan 8,02% (yoy). Penurunan transaksi SKNBI tersebut menunjukkan pergeseran preferensi masyarakat dan pelaku usaha ke BI-FAST atau kanal *mobile banking* lainnya.

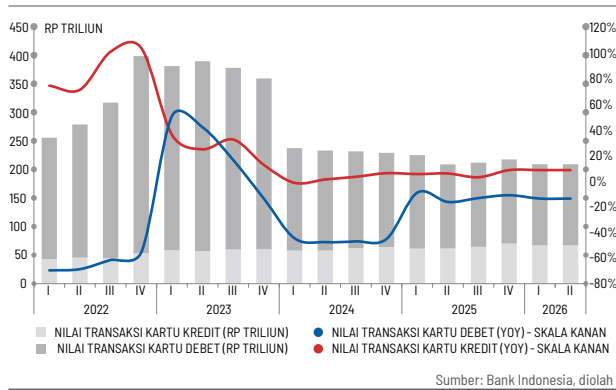
Nilai transaksi SKNBI di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 didominasi oleh kliring kredit dengan pangsa 97,19%. Nilai transaksi kliring kredit mencapai Rp842,31 triliun dengan volume sebesar 27,89 juta warkat. Secara tahunan, nilai dan volume transaksi kliring kredit tersebut tercatat mengalami kontraksi masing-masing 12,02% (yoy) dan 6,85% (yoy). Pertumbuhan tersebut tercatat lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025 dengan nilai transaksi sebesar 5,38% (yoy) dan volume transaksi sebesar 8,38% (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, pertumbuhan transaksi kliring debit tercatat mengalami penurunan baik nilai maupun volume. Pada triwulan I 2026, nilai transaksi kliring debit mencapai Rp24,40 triliun dengan volume sebanyak 270.890 warkat. Nilai dan volume tersebut masing-masing mengalami kontraksi 17,36% (yoy) dan 39,32% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 12,17% (yoy) dan 14,14% (yoy).

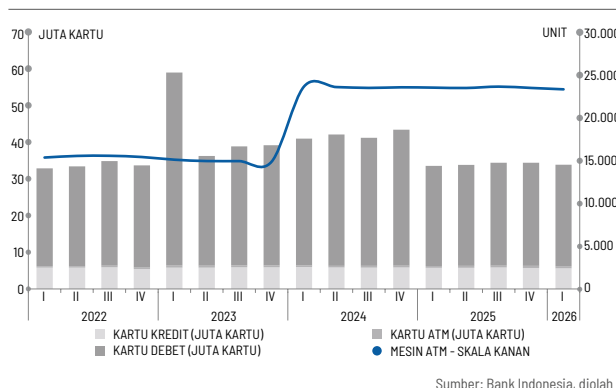
Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Sejalan dengan peningkatan Konsumsi RT pada triwulan I 2026, kinerja transaksi kartu kredit juga mencatat pertumbuhan positif baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi kartu kredit tercatat Rp67,61 triliun atau tumbuh 8,99% (yoy). Pertumbuhan nilai transaksi kartu kredit ini relatif stabil dari triwulan IV 2025. Sementara itu, volume transaksi kartu kredit mencapai 74,52 juta yang didominasi oleh transaksi belanja dengan pangsa 94,74%. Volume transaksi kartu kredit pada triwulan I 2026 tumbuh 5,46% (yoy), di bawah pertumbuhan pada triwulan IV 2025 sebesar 9,43% (yoy). Jumlah kartu kredit pada triwulan I 2026 di DKI Jakarta tercatat sebesar 5,68 juta kartu. Pertumbuhan kartu kredit pada triwulan I 2026 tercatat mengalami kontraksi 2,44% (yoy).

Di sisi lain, transaksi kartu ATM/ debit pada triwulan I 2026 terkontraksi baik dari sisi nilai maupun volume. Nilai transaksi kartu ATM/ debit tercatat sebesar Rp142,96 triliun dengan volume sebanyak 162,01 juta transaksi. Nilai dan volume transaksi kartu ATM/ debit terkontraksi masing-masing 13,26% (yoy) dan 16,20% (yoy), melanjutkan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 10,61% (yoy) untuk nilai transaksi dan 14,90% (yoy) untuk volume transaksi. Berdasarkan jenis transaksinya, volume kartu ATM/ debit terdiri dari transaksi tunai (55,95%), transaksi belanja (29,98%), dan interbank (8,52%). Adapun jumlah kartu ATM dan kartu debit masing-masing

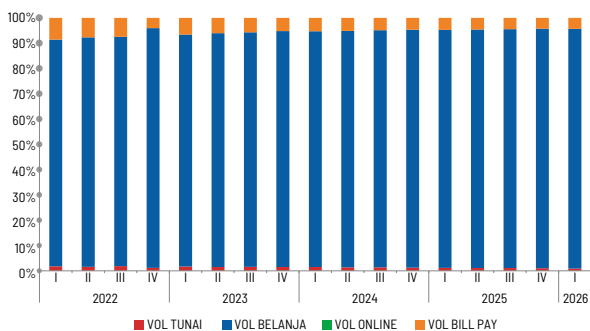


Grafik 5.7 Perkembangan Nilai Transaksi Kartu Kredit dan Debit

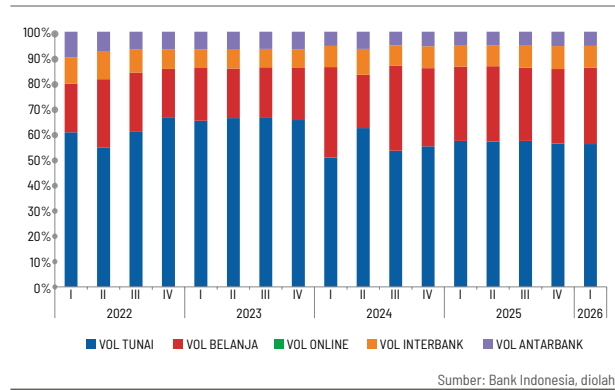


Grafik 5.8 Perkembangan Jumlah Kartu Kredit, Debit, ATM dan Mesin ATM

tercatat sebesar 599.542 kartu dan 27,93 juta kartu. Kartu ATM tumbuh 18,76% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025 sebesar 23,29% (yoy). Sementara itu, kartu debit tumbuh 1,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang berkontraksi 24,22% (yoy). Mesin ATM sebagai infrastruktur pendukung juga tercatat kontraksi 0,84% (yoy) menjadi 23.555 unit.



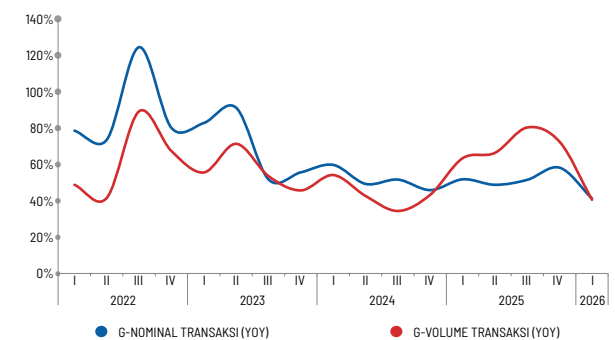
Grafik 5.9 Pangsa Volume Transaksi Kartu Kredit Berdasarkan Jenis Transaksi



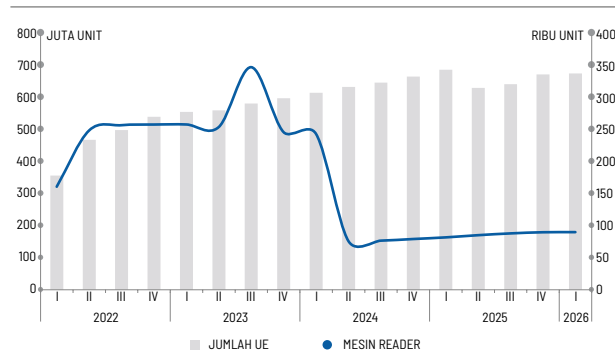
Grafik 5.10 Pangsa Volume Transaksi Kartu ATM/ Debit Berdasarkan Jenis Transaksi

Uang Elektronik

Transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik baik yang berbasis *server* maupun berbasis *chip* pada triwulan I 2026 tetap tumbuh. Nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp353,56 juta dengan volume 5,77 miliar transaksi. Pertumbuhan nilai transaksi uang elektronik pada triwulan I 2026 mencapai 41,27% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 58,21% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, volume transaksi uang elektronik tumbuh 40,46% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 72,39% (yoy). Volume transaksi uang elektronik didominasi oleh transaksi belanja (79,52%) dan transfer (20,41%). Sementara itu, jumlah uang elektronik pada triwulan I 2026 tercatat 679,86 juta dengan jumlah mesin *reader* 90.633 unit.



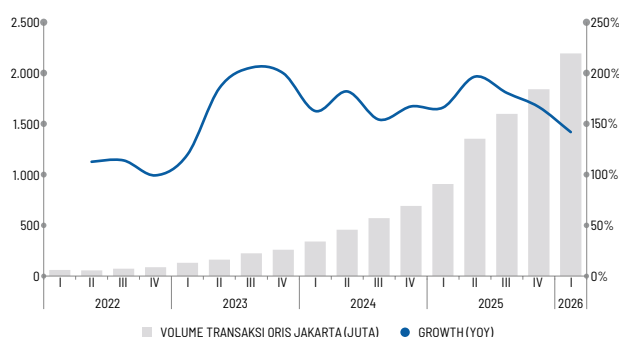
Grafik 5.11 Perkembangan Transaksi Uang Elektronik



Grafik 5.12 Perkembangan Instrumen dan Mesin Reader Uang Elektronik

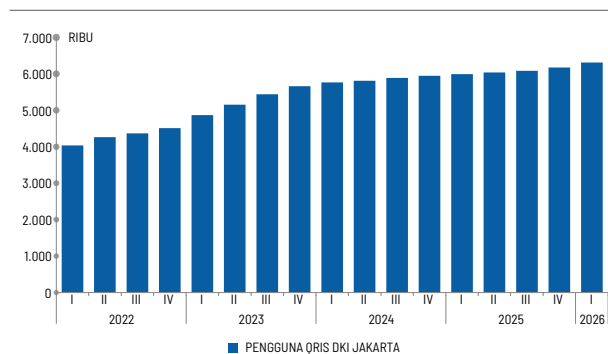
Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)

Adopsi QRIS di DKI Jakarta terus meluas didukung pelaksanaan edukasi dan sosialisasi QRIS, pendalaman *user experience* pada pusat perbelanjaan dan transportasi serta sinergi penyelenggaraan berbagai event strategis dengan stakeholder. Hal ini tecermin dari volume transaksi QRIS di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 yang mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 141,81% (yoy) atau tercatat 2,19 miliar transaksi. Adapun jumlah pengguna QRIS di DKI Jakarta pada triwulan I 2026 mencapai 6,31 juta pengguna QRIS atau bertambah 135.675 pengguna dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025. Sementara itu, jumlah *merchant* QRIS di Jakarta pada triwulan I 2026 mencapai 5,63 juta *merchant*. Jumlah ini bertambah 33.710 *merchant* dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2025.



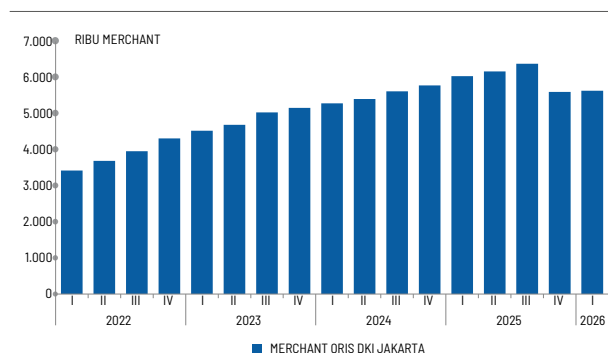
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.13 Perkembangan Volume transaksi QRIS di DKI Jakarta



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.14 Perkembangan Pengguna QRIS di DKI Jakarta

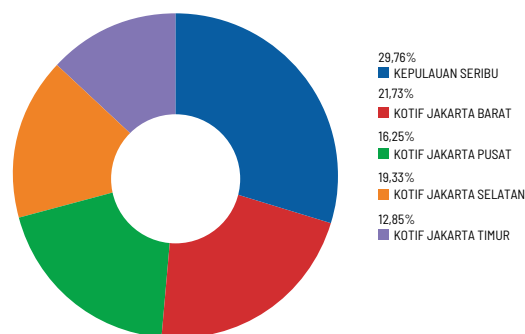


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.15 Perkembangan Merchant QRIS di DKI Jakarta

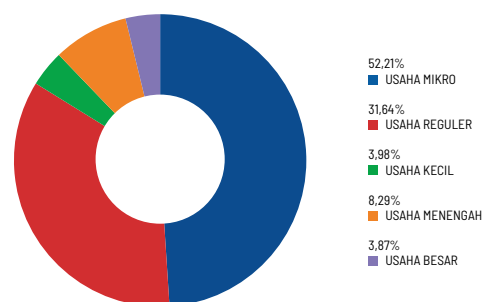
Transaksi QRIS mendukung inklusivitas perekonomian DKI Jakarta.

Hal ini tecermin dari jenis usaha *merchant* QRIS yang didominasi oleh usaha mikro dengan *share* 52,21% dan usaha reguler dengan *share* 31,64%. Adapun sebaran *merchant* QRIS cenderung merata di kota administratif DKI Jakarta dengan pangsa terbesar adalah Jakarta Selatan dengan *share* 29,76%. Selanjutnya, pangsa *merchant* QRIS terbesar juga dicapai oleh Jakarta Pusat (19,33%) dan Jakarta Barat (16,25%). *Merchant* QRIS di Kepulauan Seribu tercatat memiliki pangsa terkecil yakni 0,09%.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.16 Pangsa merchant QRIS per Wilayah



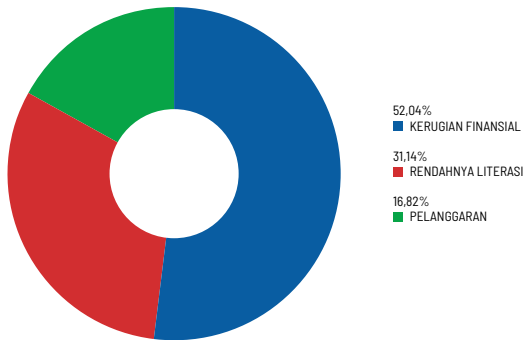
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.17 Pangsa merchant QRIS per Jenis Usaha

Upaya Pelindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

Dalam rangka memitigasi risiko *fraud* pada konsumen jasa sistem pembayaran, KPwBI Provinsi DKI Jakarta secara konsisten melaksanakan edukasi pelindungan konsumen melalui berbagai kanal dan kolaborasi bersama lintas *stakeholder*. Pada triwulan I 2026, kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan antara lain: edukasi pada kampanye implementasi QRIS TAP di Samsat Jakarta Utara dan Mall Pelayanan Publik, edukasi kepada 5.000 Anak Yatim dan Dhuafa di Masjid Istiqlal, serta edukasi kepada pelajar dalam rangkaian kegiatan Bank Indonesia *Goes to School*. Adapun sasaran edukasi adalah meningkatkan *awareness* konsumen jasa sistem pembayaran terkait langkah aman bertransaksi nontunai, pelindungan data pribadi, serta pengetahuan untuk mengantisipasi berbagai modus penipuan digital.

Di samping itu, KPwBI Provinsi DKI Jakarta juga melaksanakan konsultasi dan fasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen jasa sistem pembayaran. Sepanjang triwulan I 2026, kerugian finansial menjadi penyebab terbesar pengaduan konsumen. Adapun modus utama yang ditemui adalah *fraud mobile banking* dan *account take over*.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.18 Pangsa Pengaduan Konsumen di DKI Jakarta Triwulan I 2026

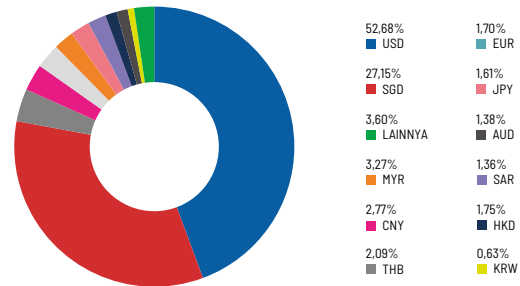
D. UPAYA MENJAGA KELANCARAN SISTEM PEMBAYARAN

Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pada triwulan I 2026, nilai transaksi Penyelenggara KUPVA BB tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Nilai transaksi jual dan beli valuta asing (dalam Rupiah) Penyelenggara KUPVA BB pada triwulan laporan mengalami peningkatan sebesar 30,78% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 26,61%(yoy) (Grafik 5.19). Peningkatan laju pertumbuhan transaksi valuta asing Penyelenggara KUPVA BB pada triwulan I 2026, diperkirakan terkait peningkatan kebutuhan valas seiring peningkatan harga dan tarif logistik internasional serta pelemahan nilai tukar rupiah sebagai dampak eskalasi konflik Timur Tengah dan tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Pada triwulan I 2026, terdapat 319 (Kantor Pusat) dan 186 (Kantor Cabang) Penyelenggara KUPVA BB yang telah diberikan izin

operasional dan diawasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta (Tabel 5.2). Industri KUPVA BB saat ini masih dominan beroperasi di wilayah Jakarta Selatan (28,53%) dan Jakarta Pusat (25,53%). Adapun *market share* valuta asing yang ditransaksikan di wilayah pengawasan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta masih didominasi oleh mata uang USD dan SGD dengan persentase masing-masing sebesar 52,68% dan 27,15% (Grafik 5.15).



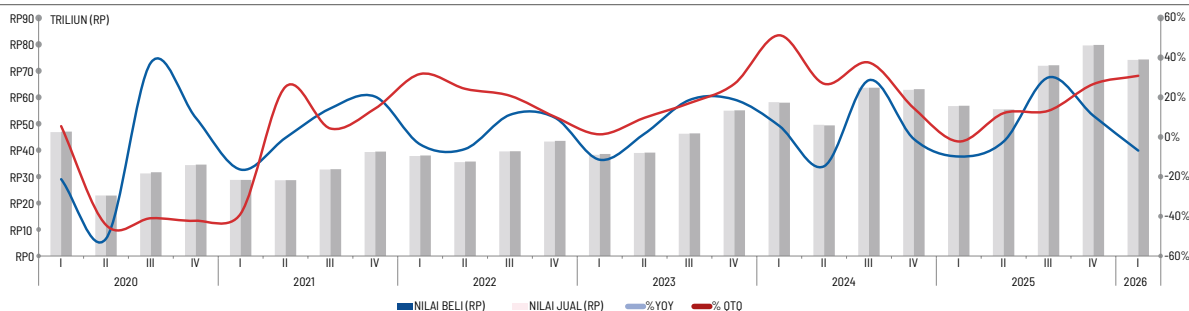
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.20 Market Share Valuta Asing

Tabel 5.1 Persebaran KUPVA BB

NO	WILAYAH	KP	KC	JUMLAH
1	DKI Jakarta	285	89	374
2	Bogor	9	9	18
3	Depok	8	3	11
4	Bekasi	14	6	20
5	Karawang	3	1	4
6	Tangerang	-	20	20
7	Pulau Jawa (Lainnya)	-	33	33
8	Pulau Bali	-	11	11
9	Pulau Sulawesi	-	2	2
10	Pulau Sumatera	-	11	11
11	Pulau Kalimantan	-	1	1
TOTAL		319	186	505

Sumber: Bank Indonesia, diolah



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.19 Perkembangan Transaksi KUPVA BB

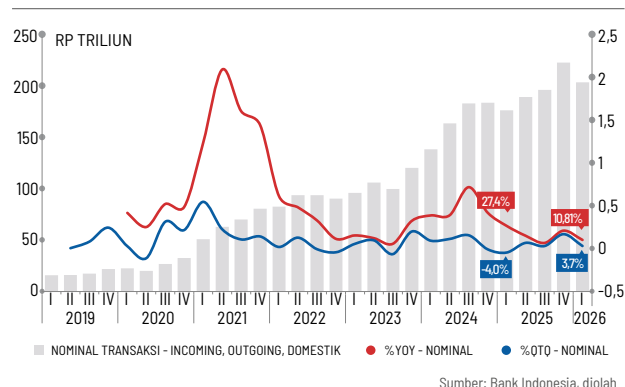
Penyedia Jasa Pembayaran Layanan Remitansi (PJP LR)

Berdasarkan data Laporan Transfer Dana Bukan Bank, perkembangan nilai transaksi transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR pada triwulan I 2026 menunjukkan pergerakan yang beragam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai transaksi *outgoing* dan domestik tercatat mengalami pertumbuhan positif meskipun lebih rendah dari triwulan sebelumnya, sementara transaksi *incoming* mengalami kontraksi. Rincian pergerakan transaksi sebagai berikut:

- Nilai transaksi *outgoing* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 19,60% (yoy) dengan nilai nominal sebesar Rp17,10 triliun, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 20,77% (yoy) dengan nominal sebesar Rp17,32 triliun. Sementara itu, frekuensi transaksi *outgoing* tercatat tumbuh meningkat sebesar 22,70% (yoy) menjadi sebanyak 645.986 transaksi, lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 37,23% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 698.424 transaksi.
- Nilai transaksi *incoming* di wilayah kerja KPwBI DKI Jakarta pada triwulan I 2026 tercatat terkontraksi sebesar 0,49% (yoy) dengan nominal sebesar Rp29,38 triliun, mengalami perbaikan pertumbuhan setelah triwulan sebelumnya terkontraksi lebih dalam sebesar 23,67% (yoy) dengan nominal sebesar Rp25,10 triliun. Sementara dari sisi volume transaksi mengalami pertumbuhan sebesar 1,87% (yoy) dengan frekuensi sebesar 4,94 juta transaksi, mengalami perbaikan setelah triwulan sebelumnya terkontraksi sebesar 24,89% (yoy) dengan frekuensi sebesar 3,93 juta transaksi.
- Nilai transaksi domestik pada triwulan I 2026 tercatat tumbuh sebesar 18,51% (yoy) dengan nominal sebesar Rp158,98 triliun, tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang

tercatat tumbuh sebesar 32,07% (yoy) dengan nominal sebesar Rp182,46 triliun. Sementara itu, pertumbuhan volume transaksi tercatat terkontraksi 4,80% (yoy) dengan frekuensi sebesar 93,30 juta transaksi, mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 7,65% (yoy) dengan frekuensi sebanyak 84,22 juta transaksi.

Secara keseluruhan terjadi pertumbuhan yang positif pada total nilai transaksi *outgoing*, *incoming*, dan domestik transfer dana yang diselenggarakan oleh PJP LR. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp205,46 triliun atau tumbuh 15,44% (yoy). Hal ini sejalan dengan tingginya aktivitas konsumsi di DKI Jakarta terutama momen HBKN Ramadhan dan Idulitri. Sementara, total frekuensi transaksi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 98,88 juta transaksi atau terkontraksi sebesar 4,35% (yoy) dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya (Grafik 5.20).



Grafik 5.21 Perkembangan Transaksi PJP LR

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi PJP LR

PERIODE		OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL	
		Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)
TW I 2021	Jan-21	21.726	1.741.457.787.387	602.773	2.991.156.931.488	6.924.581	11.536.770.574.232	7.549.080	16.269.385.293.107
	Feb-21	20.941	1.721.643.886.343	636.155	3.206.717.228.676	7.181.263	11.198.616.289.229	7.838.359	16.126.977.404.248
	Mar-21	24.788	1.800.355.972.601	748.668	4.200.335.445.525	8.056.932	13.050.057.206.091	8.830.388	19.050.748.624.217
	Total	67.455	5.263.457.646.331	1.987.596	10.398.209.605.689	22.162.776	35.785.444.069.552	24.217.827	51.447.111.321.572
TW II 2021	Apr-21	23.526	1.910.947.591.495	782.361	4.380.193.932.569	8.443.134	14.649.820.451.794	9.249.021	20.940.961.975.858
	May-21	25.291	2.129.640.509.196	801.262	4.023.213.606.203	8.859.710	15.498.808.588.234	9.686.263	21.651.662.703.633
	Jun-21	27.811	1.597.292.074.810	689.981	3.858.043.970.924	9.572.630	15.464.282.991.151	10.290.422	20.919.619.036.885
	Total	76.628	5.637.880.175.501	2.273.604	12.261.451.509.696	26.875.474	45.612.912.031.179	29.225.706	63.512.243.716.376
TW III 2021	Jul-21	27.544	1.557.649.197.078	748.349	4.028.836.392.802	10.946.079	17.343.385.085.306	11.721.972	22.929.870.675.186
	Aug-21	32.709	1.882.464.840.771	732.673	3.673.710.587.218	11.546.029	18.240.033.185.328	12.311.411	23.796.208.613.317
	Sep-21	37.379	2.395.543.528.447	695.051	3.792.521.359.819	10.721.645	17.863.854.189.666	11.454.075	24.051.919.077.932
	Total	97.632	5.835.657.566.296	2.176.073	11.495.068.339.839	33.213.753	53.447.272.460.300	35.487.458	70.777.998.366.435
TW IV 2021	Oct-21	44.692	1.665.458.149.146	865.278	4.678.048.147.998	11.901.324	19.718.417.463.247	12.811.294	26.061.923.760.391
	Nov-21	47.330	2.280.183.690.703	860.062	4.337.538.438.064	12.296.639	19.772.832.790.543	13.204.031	26.390.554.919.310
	Dec-21	51.347	2.354.809.539.298	899.734	4.562.790.327.433	13.864.975	21.998.721.000.286	14.816.056	28.916.320.867.017
	Total	143.369	6.300.451.379.147	2.625.074	13.578.376.913.495	38.062.938	61.489.971.254.076	40.831.381	81.368.799.546.718
TW I 2022	Jan-22	51.628	2.701.112.895.750	856.897	4.449.009.613.455	13.945.338	21.276.650.265.317	14.853.863	28.426.772.774.520
	Feb-22	50.467	2.174.429.338.961	763.251	3.913.050.656.759	13.261.702	18.698.420.551.277	14.075.420	24.785.900.546.997
	Mar-22	61.305	2.498.231.799.915	864.253	4.510.919.780.009	15.911.984	23.232.489.225.313	16.837.542	30.241.640.805.237
	Total	163.400	7.373.774.034.626	2.484.401	12.872.980.050.221	43.119.024	63.207.560.041.907	45.766.825	83.454.314.126.754
TW II 2022	Apr-22	60.384	3.612.733.838.880	960.426	5.091.901.296.134	17.379.120	25.894.326.976.935	18.399.930	34.598.962.111.949
	May-22	103.895	2.910.275.109.260	960.208	3.568.568.025.155	14.786.905	22.095.641.826.505	15.851.008	28.574.484.960.920
	Jun-22	112.629	2.526.485.373.078	993.800	4.071.142.999.492	16.869.809	24.098.078.056.629	17.976.238	30.695.706.429.199
	Total	276.908	9.048.494.321.218	2.914.434	12.731.612.320.781	49.035.834	72.088.046.860.069	52.227.176	93.869.153.502.068
TW III 2022	Jul-22	337.911	3.273.993.931.950	1.045.343	4.674.318.696.750	18.116.128	25.518.115.462.080	19.499.382	33.466.428.090.780
	Aug-22	336.824	3.213.384.141.909	809.921	3.475.043.980.438	17.553.090	24.691.222.695.268	18.699.835	31.379.650.817.615
	Sep-22	358.458	3.476.017.082.373	821.254	3.610.053.172.188	16.916.743	22.772.172.389.235	18.096.455	29.858.242.643.796
	Total	1.033.193	9.963.395.156.232	2.676.518	11.759.415.849.376	52.585.961	72.981.510.546.583	56.295.672	94.704.321.552.191
TW IV 2022	Oct-22	347.348	3.209.904.766.688	826.067	3.498.815.511.210	16.657.239	21.432.734.318.000	17.830.654	28.141.454.595.898
	Nov-22	349.029	3.270.207.410.868	1.030.146	4.660.248.534.081	16.617.865	21.771.323.623.705	17.997.040	29.701.779.568.654
	Dec-22	175.900	2.849.529.906.824	1.089.837	4.964.763.505.699	17.728.054	25.553.442.712.594	18.993.791	33.367.736.125.117
	Total	872.277	9.329.642.084.380	2.946.050	13.123.827.550.990	51.003.158	68.757.500.654.299	54.821.485	91.210.970.289.669
TW I 2023	Jan-23	206.853	3.031.663.147.712	1.060.915	4.172.178.454.812	17.166.451	23.422.773.401.867	18.434.219	30.626.615.004.391
	Feb-23	188.141	2.541.796.523.358	1.255.634	4.984.718.627.496	15.713.344	21.636.054.827.967	17.157.119	29.162.569.978.821
	Mar-23	206.014	6.271.350.309.317	1.370.890	5.632.361.765.112	17.986.604	26.324.340.424.361	19.563.508	38.228.052.498.790
	Total	601.008	11.844.809.980.387	3.687.439	14.789.258.847.420	50.866.399	71.383.168.654.195	55.154.846	98.017.237.482.002
TW II 2023	Apr-23	206.505	2.669.338.138.416	1.227.373	4.676.310.240.207	17.799.845	25.530.062.603.041	19.233.723	32.875.710.981.664
	May-23	245.253	3.156.441.613.325	1.324.557	5.389.577.591.989	17.560.216	24.951.878.726.113	19.130.026	33.497.897.931.427
	Jun-23	247.246	2.875.347.301.006	1.458.598	5.900.609.310.299	20.042.400	31.990.595.585.855	21.748.244	40.566.552.197.160
	Total	699.004	8.501.127.052.747	4.010.528	15.966.497.142.495	55.402.461	82.472.536.915.009	60.111.993	106.940.161.110.251
TW III 2023	Jul-23	245.468	2.672.778.528.424	1.234.758	5.567.750.963.697	18.217.682	25.701.541.146.742	19.697.908	33.942.070.638.863
	Aug-23	272.700	2.986.632.796.251	1.208.366	5.387.603.973.108	18.961.370	24.235.934.246.395	20.442.436	32.610.171.015.754
	Sep-23	281.232	2.964.115.516.896	1.181.297	5.265.620.629.852	18.037.861	25.875.297.213.086	19.500.390	34.105.033.359.834
	Total	799.400	8.623.526.841.571	3.624.421	16.220.975.566.657	55.216.913	75.812.772.606.223	59.640.734	100.657.275.014.451
TW IV 2023	Oct-23	297.665	3.341.174.508.381	1.344.927	6.122.309.658.091	23.441.197	30.412.963.804.944	25.083.789	39.876.447.971.416
	Nov-23	158.796	3.113.258.356.874	1.076.976	5.502.165.624.171	20.364.548	30.652.789.833.843	21.600.320	39.268.213.814.888
	Dec-23	158.421	3.299.192.281.008	1.208.815	6.152.900.385.938	20.906.792	32.960.977.317.490	22.274.028	42.413.069.984.436
	Total	614.882	9.753.625.146.263	3.630.718	17.777.375.668.200	64.712.537	94.026.730.956.277	68.958.137	121.557.731.770.740
TW I 2024	Jan-24	164.853	3.542.320.689.096	1.149.198	6.546.289.317.870	20.134.309	33.308.830.591.428	21.448.360	43.397.440.598.394
	Feb-24	146.838	3.155.098.647.522	1.122.486	7.069.174.073.388	19.490.424	33.262.462.144.272	20.759.748	43.486.734.865.182
	Mar-24	151.913	3.347.482.549.612	1.319.088	8.068.088.794.892	22.434.290	35.324.096.189.978	23.905.291	46.739.667.534.482
	Total	463.604	10.044.901.886.230	3.590.772	21.683.552.186.150	62.059.023	101.895.388.925.678	66.113.399	133.623.842.998.058
TW II 2024	Apr-24	152.595	3.116.325.807.983	1.513.702	8.963.120.524.159	21.991.219	34.707.823.244.702	23.657.516	46.787.269.576.844
	May-24	159.208	3.684.703.251.154	1.360.498	8.267.486.900.714	24.025.918	38.363.701.519.121	25.545.624	50.315.891.670.989
	Jun-24	152.825	3.677.435.279.743	1.311.905	7.913.112.578.674	24.564.070	40.997.949.584.626	26.028.800	52.588.497.443.043
	Total	464.628	10.478.464.338.880	4.186.105	25.143.720.003.547	70.581.207	114.069.474.348.449	75.231.940	149.691.658.690.876
TW III 2024	Jul-24	170.844	4.286.252.310.689	1.254.388	7.253.837.600.268	23.608.049	47.785.360.191.808	25.033.281	59.325.450.102.765
	Aug-24	165.438	4.769.314.105.747	1.249.523	7.540.207.796.939	24.627.251	45.731.778.010.778	26.042.212	58.041.299.913.464
	Sep-24	167.964	4.755.459.387.757	1.027.373	6.156.438.717.382	29.202.399	45.840.712.560.218	30.397.736	56.752.610.665.357
	Total	504.246	13.811.025.804.193	3.531.284	20.950.484.114.589	77.437.699	139.357.850.762.804	81.473.229	174.119.360.681.586
TW IV 2024	Oct-24	156.281	4.406.153.123.565	1.136.260	6.970.586.639.211	31.126.073	45.334.021.099.509	32.418.614	56.710.760.862.285
	Nov-24	170.656	4.617.925.897.335	1.092.969	6.713.456.411.351	26.491.850	40.682.410.626.798	27.755.475	52.013.792.935.484
	Dec-24	181.990	5.316.793.381.989	1.234.435	7.527.339.722.595	33.585.398	52.178.026.458.269	35.001.823	65.022.159.562.853
	Total	508.927	14.340.872.402.889	3.463.664	21.211.382.773.157	91.203.321	138.194.458.184.576	95.175.912	173.746.713.360.622

PERIODE	OUTGOING		INCOMING		DOMESTIK		TOTAL		
	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	Frekuensi (Vol)	Nilai (Rp)	
TW I 2025	Jan-25	177.878	4.842.827.046.010	1.191.286	7.459.985.998.064	11.107.408	18.153.606.119.248	12.476.572	30.456.419.163.322
	Feb-25	164.374	4.799.437.496.484	1.273.485	7.874.464.076.194	33.299.993	41.890.550.432.665	34.737.852	54.564.452.005.343
	Mar-25	184.244	4.655.793.930.793	1.664.259	10.110.398.671.016	31.676.346	48.078.446.498.877	33.524.849	62.844.639.100.686
	Total	526.496	14.298.058.473.287	4.129.030	25.444.848.745.274	76.083.747	108.122.603.050.790	80.739.273	147.865.510.269.351
TW II 2025	Apr-25	184.176	5.169.460.395.115	1.241.857	7.783.997.649.627	26.538.783	45.865.543.463.830	27.964.816	58.819.001.508.572
	May-25	207.449	11.714.605.422.440	1.286.246	8.316.406.201.392	29.642.291	45.940.199.453.098	31.135.986	65.971.211.076.930
	Jun-25	200.219	4.897.355.799.238	1.013.970	7.440.197.023.456	27.857.548	54.009.398.363.060	29.071.737	66.346.951.185.754
	Total	591.844	21.781.421.616.793	3.542.073	23.540.600.874.475	84.038.622	145.815.141.279.988	88.172.539	191.137.163.771.256
TW III 2025	Jul-25	223.431	5.308.166.493.760	1.037.551	7.551.937.505.375	28.114.667	54.602.217.919.182	29.375.649	67.462.321.918.317
	Aug-25	226.009	5.592.132.487.108	1.132.175	7.935.151.829.562	28.382.556	55.315.588.699.999	29.740.740	68.842.873.016.669
	Sep-25	217.257	4.750.599.974.475	984.898	7.092.132.952.613	25.228.716	50.016.783.355.135	26.430.871	61.859.516.282.223
	Total	666.697	15.650.898.955.343	3.154.624	22.579.222.287.550	81.725.939	159.934.589.974.316	85.547.260	198.164.711.217.209
TW IV 2025	Oct-25	230.854	6.504.569.084.792	1.442.079	8.636.886.742.162	26.747.591	55.331.073.909.601	28.420.524	70.472.529.736.555
	Nov-25	225.553	5.333.663.836.420	1.241.572	7.531.618.871.268	27.343.455	64.319.484.062.492	28.810.580	77.184.766.770.180
	Dec-25	242.017	5.481.824.490.007	1.301.293	9.149.082.529.289	30.131.478	62.804.855.517.284	31.674.788	77.435.762.536.580
	Total	698.424	17.320.057.411.219	3.984.944	25.317.588.142.719	84.222.524	182.455.413.489.377	88.905.892	225.093.059.043.315
TW I 2026	Jan-26	245.807	6.424.199.124.866	1.622.620	9.438.013.259.970	31.841.327	56.187.239.751.442	33.709.754	72.049.452.136.278
	Feb-26	217.765	6.019.251.634.343	1.649.127	9.779.655.154.875	29.784.565	54.719.060.630.350	31.651.457	70.517.967.419.568
	Mar-26	182.414	4.656.436.382.863	1.664.320	10.162.187.767.268	31.676.349	48.078.449.317.357	33.523.083	62.897.073.467.488
	Total	645.986	17.099.887.142.072	4.936.067	29.379.856.182.113	93.302.241	158.984.749.699.149	98.884.294	205.464.493.023.334
Grand Total	10.516.667	232.411.030.994.234	76.384.544	425.710.382.222.726	1.284.835.371	2.071.930.324.578.080	1.354.599.738	2.595.868.406.470.560	

Sumber: Bank Indonesia, diolah



BOKS 3

Perkuat Implementasi ETPD DKI Jakarta Melalui Perluasan Pembayaran QRIS Tap di SAMSAT Wilayah DKI Jakarta

Pada semester II 2025, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar 98,25%. Capaian tersebut menunjukkan tingginya tingkat kesiapan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, dengan seluruh aspek penilaian telah mencapai skor maksimal, kecuali aspek realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang tercatat sebesar 82,50%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh realisasi penerimaan PDRD melalui kanal digital, termasuk QRIS, yang baru mencapai 58,96% dari total penerimaan.

Perkembangan tersebut mengindikasikan masih terdapat kesenjangan antara kesiapan sistem pembayaran digital dan tingkat pemanfaatannya di masyarakat. Di satu sisi, inovasi digital terus berkembang melalui peluncuran QRIS TAP yang menawarkan proses transaksi lebih cepat dan praktis. Namun di sisi lain, implementasi QRIS TAP masih terkonsentrasi pada sektor transportasi dan belum optimal dimanfaatkan pada sektor layanan publik lainnya. Dengan demikian, tantangan utama digitalisasi transaksi pemerintah daerah saat ini tidak lagi berada pada aspek infrastruktur maupun regulasi, melainkan pada percepatan adopsi, perluasan implementasi lintas sektor, serta penguatan perubahan perilaku masyarakat dalam penggunaan kanal pembayaran digital.

Salah satu sektor layanan publik yang memiliki potensi besar dalam penguatan digitalisasi pembayaran daerah adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Sepanjang tahun 2025, layanan

Samsat mencatat frekuensi transaksi tertinggi dibandingkan jenis pendapatan daerah lainnya, yakni mencapai 5,39 juta transaksi. Selain itu, penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar Rp15,21 triliun atau berkontribusi 34,59% terhadap total penerimaan pajak daerah. Tingginya volume transaksi dan kontribusi penerimaan tersebut menjadikan sektor perpajakan kendaraan bermotor sebagai area strategis dalam pengembangan digitalisasi pembayaran daerah.

Implementasi pembayaran Samsat melalui QRIS TAP dinilai dapat mendukung modernisasi administrasi perpajakan daerah melalui penyediaan kanal pembayaran yang lebih efisien, mudah diakses, dan terintegrasi secara digital. Langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025 yang menekankan pentingnya peningkatan *tax ratio* melalui optimalisasi kanal pembayaran digital, termasuk QRIS TAP serta selaras dengan tindak lanjut rekomendasi kebijakan pada *High Level Meeting* (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi DKI Jakarta diantaranya memperluas implementasi *Mobile Point of Sales* (MPOS) pada layanan publik Jakarta, termasuk SAMSAT guna mendukung implementasi QRIS Tap dan QRIS Dinamis pada pembayaran PKB dan BBNKB.

Sebagai langkah awal implementasi, pilot project QRIS TAP pada layanan Samsat telah dilaksanakan di Samsat Jakarta Utara dan Gerai Samsat Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sejak 12 Februari 2026. Hingga akhir triwulan I 2026, implementasi tersebut mencatat realisasi penerimaan PKB melalui QRIS TAP sebanyak 2.500 transaksi dengan nilai mencapai Rp7,4 miliar. Sementara itu, realisasi pembayaran BBNKB melalui kanal yang sama tercatat sebanyak 281 transaksi dengan nilai mencapai Rp628 juta. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi QRIS TAP pada layanan Samsat memiliki potensi untuk memperluas adopsi pembayaran digital masyarakat sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah melalui peningkatan efisiensi transaksi dan penguatan ekosistem digital pemerintah daerah.



Gambar B3.2 Kampanye Edukasi Pembayaran QRIS Tap di Samsat Jakarta Utara



Gambar B3.1 Seremonial Implementasi QRIS Tap di Samsat Jakarta Utara



Gambar B3.3 Pembayaran QRIS Tap di Gerai Samsat Mal Pelayanan Publik



BOKS 4

Reklasifikasi Perizinan Sistem Pembayaran

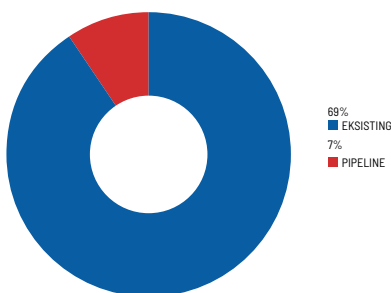
Bank Indonesia melakukan reformasi regulasi di bidang sistem pembayaran melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran (PBI PISP), yang berlaku sejak tanggal 31 Maret 2026. Penerbitan ketentuan dimaksud bertujuan untuk memperkuat struktur industri sistem pembayaran, meningkatkan efektivitas perizinan dan pengawasan, serta mendorong penguatan tata kelola dan manajemen risiko dari Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP). Salah satu perubahan utama dalam PBI PISP adalah penerapan penilaian kesehatan PJP berbasis Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIKMI). Penilaian berdasarkan aspek TIKMI juga digunakan sebagai dasar dalam proses perizinan baru, persetujuan peningkatan aktivitas, strategi pengawasan dan exit policy.

Selain itu, PBI PISP juga mengubah klasifikasi PJP yang sebelumnya dikelompokkan berdasarkan Kategori Izin (KI) 1, 2, dan 3 menjadi klasifikasi berdasarkan Paket (*Bundling*) Aktivitas 1, 2, dan 3. Perubahan

tersebut berdampak langsung terhadap PJP KI 3 atau Layanan Remitansi (PJP KI3/LR) yang menjadi kewenangan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

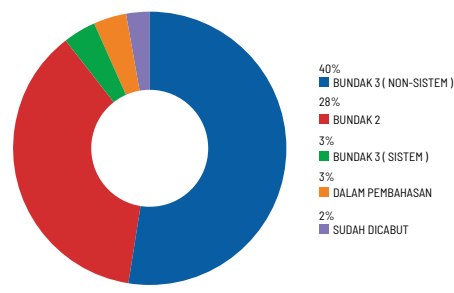
Dalam ketentuan sebelumnya, klasifikasi PJP KI3/LR didasarkan apakah PJP tersebut menyediakan sistem bagi PJP lain atau tidak, sebagai dasar untuk penetapan besaran kewajiban modal disetor minimum. Sementara itu, berdasarkan ketentuan PBI PISP terbaru, klasifikasi PJP LR atau aktivitas penerusan perintah transfer dana didasarkan apakah layanan remitansi tersebut dilakukan secara digital atau nondigital, yaitu:

1. PJP LR yang melakukan penerusan perintah transfer dana secara digital dan nondigital, masuk ke dalam *Bundling* Aktivitas 2.
2. PJP LR yang melakukan penerusan perintah transfer dana secara nondigital, masuk ke dalam *Bundling* Aktivitas 3.
3. PJP LR yang menyediakan sistem bagi PJP *Bundling* Aktivitas 3 lainnya, masuk ke dalam *Bundling* Aktivitas 3 – Penyedia Sistem.



Sumber : KPw BI Provinsi DKI Jakarta

Grafik B4.1 Jumlah PJP yang perlu direklasifikasi



Sumber : KPw BI Provinsi DKI Jakarta

Grafik B4.2 Hasil Reklasifikasi Izin PJP

Reklasifikasi izin PJP KI 3 di wilayah kerja KPw BI Provinsi DKI Jakarta dilakukan terhadap 69 PJP eksisting dan 7 PJP yang masih berada dalam proses *pipeline* perizinan (Gambar 1). Jumlah entitas PJP KI3 di Jakarta merupakan yang terbanyak secara nasional, dengan pangsa mencapai 27,98% dan menyumbang 24,59% dari total volume transaksi remitansi nasional (per triwulan I 2026). Proses reklasifikasi izin PJP KI 3 dilakukan KPw BI Provinsi DKI Jakarta melalui kegiatan *one on one meeting* dengan masing-masing PJP guna memperoleh pendalaman aktivitas usaha yang dilakukan, kesiapan pemenuhan ketentuan baru, serta rencana pengembangan usaha ke depan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan *one on one meeting* dan asesmen terhadap masing-masing PJP, diperoleh hasil reklasifikasi sebagai berikut:

1. Sebanyak 40 PJP direklasifikasi menjadi PJP Paket (*Bundling*) Aktivitas 3 yang tidak menyediakan sistem bagi PJP *Bundling* Aktivitas 3 lainnya.
2. Sebanyak 3 PJP direklasifikasi menjadi PJP Paket (*Bundling*) Aktivitas 3 yang menyediakan sistem bagi PJP *Bundling* Aktivitas 3 lainnya.
3. Sebanyak 28 PJP direklasifikasi menjadi PJP Paket (*Bundling*) Aktivitas 2 untuk aktivitas layanan remitansi digital.
4. Sebanyak 3 PJP masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut karena memiliki variasi model bisnis yang memerlukan pendalaman dan asesmen tambahan, guna menentukan klasifikasi paket aktivitas yang sesuai.
5. Sebanyak 2 PJP telah dicabut izinnya dalam periode pelaksanaan reklasifikasi sehingga tidak termasuk dalam proses reklasifikasi.

Hasil reklasifikasi menunjukkan bahwa mayoritas PJP eksisting masih berada pada klasifikasi Paket (*Bundling*) Aktivitas 3. Namun demikian, terdapat sejumlah 28 PJP yang direklasifikasi menjadi Paket (*Bundling*) Aktivitas 2 karena dalam operasionalnya menjalankan aktivitas remitansi secara digital dan nondigital.

Melalui penetapan klasifikasi terkini yang berbasis TIKMI, diharapkan ekosistem industri SP khususnya pada industri PJP, menjadi lebih tangguh, bertata kelola dengan baik dan berdampak kepada pertumbuhan industri yang sehat dan berkelanjutan.



Bab 6

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sejalan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi, serapan tenaga kerja di DKI Jakarta periode Februari 2026 relatif stabil pada level 93,97% meningkat dibandingkan Februari 2025 sebesar 93,82%. Berdasarkan status pekerjaan utama, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Dari sisi LU, peningkatan serapan tenaga kerja terutama terjadi pada LU Perdagangan Besar dan Eceran. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum, LU Transportasi dan Pergudangan, LU Industri Pengolahan, LU Jasa Lainnya.

Sementara itu, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 4,03% pada September 2025, dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14%. Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25%. Menurunnya tingkat kemiskinan tersebut sejalan dengan upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain melalui program pemberian subsidi pangan dan transportasi serta pemberian bantuan sosial bagi warga penerima manfaat.



TINGKAT KESEMPATAN KERJA

93,82%

Februari 2025



93,97%

Februari 2026



TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

6,18%

Februari 2025



6,03%

Februari 2026



UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP)

Rp 5.396.791

2025



Rp 5.729.876

2026



INDEKS PENGHASILAN KONSUMEN

139,83

Triwulan IV 2025



149,81

Triwulan I 2026



PRESENTASE PENDUDUK MISKIN

4,14%

September 2024



4,03%

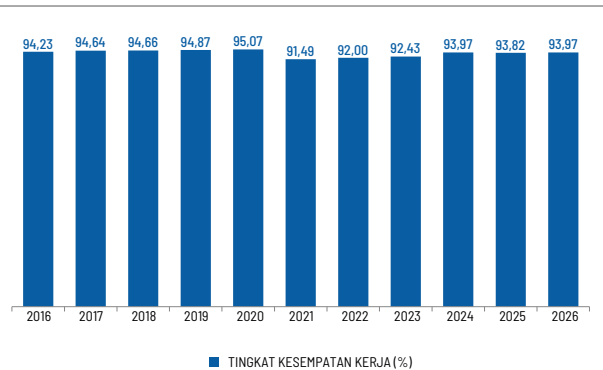
Seotember 2025

A. KETENAGAKERJAAN

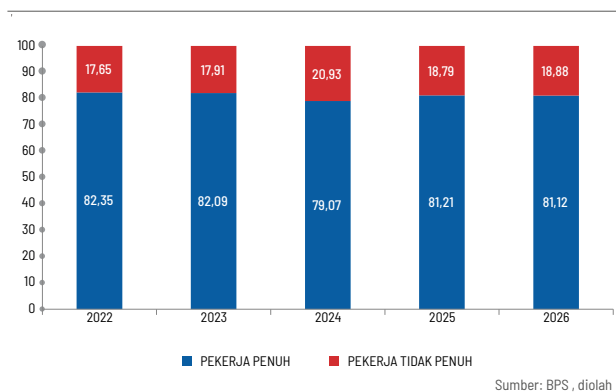
Berdasarkan kondisi ketenagakerjaan per Februari 2026, jumlah angkatan kerja di DKI Jakarta tercatat sebanyak 5,53 juta orang, mengalami peningkatan dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 5,47 juta orang (Grafik 6.1 dan Tabel 6.1). Dari sisi serapan tenaga kerja, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) tercatat sebesar 93,97%, meningkat dibandingkan periode Februari 2025 yang sebesar 93,82% (Grafik 6.2). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja tetap terjaga dengan baik.

Berdasarkan jam kerjanya, status pekerja di Jakarta didominasi oleh pekerja penuh yaitu penduduk yang bekerja dengan jam kerja minimal 35 jam per minggu, dengan pangsa sebesar 81,12%. Sementara itu, sisanya merupakan pekerja tidak penuh, yaitu penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu), dengan pangsa sebesar 18,88%. Dibandingkan Februari 2025, persentase pekerja penuh mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin.

Di sisi lain, sektor formal masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, yakni sebesar 61,87% dari total pekerja, sedangkan sisanya sebesar 38,13% bekerja pada sektor informal. Pertumbuhan pekerja sektor formal tercatat sebesar 0,91% (yoy), membaik dibandingkan periode Februari 2025 yang mengalami kontraksi sebesar 2,37% (yoy). Sementara itu, pertumbuhan pekerja



Grafik 6.2 Persentase Penyerapan Suplai Tenaga Kerja

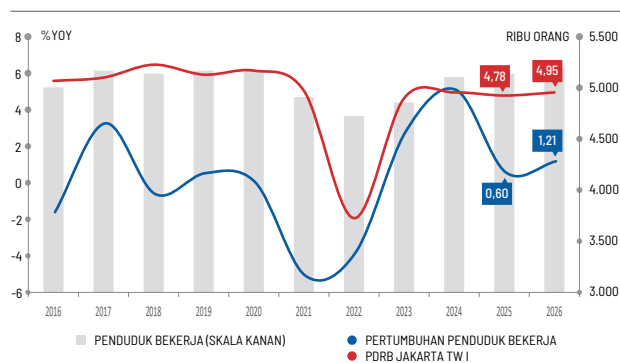


Grafik 6.3 Proporsi Penduduk Bekerja Berdasarkan Jam Kerja

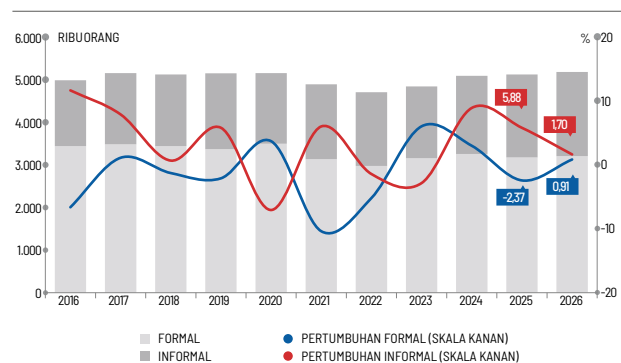
Tabel 6.1 Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan

KEADAAN KETENAGAKERJAAN	2023		2024		2025			2026
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	NOVEMBER	FEBRUARI
Penduduk Usia Kerja (ribu orang)	8.332,26	8.322,91	8.339,08	8.364,83	8.373,46	8.430,62	8.440,62	8.450,50
Angkatan Kerja (ribu orang)	5.255,24	5.427,23	5.434,37	5.445,77	5.476,00	5.458,80	5.526,10	5.533,64
Bekerja (ribu orang)	4.857,62	5.072,74	5.106,78	5.107,78	5.137,60	5.128,46	5.177,13	5.199,78
Pengangguran (ribu orang)	397,62	354,49	327,59	337,99	338,39	330,34	348,97	333,86
Bukan Angkatan Kerja (ribu orang)	3.077,02	2.895,68	2.904,71	2.919,06	2.897,46	2.971,82	2.914,52	2.916,86
Pekerja Sektor Formal (ribu orang)	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98	3.283,77	3.216,87
Pekerja Sektor Informal (ribu orang)	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48	1.893,36	1.982,91
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	63,07	65,21	65,17	65,10	65,40	64,75	65,47	65,48
Tingkat Kesempatan Kerja (%)	92,43	93,47	93,97	93,79	93,82	93,95	93,69	93,97
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,57	6,53	6,03	6,21	6,18	6,05	6,31	6,03

Sumber: BPS, diolah



Grafik 6.1 Pertumbuhan Jumlah Orang Bekerja dan Pertumbuhan Ekonomi Jakarta



Grafik 6.4 Proporsi dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

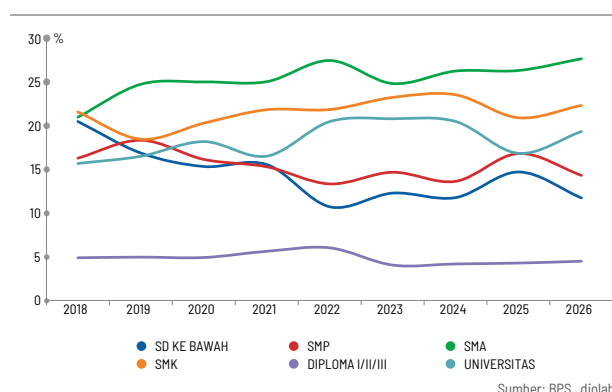
sektor informal tetap positif sebesar 1,70% (yoy), meskipun melambat dibandingkan periode Februari 2025 yang tumbuh sebesar 5,88% (yoy) (Grafik 6.4).

Ditinjau dari status pekerjaan utama, penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yang termasuk dalam kategori pekerja sektor formal masih mendominasi total penduduk bekerja di DKI Jakarta, yakni lebih dari 3 juta orang. Sementara itu, status berusaha sendiri yang termasuk dalam kategori pekerja sektor informal menempati urutan kedua, yakni lebih dari 1,2 juta orang (Tabel 6.2).

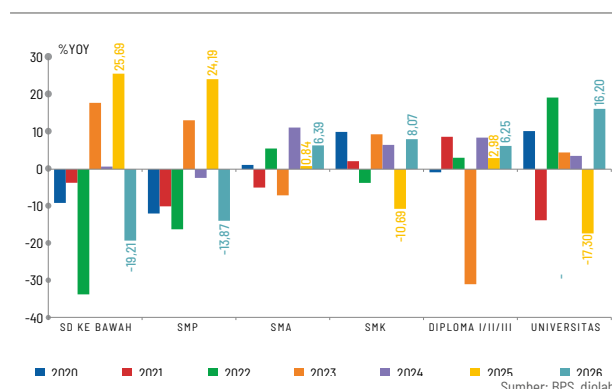
Berdasarkan tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja dari lulusan SMA mendominasi penduduk bekerja pada periode laporan. Tenaga kerja yang menamatkan pendidikan hingga tingkat SMA memiliki pangsa sebesar 27,21% terhadap total penduduk bekerja, meningkat dibandingkan periode Februari 2025 yang sebesar 26,36%. Sementara itu, peringkat kedua diduduki oleh tenaga kerja lulusan SMK dengan pangsa sebesar 22,35%.

Pada Februari 2026, pangsa tenaga kerja lulusan Universitas (S1 atau lebih) dan SMK meningkat paling besar dibandingkan periode sebelumnya, masing-masing sebesar 2,50 persen poin dan 1,42 persen poin. Selain itu, pangsa tenaga kerja lulusan Diploma I/II/III dan SMA juga meningkat, masing-masing sebesar 0,21 persen poin dan 1,35 persen poin. Sementara itu, pangsa tenaga kerja lulusan SMP serta SD ke bawah masing-masing menurun sebesar 2,51 persen poin dan 2,98 persen poin.

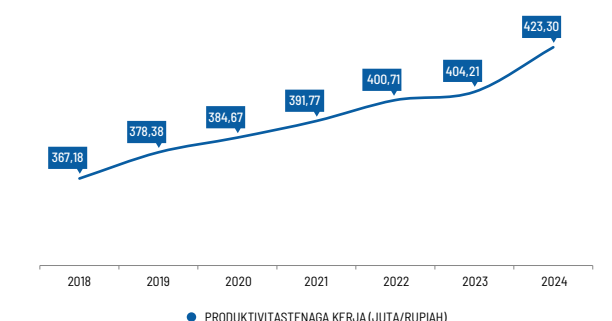
Lebih lanjut, perbaikan tingkat pendidikan tenaga kerja turut mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di DKI Jakarta. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja DKI Jakarta tercatat sebesar Rp421,13 juta, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp404,21 juta (Grafik 7.7). Produktivitas tenaga kerja di Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan perbedaan antarwilayah. Tercatat terdapat tiga kota dengan tingkat produktivitas di atas rata-rata provinsi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara (Grafik 6.8).



Grafik 6.5 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 6.6 Pertumbuhan Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Pekerjaan

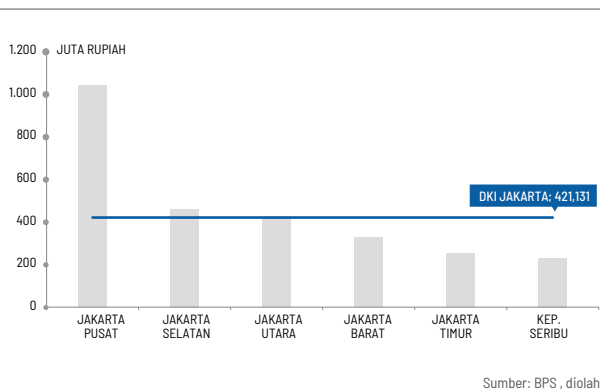


Grafik 6.7 Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta (Juta Rupiah)

Tabel 6.2 Perkembangan Status Pekerjaan Utama

STATUS PEKERJAAN UTAMA (ribu orang)	2023		2024		2025			2026
	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	FEBRUARI	AGUSTUS	NOVEMBER	FEBRUARI
Pekerja Sektor Formal	3.167,99	3.234,64	3.265,17	3.253,39	3.187,79	3.249,98	3.283,77	3.216,87
Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	269,38	186,11	306,94	193,65	192,65	166,87	170,38	205,54
Buruh/karyawan/pegawai	2.898,61	3.048,53	2.958,23	3.059,74	2.995,14	3.083,12	3.113,39	3.011,33
Pekerja Sektor Informal	1.689,63	1.838,10	1.841,61	1.854,39	1.949,81	1.878,48	1.893,36	1.982,91
Berusaha sendiri	1.084,94	1.162,88	1.115,36	1.173,98	1.200,29	1.211,85	1.229,45	1.221,04
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	253,32	248,45	343,32	267,78	337,16	300,82	302,22	338,18
Pekerja bebas pertanian	-	1,55	-	1,49	-	0,78	-	0,19
Pekerja bebas non pertanian	90,72	140,26	121,92	127,23	123,51	114,42	114,94	131,71
Pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga	260,65	284,95	261,01	283,91	288,85	250,62	246,75	291,80

Sumber: BPS, diolah

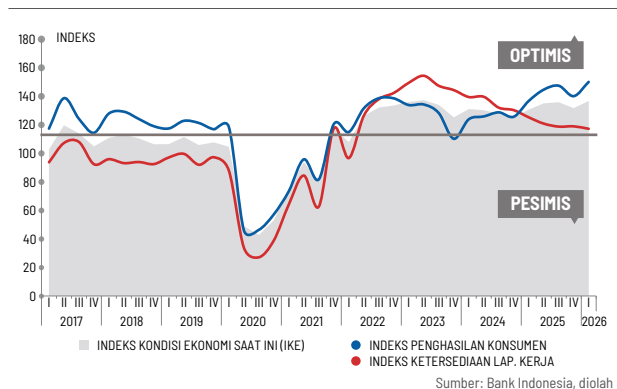


Grafik 6.8 Produktivitas TK menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta, 2024 (Juta Rupiah)

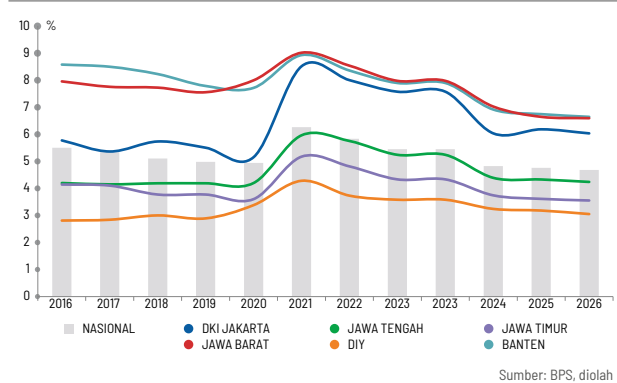
Dari sisi lapangan usaha (LU), penyerapan tenaga kerja terbesar terdapat pada LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan relatif kuatnya pertumbuhan pada sektor tersebut dan menjadi LU penopang utama ekonomi DKI Jakarta. Pangsa serapan tenaga kerja pada LU Perdagangan Besar dan Eceran mencapai 22,40% terhadap total penduduk bekerja Februari 2026. Kemudian, diikuti oleh LU sektor-sektor utama Jakarta lainnya yaitu penyediaan akomodasi dan makan minum (13,28%), LU Transportasi dan Pergudangan (11,85%), LU Industri Pengolahan (10,74%), dan LU Jasa Lainnya (10,53%) (Grafik 6.9).

Sejalan dengan membaiknya laju pertumbuhan ekonomi yang disertai meningkatnya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), rasio Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada periode Februari 2026 tercatat sebesar 6,03%, menurun dibandingkan periode Februari 2025 yang sebesar 6,18%. Artinya, dari setiap 100 angkatan kerja terdapat sekitar enam orang yang menganggur atau belum memperoleh pekerjaan.

Di sisi lain, hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia menunjukkan bahwa optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan I 2026 yang berada pada level optimis sebesar 116,93, meskipun lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 118,67. Adapun Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan indeks penghasilan konsumen juga tetap berada di atas level optimis (100) pada triwulan I 2026 (Grafik 6.10).



Grafik 6.10 Indeks Kondisi Ekonomi, Penghasilan, dan Ketersediaan Lapangan Kerja

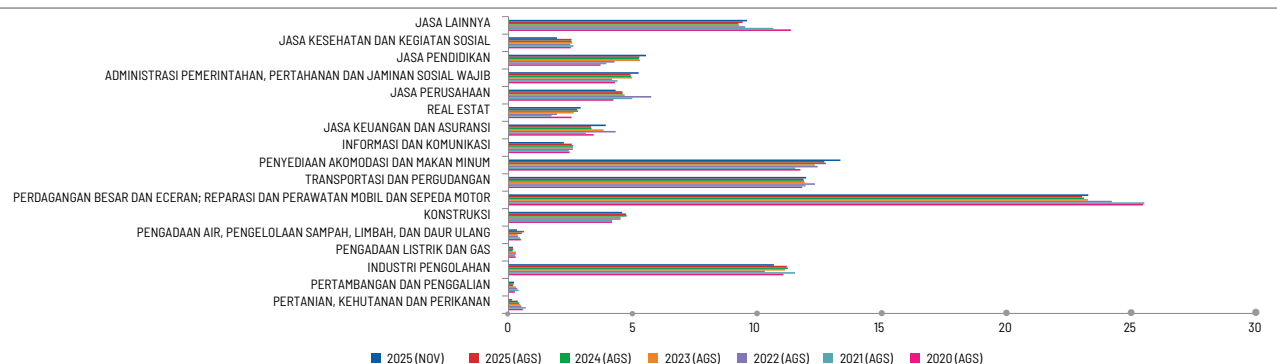


Grafik 6.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jakarta

Kondisi ketenagakerjaan DKI Jakarta yang membaik turut tercermin dari menurunnya level TPT, meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional dan menjadi yang tertinggi ketiga di wilayah Jawa setelah Banten dan Jawa Barat (Grafik 6.11).

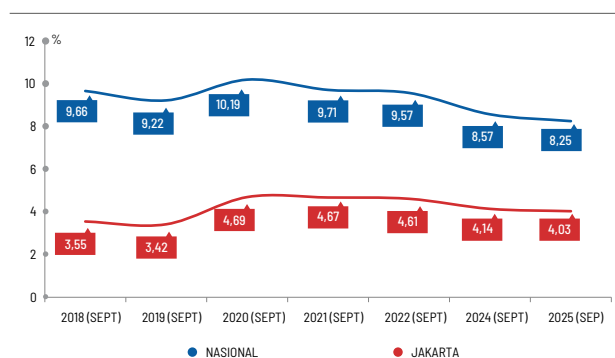
B. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat mengalami penurunan. Berdasarkan data September 2025, tingkat kemiskinan di DKI Jakarta tercatat sebesar 4,03%, menurun dibandingkan September 2024 yang sebesar 4,14% (Tabel 6.3). Tingkat kemiskinan di DKI Jakarta juga tercatat lebih rendah dibandingkan Nasional yang pada September 2025 berada pada level 8,25% (Grafik 6.12). Tingkat kemiskinan sempat

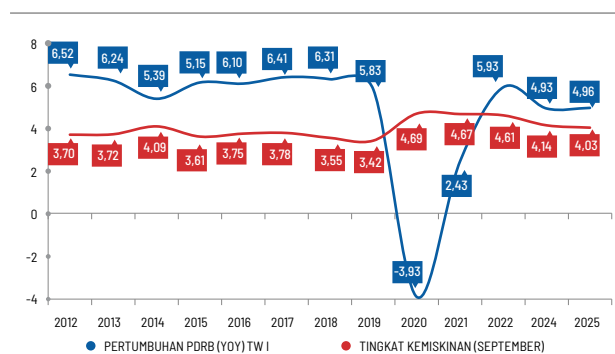


Grafik 6.9 Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha

meningkat pada awal pandemi dan mencapai 10,19% secara nasional, serta 4,69% di DKI Jakarta pada September 2020, sebelum kemudian menurun secara bertahap hingga September 2025. Capaian September 2025 merupakan tingkat kemiskinan terendah sejak periode pandemi COVID-19, meskipun masih sedikit lebih tinggi dibandingkan level prapandemi. Menurunnya tingkat kemiskinan pada September 2025 sejalan dengan peningkatan kinerja perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III 2025 yang tumbuh 4,96% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 4,93% (yoy) (Grafik 6.13). Program bantuan dari Pemerintah Pusat meliputi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai program lainnya. Di tingkat daerah, penurunan tingkat kemiskinan ini menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang secara konsisten terus melakukan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial antara lain Bantuan Sosial Tunai,



Grafik 6.12 Tingkat Kemiskinan Jakarta dan Nasional



Grafik 6.13 Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta

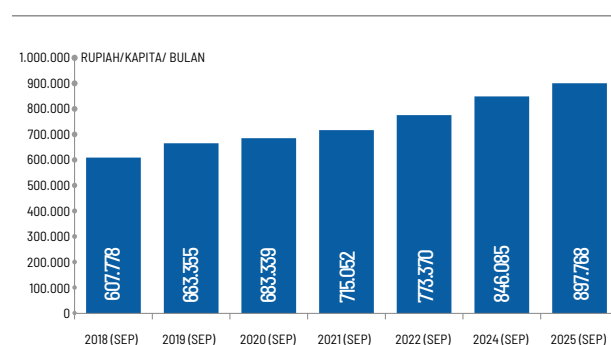
Tabel 6.3 Profil Kemiskinan DKI Jakarta

PROFIL KEMISKINAN DKI JAKARTA	2020		2021		2022		2023	2024		2025	
	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER	MARET	MARET	SEPTEMBER	MARET	SEPTEMBER
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu orang)	480,86	496,84	501,92	498,29	502,04	494,93	477,83	464,93	449,07	464,87	439,12
Presentase Penduduk Miskin (%)	4,53	4,69	4,72	4,67	4,69	4,61	4,44	4,30	4,14	4,28	4,03
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	680.401	683.339	697.638	715.052	738.955	773.370	792.515	825.288	846.085	852.768	897.768
Makanan	466.156	467.847	479.332	490.918	508.239	534.819	548.628	571.647	590.704	591.933	622.175
Non Makanan	214.245	215.491	218.306	224.134	230.716	238.551	243.887	253.641	255.381	260.835	275.593
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,59	0,67	0,64	0,75	0,77	0,68	0,70	0,65	0,55	0,57	0,49
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,11	0,15	0,14	0,18	0,19	0,16	0,18	0,13	0,11	0,11	0,10

Sumber: BPS, diolah

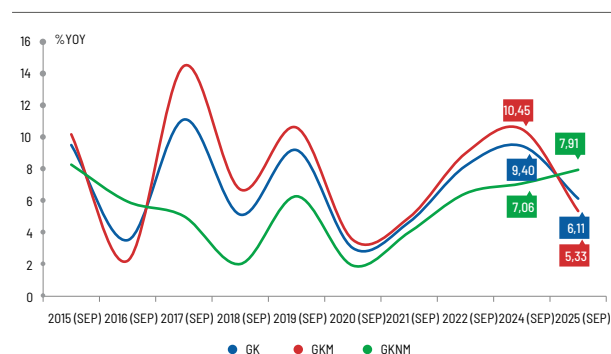
Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Jamkesda, Kartu Lansia Jakarta (KLJ), serta Program Bantuan Pangan, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD). Selain itu, Pemprov DKI memberikan insentif bagi pelaku UMKM, membebaskan biaya sewa bagi penghuni rusunawa, serta menyediakan pelatihan kerja gratis melalui Balai Latihan Kerja.

Namun demikian, angka Garis Kemiskinan (GK) terus mengalami kenaikan. Angka Garis Kemiskinan (GK) Provinsi DKI Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar Rp897.768 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 6,11% (yoy) dari angka GK September 2024 yang tercatat Rp846.085 per kapita per bulan (Grafik 6.14 dan Grafik 6.15).



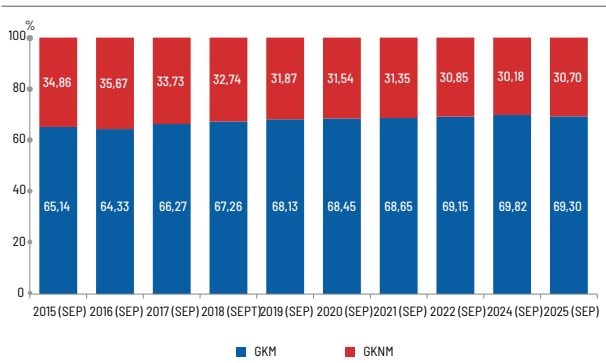
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.14 Garis Kemiskinan DKI Jakarta



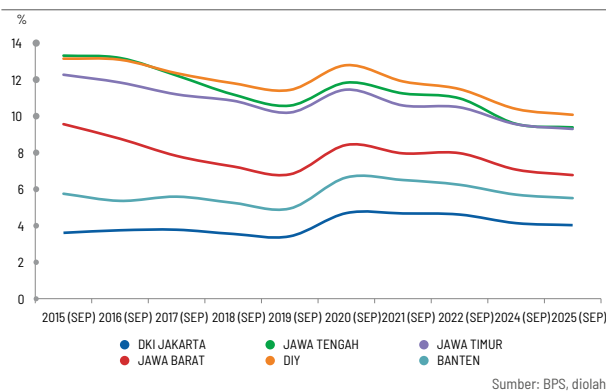
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.15 Pertumbuhan Garis Kemiskinan, Garis Kemiskinan Makanan, dan Garis Kemiskinan Non Makanan



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.16 Porsi Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan

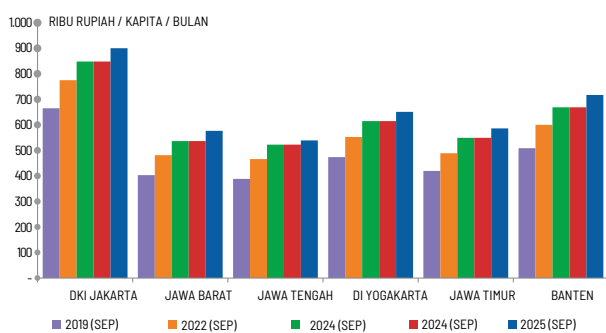


Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.17 Tingkat Kemiskinan Provinsi di Jawa

Dari sisi komoditas, peningkatan GK DKI Jakarta lebih dipengaruhi oleh komoditas makanan dibandingkan peranan komoditas non makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK pada Maret 2025 sebesar 69,30% sedangkan sumbangan GKNM terhadap GK sebesar 30,70% (Grafik 6.16).

Tingkat kemiskinan di semua provinsi di Jawa tercatat menurun pada periode September 2025. Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah di pulau Jawa yang kemudian diikuti oleh Provinsi Banten dan Jawa Barat (Grafik 6.17). Garis kemiskinan di Jakarta tercatat tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, sementara Jawa Tengah merupakan provinsi di Jawa dengan level garis kemiskinan terendah pada September 2025 (Grafik 6.18).

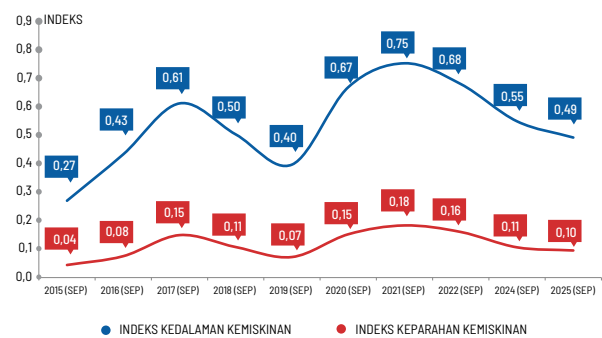


Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.18 Garis Kemiskinan Provinsi di Jawa

Di tengah penurunan tingkat kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode September 2025 juga mengalami penurunan. Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan DKI Jakarta periode September 2025 masing-masing sebesar 0,49 dan 0,10 lebih rendah dibandingkan September 2024 yang masing-masing sebesar 0,55 dan 0,11 (Grafik 6.19). Kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan, tecermin dari indeks kedalaman kemiskinan yang menurun Sementara itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin mengalami penurunan, tecermin dari indeks keparahan kemiskinan.

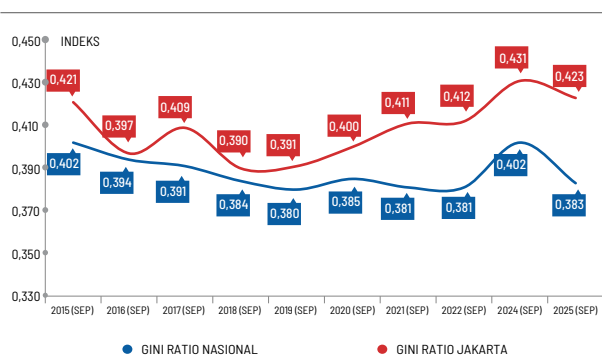
Meskipun tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada September 2025 menurun, namun ketimpangan masih tinggi seiring kenaikan rasio gini. Gap antara pengeluaran penduduk pada kelas bawah dan kelas atas



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.19 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

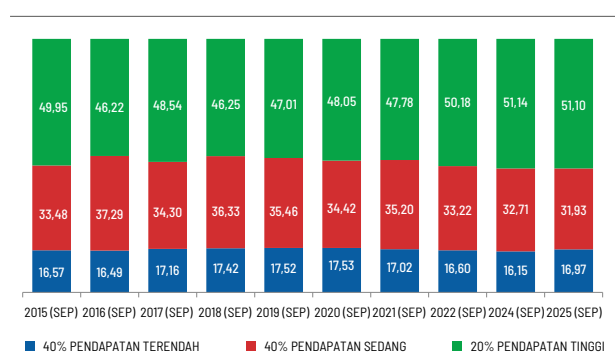
semakin tinggi, menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan penduduk. Indeks Rasio Gini DKI Jakarta tercatat 0,423. Indeks tersebut lebih tinggi dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,431 (Grafik 6.20). Indeks rasio gini tersebut juga di atas capaian nasional yang sebesar 0,383. Dari sisi nilai indeks, ketimpangan di DKI Jakarta termasuk dalam kategori sedang, melihat nilainya berada pada rentang 0,4-0,5.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.20 Rasio Gini Jakarta dan Nasional

Ketimpangan pendapatan antara kelompok pendapatan terendah dan kelompok pendapatan tertinggi masih cukup besar sebagaimana tercermin dari ketimpangan pengeluaran penduduk. Proporsi pengeluaran penduduk pada kelompok 40% terendah terhadap total pengeluaran seluruh penduduk, yakni sebesar 16,97% pada September 2025 (Grafik 6.21). Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan September 2024 yakni sebesar 16,15%. Sementara itu, kontribusi pengeluaran kelompok 20 persen teratas mengalami penurunan dari 51,14% menjadi 51,10%. Apabila fokus penanganan kemiskinan dapat lebih ditujukan untuk mendorong peningkatan alokasi kepada 40% masyarakat dengan pengeluaran terendah, maka perbaikan kondisi ketimpangan perlahan dapat membaik.



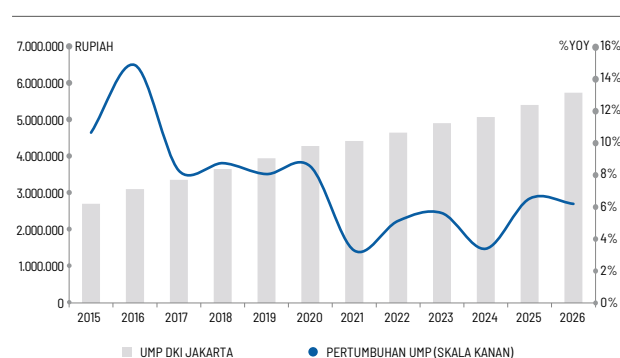
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.21 Distribusi Pendapatan DKI Jakarta

C. UPAH TENAGA KERJA

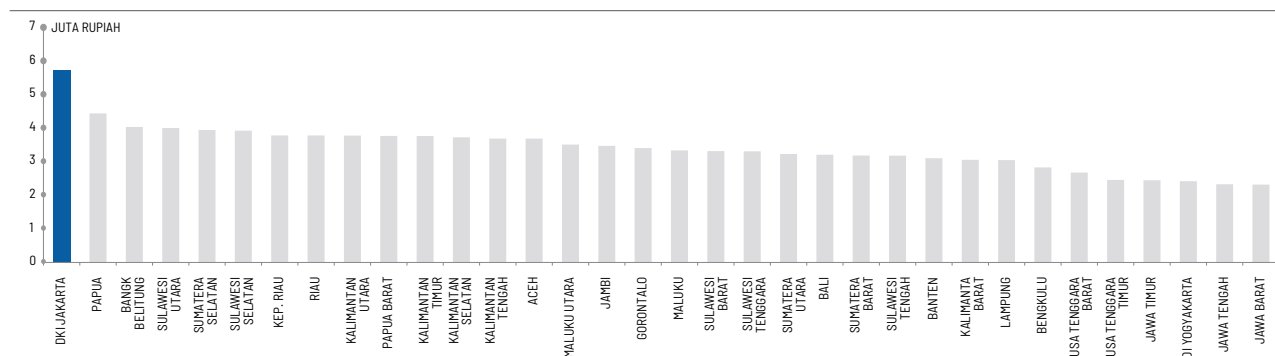
Pada tahun 2026, Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kembali mengalami kenaikan. UMP DKI Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp5.729.876, meningkat 6,17% dibandingkan tahun 2025 (Rp5.396.761) (Grafik 6.22). Ketetapan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta 1142/2025 tentang UMP Jakarta 2026 tanggal 23 Desember 2025.

UMP DKI Jakarta untuk tahun 2025 menduduki peringkat tertinggi di Indonesia, kenaikan UMP yang cukup besar ini mencerminkan tekad Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat dukungan terhadap kesejahteraan pekerja dalam menghadapi tantangan ekonomi.



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.22 Perkembangan UMP DKI Jakarta



Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.23 UMP Provinsi di Indonesia



Bab 7

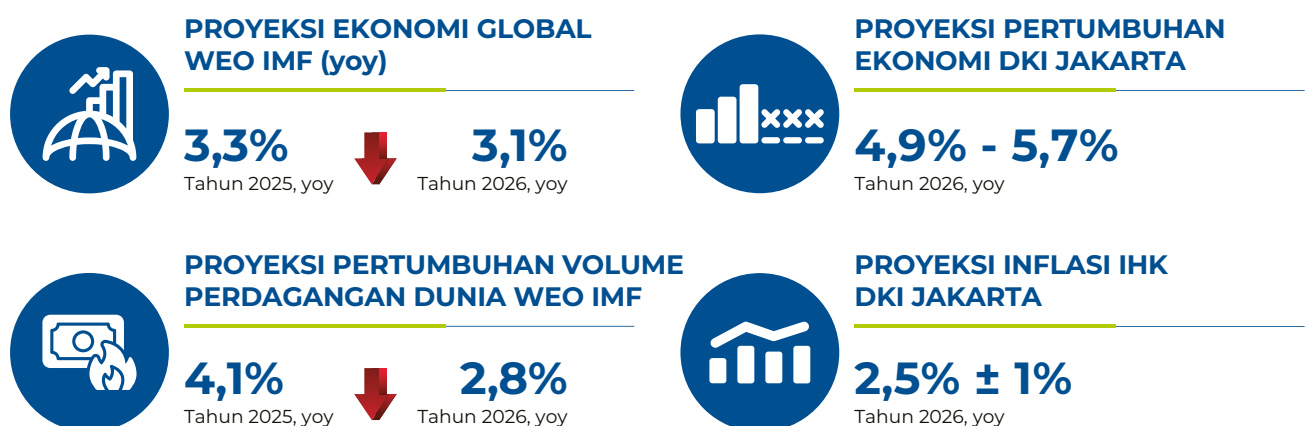
Prospek Perekonomian

Pada 2026, perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat pada kisaran 4,9–5,7% (yoy). Namun demikian, tekanan terhadap prospek pertumbuhan meningkat seiring berlanjutnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, serta volatilitas nilai tukar Rupiah.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat seiring membaiknya daya beli masyarakat, antara lain didukung kenaikan UMP 6,17%, keberlanjutan stimulus dan bantuan sosial untuk menjaga daya beli, momentum musiman, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Perkembangan tersebut juga mendorong konsumsi jasa perkotaan, terutama pada sektor perdagangan, transportasi, serta akomodasi dan makan minum. Investasi diperkirakan tetap tumbuh, didukung berlanjutnya realisasi proyek strategis multitaluh seperti MRT Fase 2A, LRT Jakarta Fase 1B, pengembangan kawasan *Transit Oriented Development* (TOD), serta proyek infrastruktur perkotaan lainnya. Investasi swasta juga diperkirakan tetap berlanjut, khususnya pada sektor properti, transportasi, dan jasa perkotaan, meskipun pelaku usaha masih bersikap *wait and see* mencermati dinamika ekonomi global. Konsumsi Pemerintah diperkirakan tumbuh positif, didukung oleh belanja APBD yang difokuskan pada layanan publik, serta belanja APBN di DKI Jakarta yang diperkirakan lebih akseleratif dan lebih merata sepanjang tahun, sehingga turut memperkuat konsumsi pemerintah. Sementara itu, ekspor diperkirakan tumbuh positif meskipun lebih moderat dibandingkan tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan permintaan global, meningkatnya tensi di kawasan Timur Tengah, serta ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional.

Dari sisi lapangan usaha (LU), perekonomian DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan ditopang oleh pertumbuhan positif 5 (lima) sektor ekonomi utama yaitu LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Perusahaan, LU Jasa Keuangan, dan LU Konstruksi. Pertumbuhan juga didukung oleh LU Akomodasi dan Makan Minum, serta LU Transportasi dan Pergudangan, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas jasa perkotaan.

Dari sisi harga, inflasi DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi $2,5 \pm 1\%$ (yoy). Prakiraan tersebut terutama didukung oleh implementasi berbagai kebijakan Pemerintah dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).



A. PROSPEK PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL

Prospek Perekonomian Global

Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2026 diperkirakan masih dibayangi ketidakpastian global yang semakin tinggi dengan kecenderungan melambat dibandingkan proyeksi sebelumnya. Pelemahan prospek tersebut turut dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik pada awal 2026, khususnya terjadinya perang antara Amerika Serikat-Israel dengan Iran yang mengalami eskalasi signifikan dengan penutupan Selat Hormuz, yang berdampak pada gangguan pasokan serta lonjakan harga minyak dunia (Tabel 7.1). Terganggunya distribusi dan rantai pasok perdagangan global juga mendorong kenaikan pada harga komoditas lainnya, yang memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026.

IMF dalam *World Economic Outlook* April 2026 merevisi turun proyeksi pertumbuhan global menjadi 3,1% pada 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Sejalan dengan itu, World Bank dan OECD juga menekankan bahwa prospek global tetap *subdued* dan *highly uncertain*¹, dengan risiko bias bawah yang semakin nyata akibat gangguan rantai pasok, tekanan harga energi, dan tertahannya aktivitas investasi global.

Dari sisi perdagangan, hambatan utama prospek global masih berasal dari tarif, *trade barriers*, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan, yang kini diperberat oleh disrupsi geopolitik di Kawasan Timur Tengah. IMF menegaskan *baseline* proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tetap berbasis *trade policy* yang berlaku saat ini dan mengasumsikan *economic policy uncertainty* tetap tinggi hingga 2026. Sejalan dengan itu, World Bank memperkirakan perlambatan ekonomi global 2026, didorong dampak tertunda dari hambatan perdagangan yang melemahkan permintaan barang *tradable* dan menahan konsumsi serta investasi. OECD juga menekankan bahwa kenaikan *trade policy uncertainty* dapat menghambat perdagangan dan aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, meski ketegangan dagang sempat mereda, prospek global masih rentan terhadap *flare-up*² kebijakan tarif dan retaliasi yang dapat menambah friksi rantai pasok dan menekan sentimen, sementara konflik di Timur Tengah menambah lapisan risiko baru melalui jalur harga energi dan disrupsi distribusi global.

Perekonomian AS diperkirakan melambat dibanding 2024, namun tetap solid pada 2026 seiring dukungan kebijakan fiskal dan pelonggaran suku bunga yang lebih terbatas. IMF memproyeksikan pertumbuhan AS 2,3% pada 2026, ditopang stimulus fiskal dan penurunan *policy rate* yang berjalan, sementara dampak *trade barriers* secara bertahap mereda. Meski demikian, pertumbuhan AS tetap rentan karena sumber pertumbuhan relatif terkonsentrasi pada sektor tertentu (terutama investasi teknologi/*Artificial Intelligence*), sehingga perubahan sentimen atau koreksi pasar pada sektor tersebut berpotensi memengaruhi konsumsi dan investasi. Dukungan fiskal menjadi salah satu bantalan aktivitas ekonomi AS, termasuk insentif pajak bagi investasi korporasi. Di sisi lain, eskalasi geopolitik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak berpotensi memperlambat ritme penurunan inflasi AS, sehingga ruang penurunan suku bunga kebijakan AS cenderung dilakukan lebih berhati-hati dan tetap *data dependent*, sehingga berpotensi menjaga *yield* US Treasury tetap tinggi. Hal ini mendorong pelarian arus modal dari berbagai negara, termasuk *Emerging Markets* dan menimbulkan tekanan pelemahan mata uang global termasuk ke Indonesia.

Di Kawasan Euro, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap lemah namun stabil, mencerminkan pemulihan yang berjalan tetapi masih dibayangi hambatan struktural dan eksposur tinggi terhadap gejolak energi. IMF memproyeksikan pertumbuhan Kawasan Euro sekitar 1,1% pada 2026, dengan dukungan peningkatan belanja publik (khususnya Jerman) dan performa yang lebih baik di beberapa negara. Namun, manfaat dorongan investasi teknologi relatif lebih kecil dibanding AS, sementara tekanan dari kenaikan harga energi akibat konflik Timur

Tabel 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia (Persen (% yoy))

	REALISASI		WEO IMF			WORLD BANK			OECD		PROYEKSI BI	
	2024	2025	JAN-26	APR-26		JUN-25	JAN-26		JAN-26	MAR-26		FEB-26
			2026	2026		2026	2026		2026	2026		2026
Dunia	3,3	3,3	3,3	▼	3,1	2,4	▲	2,6	2,9		2,9	3,2
Negara Maju	1,8	1,7	1,8		1,8	1,4	▲	1,6				1,8
Amerika Serikat	2,8	2,1	2,4	▼	2,3	1,6	▲	2,2	1,7	▲	2,0	2,3
Kawasan Euro	0,9	1,4	1,3	▼	1,1	0,8	▲	0,9	1,2	▼	0,8	1,3
Jepang	0,1	1,1	0,7		0,7	0,8		0,8	0,9		0,9	0,8
Negara Berkembang	4,3	4,4	4,2	▼	3,9	3,8	▲	4,0				
Tiongkok	5,0	5,0	4,5	▼	4,4	4,0	▲	4,4	4,4		4,4	4,1
India	6,5	7,3	6,4		6,4	6,5		6,5	6,2	▼	6,1	6,8
Volume Perdagangan Dunia	3,6	4,1	2,6	▲	2,8	2,4	▼	2,2	2,3		2,3	
Harqa Minyak (USD)	-1,8	-14,2	-8,5	▲	21,4	61	▼	60				

Sumber: World Economic Outlook (WEO) IMF, World Bank, OECD

1 Moderat dan dipenuhi ketidakpastian

2 Memanas kembali

Tengah dan ketidakpastian perdagangan masih menahan sektor manufaktur dan ekspor barang. Eksposur Kawasan Euro yang relatif tinggi terhadap impor energi membuat kawasan ini lebih rentan terhadap *spillover* lonjakan harga minyak global.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan termoderasi pada 2026. IMF memproyeksikan pertumbuhan Jepang turun dari sekitar 1,1% pada 2025 menjadi 0,7% pada 2026, meski terdapat potensi revisi kecil ke atas seiring paket stimulus fiskal oleh pemerintah baru. Ke depan, kinerja Jepang tetap dipengaruhi kombinasi pemulihan permintaan domestik dan sensitivitas tinggi terhadap permintaan eksternal serta ketidakpastian perdagangan global, di tengah dampak tidak langsung dari kenaikan harga energi global terhadap struktur biaya industri.

Adapun pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada 2026 diperkirakan melambat, terutama karena lemahnya permintaan domestik, khususnya sektor perumahan, meski ekspor masih cukup resilien. Perlambatan juga dipengaruhi oleh semakin tingginya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat serta tertahannya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. IMF merevisi proyeksi Tiongkok menjadi 4,4% pada 2026, dengan ditopang stimulus dan tambahan pembiayaan kebijakan untuk investasi, namun perlambatan mencerminkan tantangan struktural yang tetap kuat. Perlambatan Tiongkok memiliki implikasi penting bagi Jakarta melalui jalur ekspor dan dinamika fragmentasi perdagangan yang berpotensi mendorong limpahan produk impor ke pasar domestik.

Perekonomian India diperkirakan tumbuh tinggi dan menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan global. IMF memproyeksikan pertumbuhan India moderasi ke 6,4% pada 2026–2027 seiring mudarnya faktor siklikal/temporer, selain itu juga terdapat perbaikan konsumsi domestik dan ekspansi manufaktur, meskipun belanja fiskal cenderung menurun seiring konsolidasi fiskal, namun tetap berada pada level yang kuat secara global. Kuatnya pertumbuhan India membuka peluang diversifikasi pasar ekspor bagi Jakarta, khususnya untuk produk-produk manufaktur dan jasa.

Prospek Perekonomian Nasional

Pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan tetap kuat berada pada kisaran 4,9–5,7% (yoy) (Tabel 7.2), namun demikian tekanan terhadap perekonomian akibat tingginya gejolak global seiring eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah diperkirakan semakin menguat. Prospek ini terutama dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi global terkini serta dengan mencermati kinerja ekonomi domestik yang tetap solid pada 2025 dan terus berlanjut pada triwulan I 2026 dengan pertumbuhan mencapai 5,61% (yoy), meningkat dari 5,39% (yoy) pada triwulan IV 2025. Pertumbuhan 2026 terutama ditopang oleh permintaan domestik, dengan investasi tetap berperan penting, antara lain didorong Investasi Pemerintah khususnya agenda

hilirisasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat secara bertahap seiring membaiknya ekspektasi dan momentum musiman HBKN (Imlek, Nyepi, dan Idulfitri) di awal tahun yang mendorong peningkatan belanja masyarakat. Selain itu, insentif fiskal dan bantuan sosial yang tetap dipertahankan pada 2026, diperkirakan membantu menjaga daya beli dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi pemerintah juga berpotensi menjadi penopang tambahan apabila realisasi belanja program prioritas berjalan lebih merata dan tepat sasaran, sehingga memperkuat permintaan domestik.

Dari sisi investasi, kinerja pada 2026 diperkirakan tetap positif dan kuat, terutama melalui Investasi Pemerintah yang mendorong peningkatan kapasitas produksi termasuk hilirisasi serta proyek-proyek prioritas yang masih berjalan. Perbaikan keyakinan dunia usaha diperkirakan menopang keputusan ekspansi, sehingga investasi swasta tetap terjaga meski pelaku usaha masih mencermati dinamika ekonomi global, eskalasi geopolitik di Kawasan Timur Tengah, serta pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi meningkatkan biaya barang modal impor. Sejalan dengan itu, kebutuhan barang modal dan aktivitas produksi diperkirakan meningkat bertahap, selaras dengan penguatan permintaan domestik dan berlanjutnya kegiatan investasi. Secara spasial, dorongan investasi diperkirakan lebih kuat di wilayah dengan konsentrasi kawasan industri/KEK, terutama Jawa-Bali, sementara wilayah lain mengikuti dinamika sektor unggulan masing-masing.

Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus menguat, namun kualitas penguatannya perlu terus dipertahankan. Momentum HBKN di awal tahun memberi dorongan jangka pendek melalui peningkatan mobilitas dan belanja, sementara kebijakan Pemerintah melalui insentif, pemberian gaji ke-14 atau THR, dan bantuan sosial membantu menjaga daya beli, khususnya kelompok rentan. Meski demikian, penguatan konsumsi belum sepenuhnya merata karena sebagian rumah tangga masih sensitif terhadap dinamika pendapatan dan kondisi pasar kerja. Di samping itu, tekanan harga energi nonsubsidi sebagai dampak rambatan eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah berpotensi menekan daya beli pada periode tertentu. Oleh karena itu, menjaga stabilitas harga dan memperkuat daya beli menjadi kunci agar konsumsi dapat menopang pertumbuhan.

Dari sisi fiskal, dukungan Pemerintah pada 2026 diperkirakan tetap berperan sebagai penopang pertumbuhan melalui pelaksanaan program prioritas dan upaya menjaga periodisasi belanja agar lebih merata. Pendorong tidak hanya pada besaran belanja, tetapi pada kualitas belanja yang lebih tepat sasaran, berorientasi layanan publik, dan ber-multiplier tinggi sehingga mampu memperkuat permintaan domestik tanpa menambah kerentanan. Dengan realisasi yang konsisten sepanjang tahun, berbagai program prioritas pemerintah dan agenda pembangunan lainnya berpotensi memperkuat konsumsi pemerintah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sektor-sektor terkait.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ekonomi nasional 2026 diperkirakan tetap ditopang LU utama seperti LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Konstruksi, dan LU Pertanian. LU Industri Pengolahan dan LU Konstruksi diperkirakan menguat sejalan agenda hilirisasi, investasi, dan kelanjutan proyek, sementara LU Perdagangan bergerak sejalan mengikuti konsumsi rumah tangga dan aktivitas musiman. LU Pertanian tetap berperan penting sebagai penyangga pasokan pangan dan stabilitas harga, terutama di tengah fokus ketahanan pangan yang masih menjadi perhatian sertaantisipasi terhadap intensitas El Niño pada Semester II 2026.

Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan tetap tumbuh namun lebih moderat di tengah ketidakpastian global dan permintaan mitra dagang yang cenderung melambat, sehingga penguatan daya saing dan diversifikasi pasar/produk tetap relevan untuk menjaga ketahanan ekspor. Di sisi lain, impor diperkirakan meningkat seiring kebutuhan bahan baku industri dan barang modal untuk mendukung investasi dan produksi. Dengan kecenderungan tersebut, dinamika *net* ekspor perlu dicermati: ketika investasi dan produksi menguat, impor berpotensi meningkat lebih cepat, sehingga kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan dapat menjadi lebih netral tergantung ketahanan kinerja ekspor, di tengah tekanan tambahan dari pelemahan nilai tukar Rupiah yang dapat menahan permintaan barang modal impor.

Dari sisi harga, inflasi nasional pada tahun 2026 diperkirakan tetap terkendali dalam kisaran $2,5\pm 1\%$. Perkembangan tersebut seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih memadai, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia melalui kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25% pada Rapat Dewan Gubernur periode Mei 2026 serta penguatan strategi struktur suku bunga instrumen *pro-market*, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi pangan juga diperkirakan tetap terkendali didukung sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2026 terkendali dalam sasaran $2,5\pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Tabel 7.2 Proyeksi PDB Nasional

	SATUAN	2024				2024	2025				2025	2026*
		I	II	III	IV		I	II	III	IV		
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,11	5,05	4,95	5,02	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11	4,9-5,7
Inflasi IHK	%	3,05	2,51	1,84	1,57	1,57	1,03	1,87	2,65	2,92	2,5±1	2,5±1
Kredit Perbankan	%	12,40	12,36	10,85	10,39	10,36	9,16	7,77	7,70	9,69	8-11	8-12

Sumber : BPS dan Proyeksi Bank Indonesia

B. PROSPEK PERTUMBUHAN EKONOMI JAKARTA

Pada 2026, prospek pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,9-5,7% (yoy) (Grafik 7.1). Prospek tersebut mencermati perekonomian domestik terkini dan aktivitas ekonomi Jakarta yang tetap terjaga, namun tekanan terhadap perekonomian juga meningkat seiring tingginya ketidakpastian global di tengah eskalasi dampak perang di Kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, serta perkembangan nilai tukar Rupiah. Dengan karakter Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi dan jasa nasional, pertumbuhan 2026 diperkirakan ditopang oleh tetap kuatnya permintaan domestik dan kelanjutan agenda investasi/proyek strategis, sambil tetap mewaspadai risiko eksternal yang dapat memengaruhi sentimen usaha dan aktivitas perdagangan. Konfirmasi resiliensi tersebut tecermin pada kinerja perekonomian DKI Jakarta triwulan I 2026 yang tumbuh 5,59% (yoy), didukung oleh momentum HBKN Ramadan-Idulfitri serta akselerasi belanja program prioritas Pemerintah.

Dari sisi pengeluaran, meningkatnya perekonomian Jakarta pada 2026 terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan menguat secara bertahap seiring membaiknya daya beli masyarakat, antara lain didukung kenaikan UMP 6,17% yang meningkatkan pendapatan pekerja formal. Penguatan konsumsi juga diperkirakan terjadi pada periode-periode musiman, terutama rangkaian HBKN (Imlek, Nyepi, Ramadan, dan Idulfitri) yang disertai dengan peningkatan mobilitas, kunjungan keluarga, serta belanja kebutuhan pangan dan sandang. Selain itu, keberadaan rangkaian hari libur sepanjang tahun, termasuk momentum Natal dan Tahun Baru, juga diperkirakan mendorong konsumsi jasa perkotaan seperti akomodasi, makanan-minuman, rekreasi, serta transportasi. Dari sisi kebijakan, keberlanjutan program dukungan Pemerintah (stimulus/insentif dan bantuan sosial) diperkirakan tetap membantu menjaga daya beli, terutama bagi kelompok rentan, sehingga konsumsi rumah tangga dapat tetap menjadi jangkar pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi. Meski demikian, tekanan harga energi nonsubsidi sebagai dampak rambatan eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah serta pelemahan nilai tukar Rupiah perlu dicermati karena berpotensi menahan daya beli.

Sejalan dengan itu, investasi diperkirakan tetap tumbuh pada 2026. Pendorong utama investasi masih berasal dari investasi bangunan seiring berlanjutnya realisasi proyek strategis Pemerintah yang bersifat multithahun, khususnya proyek transportasi massal perkotaan dan pengembangan kawasan. Pada 2026, investasi didukung oleh kelanjutan pembangunan MRT Fase 2A, proyek LRT Jakarta Fase 1B (menuju penyelesaian dengan target operasional Agustus 2026), pengembangan kawasan TOD yang memperkuat keterhubungan ekonomi perkotaan, serta dimulainya tahapan pembebasan lahan MRT *East-West Line* sebagai proyek multithahun strategis berikutnya.

Selain itu, sejumlah proyek baru turut menopang investasi 2026 termasuk pengembangan kawasan Ancol, Giant Sea Wall, proyek *Waste to Energy*, revitalisasi Kawasan Pasar Baru-Kota Tua, serta proyek normalisasi Sungai Ciliwung. Proyek-proyek ini tidak hanya mendorong investasi secara langsung, tetapi juga menimbulkan efek turunan melalui peningkatan permintaan bahan konstruksi, jasa penunjang, serta serapan tenaga kerja. Penopang tambahan kapasitas fiskal daerah juga berasal dari rencana penerbitan Obligasi Daerah (*Jakarta Collaborative Fund*) pada semester II 2026 untuk membiayai infrastruktur multitaluh. Di samping itu, komitmen realisasi investasi swasta diperkirakan tetap terjaga, terutama pada sektor properti, transportasi, dan jasa perkotaan, meskipun pelaku usaha masih bersikap *wait and see* mencermati perkembangan eksternal di tengah meningkatnya ketidakpastian global serta penyesuaian peringkat dari lembaga *rating*.

Selain konsumsi rumah tangga dan investasi, konsumsi Pemerintah pada 2026 diperkirakan tumbuh kuat dan cenderung meningkat, sehingga menjadi penopang permintaan domestik. Dari sisi APBD, Pemerintah Daerah tetap menekankan efisiensi belanja operasional rutin, namun menjaga alokasi belanja yang berdampak langsung pada layanan publik dan pembangunan, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program sosial. Dari sisi APBN, belanja K/L di DKI diperkirakan lebih akseleratif dan periodisasinya lebih merata sepanjang tahun, sejalan dengan strategi peningkatan kualitas belanja (*spending better*) dan akselerasi belanja barang serta belanja modal. Keberlanjutan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), peningkatan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan agenda pembangunan lainnya berpotensi memperkuat belanja pemerintah sepanjang tahun. Meski demikian, realisasi belanja tetap perlu dicermati karena dapat dipengaruhi oleh ruang fiskal yang menyempit—tercermin dari penurunan pagu Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 57,29%—penyesuaian kebijakan, serta risiko administratif/pengadaan. Selain itu, struktur belanja K/L di DKI yang didominasi aktivitas administrasi pemerintahan pusat memiliki elastisitas tinggi terhadap kebijakan efisiensi anggaran, sehingga akselerasi belanja APBN tidak sepenuhnya tertransmisi ke PDRB DKI Jakarta.

Dari sisi eksternal, ekspor DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan tetap tumbuh, namun cenderung lebih moderat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi moderasi permintaan global, perlambatan mitra dagang utama, eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah yang memicu disrupsi rantai pasok global, serta peningkatan *freight cost* yang berpotensi menahan aktivitas perdagangan internasional. Dengan struktur ekspor Jakarta yang didominasi komoditas bernilai tinggi seperti logam mulia/perhiasan serta produk manufaktur yang berorientasi reeksport, kinerja ekspor relatif sensitif terhadap fluktuasi harga global dan perubahan sentimen risiko. Selain itu, prospek pelemahan ekspor otomotif khususnya ke Jepang sebagai dampak regulasi homologasi baru, turut menjadi faktor penahan. Meski demikian, penguatan ekspor bernilai tambah dan diversifikasi

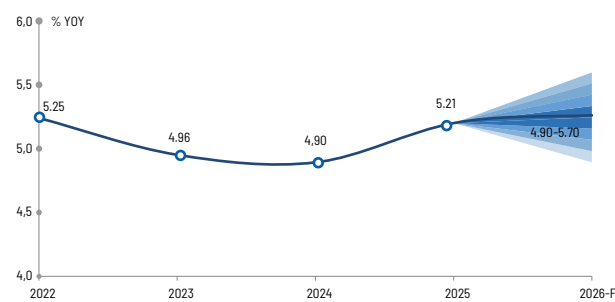
pasar tujuan ke negara *emerging market* serta kawasan ASEAN diperkirakan tetap menopang ekspor secara keseluruhan, dengan tambahan dorongan dari pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi meningkatkan daya saing harga produk ekspor. Di sisi jasa, ekspor jasa diperkirakan tetap tumbuh seiring berlanjutnya aktivitas ekonomi perkotaan, termasuk perjalanan bisnis dan penyelenggaraan *MICE/event*, meskipun berpotensi tertahan oleh dinamika global.

Sejalan dengan hal tersebut, impor DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh dan berpotensi meningkat seiring menguatnya aktivitas investasi dan produksi. Peningkatan impor terutama bersumber dari kebutuhan barang modal dan bahan baku untuk mendukung pelaksanaan proyek-proyek strategis, aktivitas konstruksi, serta kebutuhan sektor industri dan jasa perkotaan. Selain itu, fragmentasi perdagangan dan dinamika perang dagang berpotensi mengalihkan negara tujuan eksportir besar ke Indonesia, termasuk Jakarta, sehingga turut mendorong impor barang konsumsi. Namun demikian, pelemahan nilai tukar Rupiah serta disrupsi rantai pasok global akibat eskalasi geopolitik dapat menahan kinerja impor barang modal dan bahan baku. Dengan kecenderungan ekspor yang lebih moderat dan impor yang meningkat karena dorongan investasi, kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan berpotensi menjadi lebih netral, sehingga pendorong utama pertumbuhan Jakarta pada 2026 tetap bertumpu pada kekuatan permintaan domestik.

Dari sisi lapangan usaha (LU), pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada 2026 diperkirakan tetap ditopang oleh LU utama yang mencerminkan dominasi aktivitas jasa dan perdagangan di perekonomian Jakarta. Pertumbuhan diperkirakan terutama didorong oleh LU Perdagangan, LU Informasi dan Komunikasi, LU Jasa Perusahaan, LU Jasa Keuangan, serta LU Konstruksi, dengan dukungan dari LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan.

LU Perdagangan diperkirakan tetap tumbuh sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan dukungan kegiatan *MICE/event* yang menjaga perputaran ekonomi ritel. LU Informasi dan Komunikasi diperkirakan tetap solid didorong peningkatan transaksi digital, kebutuhan layanan data yang stabil, serta transformasi digital lintas sektor. LU Jasa Perusahaan diperkirakan tumbuh kuat sejalan terjaganya aktivitas dunia usaha dan permintaan layanan profesional/korporasi. LU Jasa Keuangan tetap kuat ditopang peningkatan intermediasi yang selaras dengan kebutuhan pembiayaan dunia usaha maupun rumah tangga, didukung penguatan kebijakan makroprudensial longgar Bank Indonesia. Adapun LU Konstruksi diperkirakan tetap tumbuh sejalan kelanjutan proyek transportasi massal dan pengembangan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat keterkaitan dengan sektor perdagangan dan jasa penunjang. Sementara itu, LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan diperkirakan turut tumbuh seiring berlanjutnya aktivitas pariwisata perkotaan, peningkatan mobilitas masyarakat, dan aktivitas logistik antarwilayah.

Namun demikian, beberapa risiko yang perlu dicermati yang dapat menahan perbaikan lebih lanjut utamanya yaitu dinamika ekonomi global, berlanjutnya ketegangan tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah, fragmentasi perdagangan, pelemahan nilai tukar Rupiah, serta dinamika kebijakan AS. Selain itu, risiko spesifik pada beberapa LU juga perlu diwaspadai, antara lain perlambatan kinerja LU Industri Pengolahan seiring tekanan harga bahan baku dan pelemahan permintaan, serta kinerja LU Jasa Keuangan yang masih dipengaruhi *outlook* pasar keuangan global.



Sumber : BPS, Proyeksi BI

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta 2026

Prospek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Belanja Kementerian Negara / Lembaga (K/L) di Provinsi DKI Jakarta 2026 (TBU)

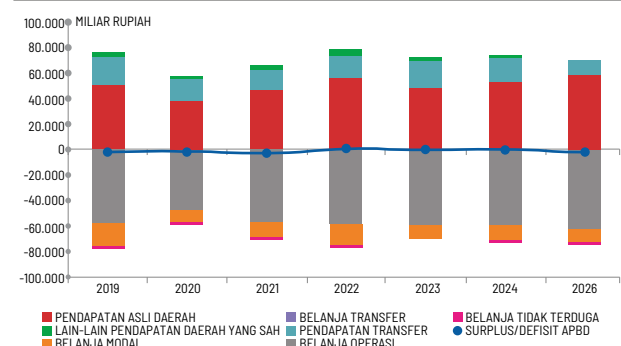
Pada 2026, pagu anggaran APBD DKI Jakarta mengalami kontraksi sebesar 10,96% dari Rp91,34 triliun menjadi Rp81,32 triliun (Grafik 7.2). Dari sisi pendapatan, pagu RAPBD DKI Jakarta 2026 mengalami kontraksi sebesar 12,58% dibandingkan APBD 2025, yaitu dari Rp81,73 triliun menjadi Rp71,45 triliun. Penurunan pagu RAPBD DKI Jakarta 2026 dari sisi pendapatan terutama bersumber dari pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat yang mengalami kontraksi 57,29% dibandingkan APBD 2025, yaitu dari Rp26,13 triliun menjadi Rp11,15 triliun.

Dari sisi belanja, pagu APBD DKI Jakarta 2026 mengalami kontraksi sebesar 10,13% dibandingkan APBD 2025 dari Rp82,67 triliun menjadi Rp74,28 triliun. Berdasarkan komponennya, penurunan pagu belanja RAPBD DKI Jakarta 2026 terutama bersumber dari komponen belanja modal (kontraksi 33,48%) dan belanja operasional (kontraksi 2,68%). Penurunan kapasitas belanja modal ini perlu dicermati mengingat perannya yang penting dalam menopang investasi bangunan dan proyek infrastruktur daerah. Sebagai respons, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan penerbitan Obligasi Daerah (*Jakarta Collaborative Fund*) pada Semester II 2026 sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung belanja modal proyek infrastruktur *multiyears*, di tengah terbatasnya ruang fiskal daerah.

Dari sisi APBN di DKI Jakarta, alokasi anggaran tahun 2026 menunjukkan skala fiskal yang cukup kuat. Postur APBN yang

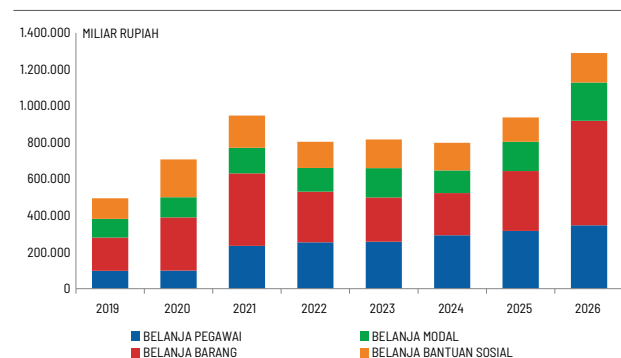
dialokasikan di DKI Jakarta mencakup Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.852,55 triliun (sekitar 67,19% dari nasional) dan Belanja Negara sebesar Rp2.291,53 triliun (sekitar 51,31% dari nasional) (Grafik 7.3). Peran DKI sebagai pusat aktivitas ekonomi dan administrasi negara menjadikan dinamika APBN di wilayah ini penting dalam membentuk prospek permintaan domestik, terutama melalui belanja K/L dan belanja barang/jasa.

Ke depan, *outlook* kinerja APBN 2026 diprakirakan tetap kuat. Pendapatan diprakirakan akan ditopang oleh penurunan restitusi, membaiknya sektor utama perpajakan, serta optimalisasi kinerja program prioritas Pemerintah. Sementara itu, belanja diprakirakan didorong oleh realisasi belanja K/L seiring akselerasi belanja barang dan belanja modal. Namun demikian, terdapat beberapa risiko yang dapat memengaruhi pencapaian realisasi pendapatan dan belanja, antara lain perang dagang dan kondisi geopolitik global yang berpotensi menekan PNBPD SDA mineral dan batubara, pemanfaatan FTA seperti ACFTA dan RCEP yang dapat menahan penerimaan bea masuk, serta kapasitas ruang fiskal yang menyempit. Dalam rangka menjaga kualitas belanja dan efektivitas program, Pemerintah juga melakukan inovasi *spending better* melalui *reallocative budgeting* dengan mekanisme RO Khusus, yaitu dana untuk pemenuhan prioritas direktif Presiden yang hanya dapat digunakan setelah ditetapkan melalui Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga dan dikonfirmasi kepada Mensesneg.



Sumber: BPKD DKI Jakarta

Grafik 7.2 Perkembangan Pagu APBD DKI Jakarta 2026



Sumber: DJPB Provinsi DKI Jakarta

Grafik 7.3 Perkembangan Pagu Belanja APBN di DKI Jakarta 2026

Prospek Inflasi Jakarta

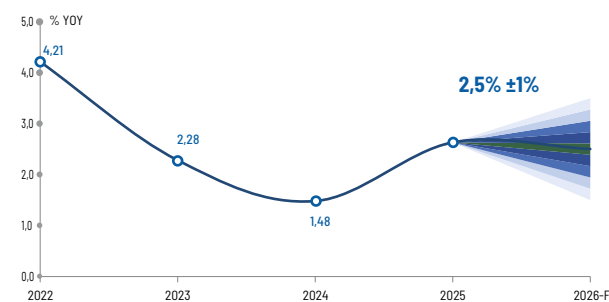
Pada 2026, inflasi Jakarta diperkirakan masih akan tetap terkendali, dengan sasaran inflasi yang rendah dan stabil pada kisaran $2,5 \pm 1\%$ (yoy) (Grafik 7.4). Secara umum, kondisi ini ditopang oleh berlanjutnya berbagai kebijakan Pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan, serta penguatan program pengendalian inflasi melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Selain itu, konsistensi koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah turut menjaga keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan ekspektasi inflasi masyarakat. Meski demikian, tekanan inflasi pada beberapa periode tertentu tetap perlu dicermati, terutama pada fase meningkatnya permintaan musiman (HBKN) dan saat terdapat gangguan pasokan/distribusi, serta dampak rambatan dari eskalasi konflik di Kawasan Timur Tengah dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang berpotensi mendorong *imported inflation*.

Adapun risiko yang berpotensi mendorong inflasi DKI Jakarta pada 2026 antara lain:

1. **Ketegangan geopolitik** yang dapat meningkatkan volatilitas harga energi dan pangan global serta berdampak pada biaya distribusi dan harga barang tertentu.
2. **Fragmentasi perdagangan** dan ketidakpastian kebijakan global (termasuk dinamika tarif) yang berpotensi memengaruhi harga impor, biaya input, serta sentimen pelaku usaha.
3. **Pelemahan nilai tukar Rupiah** yang dapat meningkatkan *imported inflation* melalui kenaikan harga komoditas impor, energi nonsubsidi, dan bahan baku industri.
4. **Risiko pasokan pangan** akibat faktor cuaca (misalnya hujan ekstrem/banjir maupun intensitas El Niño yang menguat) yang dapat mengganggu distribusi dan menekan pasokan hortikultura pada periode tertentu.
5. **Kenaikan harga pangan tertentu** seiring penyesuaian kebijakan (misalnya HPP/aturan tata niaga), kenaikan harga input pertanian termasuk pupuk, serta dinamika pasokan antarwilayah.
6. **Tarif layanan publik/komponen harga yang diatur** yang berpotensi menambah tekanan inflasi pada periode penyesuaian, termasuk penyesuaian harga energi nonsubsidi.
7. **Persistensi harga beras/gabah** pada level relatif tinggi apabila distribusi pasokan tidak merata atau terjadi gangguan produksi.
8. **Peningkatan harga emas global** yang dapat mendorong inflasi kelompok komoditas logam mulia dan emas perhiasan.

Upaya Pengendalian inflasi DKI Jakarta pada 2026 tetap membutuhkan penguatan peran TPID melalui strategi 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif). Implementasi kebijakan dapat terus diperkuat melalui operasi pasar/pasar murah dan program pangan bersubsidi bersama BUMD Pangan, perluasan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga pasokan, penguatan komunikasi publik untuk menjaga ekspektasi, serta *capacity*

building TPID. Sejalan dengan itu, pelaksanaan GPIPS perlu dilanjutkan secara konsisten melalui penguatan produksi (alsintan/saprodi), fasilitasi distribusi, hilirisasi dan diversifikasi pangan, penguatan infrastruktur dan digitalisasi informasi pangan, serta koordinasi intensif melalui *High Level Meeting* TPID, khususnya menjelang HBKN/RAFI dan pada periode rawan gangguan pasokan.



Sumber : BPS (diolah), Proyeksi BI

Grafik 7.4 Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2026

Faktor Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Berbagai risiko pada 2026 terutama bersumber dari ketidakpastian global yang masih tinggi, termasuk moderasi pertumbuhan ekonomi dunia, eskalasi ketegangan geopolitik di Kawasan Timur Tengah, serta fragmentasi perdagangan yang dipengaruhi dinamika kebijakan tarif Amerika Serikat. Eskalasi konflik Timur Tengah, termasuk gangguan jalur distribusi energi global, menjadi sumber risiko utama yang dapat mendorong lonjakan harga minyak dan komoditas dunia, memberikan tekanan kepada nilai tukar Rupiah, serta meningkatkan tekanan *imported inflation*. Kondisi tersebut berpotensi menahan kinerja sektor eksternal (ekspor dan sentimen investasi) dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan, sehingga dapat memengaruhi keputusan dunia usaha serta keyakinan konsumen di DKI Jakarta.

Selain itu, risiko domestik juga perlu dicermati, baik yang bersifat struktural maupun siklikal. Tantangan struktural tetap bersumber dari daya dukung Jakarta, seperti keterbatasan lahan, tekanan biaya (termasuk upah), ketersediaan air, serta isu perkotaan lain seperti kemacetan, ketimpangan sosial, dan polusi udara. Sementara itu, tantangan siklikal utamanya terkait dinamika permintaan domestik, antara lain sensitivitas daya beli sebagian kelompok masyarakat, risiko PHK/penyesuaian tenaga kerja di beberapa sektor, serta perubahan perilaku konsumsi yang cenderung lebih selektif (*value for money*) dan menahan belanja non-primer.

Sehubungan dengan itu, untuk memperkuat daya tahan perekonomian Jakarta di tengah tantangan eksternal dan domestik, sekaligus meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global, diperlukan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain melalui:

1. Menjaga daya beli melalui pengendalian inflasi agar tetap berada dalam sasaran $2,5\% \pm 1\%$, termasuk penguatan sinergi TPID dan implementasi GPIPS untuk menjaga stabilitas pangan dan kelancaran distribusi.
2. Mendorong MICE dan event (musik, olahraga, dan kegiatan lainnya) serta penguatan *urban tourism* untuk menjaga perputaran ekonomi sektor jasa perkotaan (perdagangan, transportasi, akomodasi-mamin, dan jasa perusahaan).
3. Mendorong sumber pertumbuhan baru melalui pengembangan sektor potensial: perdagangan (*hub e-commerce*), infokom (ekosistem digital dan *startup*), jasa keuangan (penguatan peran Jakarta sebagai pusat layanan keuangan), pariwisata dan ekonomi kreatif (MICE dan *urban*), jasa pendidikan, serta jasa kesehatan; termasuk penguatan UMKM *go digital* dan *go ekspor*.
4. Memperkuat koordinasi kawasan aglomerasi Jabodetabek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, terutama terkait mobilitas, logistik, pasokan pangan, dan integrasi layanan publik.
5. Menjaga kesinambungan investasi melalui percepatan pelaksanaan proyek strategis sesuai rencana, perbaikan iklim investasi, optimalisasi sektor prioritas, serta promosi investasi termasuk penguatan kepastian dan efisiensi perizinan.
6. Mendorong digitalisasi UMKM dalam sistem pembayaran dan akses pembiayaan untuk memperluas inklusi ekonomi, memperkuat produktivitas, dan meningkatkan ketahanan usaha.
7. Mendorong digitalisasi Pemda dan masyarakat, melalui:
 - a. Penguatan inklusi dan resiliensi sistem pembayaran nontunai (terutama QRIS) pada sektor potensial (pariwisata, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan pasar);
 - b. Peningkatan literasi digital melalui edukasi publik dan kampanye QRIS (mis. Jakarta Kreatif Festival, Jakarta Economic Forum, QRIS Jelajah Indonesia); serta
 - c. Optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) untuk mempertahankan status Pemda Digital dan meningkatkan Indeks ETPD, antara lain melalui perluasan penerimaan pajak/retribusi via QRIS, akselerasi implementasi KKPD, serta penguatan sinergi dan kolaborasi TP2DD.

Adapun tantangan pengendalian inflasi pada 2026 masih terkait dengan berbagai permasalahan struktural di Jakarta. Sebagai kota dengan populasi yang dinamis termasuk pertambahan arus komuter dari wilayah aglomerasi (Bodetabek) pada siang hari permintaan komoditas pangan dan jasa cenderung tinggi dan fluktuatif, terutama pada periode HBKN. Di sisi pasokan, Jakarta bukan wilayah sentra produksi sehingga sebagian besar pemenuhan komoditas pangan bersumber dari daerah penghasil. Kondisi tersebut membuat inflasi Jakarta relatif sensitif terhadap gangguan pasokan, hambatan distribusi, dan volatilitas harga di daerah produsen. Selain itu, risiko

cuaca ekstrem (hujan lebat/banjir) juga perlu dicermati karena dapat mengganggu distribusi dan menekan pasokan hortikultura pada periode tertentu.

Untuk itu, diperlukan strategi khusus pengendalian inflasi daerah non-produsen melalui penguatan strategi 4K, terutama pada kelompok pangan, sebagai berikut:

1. Ketersediaan pasokan: memperkuat pasokan melalui peningkatan produktivitas (mis. urban farming yang terarah pada komoditas hortikultura tertentu), perluasan dan pendalaman Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah produsen yang surplus, serta penguatan koordinasi dengan TPID Bodetabek yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan Jakarta. Pada 2026, penguatan KAD perlu lebih menekankan kepastian volume, jadwal pasokan, dan mekanisme buffer stock menjelang HBKN.
2. Keterjangkauan harga: memperkuat stabilisasi harga melalui operasi pasar/pasar murah yang lebih terukur pada komoditas bergejolak (beras, cabai, bawang, gula, minyak goreng) bekerja sama dengan Bulog dan BUMD Pangan, disertai pemantauan harga berbasis wilayah agar intervensi lebih tepat sasaran.
3. Kelancaran distribusi: memperkuat distribusi dan logistik pangan melalui optimalisasi kanal distribusi TPID-BUMD Pangan, penguatan konektivitas pasokan dari wilayah aglomerasi, sertaantisipasi hambatan distribusi pada periode cuaca ekstrem dan puncak permintaan (HBKN).
4. Komunikasi efektif: memperkuat koordinasi dan komunikasi pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi masyarakat, termasuk penyampaian informasi pasokan, harga acuan, dan jadwal intervensi pasar secara konsisten agar tidak memicu *panic buying*.

Di samping itu, pada 2026 penguatan ekosistem digital perlu semakin diarahkan sebagai instrumen pendukung stabilitas harga, bukan hanya untuk transaksi Pemda. Digitalisasi perlu diperluas pada sektor ekonomi potensial pariwisata, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pasar melalui perluasan pembayaran nontunai (QRIS), pencatatan transaksi yang lebih rapi, dan integrasi data yang mendukung pemantauan harga serta efektivitas penyaluran bantuan sosial. Penguatan digitalisasi juga relevan untuk memperbaiki tata niaga dan menekan biaya transaksi, sehingga membantu menjaga keterjangkauan harga, khususnya pada rantai pasok UMKM dan perdagangan ritel.

Pengembangan UMKM pada 2026 juga perlu diakselerasi, tidak hanya sebagai motor pertumbuhan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi. UMKM dapat diarahkan menjadi pemasok yang lebih kuat bagi sektor produktif (pariwisata, industri pengolahan, jasa perkotaan) melalui penguatan kapasitas, standarisasi produk, dan akses pembiayaan. Dalam konteks stabilisasi harga pangan, UMKM juga dapat dikembangkan untuk mendukung KAD misalnya melalui

penguatan agregator, *packaging*, *cold chain* sederhana, serta distribusi *last-mile* sehingga pasokan lebih stabil dan losses menurun. Sejalan dengan itu, inovasi program UMKM digital dan UMKM ekspor tetap diperlukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas, sekaligus memperkuat ketahanan pelaku usaha menghadapi volatilitas harga dan permintaan.

Lebih lanjut, inovasi kebijakan dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah serta ekonomi hijau tetap relevan pada 2026 untuk mendorong pertumbuhan Jakarta yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Selain memperluas sumber pembiayaan dan memperkuat daya saing, penguatan dua agenda tersebut juga dapat mendukung efisiensi rantai pasok, mendorong praktik usaha yang lebih produktif, dan pada akhirnya membantu menjaga stabilitas harga secara lebih berkelanjutan.

Tabel 7.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta 2026

JENIS RISIKO	JALUR TRANSMISI	PROBABILITAS	KETERANGAN
Ketidakpastian global, geopolitik, dan fragmentasi perdagangan	Menahan investasi, ekspor, dan keyakinan pelaku usaha	Tinggi	Menahan pertumbuhan
Pelemahan daya beli dan tingginya biaya hidup	Menahan konsumsi rumah tangga	Tinggi	Menahan pertumbuhan
Tertundanya proyek strategis dan kehati-hatian investor	Menahan investasi	Moderat	Menahan pertumbuhan
Kenaikan harga energi dan volatilitas nilai tukar	Meningkatkan biaya produksi dan <i>imported inflation</i>	Tinggi	Menahan pertumbuhan dan meningkatkan inflasi
Gangguan pasokan dan distribusi pangan	Meningkatkan harga pangan strategis	Tinggi	Meningkatkan inflasi
Penyesuaian tarif layanan publik	Meningkatkan inflasi kelompok harga yang diatur Pemerintah	Moderat	Meningkatkan inflasi

Tim Penyusun

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Iwan Setiawan

KOORDINATOR PENYUSUN

Sakti Arif Wicaksono

TIM PENULIS

Muhammad Iqbal Baihaqi

Haris Fatori Aldila

Gia Amadea

Reza Kianendra

Dhia Atika Anggraini

Roma Paulyna Siahaan

Muhammad Zaydan Musyaffa

Adhityas Ghaniyya Tejo

Harvia Mughni Vadwi

Fikri Mauli Utomo

Chendy Dea Andriany

Faridah Muthia Azzahra

Olivia Citra Octaviani

KONTRIBUTOR

Divisi Implementasi KEKDA Provinsi

Divisi Perizinan dan Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran

Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42 – Jakarta – 10410

No. Telp. 62-21-35110321





**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI DKI JAKARTA**

Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 42
Jakarta - 10410

